

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2021**



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baplitbang adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II **RPJMD TAHUN 2021-2026**

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (Lima)
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati.
- (3) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman PD dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam sistematika berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program PD;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB IX	:	Penutup.
- (2) Uraian RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

- (1) Bupati Berau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026;

- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat tercapai dalam mewujudkan visi pembangunan jangka daerah dan pembangunan jangka menengah nasional;
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan Bupati untuk periode selanjutnya belum dilantik, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan mengacu kepada program yang tertuang didalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dari peraturan daerah ini;
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021



BUPATI BERAU,

SRI JUMARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2021-2026 : (64.03/1/21/1/2021).

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Berau Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Berau Tahun 2021-2026 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Berau Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil kerjasama antara Bappeda dan Litbang Pemerintah Kabupaten Berau dengan Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (MEP-FEB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk, baik sumbang saran, kritik dan masukannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Berau Tahun 2021-2026 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tanjung Redeb, Oktober 2021

Atas Nama
Pemerintah Kab. Berau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. LATAR BELAKANG	I – 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I – 4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I – 9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I – 12
1.4.1. Maksud	I – 12
1.4.2. Tujuan	I – 12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I – 13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 14
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II – 19
2.1.4. Demografi	II – 20
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..	II – 29
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan	
Pemerataan Ekonomi	II – 29
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II – 40
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II – 50
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II – 52
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang	
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .	II – 53
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang	
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan	
Dasar	II – 84
2.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	II – 114
2.4.1. Urusan Kelautan dan Perikanan	II – 114
2.4.2. Urusan Pariwisata	II – 116
2.4.3. Urusan Pertanian	II – 122
2.4.4. Urusan Kehutanan	II – 126
2.4.5. Urusan Energi dan Sumber Daya	
Mineral	II – 127
2.4.6. Urusan Perdagangan	II – 129
2.4.7. Urusan Perindustrian	II – 130

	2.4.8. Urusan Transmigrasi	II – 132
2.5.	PEMETAAN KESELARASAN ANTARA INDIKATOR TPB/SDGS DENGAN INDIKATOR RPJMD (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)	II – 132
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III – 1
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 3
	3.1.2. Neraca Daerah	III – 6
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III – 9
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 9
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III – 10
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	III – 14
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021-2026	III – 14
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III – 22
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV – 1
4.1.	KAJIAN ATAS DOKUMEN RTRW KAB. BERAU 2016-2036	IV – 2
	4.1.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Berau	IV – 5
	4.1.2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Berau	IV – 24
	4.1.3. Penetapan Kawasan Strategis	IV – 36
	4.1.4. Arahana Pemanfaatan Ruang	IV – 37
4.2.	KAJIAN ATAS DOKUMEN RPJPD KAB. BERAU 2006-2026	IV – 69
4.3.	KAJIAN ATAS DOKUMEN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019- 2023	IV – 73
4.4.	PENELAAHAN ATAS DOKUMEN RPJMD DAERAH SEKITAR	IV – 80
4.5.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV – 80
4.6.	ISU STRATEGIS	IV – 107
	4.6.1. Isu Strategis Level Global	IV – 107
	4.6.2. Isu Strategis Level Nasional	IV – 114
	4.6.3. Isu Strategis Level Regional/Daerah	IV – 122
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
5.1.	VISI	V – 1
5.2.	MISI	V – 3
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	V – 12

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 1
6.1.	STRATEGI	VI – 1
6.2.	ARAH KEBIJAKAN	VI – 8
6.3.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 18
6.3.1.	Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib Dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar	VI – 18
6.3.2.	Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah	VI – 18
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII – 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII – 1
BAB IX	PENUTUP	IX – 1
9.1.	PEDOMAN TRANSISI	IX – 1
9.2.	KAIDAH PELAKSANAAN	IX – 2

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional	I – 9
Gambar 1.2	Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek	I – 11
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Berau	II – 2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Berau	II – 6
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Berau	II – 7
Gambar 2.4	Peta Sebaran Karst di Kabupaten Berau dan Kutai Timur	II – 11
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau (Jiwa), 2016-2020	II – 21
Gambar 2.6	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau (Persen), 2016-2020	II – 22
Gambar 2.7	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau (Miliar Rupiah), 2016-2020	II – 30
Gambar 2.8	PDRB per Kapita Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2016-2020	II – 35
Gambar 2.9	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 37
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau, Tahun 2016-2020	II – 42
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 55
Gambar 2.12	Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Berau 2020	II – 63
Gambar 2.13	Jumlah Tahanan Polres Berau, 2016-2020 ...	II – 76
Gambar 2.14	Gini Ratio Kabupaten Berau, Tahun 2016-2020	II – 82
Gambar 2.15	Perkembangan TPT di Kabupaten Berau, 2017-2020	II – 85
Gambar 2.16	Perkembangan UMK Kabupaten Berau dan UMP Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 88
Gambar 2.17	Jumlah Kampung/Kelurahan yang Terkoneksi Jaringan Internet di Kabupaten Berau, 2017-2020	II – 103

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 2.18	Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Menguasai/Memiliki HP di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 104
Gambar 2.19	Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Mengakses Internet di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 106
Gambar 2.20	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 107
Gambar 2.21	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Berau (Ton), 2016-2020	II – 115
Gambar 2.22	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Setiap Bulan di Kabupaten Berau, 2020	II – 120
Gambar 2.23	Perkembangan Produksi Batu Bara di Kabupaten Berau (Metrik Ton), 2016-2020 ...	II – 128
Gambar 2.24	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 129
Gambar 2.25	Jumlah Pedagang di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 130
Gambar 2.26	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 131
Gambar 3.1	Perkembangan dan Tren Perkembangan Penerimaan APBD Kabupaten Berau	III – 15
Gambar 4.1	Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Berau	IV – 5
Gambar 4.2	Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Berau	IV – 25
Gambar 5.1	Skema Keterkaitan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	V – 8
Gambar 5.2	Skema Keterkaitan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024	V – 9
Gambar 6.1	Prioritas Pembangunan Nasional 2019-2024	VI – 8
Gambar 6.2	Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	VI – 9
Gambar 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026	VI – 9

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1	Data Luas Daratan dan Administrasi Provinsi Kalimantan Timur, 2020	II – 3
Tabel 2.2	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi	II – 8
Tabel 2.3	Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	II – 9
Tabel 2.4	Statistik Klimatologi Kabupaten Berau, 2020 ..	II – 13
Tabel 2.5	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036	II – 14
Tabel 2.6	Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau	II – 15
Tabel 2.7	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau	II – 16
Tabel 2.8	Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 19
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau (Jiwa), 2016-2020	II – 21
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau menurut Kecamatan, 2016-2020 dan 2019-2020	II – 23
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 24
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Berau, 2020	II – 25
Tabel 2.13	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Berau (Jiwa/Km ²), 2016-2020	II – 26
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Dependency Ratio di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 27
Tabel 2.15	Angka Beban Tanggungan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 28
Tabel 2.16	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2016-2020	II – 31
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2016-2020	II – 33
Tabel 2.18	Perbandingan PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah), 2016-2020 ..	II – 36
Tabel 2.19	Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Berau (Persen), 2016-2020	II – 37

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2019	II – 40
Tabel 2.21	Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 42
Tabel 2.22	Perbandingan IPM di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 43
Tabel 2.23	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 45
Tabel 2.24	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 47
Tabel 2.25	Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 48
Tabel 2.26	Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2020	II – 50
Tabel 2.27	Aset Kebudayaan Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 51
Tabel 2.28	Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau, 2020	II – 52
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 54
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 56
Tabel 2.31	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 57
Tabel 2.32	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 58
Tabel 2.33	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 59
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Berusia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020	II – 59
Tabel 2.35	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 61
Tabel 2.36	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Kalimantan Timur, 2020	II – 62

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.37	Rasio Per 100.000 Penduduk dan Jangkauan Pelayanan dari Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Berau, 2020	II – 64
Tabel 2.38	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 66
Tabel 2.39	Perbandingan Pemberian Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020	II – 66
Tabel 2.40	Jumlah PUS dan Peserta KB, 2016-2020	II – 67
Tabel 2.41	Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Berau (Km), 2017-2020	II – 69
Tabel 2.42	Statistik Perumahan Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 72
Tabel 2.43	Indikator Kelayakan Perumahan di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 75
Tabel 2.44	Jumlah Penduduk, Jumlah Tindak Pidana, dan Angka Kriminalitas Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 76
Tabel 2.45	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kecamatan, 2016-2020	II – 77
Tabel 2.46	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 79
Tabel 2.47	Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 80
Tabel 2.48	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 80
Tabel 2.49	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 81
Tabel 2.50	Besarnya Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Berau, 2020	II – 84
Tabel 2.51	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 86
Tabel 2.52	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	II – 86
Tabel 2.53	Perkembangan IPM Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 89
Tabel 2.54	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020	II – 90
Tabel 2.55	Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2020	II – 92

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.56	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020	II – 94
Tabel 2.57	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020	II – 94
Tabel 2.58	Jumlah Peserta KB Aktif dan KB Baru Berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Berau, 2018-2020 ...	II – 95
Tabel 2.59	Jumlah Pesawat dan Penumpang di Bandara Kalimantan Kabupaten Berau, 2020	II – 97
Tabel 2.60	Barang Dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb (Ton/M3/MT), 2020	II – 97
Tabel 2.61	Barang Dimuat di Pelabuhan Tanjung Redeb (Ton/M3/MT), 2020	II – 100
Tabel 2.62	Jumlah Pos Pembantu di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 101
Tabel 2.63	Ketersediaan Jaringan Komunikasi di Kabupaten Berau, 2020	II – 102
Tabel 2.64	Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis UMKM di Kabupaten Berau, 2020	II – 108
Tabel 2.65	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 109
Tabel 2.66	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun Penilaian 2016-2020	II – 113
Tabel 2.67	Hasil Penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Evaluasi 2016-2020	II – 114
Tabel 2.68	Produksi Perikanan Budidaya (Ton) di Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 115
Tabel 2.69	Beberapa Potensi dan Daya Tarik Obyek Wisata Kabupaten Berau	II – 117
Tabel 2.70	Statistik Pariwisata Kabupaten Berau, 2016-2020	II – 119
Tabel 2.71	Jumlah Potensi Pariwisata di Kabupaten Berau, 2020	II – 122
Tabel 2.72	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Berau, 2018-2020	II – 123
Tabel 2.73	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Palawija di Kabupaten Berau, 2020	II – 124

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.74	Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Berau, 2020	II – 125
Tabel 2.75	Luas Kawasan Hutan menurut Fungsinya di Kabupaten Berau	II – 127
Tabel 2.76	Pemetaan Keselarasan antara Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/SDGs dengan Indikator RPJMD (Permendagri 86 Tahun 2017)	II – 133
Tabel 3.1	Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab. Berau	III – 2
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau	III – 4
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	III – 6
Tabel 3.4	Analisis Neraca Kabupaten Berau	III – 7
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Aparatur	III – 9
Tabel 3.6	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Berau Tahun 2016-2020	III – 11
Tabel 3.7	Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Berau Tahun 2016-2020 ...	III – 13
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	III – 17
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Berau Periode 2021-2026	III – 21
Tabel 3.10	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	III – 23
Tabel 3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau Periode 2021-2026	III – 24
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau Periode 2021-2026	III – 24
Tabel 4.1	Hirarki Kota dan Fungsi Pusat Pelayanan Dalam Rencana Struktur Ruang Kab. Berau ...	IV – 8
Tabel 4.2	Rincian Jalan Arteri Primer Kab. Berau	IV – 10
Tabel 4.3	Sebaran Lokasi dan Kondisi Jembatan Di Kab. Berau	IV – 12
Tabel 4.4	Pola Ruang Wilayah Kabupaten Berau (Luas dalam Ha)	IV – 34
Tabel 4.5	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Berau	IV – 37
Tabel 4.6	Arahan Pemanfaatan Ruang Kab. Berau	IV – 38

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 4.7	Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Berau untuk Tahap ke IV (2022-2026)	IV – 71
Tabel 4.8	Arah Tematik Tahunan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur	IV – 79
Tabel 4.9	Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan RPJMD Prov. Kalimantan Timur Untuk Kab. Berau	IV – 79
Tabel 4.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..	IV – 82
Tabel 4.11	Penentuan Isu Strategis Kab. Berau	IV – 130
Tabel 5.1	Penyelarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berau	IV – 11
Tabel 5.2	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .	IV – 15
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kab. Berau 2021-2026	VI – 3
Tabel 6.2	Fokus Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026	VI – 13
Tabel 6.3	Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah	VI – 20
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kab. Berau Periode 2021-2026 .	VI – 23
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026	VII – 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026	VII – 3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Berau	VIII – 2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau	VIII – 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, telah terpilih Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program program pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik

RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam Forum Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Berau yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Berau sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) OPD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari OPD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh OPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkan

Perda Kabupaten Berau tentang RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026.

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau tahun 2006-2026. RPJMD. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau tahun 2016-2036. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 juga menjadikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan RPJMN 2020-2024 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Berau tetap selaras dengan kebijakan Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Berau lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau ini memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Target capaian pembangunan berkelanjutan periode sebelumnya di analisis untuk mencari *gap* target yang belum tercapai. Target yang belum tercapai tersebut kemudian menjadi dasar permasalahan dan isu strategis daerah. Selain itu, Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan telah diintegrasikannya instrumen KLHS dalam perumusan kebijakan RPJMD ini diharapkan kebijakan strategis dalam jangka menengah benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat

Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Organisasi Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

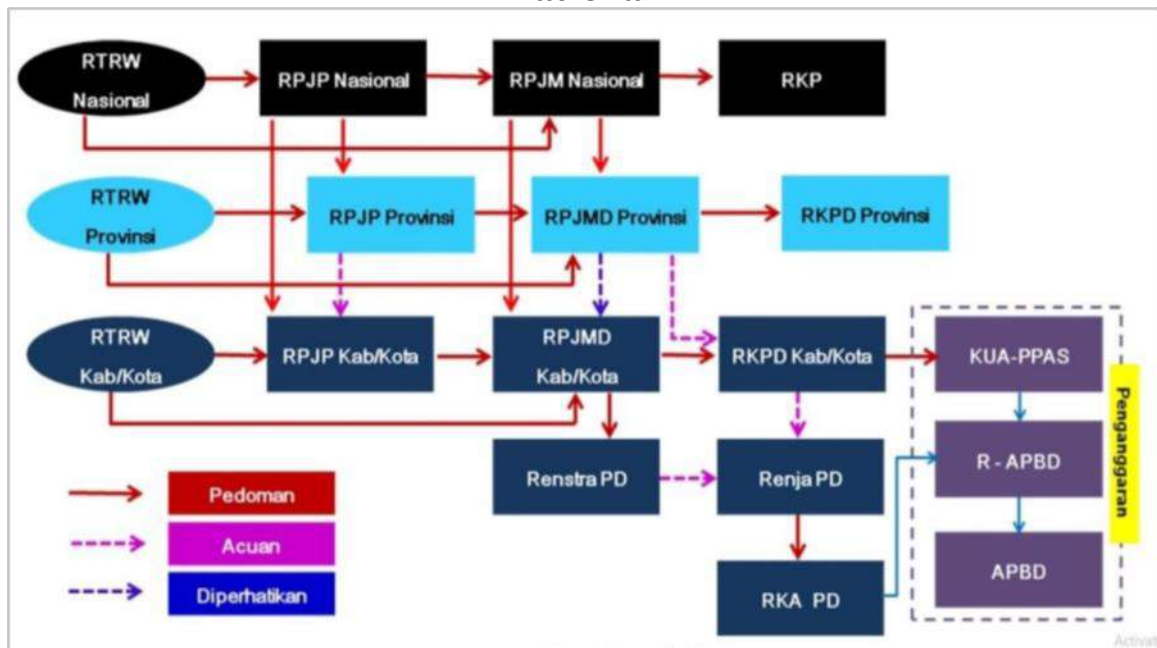
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 26) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 8/67/2017).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi dan Nasional



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

1. Hubungan Antara RPJMD Kab. Berau dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Kabupaten Berau memedomani RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan regional. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan sasaran RPJMN dan RPJMD Provinsi yang telah diselaraskan juga dengan arah kebijakan dalam RPJPN dan RPJMD Provinsi. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan

strategi pembangunan nasional dan regional provinsi untuk sinkronisasi kebijakan.

2. Hubungan Antara RPJMD dan RPJP

RPJMD Kabupaten Berau merupakan bagian dari pencapaian RPJP Kab Berau 2026. RPJMD 2021-2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2016-2020 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh kepala daerah. Secara substantif, isi RPJMD 2021-2026 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Berau pada tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Berau. Berbagai evaluasi RJPMD sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD 2021-2026.

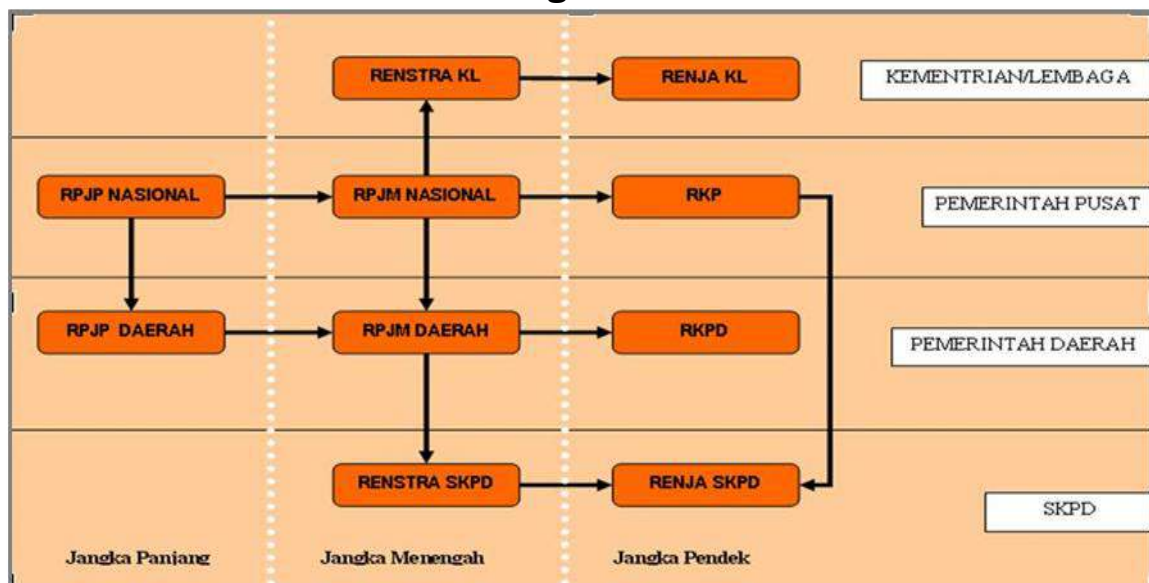
3. Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD

RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjabarkan visi dan misi serta RPJPD. Implementasi dari RPJMD dituangkan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai garis-garis besar RPJMD, yang difokuskan pada bagian-bagian sebagaimana yang menjadi tupoksi Perangkat Daerah. RPJMD disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu 2021-2026. Penjabaran RPJMD ke dalam Renstra OPD dituangkan ke dalam program-program yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah, berdasarkan RPJMD.

4. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Implementasi RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam bentuk RKPD. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif. RKPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek disusun berdasarkan pertimbangan hasil Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek



5. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Berau yang telah disusun sebelumnya. Pembangunan secara fisik sebagai implementasi RPJMD dilaksanakan dengan mengikuti RTRW yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin sinkronisasi dan harmonisasi dengan antar wilayah

pembangunan, serta memperhatikan keselarasan atau harmonisasi antara Kabupaten Berau dengan daerah lain.

6. Hubungan Antara RPJMD dan Dokumen KHLS

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD harus mencakup KLHS. Dokumen KLHS harus telah tersedia sebelum rancangan teknokratik RPJMD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1.Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Berau 2021-2026.

1.4.2.Tujuan

- 1) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra);

- 2) Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Berau dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 5) Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarwaktu dan antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Berau yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Berau saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Berau 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau 2021-2026 ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, maka hal ini menjadikan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki keuntungan dari sisi geografis yang bisa memberikan keuntungan ekonomi untuk pembangunan wilayahnya. Hal ini dikarenakan keluar masuk barang maupun manusia dari dan ke Provinsi Kalimantan Utara melalui jalur darat pasti akan terjadi, maka sudah tentu akan terjadi transaksi ekonomi. Letak Kabupaten Berau berada pada posisi paling utara dan memiliki jarak terjauh dengan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, dengan jarak tempuh 296 km. Ibukota Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Adapun jarak terjauh dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan Biduk-Biduk yaitu sejauh 254 km.

**Gambar 2.1
Peta Kabupaten Berau**



Sumber: Bappeda Kabupaten Berau, 2016.

Sampai dengan tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Berau terbagi dalam 13 kecamatan dengan jumlah kampung/kelurahan sebanyak 100 kampung dan 10 kelurahan. Ditinjau menurut proses pembentukannya, sebelum tahun 2000, Kabupaten Berau hanya terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kelay, Talisayan, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, Sambaliung, Tanjung Redeb, Gunung Tabur dan Segah. Kemudian, terjadi penambahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Teluk Bayur yang merupakan gabungan sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Gunung Tabur. Pada tahun 2002 terjadi penambahan dua kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Maratua dan Kecamatan Tabalar. Selanjutnya, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih merupakan kecamatan termuda yang dibentuk pada tahun 2005. Pada tingkat kampung, perubahan terakhir terjadi pada tahun 2012 dimana terdapat dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang bergabung ke Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung. Selain

itu, terdapat penambahan sebanyak tiga kampung dimana satu kampung di Kecamatan Talisayan yaitu Kampung Capuak serta dua kampung di wilayah Kecamatan Segah yaitu Kampung Batu Rajang dan Siduung Indah.

Secara total, Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 36.962,37 Km² yang terdiri dari daratan 21.942,37 Km² dan lautan 15.020,00 Km² sepanjang 12 mil dari garis pantai pulau terluar. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Berau sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Jika dilihat dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi tujuh kabupaten yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta tiga kota yaitu Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Berdasarkan Tabel 2.1, Kabupaten Berau memiliki wilayah daratan seluas 21.735,19 Km² atau 17,07 persen dari total luas daratan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luasan ini, Kabupaten Berau berada pada urutan ketiga Kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.1
Data Luas Daratan dan Administrasi Provinsi Kalimantan Timur,
2020

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kampung/ Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	11.096,96	10	144
Kutai Barat	13.709,92	16	194
Kutai Kartanegara	25.988,08	18	237
Kutai Timur	31.051,71	18	141

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kampung/ Kelurahan
Berau	21.735,19	13	110
Penajam Paser Utara	2.923,73	4	54
Mahakam Ulu	19.449,41	5	50
Kota Balikpapan	512,25	6	34
Kota Samarinda	716,53	10	59
Kota Bontang	163,14	3	15
Kalimantan Timur	127.346,92	103	1.038

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah No.01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

b. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis terletak antara 116°08'28" Bujur Timur sampai dengan 119°03'31" Bujur Timur dan 0°59'28" Lintang Utara sampai dengan 2°37'32" Lintang Utara. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi sumber daya alam yang tidak terbarui cukup besar yakni batu bara. Dengan wilayah yang luas dan sebagian besar masih berupa kawasan hutan dan belum menjadi pemukiman penduduk, juga dapat menjadi potensi kehutanan atau dibuka menjadi perkebunan tahunan seperti kelapa sawit. Selain itu, terdapat banyak potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik yang meliputi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

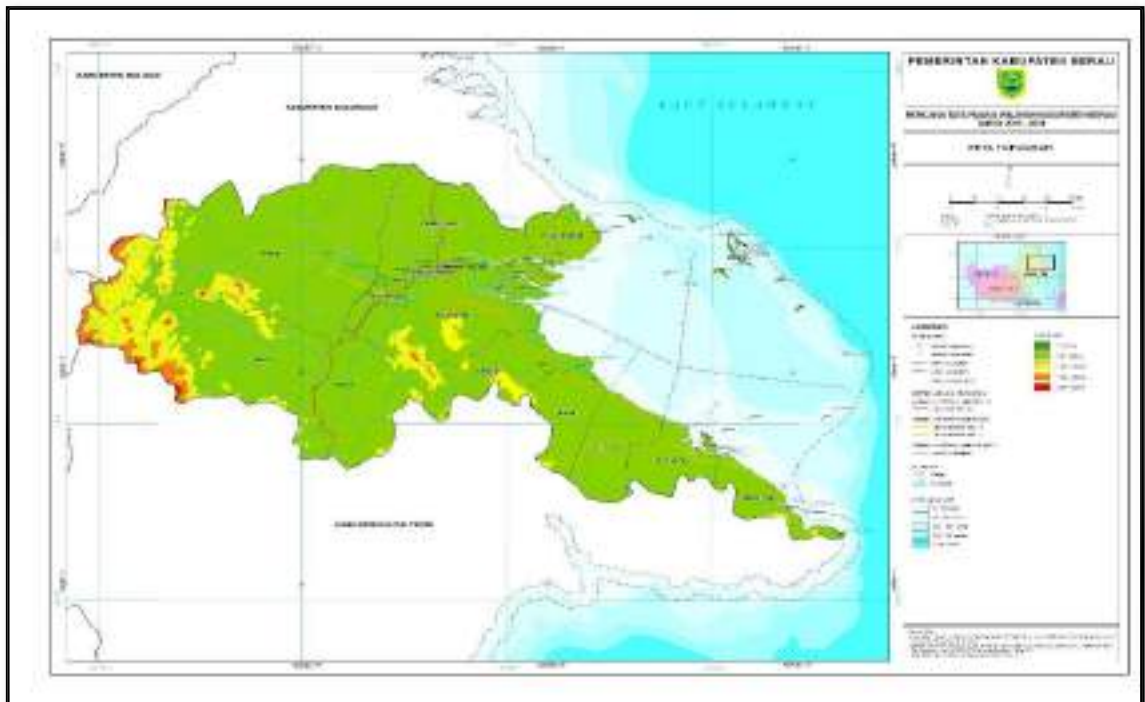
Kabupaten Berau dikatakan memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya kecamatan yang memiliki geografis berbatasan langsung dengan lautan lepas. Antara lain adalah Kecamatan Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau Derawan, dan Maratua, dimana daerah tersebut merupakan daerah pesisir pantai. Dua kecamatan yang sudah dikenal baik nasional maupun internasional sebagai daerah tujuan wisata di mana pantai dan alam bawah lautnya memiliki panorama yang indah adalah Kecamatan Pulau

Derawan dan Maratua sudah Di samping itu, Kabupaten Berau juga memiliki 31 pulau kecil dan wilayah laut yang cukup luas dengan keanekaragaman sumber daya hayati yang tinggi. Namun demikian, tidak semua kecamatan di Kabupaten Berau merupakan wilayah pesisir, terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Segah dan Kelay yang posisinya jauh dari ibukota Kabupaten dan tidak berbatasan langsung dengan laut lepas sehingga dikenal sebagai wilayah pedalaman dengan kekayaan alam yang luar biasa indahnyanya sehingga memiliki potensi wisata alam yang dapat dikembangkan.

c. Topografi

Wilayah daratan Kabupaten Berau lebih banyak berbentuk gugusan bukit dan hutan yang sebagian besar tidak dihuni oleh penduduk. Selain itu ada sebagian wilayah yang berbatasan dengan laut. Hal ini dapat dikatakan jika topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Dengan demikian, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Berau dengan wilayah yang luas akan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan penyebaran penduduk jadi tidak merata. Hamparan perbukitan ada di seluruh wilayah terutama Kecamatan Kelay yang memiliki perbukitan batu kapur dengan luas hampir mencapai 100 km². Gugusan bukit juga terdapat di Kecamatan Tabalar dengan bukit tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Selain itu, Kabupaten Berau memiliki tujuh buah danau dengan total luas kurang lebih 15 Ha.

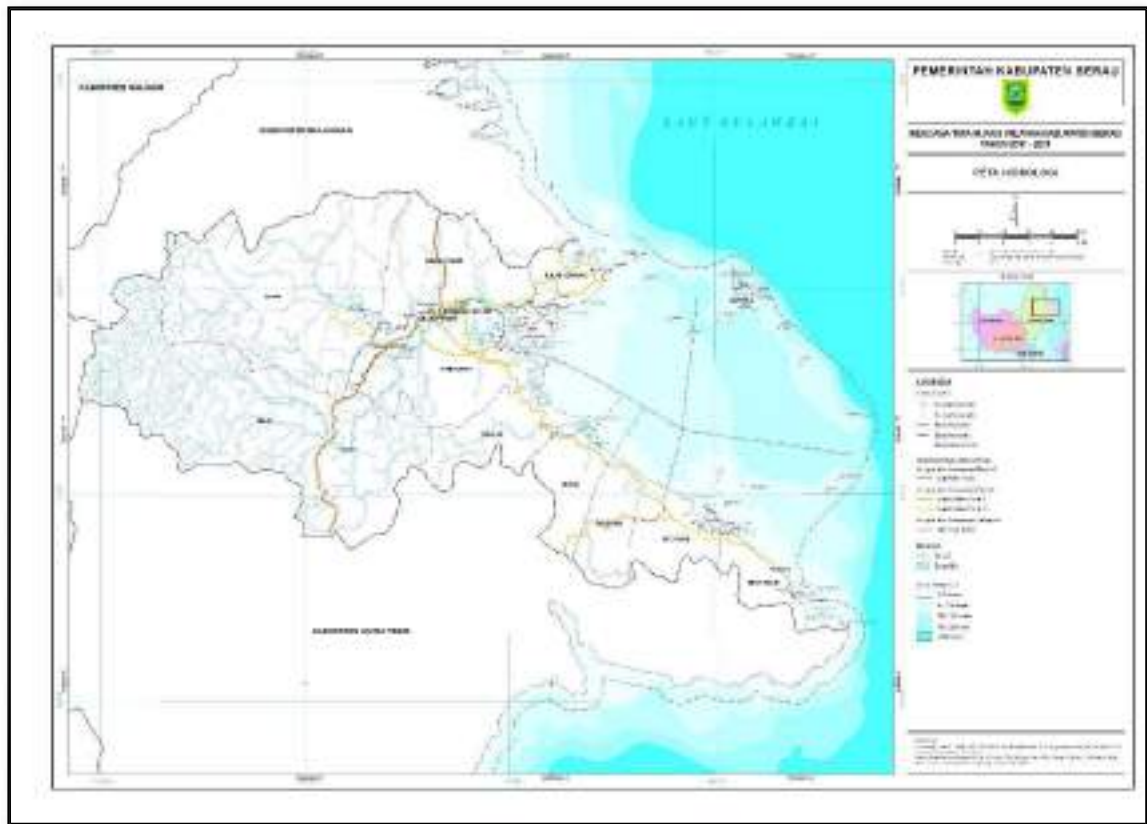
Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Berau



d. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Berau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Di Kabupaten Berau, terdapat enam kecamatan yang dialiri sungai dengan jumlah total mencapai 20 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Berau di Kecamatan Gunung Tabur yang mencapai 292 km dan Sungai Kelay di Kecamatan Kelay sepanjang 254 km.

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Berau



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Berau mencakup antara lain a) sistem wilayah sungai dan daerah aliran sungai, b) pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi dan c) pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir dan bangunan konservasi. Adapun Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Berau mencakup dua WS yaitu WS Berau-Kelay dan WS Karangan. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut wilayah sungainya dirinci sebagai berikut:

1. DAS yang termasuk dalam WS Berau-Kelay mencakup 15 DAS yaitu DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkupadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempake,

DAS Pegat, DAS lungsuran naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung dan DAS Maratua Teluk Alulu.

2. DAS yang termasuk dalam WS karangan mencakup 16 DAS yaitu DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benyuan, DAS Sumber Agung, DAS Kayu Indah, DAS Talisayan, DAS Dumaring, DAS Lobang Kelatak, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuan Kelambu, DAS Sandaran, DAS Kembalun, DAS Manubara, DAS Karangan dan DAS Tanjung Buaya.

Selanjutnya, pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Berau terbagi menjadi 2 (dua) kewenangan, yakni kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten dengan lokasi dan luasan yang dapat terlihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 berikut.

Tabel 2.2
Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi

No.	Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DI Biatan	Biatan	1.800
2	DI Dumaring	Talisayan	1.000
3	DI Labanan	Teluk Bayur	1.116
4	DI Merancang	Gunung Tabur	1.200
5	DI Batu-Batu	Gunung Tabur	1.000
6	DI Sungai Lati	Gunung Tabur	1.050
7	DI Beriwit	Sambaliung	1.500
8	DI Muara Bangun	Sambaliung	2.000
9	DI Tepian Buah	Segah	1.500
10	DIR Rantau Panjang	Sambaliung	1.500
11	DIR Sei Kuran	Gunung Tabur	1.000
12	DIR Sukan Tengah	Sambaliung	1.000
13	DIR Tanjung Perangat	Sambaliung	2.500
14	DIR Urutang		2.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

**Tabel 2.3
Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten**

No.	Daerah Irigasi (DI)	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DI Buyung-Buyung	Tabalar	500
2	DI Gurimbang	Sambaliung	250
3	DI Pulau Besing	Gunung Tabur	200
4	DI Semurut	Tabalar	510
5	DI Talisayan	Talisayan	850
6	DI Merancang	Gunung Tabur	200
7	DI Tasuk	Gunung Tabur	300
8	DI Tumbit Melayu	Teluk Bayur	350
9	DI Siduong	Segah	500
10	DI Pujut	Pulau Derawan	500
11	DI Tabalar	Tabalar	300
12	DI Samburakat	Gunung Tabur	200
13	DI Bebanir Muara	Sambaliung	100
14	DI Pulau Aji	Sambaliung	100
15	DIR Karangan	Biatan	250
16	DIR Sukan	Sambaliung	500
17	DIR Semanting	Tabalar	500
18	DI Suaran	Sambaliung	200
19	DI Teluk Sumbang	Biduk-Biduk	250
20	DI Semurut II	Tabalar	300
21	DI Batu Putih	Batu Putih	300
22	DI Biatan Lempake	Biatan	450
23	DI Pandan Sari	Segah	300
24	DI Bukit Makmur	Segah	600
25	DI Tabalar Muara	Tabalar	1.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

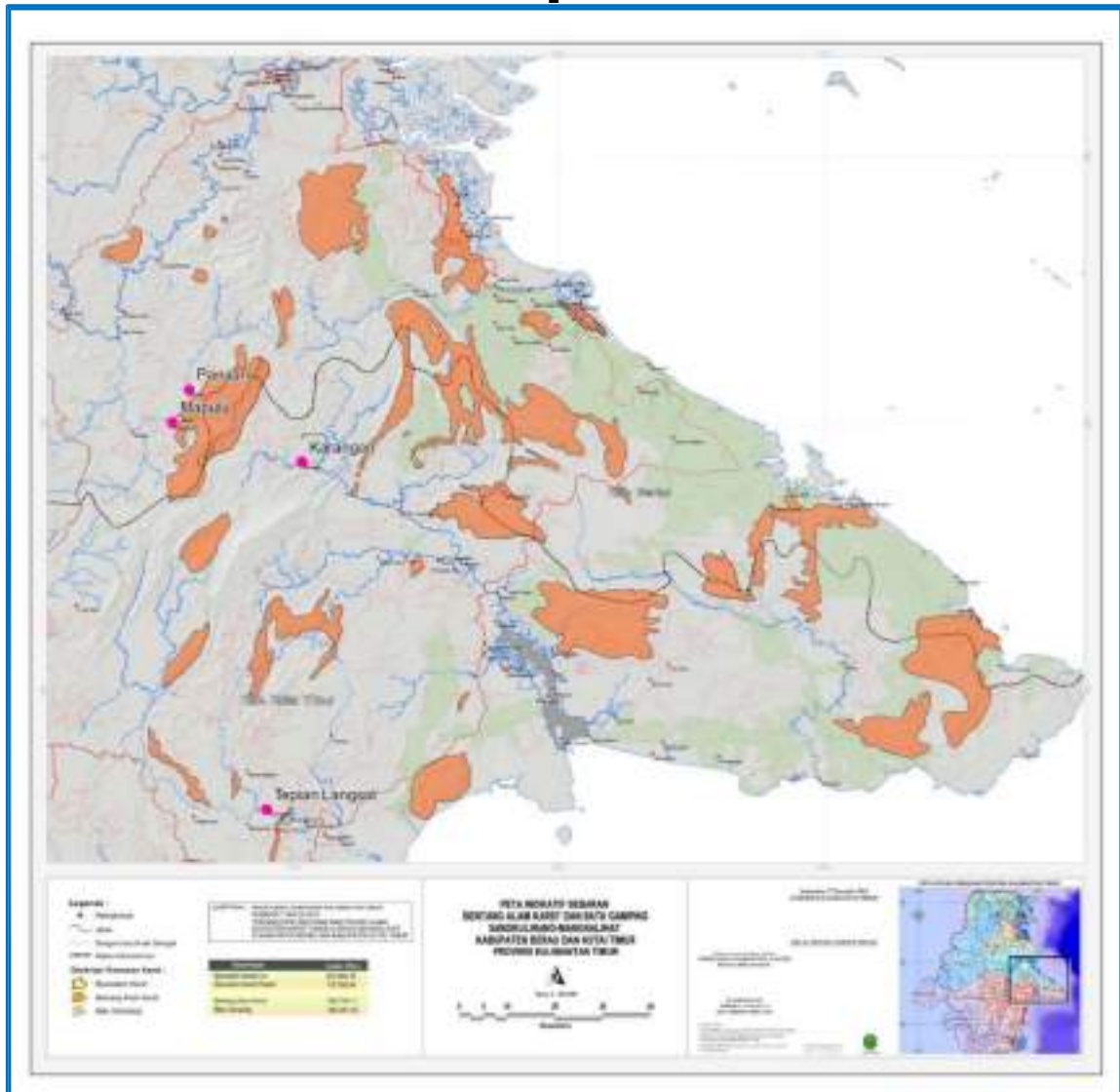
e. Geologi

Salah satu kawasan prioritas dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan di Indonesia adalah Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Ekosistem esensial adalah ekosistem penyangga kehidupan yang berupa ekosistem atau wilayah yang memiliki keunikan dan atau fungsi penting dari habitat dan atau jenis. Kriteria ekosistem esensial didasarkan pada aspek nilai tata ruang, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, nilai ekologi, sosial ekonomi budaya, dan jasa lingkungan.

Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat dengan total luas 1.867.676 Ha atau seluas 12 persen dari total luas karst di Indonesia terletak di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Kawasan karst merupakan suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas, disebabkan oleh derajat pelarutan batu-batuan yang intensif, terutama batuan gamping dan dolomit. Ekosistem karst memiliki keunikan, baik secara fisik yang ditandai dengan perbukitan, lembah-lembah terjal, gua dan sungai bawah tanah, maupun secara keanekaragaman hayati. Kawasan Karst ini memiliki peran penting dalam siklus hidrologi, yaitu berdasarkan pendekatan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, kawasan tersebut merupakan hulu dari 5 sungai utama di Berau dan Kutai Timur (Dumaring, Tabalar, Menubar, Karangan dan Bengalun) dan merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat di 100 kampung.

Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable*), yang jika rusak tidak dapat dipulihkan (*unretrievable*) dan kawasan yang sangat peka untuk segala bentuk perubahan lingkungan. Keanekaan hayati maupun nirhayati kawasan karst merupakan unsur penting penyusun keanekaan bumi (*geodiversity*). Tiga aspek utama kawasan karst yang bernilai ilmiah, ekonomi, dan kemanusiaan merupakan sendi-sendi strategis yang penting sehingga pada 1997, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengukuhkan karst sebagai kawasan yang lingkungannya harus dilestarikan. Selain itu, saat ini kawasan karst juga diakui turut memainkan peran penting dalam siklus karbon dunia. Dalam perkembangannya, kini sebagian besar kawasan karst telah menjadi lokasi wisata alam, budaya dan ilmiah. Namun demikian, kawasan karst ini tak luput pula dari ancaman kelestarian kawasan melalui penambangan marmer, semen, maupun penggalian batu kapur.

Gambar 2.4
Peta Sebaran Karst di Kabupaten Berau dan Kutai Timur



Sumber: Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012.

Kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat di Berau mempunyai keunikan tersendiri karena selain dihiasi perbukitan hijau, dinding-dinding terjal dan gua bawah tanah yang eksotis, membentang indah dan meraksasa dari Kabupaten Berau hingga Kabupaten Kutai Timur, juga pada dinding-dinding guanya terdapat jejak kehidupan manusia purba berupa lukisan tangan dan lukisan berbagai jenis binatang, yang diperkirakan sudah berusia sekitar 10.000 tahun Sebelum Masehi. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan penyebaran rumpun manusia

purba Austronesia berawal di Pegunungan Karst Sangkulirang, yang artinya disinilah titik awal masuknya manusia purba ke wilayah nusantara.

Selain memiliki keindahan dan keunikan alam, Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat juga menyimpan potensi sumber daya alam bernilai ekonomis, berupa sarang burung Rating, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun non kayu, serta batuan mineral. Keanekaragaman hayatinya pun melimpah, diantaranya menjadi salah satu habitat penting orang utan dan beberapa fauna lain, selain menjadi kawasan berpotensi penyerapan karbon yang cukup tinggi. Pada tanggal 30 Januari 2015, kawasan kars Sangkulirang-Mangkalihat telah diajukan untuk ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Aspek utama yang diajukan sebagai *Outstanding Universal Value* (OUV) adalah lukisan gua yang ada digua-gua di kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat. Kini, situs ini masih termasuk kedalam daftar tentative untuk menjadi warisan dunia.

f. Klimatologi

Secara umum Kabupaten Berau beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 21,6°C sampai dengan 36,6°C. Suhu udara rata-rata terendah adalah 26,5°C dan rata-rata tertinggi adalah 27,8°C. Rata-rata kelembaban udara tertinggi mencapai 97 persen pada bulan Oktober dan paling minim hanya berkisar 88 persen pada bulan Agustus. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan iklim yang dilakukan oleh BMKG Kabupaten Berau di Stasiun Meteorologi Kalimantan pada tahun 2020, penyinaran matahari yang minim menyebabkan kelembaban meningkat, hal ini terlihat pada rendahnya penyinaran matahari yang sebesar 32,0 persen pada bulan Oktober dan mencapai 63,0 persen pada bulan Agustus. Adapun rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Berau hanya berkisar 3,3 sampai dengan 3,9 knot. Rata-rata tekanan udara tertinggi di Kabupaten Berau terjadi pada bulan Februari yakni mencapai 1.013,7

mb. Selain itu, jumlah curah tertinggi selama tahun 2020 terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar 99,9 mm.

**Tabel 2.4
Statistik Klimatologi Kabupaten Berau, 2020**

Kabupaten/ Kota	Rata- Rata Suhu Udara (°C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata- Rata Tekanan Udara (mb)	Rata-Rata Kecepatan Angin (m/s)	Penyinaran Matahari (Persen)	Jumlah Curah Hujan (mm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	26,6	90,0	1013,0	3,6	42,0	92,9
Februari	26,5	90,0	1013,7	3,8	43,0	53,2
Maret	26,9	90,0	1013,2	3,6	63,0	69,0
April	27,1	90,0	1013,2	3,7	67,0	42,6
Mei	27,8	89,0	1012,0	3,5	68,0	99,9
Juni	26,9	91,0	1011,8	3,5	47,0	35,7
Juli	26,6	91,0	1011,0	3,5	57,0	40,5
Agustus	27,3	88,0	1011,6	3,7	63,0	53,8
September	26,8	90,0	1011,6	3,7	30,0	29,3
Oktober	26,7	97,0	1011,0	3,6	32,0	43,3
November	27,1	89,0	1011,6	3,9	52,0	31,4
Desember	26,9	91,0	1011,0	3,3	33,0	45,6

Sumber: Stasiun Metereologi Kalimantan.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 kawasan lindung yang ada di Kabupaten Berau ada seluas 380.259,80 Ha dan kawasan budidaya seluas 1.975.590,05 Ha. Oleh karena itu, potensi penggunaan lahan harus direncanakan dengan matang. Berikut rencana pengembangan penggunaan lahan secara keseluruhan dari Kabupaten Berau.

Tabel 2.5
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Kawasan/Pola Ruang		Luas (Km2)
(1)		(2)
A	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	3.602,54
2	Hutan Mangrove	3,18
3	Padang Lamun (Konservasi Laut)	585,93
4	Sempadan Pantai	39,84
5	Sempadan Sungai	381,68
6	Suaka Marga Satwa	0,59
Jumlah Kawasan Lindung		4.613,76
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Konversi	483,62
2	Hutan Produksi Terbatas	6.525,79
3	Hutan Produksi Tetap	4.905,36
4	Industri	107,86
5	Kawasan Peruntukan Perikanan	834,67
6	Laut Teritorial (12 mill)	11.943,71
7	Pariwisata Darat	143,98
8	Pariwisata Laut	234,94
9	Perkebunan	4.337,59
10	Permukiman Perdesaan	501,46
11	Permukiman Perkotaan	161,62
12	Pertanian Lahan Basah	174,68
13	Pertanian Lahan Kering	463,78
14	Sungai	290,31
15	Taman Wisata Alam Laut	1.239,23
Jumlah Kawasan Budidaya		32.348,61
Luas Kabupaten Berau		36.962,37

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Berau dititikberatkan pada penataan ruang terkait sistem pusat kegiatan. Terdapat tiga sistem yang akan dikembangkan, yakni Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi 15 perkotaan.

Tabel 2.6
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau

No.	Sistem Pelayanan	Fungsi Utama	Nama Pusat Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PKW	Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, pusat pelayanan jasa pariwisata, pusat transportasi darat dan laut regional, pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat siaran dan telekomunikasi, pusat olah raga skala provinsi, pengendalian lingkungan kelautan, pusat transportasi laut regional dan internasional, pusat perikanan tangkap, pusat penelitian kelautan, pusat industri, pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, pengembangan perikanan tangkap.	Perkotaan: Tanjung Redeb
2	PKL	Sebagai pusat transportasi udara regional, pusat pengembangan agropolitan, pelayanan pariwisata, pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, pendidikan tinggi, pengembangan agroindustri dan agribisnis, pengembangan budidaya perikanan darat, pengembangan energi/kelistrikan, pengelolaan/industri pengelolaan perkebunan, pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas pergudangan, industri	Meliputi Perkotaan: Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, dan Sido Bangen.
3	PKL.p		Perkotaan: Biduk-Biduk
4	PPK	Sebagai pelayanan kegiatan perikanan tangkap, pelayanan kegiatan budidaya tambak, industri rakyat, pelayanan jasa dan perdagangan, pengembangan pertanian, pengembangan perkebunan, pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat	Meliputi Sambakungan, Kasai, Teluk Harapan, Bebanir/Bangun, Tumbit Melayu, Tubaan, Biatan Lempake, Tembudan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Merapun, Long Keluh, Merasa, Bukit Makmur, dan Long Laai.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

Selain itu, terdapat juga sistem perkampungan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebanyak 77 perkampungan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau, sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau**

No.	Kecamatan	Jumlah PPL	Lokasi PPL
(1)	(2)		(3)
1	Kelay	10	Merabu, Mapulu, Panaan, Muara Lesan, Lesan Dayak, Long Beliu, Long Duhung, Long Lamcin, dan Long Pelay, Long Sului.
2	Talisayan	9	Sumber Mulya, Eka Sapta, Purna Sari Jaya, Suka Murya, Dumaring, Capuak, Bumi Jaya, Tunggal Bumi, dan Campu Sari.
3	Tabalar	5	Buyung-Buyung, Semurut, Harapan Maju, Tabalar Ulu, dan Tabalar Muara.
4	Biduk-Biduk	5	Tanjung Perepat, Pantai Harapan, Giring-Giring, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang.
5	Pulau Derawan	3	Teluk Semanting, Pulau Derawan, dan Pegat Batumbuk
6	Maratua	3	Bohe Silian, Payung-Payung, dan Teluk Alulu.
7	Sambaliung	13	Rantau Panjang, Pegat Bukur, Inaran, Bena Baru, Tumbit Dayak, Long Lanuk, Gurimbang, Rantau Panjang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, UPT Sukan Tengah III, UPT Sukan Tengah IV, dan Suaran
8	Gunung Tabur	7	Tasuk, Birang, Maluang, Samburakat, Pulau Besing, Batu-Batu, dan Melati Jaya.
9	Segah	9	Pandan Sari, Siduung Indah, Batu Rajang, Harapan Jaya, Punan Malinau, Long Ayan, Long Ayap, Punan Mahakam, dan Punan Segah
10	Teluk Bayur	1	Labanan Makarti
11	Batu Putih	5	Kayu Indah, Sumber Agung, Ampen Medang, Lobang Kelatak, dan Balikukup.
12	Biatan	7	Biatan Bapinang, Biatan Baru, Manunggal Jaya, Biatan Ulu, Bukit Makmur Jaya, Karangan, dan Biatan Ilir.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan, yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: kawasan *Heart of Borneo* (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi, meliputi: kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batu bara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
 - c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam, meliputi: Pulau Kakaban, Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit, Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha serta Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup;
 - d. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau, yakni bandar udara HANKAM di Pulau Maratua.

Prioritas pembangunan Kabupaten Berau difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang agrobisnis dan pariwisata. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan khusus yang ada di Kabupaten Berau. Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, pengembangan pariwisata dilakukan melalui perwujudan kawasan pariwisata, yakni: (1) Kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari kawasan pariwisata darat dan kawasan pariwisata laut; (2) Pengembangan wisata alam; (3) Pengembangan wisata sejarah; (4) Pengembangan wisata budaya; serta (5) Pengembangan wisata buatan.

Adapun wisata yang dikembangkan di Kabupaten Berau meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Berikut masing- masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya:

1. Pengembangan Wisata Alam, mencakup:
 - a. Pengembangan Wisata Bahari meliputi Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batuputih, dan Kecamatan Talisayan.
 - b. Pengembangan Wisata Minat Khusus meliputi Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Maratua, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Talisayan
 - c. Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata meliputi Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Maratua.
2. Pengembangan Wisata Sejarah mencakup Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Kelay.
3. Pengembangan Wisata Budaya, mencakup:
 - a. Wisata Budaya Banua, terletak di Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung.

- b. Wisata Budaya Dayak, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
- c. Wisata Budaya Bajau, terletak di Kecamatan Derawan dan Kecamatan Maratua.
- 4. Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia, mencakup:
 - a. Wisata Tangap dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur.
 - b. Wisata Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur.
 - c. Wisata kuliner dan belanja di Kecamatan Tanjung Redeb.
 - d. Wisata religi di Kecamatan Tanjung redeb, Gunung Tabur dan Sambaliung.
 - e. Wisata rekreasi di Kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah harus mampu memberikan gambaran terkait statistik bencana yang akan menjadi bahan dalam merumuskan program penanggulangan bencana pada periode pembangunan saat ini.

Tabel 2.8
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Berau, 2016-2020

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angin Puting Beliung	1	1	1		
Banjir	3	4		8	5
Tanah Longsor	3	3	1		5

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
Kebakaran	18	21	20	30	22
Kebakaran Hutan dan Lahan	6	6	26	8	0
Kecelakaan Air/Laut	3	1	1		1
Kecelakaan Goa Sarang Burung	1				
Kebocoran Gas	1				
Orang Tenggelam	3	1	4	2	5
Pohon Tumbang			2		1
Orang Dimakan Buaya					2
Nelayan Hilang					1
Total	39	37	55	48	42

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

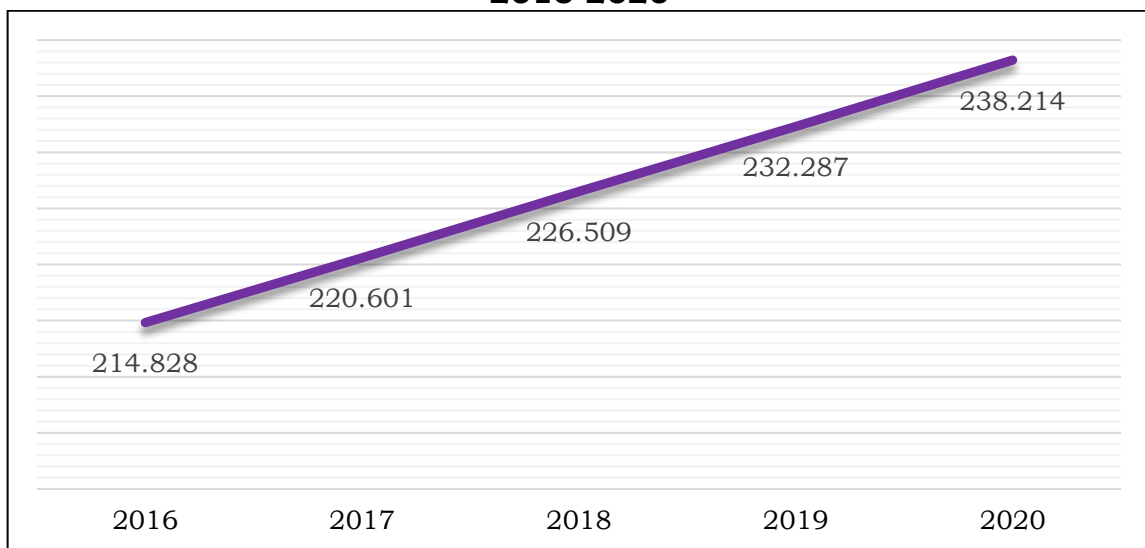
Berdasarkan Tabel 2.8 dapat terlihat bahwa kejadian bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Berau selama tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah bencana kebakaran. Termasuk dalam kebakaran dalam konteks ini antara lain kebakaran bangunan (baik bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal) dan kebakaran kendaraan. Selain kebakaran, jenis bencana yang hampir selalu terjadi pada setiap tahunnya adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kasus orang tenggelam.

2.1.4 Demografi

Pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya dari faktor alami yaitu fertilitas, mortalitas, dan faktor buatan yaitu migrasi. Laju perubahan di setiap faktor menentukan besaran jumlah dan struktur penduduk di suatu wilayah. Teori Malthus menyatakan bahwa jumlah populasi akan meningkat sangat cepat mengikuti deret ukur. Transisi demografi terjadi ketika pertumbuhan penduduk tinggi disebabkan oleh tingkat fertilitas (kelahiran) tinggi dan sebaliknya tingkat mortalitas turun akibat peningkatan sosial ekonomi penduduk dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 238.214 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 2,55 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 232.287 jiwa. Jika

dilihat persebarannya, mayoritas penduduk Kabupaten Berau berada di Kecamatan Tanjung Redeb dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Maratua, masing-masing sebesar 67.895 jiwa dan 4.039 jiwa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini.

Gambar 2.5
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Berau (Jiwa),
2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.9
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau (Jiwa),
2016-2020**

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Proporsi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelay	5.667	5.892	6.119	6.340	6.561	2,75
Talisayan	11.332	11.542	11.749	11.939	12.120	5,09
Tabalar	6.598	6.835	7.129	7.362	7.645	3,21
Biduk-Biduk	6.379	6.541	6.648	6.744	6.889	2,89
Pulau Derawan	9.051	9.081	9.161	9.229	9.288	3,90
Maratua	3.747	3.837	3.927	4.011	4.039	1,70
Sambaliung	32.403	33.841	35.351	36.839	38.425	16,13
Tanjung Redeb	67.114	67.380	67.621	67.816	67.895	28,50
Gunung Tabur	19.976	20.874	21.783	22.732	23.731	9,96
Segah	10.208	10.565	10.926	11.330	11.675	4,90
Teluk Bayur	27.356	28.579	29.816	31.088	32.408	13,60

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Proporsi 2020
Batu Putih	8.079	8.370	8.606	8.834	9.109	3,82
Biatan	6.918	7.264	7.673	8.023	8.429	3,54
Berau	214.828	220.601	226.509	232.287	238.214	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar. Kegunaan LPP biasanya untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Metode yang digunakan BPS untuk menghitung LPP adalah metode geometrik. Artinya ketika $LPP > 0$ terjadi penambahan penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika $LPP = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ketika $LPP < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan gambar 2.6 dapat terlihat bahwa nilai LPP Kabupaten Berau selama tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu bertanda positif, yang menunjukkan terjadinya penambahan penduduk selama periode tersebut.

Gambar 2.6
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau (Persen), 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau menurut Kecamatan,
2016-2020 dan 2019-2020

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	
	2016-2020	2019-2020
(1)	(2)	(3)
Kelay	3,73	3,49
Talisayan	1,69	1,52
Tabalar	3,75	3,84
Biduk-Biduk	1,94	2,15
Pulau Derawan	0,65	0,64
Maratua	1,89	0,70
Sambaliung	4,35	4,31
Tanjung Redeb	0,29	0,12
Gunung Tabur	4,40	4,39
Segah	3,41	3,05
Teluk Bayur	4,33	4,25
Batu Putih	3,05	3,11
Biatan	5,06	5,06
Berau	2,62	2,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

LPP Kabupaten Berau tahun 2016 hingga 2020 sebesar 2,62 persen. Artinya selama kurun waktu lima tahun, rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun di Kabupaten Berau sebesar 2,62 persen. Sedangkan LPP periode 2019-2020 sebesar 2,55 persen, angka ini lebih rendah dibanding rata-rata LPP 5 tahun terakhir. Melalui indikator ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah tentang masalah kependudukan di Kabupaten Berau telah memperlihatkan hasil cukup baik.

Pada periode tahun 2019-2020, hanya terdapat lima kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dibawah laju Kabupaten Berau. Kelima kecamatan tersebut adalah Talisayan (1,52 persen), Biduk-Biduk (2,15 persen), Pulau Derawan (0,64 persen), Maratua (0,70 persen) dan Tanjung Redeb (0,12 persen). Adapun pertumbuhan penduduk 2019-2020 yang terbesar adalah Kecamatan Biatan yaitu sebesar 5,06 persen.

Selanjutnya, struktur penduduk suatu daerah dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin melalui *sex ratio*. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan

banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jika nilai *sex ratio* > 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika nilai *sex ratio* = 100, berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Angka *sex ratio* Kabupaten Berau tahun 2020 sebesar 115,93, artinya setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 115 sampai 116 penduduk laki-laki. Hal ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Kondisi yang sama juga terjadi selama tahun 2016 sampai dengan 2019 dimana penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Berau, 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	115.521	118.581	121.720	124.807	127.892
Perempuan	99.307	102.020	104.789	107.480	110.322
<i>Sex Ratio</i>	116,33	116,23	116,16	116,12	115,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Berdasarkan Tabel 2.12, pada tahun 2020 semua kecamatan di Kabupaten Berau memiliki angka *sex ratio* yang juga lebih besar dari 100 (penduduk laki-laki masih lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan). Beberapa kecamatan memiliki angka *sex ratio* yang tinggi disebabkan banyaknya perusahaan tambang dan perkebunan sawit, dimana sebagian besar pekerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja laki-laki, sehingga kebanyakan penduduk bermigrasi ke Kabupaten Berau adalah laki-laki untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dibandingkan daerah asalnya. Adapun kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kelay (124,31), Kecamatan Segah (129,33), dan Kecamatan Batu Putih (121,31). Tiga daerah kecamatan tersebut merupakan daerah memiliki banyak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan

terdapat industri besar pengolahan kelapa sawit, yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Pada tahun 2020, Kecamatan Biduk-Biduk memiliki nilai *sex ratio* paling kecil yaitu sebesar 105,15.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Berau, 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	
Kelay	3.636	2.925	124,31
Talisayan	6.650	5.470	121,57
Tabalar	4.125	3.520	117,19
Biduk-Biduk	3.531	3.358	105,15
Pulau Derawan	5.009	4.279	117,06
Maratua	2.089	1.950	107,13
Sambaliung	20.553	17.872	115,00
Tanjung Redeb	35.833	32.062	111,76
Gunung Tabur	12.791	10.940	116,92
Segah	6.584	5.091	129,33
Teluk Bayur	17.514	14.894	117,59
Batu Putih	4.993	4.116	121,31
Biatan	4.584	3.845	119,22
Berau	127.892	110.322	115,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Distribusi penduduk tidak merata menimbulkan masalah kepada kepadatan (densitas) penduduk. Terlalu padatnya penduduk dalam suatu wilayah akan mempengaruhi daya dukung infrastruktur, lingkungan dan sosial di wilayah tertentu. Daya dukung infrastruktur, lingkungan, sosial dan kemudahan yang bisa mempermudah kehidupan juga menjadi alasan penduduk bermigrasi ke perkotaan, sehingga daerah yang menjadi pusat perekonomian selalu memiliki kepadatan penduduk tinggi. Indikator persebaran penduduk secara umum digunakan adalah kepadatan penduduk umum (*aritmatis*). Ukuran ini dihitung dari perbandingan antara jumlah penduduk total dengan luas wilayah (km²). Perhitungan kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah, kemudian dapat dijadikan

sebagai acuan pembuatan kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi).

Tabel 2.13
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Berau (Jiwa/Km²), 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	0,87	0,90	0,94	0,97	1,01
Talisayan	10,29	10,48	10,67	10,84	11,01
Tabalar	4,95	5,13	5,35	5,53	5,74
Biduk-Biduk	10,11	10,36	10,53	10,68	10,91
Pulau Derawan	9,86	9,90	9,98	10,06	10,12
Maratua	107,57	110,16	112,74	115,15	115,95
Sambaliung	15,61	16,30	17,03	17,74	18,51
Tanjung Redeb	2.950,25	2.961,95	2.972,54	2.981,11	2.984,59
Gunung Tabur	10,33	10,80	11,27	11,76	12,28
Segah	1,96	2,03	2,10	2,17	2,24
Teluk Bayur	88,37	92,32	96,32	100,43	104,69
Batu Putih	9,03	9,36	9,62	9,88	10,18
Biatan	7,25	7,61	8,04	8,41	8,83
Berau	9,79	10,05	10,32	10,59	10,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, kepadatan penduduk di Kabupaten Berau terus meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sedangkan luas wilayah tidak mengalami perubahan. Kepadatan penduduk Kabupaten Berau tahun 2020 mencapai 10,86 jiwa/km². Artinya, rata-rata setiap satu kilometer persegi di Kabupaten Berau didiami oleh 10 sampai 11 jiwa penduduk. Sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Berau masih cukup jarang mengingat karena sebagian besar wilayah Kabupaten Berau masih berupa hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan kepadatan tahun 2019 yang sebesar 10,59 jiwa/km².

Jika dibandingkan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan, maka memiliki ketimpangan yang sangat tinggi dikarenakan distribusi penduduk yang tidak merata. Di mana pada daerah pedalaman/terpencil dengan luas wilayah yang jauh lebih besar dibanding wilayah yang lebih maju memiliki penduduk relatif sedikit jika dibandingkan wilayah yang

lebih maju. Ibukota Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Redeb) pada tahun 2020 memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, mencapai 2.984,59 jiwa/km² yang berarti dalam wilayah seluas satu kilometer persegi, dihuni kurang lebih 2.984 jiwa. Angka tersebut merupakan yang tertinggi karena peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung redeb sebesar 2.950,25 jiwa/km². dan tahun 2019 kepadatan tersebut turun menjadi 2.778,21. Adapun Kecamatan Kelay merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah, hanya sebesar 1,01 jiwa/km² pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2016 sampai dengan 2019, kepadatan penduduk di Kecamatan ini masih kurang dari 1 jiwa/km².

Selanjutnya, penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dibedakan menjadi penduduk produktif dan penduduk tidak produktif. Berdasarkan tabel 2.14, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Berau tahun 2020 sebanyak 161.230 jiwa, terdiri dari 88.314 laki-laki dan 72.916 perempuan. Sementara itu, penduduk usia muda belum produktif (0-14 tahun) mencapai 35.057 laki-laki dan 33.571 perempuan. Kelompok penduduk usia muda biasanya masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, dikarenakan penduduk usia muda sebagian besar belum bersekolah atau masih mengemban pendidikan dasar atau menengah. Sementara itu, penduduk usia lanjut tidak produktif (65 tahun ke atas) terdapat sebanyak 4.521 penduduk laki-laki dan 3.835 penduduk perempuan. Penduduk pada kelompok usia lanjut ini sudah riskan atau tidak mampu untuk bekerja secara optimal/produktif lagi karena faktor usia yang sudah tua.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan *Dependency Ratio*
di Kabupaten Berau, 2016-2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	Laki-Laki	33.275	33.736	34.204	34.649	35.057
	Perempuan	31.675	32.159	32.644	33.102	33.571

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Total	64.950	65.895	66.848	67.751	68.628
15-64	Laki-Laki	79.099	81.400	83.741	86.024	88.314
	Perempuan	64.878	66.881	68.914	70.866	72.916
	Total	143.977	148.281	152.655	156.890	161.230
65+	Laki-Laki	3.147	3.445	3.775	4.134	4.521
	Perempuan	2.754	2.980	3.231	3.512	3.835
	Total	5.901	6.425	7.006	7.646	8.356
Dependency Ratio	Laki-Laki	46,05	45,68	45,35	45,08	44,82
	Perempuan	53,07	52,54	52,06	51,67	51,30
	Total	49,21	48,77	48,38	48,06	47,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Berdasarkan kelompok umur ini juga dapat diperoleh informasi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban tanggungan. Indikator ini untuk melihat sejauh mana penduduk usia produktif harus menanggung penduduk yang bukan usia produktif. Angka beban tanggungan di Kabupaten Berau pada tahun 2020 mencapai 47,75 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 47 sampai 48 penduduk tidak produktif baik berusia dibawah 14 tahun maupun berusia 65 tahun keatas. Jika melihat berdasarkan jenis kelamin, angka beban tanggungan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2020, angka beban tanggungan penduduk laki-laki sebesar 44,82 persen sedangkan angka beban tanggungan penduduk perempuan sebesar 51,30 persen. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, angka beban tanggungan di Kabupaten Berau menunjukkan trend menurun baik penduduk secara total, penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Tabel 2.15
Angka Beban Tanggungan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	46,77	46,36	46,00	45,71	45,44
Kutai Barat	48,23	47,88	47,57	47,36	47,18
Kutai Kartanegara	47,70	47,31	46,98	46,71	46,48
Kutai Timur	45,78	45,37	44,99	44,68	44,36
Berau	49,21	48,77	48,38	48,06	47,75
Penajam Paser Utara	49,48	49,04	48,68	48,39	48,14

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mahakam Ulu	55,23	54,82	54,51	54,28	54,13
Kota Balikpapan	41,67	41,27	40,91	40,61	40,34
Kota Samarinda	40,92	40,57	40,27	40,02	39,79
Kota Bontang	45,37	44,84	44,35	43,92	43,49
Kalimantan Timur	44,83	44,44	44,09	43,81	43,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Angka beban tanggungan Kabupaten Berau tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, Kabupaten Berau menduduki peringkat ke tiga dengan angka beban tanggungan tertinggi setelah Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Seperti halnya Kabupaten Berau, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki angka beban tanggungan dengan trend menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2020.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Banyak aspek tolak ukur kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan.

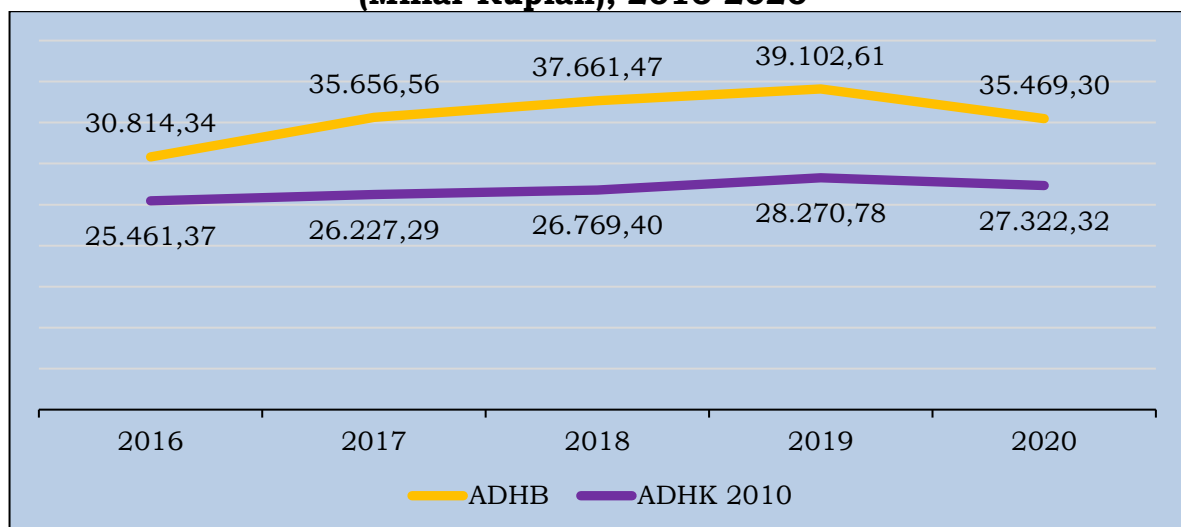
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai

aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki residen atau non residen.

Gejolak perekonomian global yang terjadi pada tahun 2020 turut memberikan guncangan pada perekonomian Kabupaten Berau. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Berau baik atas dasar harga (adh) berlaku maupun adh konstan 2010 mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2019. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, angka PDRB adh berlaku terus meningkat dari 30.814,34 miliar rupiah pada tahun 2016 hingga menjadi 39.102,61 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun di tahun terakhir, PDRB adh berlaku mengalami penurunan sebesar 3.633,31 miliar rupiah menjadi 35.469,30 miliar rupiah pada tahun 2020. Angka PDRB di posisi ini bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan angka PDRB pada tahun 2017 yang sebesar 35.656,56 miliar rupiah. Selain menurun pada PDRB adh berlaku, PDRB Kabupaten Berau adh konstan 2010 juga menurun pada tahun 2020. Angka PDRB yang sebelumnya sebesar 28.270,78 miliar rupiah pada tahun 2019, menurun 948,46 miliar rupiah menjadi 27.322,32 miliar rupiah pada tahun 2020.

Gambar 2.7
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau
(Miliar Rupiah), 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Salah satu kegunaan PDRB adalah untuk mengetahui struktur ekonomi yang dapat dilihat dari peranan atau persentase PDRB masing-masing kategori terhadap total PDRB Kabupaten Berau. Disebut sebagai kategori dominan adalah kategori yang memiliki nilai persentase terbesar dan akan menjadi ciri khas perekonomian daerah. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, struktur perekonomian Kabupaten Berau tidak mengalami perubahan signifikan dimana perekonomian masih didominasi oleh kategori yang berbasis sumber daya alam yaitu kategori pertambangan dan penggalian dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.16
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,28	10,85	10,99	10,69	11,64
Pertambangan dan Penggalian	60,13	62,42	61,49	60,83	56,43
Industri Pengolahan	4,16	4,06	4,05	4,07	4,77
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	4,21	3,63	3,72	4,05	4,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,30	5,06	5,35	5,63	6,51
Transportasi dan Pergudangan	5,88	5,56	5,75	5,78	6,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,10	1,14	1,18	1,26
Informasi dan Komunikasi	0,88	0,84	0,87	0,91	1,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,51	0,52	0,53	0,60
Real Estate	0,95	0,88	0,88	0,89	0,99
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	1,10	1,10	1,16	1,22
Jasa Pendidikan	2,52	2,35	2,44	2,50	3,01

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,81	0,87	0,91	1,23
Jasa lainnya	0,66	0,64	0,66	0,70	0,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Pada tahun 2020, total kontribusi dari dua kategori utama yakni kategori pertambangan dan penggalian dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 68,08 persen dari total PDRB Kabupaten Berau. Angka ini merupakan yang terkecil selama lima tahun terakhir, karena kontribusi kedua kategori ini biasanya selalu di atas 70 persen selama tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada satu sisi, kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan peran dari yang sebelumnya selalu di atas 60 persen menjadi 56,43 persen pada tahun 2020. Sebaliknya, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kenaikan dari 10,69 persen pada tahun 2019 menjadi 11,64 persen pada tahun 2020.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. BPS dalam penghitungannya, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai penambahan nilai PDRB yang ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun berjalan dibandingkan dengan nilai total PDRB tahun sebelumnya. Data PDRB yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB dapat mencerminkan pertumbuhan secara riil nilai tambah yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu dengan referensi tahun tertentu.

Penurunan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 menyebabkan Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan ekonomi negatif atau mengalami kontraksi ekonomi sebesar -3,35 persen pada tahun 2020. Kondisi pertumbuhan tahun 2020 ini merupakan yang

terparah selama lima tahun terakhir. Sebelumnya, perekonomian Kabupaten Berau juga pernah mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,70 persen pada tahun 2016. Adapun pemeran utama yang menyebabkan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 adalah pertumbuhan negatif pada kategori-kategori yang memiliki peran cukup besar. Kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi ekonomi sebesar -4,49 persen. Kategori lain yang memiliki peran cukup besar tetapi tumbuh negatif pada tahun 2020 adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun produksi kelapa sawit meningkat, namun penurunan yang terjadi pada produksi jagung serta kayu masih menyebabkan kategori ini terkontraksi sebesar -3,81 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,39	6,12	6,97	2,03	-3,81
Pertambangan dan Penggalian	-2,42	2,40	-0,02	6,58	-4,49
Industri Pengolahan	-0,44	3,48	4,80	4,42	-0,45
Pengadaan Listrik dan Gas	6,81	8,12	11,88	7,80	6,32
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,59	5,88	3,32	5,73	6,02
Konstruksi	-7,92	-3,18	2,44	9,82	-9,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,65	5,35	6,28	4,08	1,60
Transportasi dan Pergudangan	-0,07	5,19	5,90	2,39	-3,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,90	6,80	6,83	5,38	-3,63
Informasi dan Komunikasi	6,55	7,82	6,12	6,22	7,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,37	1,73	4,75	3,58	0,60
Real Estate	-0,11	2,33	3,28	1,81	1,18
Jasa Perusahaan	-0,98	3,49	4,81	2,87	-5,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,14	-4,89	3,05	3,60	-5,35
Jasa Pendidikan	5,98	5,98	5,87	3,53	4,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,48	5,92	7,70	6,69	19,65

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa lainnya	6,27	5,73	5,82	5,26	-2,04
Total PDRB	-1,70	3,01	2,07	5,61	-3,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

**Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

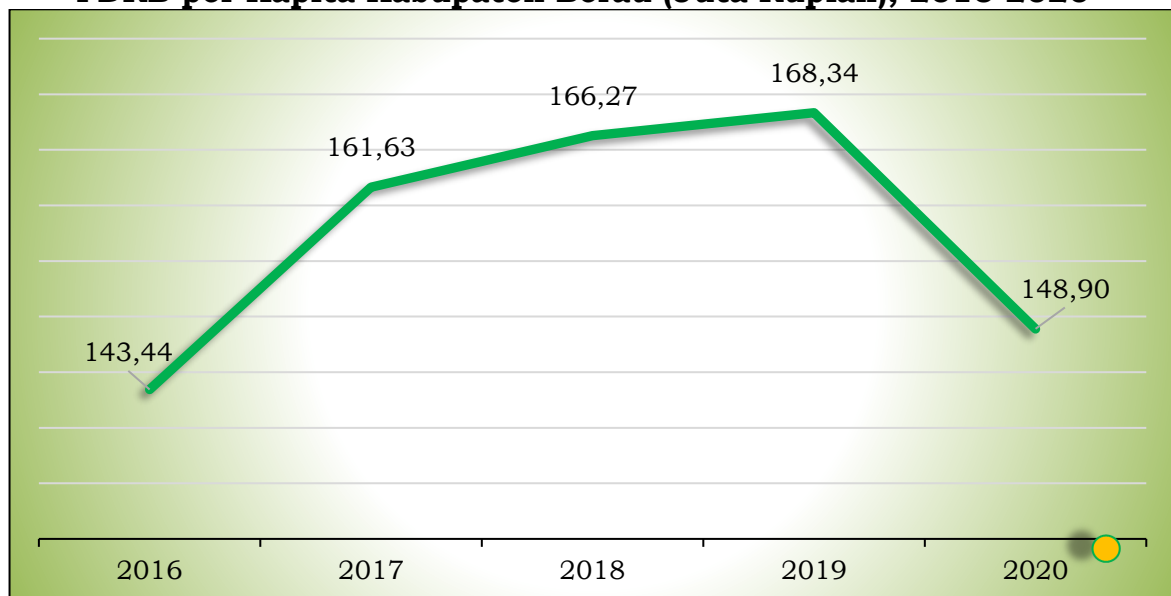
Selanjutnya, kategori transportasi dan pergudangan juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,62 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena berkurangnya barang yang dimuat melalui Pelabuhan Tanjung Redeb maupun Bandara Kalimantan, serta penurunan jumlah penumpang berangkat dari Bandara Kalimantan. Pada tahun 2020, hanya terdapat delapan kategori yang masih memiliki pertumbuhan positif dimana yang terbesar adalah kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 19,65 persen. Sebaliknya, kategori yang memiliki pertumbuhan negatif tertinggi adalah kategori konstruksi yakni sebesar -9,17 persen.

b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di suatu daerah, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar PDRB per kapita tersebut. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Untuk dapat meningkatkan nilai PDRB per kapita, suatu daerah harus dapat meningkatkan nilai PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun sesungguhnya, PDRB per kapita ini tidak serta menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki peran produktif dalam menciptakan nilai tambah. PDRB per kapita ini hanya memberikan gambaran secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan apakah penduduk tersebut benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi.

Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, PDRB per kapita Kabupaten Berau adh berlaku selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,48 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2016, besarnya PDRB per kapita sebesar 143,44 juta rupiah dan meningkat menjadi 168,34 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun selanjutnya, PDRB per kapita menurun 19,44 juta rupiah menjadi 148,90 juta rupiah sejalan dengan nilai PDRB totalnya yang juga menurun pada tahun 2020. Angka ini berarti bahwa secara ekonomi setiap penduduk di Kabupaten Berau, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar 148,90 juta rupiah selama tahun 2020. Kondisi ini disebabkan nilai nominal PDRB yang menurun sebesar 9,29 persen, sedangkan jumlah penduduk masih terus meningkat sebesar 2,55 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.8
PDRB per Kapita Kabupaten Berau (Juta Rupiah), 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.18
Perbandingan PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Timur
(Juta Rupiah), 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	139,01	160,30	171,64	167,96	157,33
Kutai Barat	150,51	175,43	192,10	197,14	158,22
Kutai Kartanegara	173,97	198,41	210,47	206,10	204,36
Kutai Timur	285,34	346,12	353,74	355,99	266,53
Berau	143,44	161,63	166,27	168,34	143,00
Penajam Paser Utara	49,24	53,77	55,70	56,81	50,66
Mahakam Ulu	82,11	88,87	95,32	103,04	85,21
Kota Balikpapan	128,12	137,92	151,30	159,91	150,51
Kota Samarinda	59,72	69,29	74,08	77,57	80,37
Kota Bontang	331,04	345,15	337,45	328,24	316,10
Kalimantan Timur	143,16	165,55	174,16	175,25	161,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

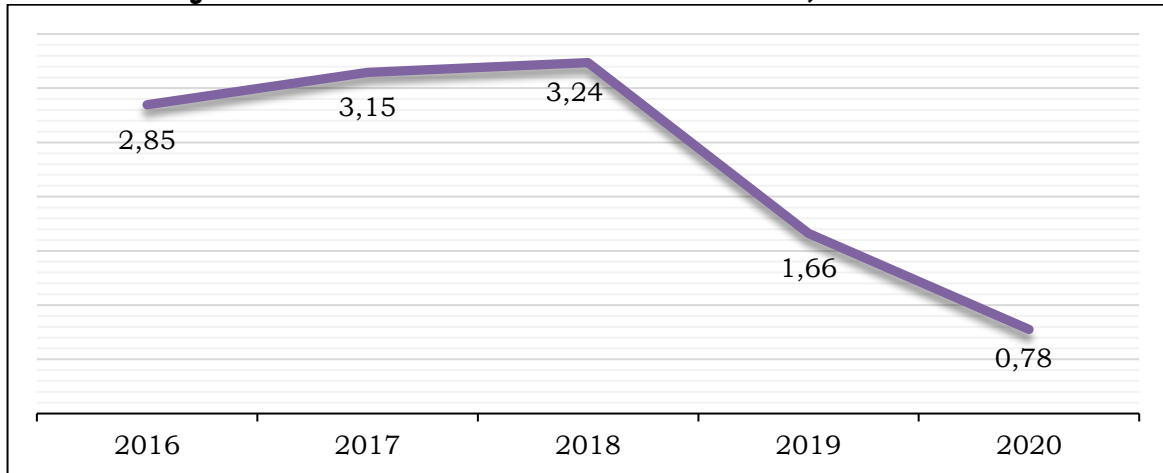
Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kabupaten Berau berada pada urutan 7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki nilai PDRB per kapita yang tertinggi yaitu sebesar 316,10 juta rupiah sedangkan yang memiliki PDRB per kapita yang terendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 50,66 juta rupiah.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan menurunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju inflasi di Kabupaten Berau menggunakan pendekatan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen kemudian meningkat menjadi 3,15 persen pada tahun 2017 dan 3,24 persen pada tahun 2018. Namun, pada dua tahun terakhir inflasi menurun menjadi masing-masing 1,66 persen pada tahun 2019 dan 0,78 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.9
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.19
Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Berau (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,62	4,91	0,01	-1,02	2,70
Pertambangan dan Penggalian	2,97	17,30	4,08	-3,64	-11,89
Industri Pengolahan	10,75	9,15	0,36	0,06	6,81
Pengadaan Listrik dan Gas	5,15	11,21	3,92	1,23	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,32	4,17	1,16	0,11	0,45
Konstruksi	5,17	3,12	5,68	2,91	1,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,51	4,98	4,98	5,04	3,30
Transportasi dan Pergudangan	3,88	4,03	3,08	1,98	-0,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	3,31	2,14	1,70	0,49
Informasi dan Komunikasi	1,85	2,94	3,16	2,39	0,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	4,43	3,44	2,14	0,91
Real Estate	0,93	5,46	2,24	2,48	0,11
Jasa Perusahaan	2,34	4,87	3,15	2,39	1,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,92	4,01	2,45	5,67	1,06
Jasa Pendidikan	4,46	2,03	3,26	2,71	4,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,49	2,38	4,16	2,20	2,91
Jasa lainnya	7,97	6,04	2,86	4,09	3,55
Total PDRB	4,22	12,33	3,48	-1,69	-6,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Adapun inflasi yang biasanya menjadi deflator dalam penghitungan PDRB biasa disebut sebagai laju indeks implisit. Pendekatan deflator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara indeks harga konsumen menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Deflator PDRB dapat digunakan sebagai *proxy* ketika indeks harga konsumen belum tersedia.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, terjadi deflasi pada deflator PDRB pada tahun 2019 dan 2020. Fluktuasi inflasi dengan menggunakan deflator PDRB ini sangat dipengaruhi oleh harga produk yang dihasilkan dari kegiatan pada kategori pertambangan dan penggalian. Hal ini disebabkan tingginya peranan kategori ini dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau. Sebagai contoh, rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) mengalami penurunan dari 77,89 US\$ per metrik ton pada tahun 2019 menjadi 58,17 US\$ per metrik ton pada tahun 2020. Hal tersebut memberikan dampak deflasi pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar 11,89 persen dan deflasi sebesar 6,14 pada total PDRB Kabupaten Berau. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dimana rata-rata HBA mengalami penurunan dari 98,96 US\$ per metrik ton pada tahun 2018 menjadi 77,89 US\$ pada tahun 2019 dan menyebabkan deflasi pada kategori pertambangan dan penggalian dan total PDRB masing-masing sebesar 3,64 persen dan 1,69 persen.

d. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk melihat ukuran inklusivitas pembangunan ekonomi, dipergunakan suatu indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar yaitu pilar pertama: pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar kedua: pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar ketiga: perluasan akses dan kesempatan. Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub pilar utama serta 21 indikator yang terangkum menjadi IPEI. Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogyanya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: kurang memuaskan (skor 1-3), memuaskan (skor 4-7), dan sangat memuaskan (skor 8-10).

Selama tahun 2015 sampai dengan 2019, posisi IPEI Kabupaten Berau menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, nilai IPEI Kabupaten Berau sebesar 5,48 atau termasuk dalam kategori memuaskan. Dibanding kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, angka ini masih di bawah Kota Balikpapan (6,19), Kota Bontang (6,08), Kota Samarinda (5,86) dan Paser (5,50). Selain itu, angka IPEI Kabupaten Berau juga lebih rendah dari nilai IPEI Provinsi Kalimantan Timur (6,27) maupun nasional (5,89). Salah satu indikasi dari nilai ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Berau meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan namun belum memberikan *multiplier effect* yang besar. Dengan demikian dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan ekonomi, perlu mempertimbangkan secara matang seberapa besar efeknya dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta memperkecil tingkat kesenjangan.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	4,93	5,21	5,29	5,36	5,50
Kutai Barat	4,64	4,86	5,03	5,15	5,26
Kutai Kartanegara	5,03	5,20	5,28	5,31	5,44
Kutai Timur	4,86	4,82	5,01	5,03	5,23
Berau	5,13	5,16	5,30	5,36	5,48
Penajam Paser Utara	5,06	5,10	5,13	5,16	5,20
Mahakam Ulu					4,72
Kota Balikpapan	6,05	6,04	6,06	6,07	6,19
Kota Samarinda	5,77	5,92	5,79	5,90	5,86
Kota Bontang	5,97	5,91	5,98	6,06	6,08
Kalimantan Timur	5,72	5,84	6,03	5,99	6,27
Nasional	5,41	5,64	5,75	5,75	5,89

Sumber: www.inklusif.bappenas.go.id.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat menguraikan gambaran umum bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau selama ini.

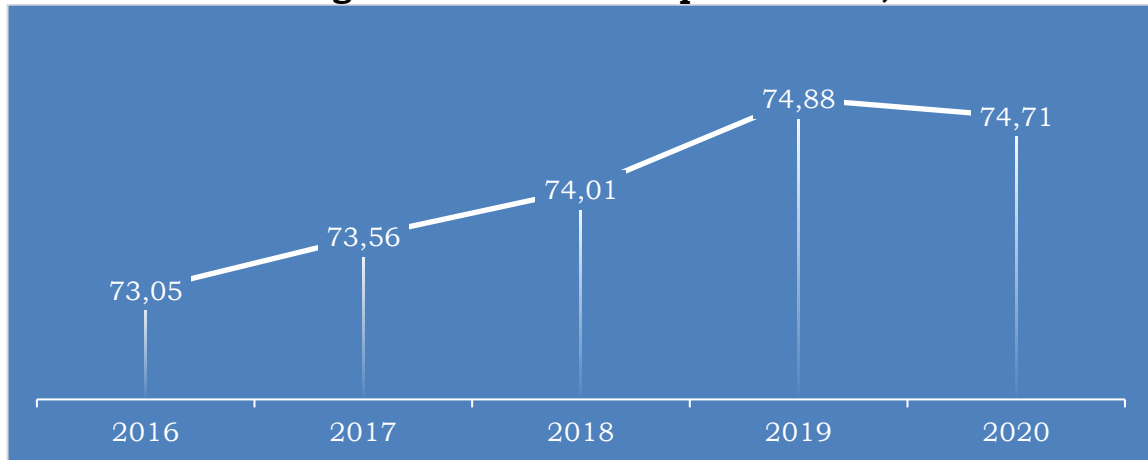
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian suatu daerah dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Pembangunan daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam hal ini, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Adapun klasifikasi pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$), “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$), “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) dan “rendah” ($IPM < 60$).

Pembangunan manusia di Kabupaten Berau terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Selama kurun waktu 2016-2020, IPM Kabupaten Berau telah meningkat 1,66 poin, dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 0,56 persen. Perkembangan ini secara umum menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Berau. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Berau mencapai 74,71, menurun sebesar 0,17 poin dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Berau telah memasuki pembangunan manusia dengan status “tinggi” yang ditunjukkan oleh nilai IPM yang selalu di atas 70.

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dari sisi komponen pembentuknya, semua komponen mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat komponen yang mengalami penurunan nilai yakni pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari 12.726 ribu rupiah per kapita per tahun menjadi 12.018 ribu rupiah per kapita per tahun. Adapun jika dilihat rata-rata kenaikan setiap tahun dari masing-masing komponen, rata-rata lama sekolah memiliki kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,04 persen, yakni dari 8,78 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,52 tahun pada tahun 2020. Sedangkan komponen angka harapan hidup memiliki rata-rata kenaikan yang paling kecil yakni sebesar 0,24 persen.

Tabel 2.21
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Berau, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,78	8,96	8,98	9,25	9,52
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,18	13,29	13,3	13,31	13,32
Pengeluaran Per Kapita (Ribuan/Kapita/Tahun)	11.675	11.843	12.207	12.726	12.018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.22
Perbandingan IPM di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	71,00	71,16	71,61	72,29	72,04
Kutai Barat	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19
Kutai Kartanegara	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
Kutai Timur	71,10	71,91	72,56	73,49	73,00
Berau	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71
Penajam Paser Utara	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41
Mahakam Ulu	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
Kota Balikpapan	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01
Kota Samarinda	78,91	79,46	79,93	80,20	80,11
Kota Bontang	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02
Kalimantan Timur	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.22 menunjukkan perbandingan capai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 adalah Kota Samarinda dengan nilai IPM 80,11, disusul oleh Kota Bontang dengan nilai IPM 80,02 dan kemudian IPM Kota Balikpapan yang sebesar 80,01 menempati urutan ke tiga. Posisi tiga teratas tersebut hampir sama setiap tahun, kecuali pada tahun 2019 dimana Kota Bontang berada pada urutan ketiga sedangkan Kota Balikpapan berada pada urutan kedua. Adapun IPM Kabupaten Berau selalu berada pada urutan keempat selama lima tahun terakhir, namun memiliki nilai IPM paling tinggi diantara kabupaten lainnya. Nilai IPM yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai capaian IPM sebesar 67,09.

b. Pendidikan

Hasil capaian suatu pembangunan akan sangat tergantung pada sumber daya manusia. Pendidikan dikatakan menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia karena melalui pendidikan manusia mampu memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mampu berkembang menjadi apa yang diinginkan. Dalam suatu proses pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa terbentuknya pendidikan yang

berkualitas harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah. Sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam menunjang kualitas belajar murid. Dalam hal ini, terdapat tiga komponen yang memiliki keterkaitan secara langsung yaitu sekolah, guru dan murid.

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, secara total terjadi penambahan jumlah sekolah SD sebanyak dua unit (disebabkan adanya penambahan tetapi ada juga pengurangan). Penambahan pada jumlah fasilitas sekolah SD juga diikuti oleh kenaikan jumlah murid sebanyak 10,58 persen yaitu dari 30.176 murid pada tahun 2016 menjadi 33.370 murid pada tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan jumlah murid setiap tahun sebesar 2,55 persen. Dengan murid yang jumlahnya terus bertambah, agar pembelajaran dapat tetap berjalan dengan efektif maka harus disertai dengan peningkatan jumlah guru. Adapun jumlah guru SD yang terdapat di Kabupaten Berau pada tahun 2020 sebanyak 2.239 orang atau bertambah 136 orang dari 2.103 orang pada tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah guru pada tahun 2020 ini menurun sebanyak 4,64 persen.

Untuk jenjang pendidikan SMP, jumlah sekolah SMP masih tetap sebanyak 56 unit dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dan jumlah guru meningkat dari 931 guru pada tahun 2016 menjadi 940 guru pada tahun 2018. Selanjutnya, jumlah sekolah bertambah sebanyak 6 unit pada tahun 2019 menjadi 62 sekolah dan bertambah lagi pada tahun 2020 menjadi 65 sekolah. Dari sisi jumlah guru, dengan penambahan jumlah sekolah juga disertai dengan penambahan jumlah guru menjadi 1.030 guru pada tahun 2019 dan 1.041 guru pada tahun 2020. Meskipun penambahan jumlah sekolah SMP hanya terjadi pada tahun 2019 dan 2020, namun jumlah murid terus bertambah dengan rata-rata peningkatan setiap tahun masing-masing sebesar 2,16 persen (bertambah 1.095 murid) selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

Jika jumlah sekolah SD dan SMP masih mengalami penambahan (meskipun sedikit), untuk sekolah SMA masih belum ada penambahan dan bahkan menurun. Namun, penurunan tersebut bukan disebabkan karena bangunan sekolahnya sudah tidak ada lagi, tetapi karena minat para siswa untuk bersekolah di sekolah tersebut sangatlah rendah (sekolah swasta) menyebabkan sekolah tersebut terpaksa tutup. Meskipun demikian, jumlah murid yang ditampung oleh sekolah mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 24,60 persen yakni dari 9.147 murid pada tahun 2016 menjadi 11.397 murid pada tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 5,65 persen. Sedangkan jumlah guru SMA meningkat dari 731 guru pada tahun 2016 menjadi 816 guru pada tahun 2020 (meningkat 11,63 persen, lebih kecil dibandingkan peningkatan jumlah murid). Selanjutnya, seperti halnya jumlah guru SMP yang bertambah banyak pada tahun 2019, jumlah guru SMA juga bertambah banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 63 guru dan pada tahun 2020 masih bertambah lagi sebanyak 31 guru.

Tabel 2.23
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Berau, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar (SD)/Sederajat					
Sekolah	170	170	171	173	173
Guru	2.103	2.242	2.275	2.348	2.239
Murid	30.176	30.818	31.567	32.766	33.370
Rasio Murid-Sekolah	177,51	181,28	184,60	189,40	192,89
Rasio Murid-Guru	14,35	13,75	13,88	13,95	14,90
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat					
Sekolah	56	56	56	62	65
Guru	931	936	940	1.030	1.041
Murid	12.242	12.595	12.819	13.194	13.337
Rasio Murid-Sekolah	218,61	224,91	228,91	212,81	205,18
Rasio Murid-Guru	13,15	13,46	13,64	12,81	12,81
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat					
Sekolah	37	37	36	36	36
Guru	731	734	722	785	816
Murid	9.147	9.777	10.277	10.792	11.397
Rasio Murid-Sekolah	247,22	264,24	285,47	299,78	316,58
Rasio Murid-Guru	12,51	13,32	14,23	13,75	13,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, diolah.

Adanya perkembangan jumlah sekolah murid dan sekolah dapat mempengaruhi indikator rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru. Pada tahun 2020, besarnya rasio murid-sekolah jenjang SD sebesar 192,89 yang berarti bahwa rata-rata dari setiap SD di Kabupaten Berau dapat menampung sekitar 192 sampai 193 murid. Selanjutnya rasio murid-guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin sedikit murid yang ditangani seorang guru cenderung semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap muridnya. Sedangkan banyaknya murid yang menjadi beban mengajar seorang guru SD adalah sebanyak 14 sampai 15 murid di setiap kelas dengan nilai rasio murid-guru sebesar 14,90. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, angka rasio murid-sekolah jenjang SMP sebesar 205,18 yang bermakna bahwa rata-rata dari setiap SMP di Kabupaten Berau dapat menampung sekitar 205 sampai 206 murid. Angka ini merupakan yang terkecil selama lima tahun terakhir. Pada tingkat SMA, rata-rata banyaknya murid yang di tampung setiap sekolah SMA di Kabupaten Berau pada tahun 2020 adalah 316 sampai 317 murid. Angka ini merupakan yang tertinggi karena rasio murid-sekolah untuk jenjang SMA terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah karena tidak ada penambahan jumlah sekolah, sedangkan jumlah murid terus mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Di sisi lain, beban mengajar setiap guru kembali meningkat yang ditunjukkan oleh rasio murid guru yang naik dari 13,75 pada tahun 2019 menjadi 13,97 pada tahun 2020.

c. Kesehatan

Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan. Sumber daya manusia yang besar namun tidak diimbangi dengan kualitas

kesehatan yang baik justru akan menjadi beban pembangunan. Setiap kegiatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan serta dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya upaya tersebut, dibutuhkan sumber daya di bidang kesehatan yang salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan diantaranya dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan ketersediaan, kemudahan dan keterjangkauan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk akan dapat segera diatasi. Namun, hal tersebut juga harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tabel 2.24
Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Berau, 2016-2020

Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	1	2	2	2	2
Puskesmas Induk	19	21	21	21	21
Puskesmas Pembantu	109	109	109	112	112
Poskesdes	66	66	66	67	67
Apotek	31	47	58	62	62
Unit Transfusi Darah	1	1	1	1	1
Laboratorium Kesehatan	1	1	3	4	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk dapat menjadi tolok ukur bahwa infrastruktur di bidang kesehatan telah tercukupi atau tidak. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk, pemerintah Kabupaten Berau terus mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Berau yang terdiri atas satu unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas C yang merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unit Rumah

Sakit Pratama Talisayan yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan. Untuk puskesmas induk, selama lima tahun terakhir terdapat penambahan sebanyak 2 unit, dimana pada tahun 2016 berjumlah 19 unit dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 21 unit. Unit puskesmas ini tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

Adapun untuk lingkup di bawah kecamatan, terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berjumlah sebanyak 112 unit pada tahun 2020. Pustu sendiri adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) pustu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kampung/kelurahan. Penanggung jawab pustu adalah seorang perawat atau bidan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Termasuk dalam Upaya Kesehatan yang Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Pada tahun 2019, sebanyak 67 kampung dari total 100 kampung di Kabupaten Berau telah memiliki Poskesdes.

Tabel 2.25
Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Berau, 2016-2020

Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter Umum	54	75	71	74	86
Dokter Spesialis	19	19	20	19	27
Dokter Gigi	25	23	23	19	18
Bidan	266	277	294	310	339
Perawat	603	616	612	621	661
Tenaga Teknis Farmasi	41	39	42	28	43
Apoteker	20	29	33	37	40
Tenaga Kesehatan Lainnya	144	161	168	171	200
Total	1.172	1.239	1.263	1.279	1.414

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Pembangunan kesehatan harus terlaksana secara maksimal apabila kebutuhan sumber daya kesehatan berupa sarana, tenaga dan pembiayaan dapat terpenuhi. Berdasarkan Tabel 2.25 dapat terlihat bahwa total tenaga kesehatan di Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari 1.279 orang pada tahun 2019 menjadi 1.414 orang pada tahun 2020. Hampir semua jenis tenaga kesehatan mengalami kenaikan, kecuali dokter gigi yang mengalami penurunan dari 19 orang pada tahun 2019 menjadi 18 orang pada tahun 2020. Secara nominal, penambahan tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat yang mencapai sebanyak 40 orang. Namun, secara persentase jumlah penambahan terbanyak adalah dokter spesialis yang meningkat 42,11 persen, yakni dari 19 orang pada tahun 2019 menjadi 27 orang pada tahun 2020.

Indikator berikutnya untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah melalui angka kesakitan (morbiditas). Setiap individu memiliki daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ketika mengalami keluhan kesehatan, terdapat penduduk yang merasa tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Tetapi terdapat pula penduduk yang merasa jika keluhan kesehatan yang dialami mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya. Adapun keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut; penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak memiliki keluhan); kecelakaan; kriminalitas atau keluhan lainnya. Dalam konsep BPS, kondisi ketika keluhan kesehatan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari disebut *morbidity rate* atau angka kesakitan.

Tabel 2.26
Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	9,04	8,33	8,70
Kutai Barat	13,78	13,08	13,45
Kutai Kartanegara	7,41	6,79	7,12
Kutai Timur	7,44	8,40	7,88
Berau	14,63	16,85	15,66
Penajam Paser Utara	7,60	8,85	8,19
Mahakam Ulu	9,03	7,89	8,49
Kota Balikpapan	7,06	8,56	7,78
Kota Samarinda	8,85	10,42	9,61
Kota Bontang	9,76	11,32	10,49
Kalimantan Timur	8,66	9,41	9,02

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Berdasarkan Tabel 2.26 dapat terlihat bahwa dari penduduk Kabupaten Berau yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2020, terdapat sebanyak 15,66 persen penduduk yang merasa bahwa keluhannya tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka kesakitan penduduk perempuan sebesar 16,85 persen, masih lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang sebesar 14,63 persen. Angka kesakitan Kabupaten Berau pada tahun 2020, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sebaliknya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki angka kesakitan yang paling rendah yaitu sebesar 7,12 persen.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Kebudayaan

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Berau selain dari sumber daya manusia adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Berau memiliki aset yang cukup beragam. Pada tahun 2020, jumlah situs dan Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Berau mencapai 635 unit, tidak

ada penambahan sejak tahun 2016. BCB adalah benda bergerak maupun tidak bergerak hasil karya manusia yang berusia 50 tahun atau lebih, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. BCB ini dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan pariwisata, pembelajaran dan penelitian. Jumlah kampung adat/budaya juga tidak mengalami penambahan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 6 kampung. Sedangkan kampung wisata, yang pada tahun 2016 hanya sebanyak 1 kampung, jumlahnya terus bertambah hingga menjadi sebanyak 9 kampung pada tahun 2020.

**Tabel 2.27
Aset Kebudayaan Kabupaten Berau, 2016-2020**

No.	Aset Budaya	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kampung Adat/Budaya	Kampung	6	6	6	6	6
2	Kampung Wisata	Kampung	1	1	6	9	9
3	Situs Dan Benda Cagar Budaya	Unit	635	635	635	635	635
4	Kelompok Kesenian	Kelompok	3	3	3	3	3
5	Permainan Tradisional	Jenis	-	-	-	-	-
6	Lembaga Budaya	Lembaga	3	3	3	3	3
7	Upacara Tradisional	Event	1	1	1	2	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

b. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Kesadaran akan pentingnya seni, budaya dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan

kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam kancah nasional dan internasional.

Ketersediaan fasilitas penunjang bagi organisasi pemuda dan olahraga di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Berau pada tahun 2015 dapat terlihat pada tabel 2.28 yaitu jumlah water boom sebanyak 4 unit, 1 gedung serba guna, 1 lapangan pemuda, 5 lapangan tenis cendana, serta 1 lapangan sepak bola.

Tabel 2.28
Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau, 2020

No.	Nama Aset	Lokasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Water Boom/Kolam Renang	Jl. Gatot Subroto, Tanjung Redeb	4
2	Gedung Serba Guna/Graha Pemuda	Jl. Mangga I, Tanjung Redeb	1
3	Lapangan Pemuda	Jl. Mangga I, Tanjung Redeb	1
4	Lapangan Tenis Cendana	Jl. Cendana, Tanjung Redeb	5
5	Lapangan Sepak Bola Batiwakal	Jl. Murjani I, Tanjung Redeb	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini mencakup fokus urusan layanan wajib yang mencakup dua urusan pembangunan daerah, yakni: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan fokus urusan pilihan; serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

a. Urusan Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat bagaimana kondisi keterjangkauan pendidikan bagi penduduk usia sekolah dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS yang tinggi menunjukkan bahwa terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum, namun meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah dan sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan lembaga pendidikan dalam menyerap warga belajar semakin meningkat. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah di
Kabupaten Berau, 2016-2020

Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7-12	97,65	98,82	99,23	99,25	99,37
13-15	97,15	97,92	98,03	97,80	97,59
16-18	75,55	84,77	77,07	79,23	81,38
19-24	19,93	17,70	15,24	14,85	14,44

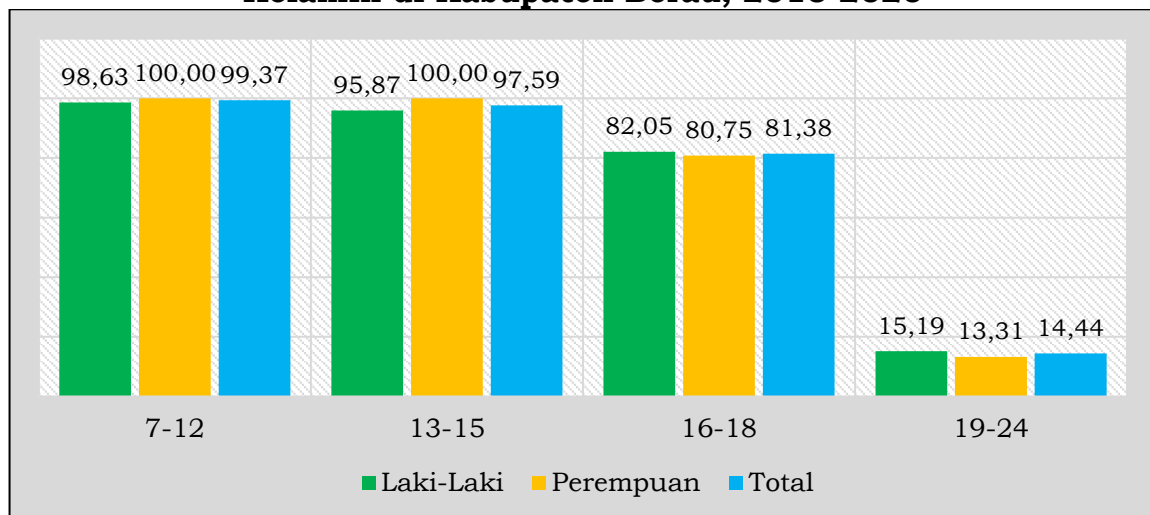
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, APS penduduk usia 7-12 terus menunjukkan peningkatan hingga menjadi 99,37 persen pada tahun 2020. Nilai APS tersebut memberikan penjelasan bahwa dari total penduduk di Kabupaten Berau yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99,37 persen yang sedang bersekolah dan hanya 0,63 persen lainnya yang tidak bersekolah. APS yang sangat tinggi juga ditemukan pada penduduk usia 13-15 tahun dengan nilai yang mendekati nilai APS penduduk usia 7-12 tahun. Dapat dikatakan bahwa hampir semua penduduk berusia 7-12 tahun tersebut masih bersekolah. Adapun pola perkembangan nilai APS penduduk usia 13-15 tahun cenderung berfluktuasi dan menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, APS penduduk usia 13-15 sebesar 97,59 persen. Berdasarkan tabel 2.29 dapat dilihat bahwa pada tahun semakin tinggi kelompok usia bersekolah, nilai APS semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia penduduk Kabupaten Berau, maka penduduk yang bersekolah juga semakin sedikit. Pada penduduk berusia 19-24 tahun, jumlah penduduk yang masih bersekolah terus mengalami penurunan dari 19,93 persen pada tahun 2016 menjadi 14,44 persen pada tahun 2020.

Dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2020 nilai APS perempuan pada kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Sedangkan pada kelompok usia 19-24 tahun APS laki-laki justru yang lebih tinggi daripada APS perempuan dengan selisih nilai 1,88. Hal ini menunjukkan

bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Berau memiliki partisipasi bersekolah yang lebih besar dari penduduk perempuan.

Gambar 2.11
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Indikator pendidikan lainnya yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk bersekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini menunjukkan persentase penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

APM Kabupaten Berau pada tahun 2018 kurang dari 100 persen. APM jenjang SD satu-satunya APM yang nilainya mendekati 100 persen, yaitu 99,23 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar bersekolah secara tepat waktu. Nilai APM

sebesar 99,23 persen dapat diartikan bahwa sekitar 99 persen penduduk di Kabupaten Berau tahun 2018 yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD.

Tabel 2.30
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Berau, 2016-2020**

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/Sederajat	92,05	96,41	99,23	99,06	99,04
SMP/Sederajat	81,41	81,44	79,19	78,86	79,64
SMA/Sederajat	66,20	68,34	71,32	70,82	71,19
PT	9,76	12,14	13,26	12,54	11,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai APM jenjang SD berada dalam kisaran 92 sampai dengan 99 persen. Seperti halnya APS, APM pada jenjang SD yang juga selalu memiliki nilai tertinggi. Tercatat APM Kabupaten Berau pada jenjang SD di tahun 2020 sebesar 99,04 persen, menurun dari dua tahun sebelumnya yakni dari 99,23 persen pada tahun 2018 dan 99,06 persen pada tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dari 100 penduduk yang berusia 7-12 tahun, terdapat sebanyak 99 murid yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD sedangkan sisanya sebanyak 1 murid masih bersekolah SD dengan usia diluar rentang 7-12 tahun yang kemungkinan mengalami tinggal kelas, terlambat masuk SD atau terlalu cepat masuk SD. APM jenjang PT juga menurun selama tiga tahun terakhir seperti halnya APM SD yakni dengan angka sebesar 11,43 persen pada tahun 2020.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk di suatu daerah dapat menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan dalam menilai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan

berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Kemampuan tersebut diukur menggunakan indikator yang disebut dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Batas usia 15 tahun ke atas ditentukan karena kelompok usia tersebut adalah penduduk usia dewasa yang diasumsikan seharusnya sudah dapat membaca dan menulis dalam huruf tertentu. Adapun istilah kebalikan dari melak huruf adalah buta huruf yang menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan. Buta huruf dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya.

Pada tahun 2020 AMH penduduk Kabupaten Berau telah mencapai 97,87 persen, menurun 0,80 persen dibandingkan dengan AMH tahun 2019. Indikator tersebut memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 97 penduduk diantaranya telah mampu membaca dan menulis huruf tertentu dan hanya sekitar 3 penduduk saja yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, AMH tahun 2020 ini merupakan yang paling rendah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, selama 2016 sampai dengan 2020, AMH penduduk laki-laki selalu lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Adapun perbedaan AMH tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang bahkan mencapai 2,56 persen.

Tabel 2.31
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	98,89	99,15	99,45	99,14	99,03
Perempuan	98,12	98,82	98,49	98,11	96,46
Total	98,54	99,00	99,01	98,67	97,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Jika dilihat menurut jenis aksara, yang paling banyak bisa dibaca dan ditulis oleh penduduk Kabupaten Berau adalah huruf latin. Hal ini karena huruf latin merupakan aksara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aktivitas. Termasuk juga menjadi pembelajaran utama yang diberikan pada tingkat sekolah dasar yakni membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan untuk jenis aksara arab, masih kurang dari 30 persen penduduk yang dapat membaca dan menulisnya.

Tabel 2.32
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Berau, 2016-2020

Kemampuan Membaca dan Menulis	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	98,89	96,40	97,77
Huruf Arab	26,28	29,00	27,51
Huruf Lainnya	1,78	2,24	1,99
Buta Huruf	0,97	3,54	2,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Berdasarkan Tabel 2.33 juga dapat dilihat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Berau pada tahun 2020 sebesar 2,13 persen yang artinya dari 100 penduduk hanya terdapat 2 penduduk saja yang tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini dapat menjadi suatu bahan evaluasi bahwa program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka pemberantasan buta huruf dapat terlaksana dengan baik. Dengan angka huruf sebesar 2,13 persen tersebut, Kabupaten Berau memiliki angka buta huruf yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki angka buta huruf yang paling kecil yaitu sebesar 0,65 persen. Adapun secara umum, tingkat buta huruf di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,03 persen.

Tabel 2.33

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	Kemampuan Membaca dan Menulis			Buta Huruf
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	98,60	18,44	0,46	1,30
Kutai Barat	98,35	13,24	0,18	1,61
Kutai Kartanegara	99,09	24,70	0,46	0,91
Kutai Timur	98,53	28,26	2,80	1,15
Berau	97,77	27,51	1,99	2,13
Penajam Paser Utara	98,10	14,40	1,13	1,90
Mahakam Ulu	98,02	5,85	0,00	1,98
Kota Balikpapan	99,10	26,70	1,46	0,80
Kota Samarinda	99,28	30,80	3,12	0,65
Kota Bontang	98,99	20,32	3,15	0,90
Kalimantan Timur	98,88	25,34	1,74	1,03

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Tabel 2.34

Persentase Penduduk Berusia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/ Kota	Tidak/ Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah					Tidak Bersekolah lagi
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT/ Sederajat	Total Masih Bersekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	0,00	35,93	17,72	15,19	3,71	72,55	27,45
Kutai Barat	0,32	38,13	18,63	14,84	4,85	76,45	23,23
Kutai Kartanegara	0,02	35,76	14,84	14,62	5,80	71,02	28,96
Kutai Timur	0,24	38,09	14,57	14,57	2,86	70,09	29,67
Berau	0,24	37,85	13,01	15,39	5,07	71,32	28,44
Penajam Paser Utara	0,08	38,77	14,06	14,20	2,69	69,72	30,20
Mahakam Ulu	0,78	45,03	18,64	9,80	2,25	75,72	23,50
Kota Balikpapan	0,07	34,64	14,23	15,21	9,96	74,04	25,89
Kota Samarinda	0,17	30,73	13,36	15,60	18,05	77,74	22,09
Kota Bontang	0,00	41,60	18,97	13,46	3,24	77,27	22,73
Kalimantan Timur	0,12	35,32	14,80	14,94	8,57	73,63	26,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Tabel 2.34 memberikan gambaran bagaimana status sekolah dari penduduk yang sesungguhnya berada pada rentang usia sekolah (usia 7-24 tahun). Pada tahun 2020, di Kabupaten Berau masih terdapat sebanyak 0,24 persen penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah. Dari tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa persentase tertinggi dari status pendidikan penduduk adalah status masih bersekolah yang berada dalam kisaran 69 sampai dengan 77 untuk semua kabupaten/kota. Adapun dari penduduk yang berstatus masih sekolah tersebut, paling banyak adalah berstatus masih bersekolah SD. Di Kabupaten Berau, penduduk yang berstatus masih sekolah sebanyak 71,32 persen dimana yang terbanyak adalah masih bersekolah SD sebesar 37,85 persen. Untuk penduduk yang berstatus masih sekolah di perguruan tinggi yang terbanyak adalah Kota Samarinda yaitu sebesar 18,05 persen. Hal ini wajar karena banyak terdapat perguruan tinggi di wilayah tersebut. Penduduk masih bersekolah perguruan tinggi di Kabupaten Berau berada pada urutan ke empat setelah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu indikator kualitas tingkat pendidikan penduduk adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Pada 2016, persentase penduduk Kabupaten Berau yang paling banyak adalah tamatan SD/ sederajat yaitu sebanyak 28,10 persen dan 32,01 persen. Kemudian sejak tahun 2017, telah terjadi perubahan struktur penduduk dimana penduduk berijazah SMA/ sederajat menjadi yang paling dominan. Adapun untuk penduduk yang bertamatan perguruan tinggi merupakan yang paling sedikit, karena lokasi dan biaya masih menjadi kendala dalam keputusan bersekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya sarana pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Berau menyebabkan penduduk berijazah perguruan tinggi meningkat dan bahkan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 13,05 persen. Sebaliknya,

persentase penduduk di Kabupaten Berau yang tidak memiliki ijazah menurun pada tahun 2020.

Tabel 2.35
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Berau, 2016-2020

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Memiliki Ijazah	12,18	13,04	17,44	12,85	9,39
SD/Sederajat	32,01	23,43	21,45	19,77	21,64
SMP/Sederajat	14,36	23,33	19,81	19,87	21,09
SMA/Sederajat	30,98	30,15	29,20	36,42	35,92
Perguruan Tinggi (PT)	10,47	10,04	12,10	11,09	11,96
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Secara umum di Provinsi Kalimantan Timur, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berijazah SMA/ sederajat yaitu sebanyak 37,70 persen. Pada setiap kabupaten/kota, persentase penduduk yang terbanyak juga berijazah SMA/ sederajat, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu dimana persentase terbanyak adalah penduduk berijazah SD/ sederajat yaitu 29,25 persen. Kabupaten Berau memiliki sebanyak 35,92 persen penduduk berijazah SMA/ sederajat dan berada pada urutan ke empat tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Demikian halnya untuk penduduk berijazah perguruan tinggi juga berada pada urutan keempat tertinggi. Jika persentase penduduk masih bersekolah di perguruan tinggi yang paling tinggi adalah di Kota Samarinda, penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi dengan persentase paling tinggi justru terdapat di Kota Balikpapan. Hal ini dapat disebabkan karena setelah selesai menempuh pendidikan di Kota Samarinda, para mahasiswa kembali ke daerah masing-masing.

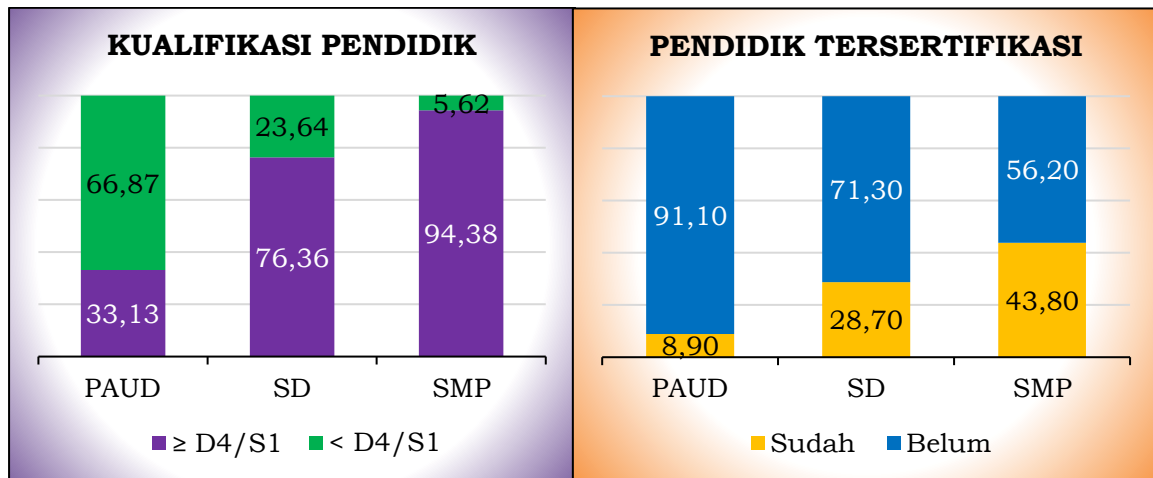
Tabel 2.36
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota	Tidak Memiliki Ijazah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	14,98	26,03	23,93	27,47	7,59
Kutai Barat	15,19	27,79	18,69	30,95	7,38
Kutai Kartanegara	10,26	22,01	22,92	33,73	11,08
Kutai Timur	14,15	21,06	21,29	33,98	9,52
Berau	9,39	21,64	21,09	35,92	11,96
Penajam Paser Utara	16,77	26,81	21,24	28,35	6,83
Mahakam Ulu	18,10	29,25	16,87	26,19	9,59
Kota Balikpapan	6,36	13,85	19,64	48,06	12,09
Kota Samarinda	5,18	18,02	21,31	40,57	14,92
Kota Bontang	6,43	13,58	16,80	44,20	18,99
Kalimantan Timur	9,40	19,88	21,19	37,70	11,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dari sisi tenaga kualitas tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Berau pada tahun 2020, untuk tingkat SD dan SMP sudah lebih dari 50 persen guru merupakan tamatan D4/S1 atau yang lebih tinggi yaitu dengan persentase masing-masing 76,36 persen dan 94,38 persen. Hanya pendidik untuk tingkat PAUD yang sebagian besar gurunya masih berpendidikan di bawah D4/S1, hanya sebanyak 33,13 persen yang berpendidikan minimal D4/S1. Meskipun demikian, kondisi yang berbeda terjadi pada sertifikasi tenaga pendidik. Walaupun sebagian besar jenjang pendidikan tenaga pendidik sudah bagus, namun masih sedikit tenaga pendidik yang tersertifikasi. Untuk semua jenjang pendidikan, lebih dari 50 persen tenaga pendidik belum bersertifikat pendidik sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen.

Gambar 2.12
Kualifikasi Pendidik di Kabupaten Berau, 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.

b. Urusan Kesehatan

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penduduk dapat menjadi tolok ukur bahwa infrastruktur di bidang kesehatan telah tercukupi atau tidak. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Berau yang terdiri atas satu unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas C yang merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unit Rumah Sakit Pratama Talisayan yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan. Dua rumah sakit tersebut memiliki rasio per 100.000 penduduk sebesar 0,84 pada tahun 2020. Angka ini berarti jika terdapat 100.000 orang yang datang ke dua rumah sakit tersebut, jumlah yang dapat terlayani sebanyak 84.000 orang. Rasio dari rumah sakit ini terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 karena jumlah rumah sakit tetap sebanyak 2 unit, sedangkan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.37
Rasio Per 100.000 Penduduk dan Jangkauan Pelayanan dari Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Berau, 2020

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan	Rasio per 100.000 Penduduk	Jangkauan Pelayanan
(1)	(6)	(6)
Fasilitas Kesehatan		
Rumah Sakit	0,84	119.107
Puskesmas Induk	8,82	11.344
Puskesmas Pembantu	47,02	2.127
Poskesdes	28,13	3.555
Apotek	26,03	3.842
Unit Transfusi Darah	0,42	238.214
Laboratorium Kesehatan	1,68	59.554
Tenaga Kesehatan		
Dokter Umum	36,10	2.770
Dokter Spesialis	11,33	8.823
Dokter Gigi	7,56	13.234
Bidan	142,31	703
Perawat	277,48	360
Tenaga Teknis Farmasi	18,05	5.540
Apoteker	16,79	5.955
Tenaga Kesehatan Lainnya	83,96	1.191

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, diolah.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau penduduk di masing-masing kecamatan adalah puskesmas induk. Seperti halnya rumah sakit, karena tidak adanya penambahan jumlah unit, rasio per 100.000 penduduk dari fasilitas ini juga menurun dalam empat tahun terakhir atau juga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap puskesmas semakin meningkat. Pada tahun 2020, dari total penduduk Kabupaten Berau, secara rata-rata yang harus dilayani oleh setiap puskesmas sebanyak 11.343 penduduk. Kondisi jangkauan ini dapat dikatakan ideal karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016, perbandingan ideal puskesmas induk terhadap penduduk adalah satu banding 16.000.

Dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, perbandingan jumlah dokter umum dengan jumlah penduduk di Kabupaten Berau pada tahun 2020 masih belum ideal. Dengan jumlah dokter umum sebanyak 86 orang dan jumlah penduduk mencapai 238.214 jiwa, satu dokter umum harus

melayani 2.770 penduduk. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016, perbandingan ideal dokter umum dan penduduk adalah satu banding 2.500. Sedangkan untuk dokter spesialis, dengan kondisi perbandingan yang masih dibawah 1: 16.000, dapat dikatakan bahwa jangkauan dokter spesialis di Kabupaten Berau masih ideal. Namun, perlu diingat bahwa dokter spesialis yang ada di Kabupaten Berau belum tersebar merata atau hanya terdapat di daerah perkotaan saja.

Jangkauan pelayanan tenaga kesehatan yang juga ideal adalah tenaga kesehatan bidan yaitu sebesar 703 pada tahun 2020. Artinya, bahwa dari total penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2020, secara rata-rata yang harus dilayani oleh satu orang bidan adalah sebanyak 703 penduduk. Jangkauan pelayanan bidan yang semakin menurun dari tahun 2016 sampai dengan 2020, menunjukkan suatu kemajuan karena beban pelayanan bidan terhadap penduduk menjadi semakin sedikit. Tenaga kesehatan bidan ini memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan serta persalinan ibu hamil.

Dalam bidang pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan berbagai antisipasi terhadap penyebaran penyakit terutama yang pernah menjadi wabah dalam nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam perkembangan anak, khususnya yang masih berusia di bawah lima tahun, perlu diberikan imunisasi untuk memberikan kekebalan balita terhadap berbagai penyakit. Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, lebih dari 90 persen balita sudah pernah diberikan imunisasi BCG yang diberikan pada bayi usia 1 bulan. Untuk pemberian imunisasi jenis ini memiliki persentase tertinggi dibandingkan jenis imunisasi lainnya yaitu sebanyak 90,12 persen pada tahun 2020. Adapun dari berbagai jenis imunisasi, persentase bayi yang pernah diberikan imunisasi campak adalah yang paling sedikit yaitu sebanyak 62,09 persen pada tahun 2020. Padahal sesungguhnya campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan

dengan komitmen Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita. Namun, angka yang kecil tersebut tidak serta merta bahwa balita tidak diberikan imunisasi campak, tetapi ada kemungkinan juga bahwa masih terdapat balita yang belum mencapai usia untuk diberikan imunisasi campak.

Tabel 2.38
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut
Jenis Imunisasi di Kabupaten Berau, 2016-2020

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BCG	91,95	90,28	N/A	92,92	90,12
Polio	91,46	91,51	N/A	92,88	89,87
DPT	87,60	86,00	N/A	85,60	79,94
HB	92,08	79,72	N/A	88,58	83,36
Campak/Morbili	80,21	61,57	N/A	75,16	62,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan imunisasi di Kabupaten Berau masih lebih rendah dibandingkan dengan pemberian imunisasi secara umum di Provinsi Kalimantan Timur untuk semua jenis imunisasi. Bahkan untuk jenis imunisasi DPT dan campak, Kabupaten Berau memiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.39
Perbandingan Pemberian Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi
di Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Kabupaten/Kota	BCG	Polio	DPT	HB	Campak/ Morbili
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	89,12	90,75	85,90	81,22	67,40
Kutai Barat	94,79	93,40	88,76	91,94	76,43
Kutai Kartanegara	86,18	88,76	83,38	88,50	66,14
Kutai Timur	89,51	89,02	80,32	83,21	67,28
Berau	90,12	89,87	79,94	83,36	62,09
Penajam Paser Utara	91,83	94,24	89,79	89,41	76,83

Kabupaten/Kota	BCG	Polio	DPT	HB	Campak/ Morbili
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mahakam Ulu	94,23	93,96	91,84	91,95	83,39
Kota Balikpapan	94,71	96,53	92,91	97,19	67,77
Kota Samarinda	94,74	94,50	89,28	91,95	71,47
Kota Bontang	95,24	97,38	94,24	95,92	77,18
Kalimantan Timur	91,52	92,54	87,08	89,86	68,86

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Tabel 2.40
Jumlah PUS dan Peserta KB, 2016-2020

Uraian	2016	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pasangan Usia Subur (PUS)	38.727	30.668	38.568	45.396	44.099
Peserta KB	33.157	26.352	32.418	38.642	38.897
- IUD	1.931	1.758	2.153	2.548	2.796
- MOP	15	12	12	16	15
- MOW	861	955	1.237	1.437	1.681
- Implan	1.897	1.361	2.119	3.085	3.811
- Kondom	773	717	756	834	864
- Suntik	18.038	14.002	17.780	20.849	20.183
- Pil	9.642	7.547	8.361	9.873	9.547

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Selanjutnya, indikator kesehatan terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan pemerintah adalah program Keluarga Berencana (KB). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mencatat terdapat sebanyak 44.099 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2020. Jumlah ini menurun sebanyak 1.297 PUS dari tahun 2019 yang sebanyak 45.396 PUS. Namun dari sisi pengguna KB, terdapat kenaikan sebesar 0,66 persen peserta KB yakni dari 38.642 peserta pada tahun 2019 menjadi 38.897 peserta pada tahun 2020. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh PUS di Kabupaten Berau tidak mengalami perubahan yaitu jenis suntik yang mencapai 20.183 peserta atau 51,89 persen dari total peserta KB pada tahun 2020. Adapun jenis KB yang pesertanya paling sedikit adalah

Metode Operasi Pria (MOP) atau lebih dikenal dengan istilah vasektomi yang hanya sebanyak 15 peserta pada tahun 2020.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembangunan daerah, seperti pemenuhan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, drainase, prasarana SDA kewenangan Kabupaten (embung, irigasi, bendungan) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Oleh karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan, baik dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi jalan. Hal ini karena jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah, khususnya untuk transportasi darat.

Infrastruktur jalan memiliki peran penting untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Peran tersebut dinikmati oleh para pelaku ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun distributor. Dengan kondisi jalan yang baik maka akan mampu mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, harga barang dan jasa menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah. Menurut tingkat kewenangan pemerintah, Kabupaten Berau memiliki jalan yang terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat (disebut jalan negara), kewenangan pemerintah provinsi (disebut jalan provinsi) dan kewenangan pemerintah kabupaten (disebut jalan kabupaten). Sampai dengan tahun 2020, pemerintah telah membangun jalan sepanjang 2.248,36 km yang terdiri dari 1.686,08 km jalan kabupaten, 268,68 km jalan provinsi dan 362,68 km jalan negara. Menurut kondisi jalan, sepanjang 633,36 km jalan di Kabupaten Berau (28,17 persen) dalam kondisi baik dan 38,15 persen dalam kondisi sedang. Selain itu, masih terdapat sepanjang 550,71 km

dan 206,54 km jalan, yang pada tahun 2020 kondisinya rusak dan rusak berat.

**Tabel 2.41
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Berau (Km), 2017-2020**

Uraian	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurut Tipe				
Jalan Negara	362,68	362,68	362,68	362,68
Jalan Provinsi	170,60	199,60	199,60	265,68
Jalan Kabupaten	1.686,08	1.686,08	1.686,08	1.686,08
Jumlah	2.219,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36
Menurut Jenis Permukaan				
Aspal	851,49	897,27	956,41	
Kerikil	20,61	55,05	1.180,66	
Tanah	1.243,52	1.191,77	0,00	
Beton	103,75	104,27	111,30	
Tidak Diperinci	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	2.219,36	2.248,36	2.248,36	
Menurut Kondisi Jalan				
Baik	795,92	635,46	567,43	696,41
Sedang	583,06	857,75	905,65	706,31
Rusak	709,29	541,21	550,72	528,83
Rusak Berat	131,09	213,94	224,57	214,22
Tidak Diperinci	0,00	0,00	0,00	102,59
Jumlah	2.219,36	2.248,36	2.248,36	2.248,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau, UPTD Dinas Pekerjaan Umum Wilayah III Kalimantan Timur dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.

Menurut jenis permukaan, pada tahun 2019 jalan di Kabupaten Berau yang sudah beraspal mencapai 956,41 km dan yang dicor atau beton sudah sebanyak 111,30 km. Kondisi jalan yang seperti ini mempermudah arus baik dalam kondisi hujan maupun cerah. Adapun jenis jalan yang paling banyak berada di Kabupaten Berau adalah jenis jalan kerikil yaitu sepanjang 1.180,66 atau 52,51 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Berau. Tahun 2018 jalan tanah masih sebesar 1.191,77 km jalan tanah yang pada tahun 2019 sudah berubah menjadi jalan kerikil. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan jalan dari tanah menjadi kerikil sepanjang kurang lebih 1.190 km dan pengaspalan sepanjang kurang lebih 58 km.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator perumahan merupakan salah satu cara dalam menilai kesejahteraan masyarakat dari segi penggunaan sumber air minum, status kepemilikan rumah, luas lantai tempat tinggal dan penggunaan fasilitas tempat pembuangan air besar. Di Kabupaten Berau urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas PUPR (Air bersih dan Sanitasi) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perumahan). Berkaitan dengan status kepemilikan rumah, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 72,18 persen rumah tangga telah menempati rumah miliknya sendiri, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 66,38 persen. Kenaikan ini berbanding terbalik dengan penurunan rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan maupun rumah sewaan yakni dari 21,20 persen pada tahun 2019 menjadi 19,23 persen pada tahun 2020. Sisanya merupakan rumah tempat tinggal bebas sewa, milik orang tua/sanak/saudara, dinas ataupun tempat tinggal lainnya.

Kalimantan sangat terkenal sebagai penghasil kayu hutan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian besar tempat tinggal penduduk di Kabupaten Berau memiliki lantai berupa kayu/bambu yaitu sebesar 53,74 persen pada tahun 2020. Hanya ditemukan sebanyak 0,85 persen rumah tangga yang memiliki lantai berupa tanah. Tidak hanya untuk lantai, pemakaian kayu untuk dinding juga merupakan yang terbanyak di Kabupaten Berau, mencapai 60,67 persen pada tahun 2020. Kemudian dari sisi atap, rumah tangga di Kabupaten Berau yang tinggal di rumah beratapkan atap berupa jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya sebesar 0,00 persen. Sedangkan sisanya merupakan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap berupa atap beton, genteng, asbes, seng dan bambu/kayu/sirap. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Berau telah memiliki pandangan bahwa atap merupakan salah satu kebutuhan yang harus

diutamakan pada saat mendirikan rumah atau memilih rumah sewaan/kontrakan yang akan ditinggali.

Fasilitas penerangan tempat tinggal yang ada di Kabupaten Berau sudah sangat baik. Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, lebih dari 97 persen rumah tangga di Kabupaten Berau telah menggunakan sumber penerangan listrik, baik listrik PT. PLN maupun listrik bukan dari PT. PLN. Adapun persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dari PT. PLN pada tahun 2020 mencapai 94,53 persen, meningkat dari dua tahun sebelumnya yakni 90,77 persen pada tahun 2018 dan 87,21 persen pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan jangkauan pelayanan oleh PT. PLN telah memberikan manfaat bagi rumah tangga di Kabupaten Berau.

Berdasarkan tabel 2.42 terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, lebih dari 80 persen rumah tangga di Kabupaten Berau telah menggunakan bahan bakar modern yakni listrik dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Adapun dari berbagai jenis bahan bakar, yang paling populer di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Berau adalah LPG. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 93,33 persen rumah tangga di Kabupaten Berau tahun 2020 menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak.

Pada tahun 2020, air minum yang berasal dari air kemasan bermerk/isi ulang merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Berau yaitu sebesar 76,70 persen. Masyarakat lebih cenderung memilih untuk mengkonsumsi air isi ulang karena budaya instan, praktis, mudah mendapatkannya dan harga lebih murah dibandingkan harus merebus sendiri dari air ledeng, air sumur ataupun mata air. Selain itu, masyarakat juga memiliki anggapan bahwa air minum isi ulang sudah melalui proses filterasi sehingga air lebih bersih dan higienis. Penggunaan sumber air minum terbanyak selanjutnya adalah air ledeng meteran atau eceran yaitu sebanyak 9,70 persen. Suatu hal yang menarik untuk diceramti adalah

bahwa masih ditemukan rumah tangga yang menjadikan air permukaan (seperti air sungai, danau, rawa dan sebagainya) dan air hujan sebagai sumber air minumnya yaitu masing-masing 0,61 persen dan 1,58 persen.

**Tabel 2.42
Statistik Perumahan Kabupaten Berau, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepemilikan Rumah					
- Milik Sendiri	71,57	66,46	73,46	66,38	72,18
- Kontrak/Sewa	13,77	24,43	16,60	21,20	19,23
- Bebas Sewa	9,32	5,43	7,72	10,49	8,50
- Lainnya	5,33	3,68	2,22	1,94	0,09
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah					
- 0-19	1,22	2,02	0,76	0,42	0,72
- 20-49	35,38	36,89	29,85	37,69	35,73
- 50-99	41,19	37,04	36,34	36,34	39,03
- 100-149	10,97	15,69	17,26	11,35	14,81
- 150+	11,24	8,36	15,79	14,20	9,71
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas					
- Bukan Tanah	99,10	99,31	100,00	99,28	99,15
- Tanah	0,89	0,70	0,00	0,72	0,85
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas					
- Bukan Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	99,26	100,00	100,00	99,89	100,00
- Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	0,74	0,00	0,00	0,12	0,00
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas					
- Tembok	22,20	22,89	28,47	34,45	28,60
- Kayu	76,51	76,94	71,53	65,02	70,67
- Bambu dan lainnya	1,28	0,17	0,00	0,53	0,73
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan					
- Listrik PLN	87,95	88,36	90,77	87,21	94,53
- Listrik Non PLN	10,40	9,49	8,13	12,58	5,01
- Bukan Listrik	1,65	2,15	1,10	0,21	0,46
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Memasak					
- Listrik/LPG/Gas	84,07	91,06	89,23	93,72	93,33
- Minyak Tanah	4,16	1,22	2,26	1,63	1,08
- Arang/Kayu Bakar/Tidak Memasak/Lainnya	11,77	7,72	8,51	4,65	5,59
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Pembuangan Air Besar					
- Sendiri	89,56	90,48	91,56	92,44	96,57
- Bersama	5,10	3,41	2,36	5,00	1,06
- Umum	1,33	2,20	6,08	1,46	0,64
- Tidak Ada	4,01	3,90	0,00	1,09	1,73
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Penampungan Kotoran ke Sumber Air					
- < 10 m	15,64	12,53	22,39	12,49	21,21

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- > 10 m	63,82	68,85	69,34	87,51	78,79
- Tidak tahu	20,54	18,62	8,27	0,00	0,00
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja					
- Tangki/IPAL	78,88	69,25	87,67	91,96	93,98
- Kolam/Sawah/Sungai/Danau /Laut	6,33	7,61	8,38	3,18	3,45
- Lubang Tanah	11,39	19,39	3,89	4,86	2,40
- Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	3,41	3,74	0,05	0,00	0,17
Sumber Air Minum					
- Air kemasan Bermerk/Isi Ulang	56,32	63,88	61,74	74,79	76,70
- Ledeng Meteran/Eceran	16,22	19,57	18,32	6,82	9,70
- Sumur Bor/Pompa	5,54	7,57	3,67	5,72	5,02
- Sumur Terlindung	4,22	1,85	4,85	4,21	3,42
- Sumur Tak Terlindung	4,08	2,31	1,13	1,32	1,11
- Lainnya	2,22	1,71	2,67	3,54	1,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dari sisi kepemilikan fasilitas buang air besar, rumah tangga di Kabupaten Berau lebih cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya. Hal ini terlihat pada tabel 2.42 dimana sudah lebih dari 85 persen rumah tangga di Kabupaten Berau telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Pada tahun 2016, besarnya persentase untuk rumah tangga tersebut adalah 89,56 persen dan kemudian terus meningkat menjadi 96,57 persen pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 93,98 persen rumah tangga di Kabupaten Berau yang telah menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Sedangkan sisanya sebanyak 12,33 persen belum menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL. Dengan kata lain, rumah tangga ini masih memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang belum memenuhi syarat kesehatan. Adapun tempat pembuangannya tersebut dapat berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut yaitu sebanyak 3,45 persen, lubang tanah sebesar 2,40 persen dan lainnya sebesar 0,17 persen.

Secara umum, hampir semua rumah tangga di Kabupaten Berau sudah menempati rumah yang termasuk dalam kategori layak huni yaitu mencapai 97,97 persen pada tahun 2020. Namun, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 98,38 persen. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Konsep rumah layak huni menurut BPS adalah indikator komposit yang dibentuk dari beberapa indikator, antara lain kualitas bangunan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas), kecukupan luas lantai hunian, sumber penerangan, air minum layak, dan sanitasi layak. Rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua kriteria yang tidak terpenuhi dari tujuh indikator pembentuk tersebut. Sebaliknya, jika terdapat tiga atau lebih kriteria yang tidak terpenuhi, rumah tangga tersebut dikategorikan menempati rumah tidak layak huni.

Adapun definisi air minum layak yang merupakan salah satu indikator rumah layak huni adalah sumber air minum yang terdiri dari air leding, air hujan dan air terlindung yakni air yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/limbah/tinja sejauh 10 m atau lebih. Akses terhadap air minum layak merupakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti minum, masak, mandi, cuci dan ibadah. Untuk sanitasi layak, suatu rumah dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memenuhi syarat kesehatan seperti kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau Bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak sebanyak 19,79 persen dari seluruh rumah tangga. Angka ini mengalami kenaikan dari 19,27 persen pada tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yang sudah

memiliki sanitasi layak yakni dari 89,61 persen pada tahun 2019 menjadi 91,76 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.43
Indikator Kelayakan Perumahan di Kabupaten Berau, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Layak Huni	96,36	95,01	98,41	98,38	97,97
Air Minum Layak	29,71	25,87	29,14	19,27	19,79
Sanitasi Layak	77,92	59,54	81,97	89,61	91,76
Air Minum Bersih	79,90	88,77	87,97	93,45	94,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

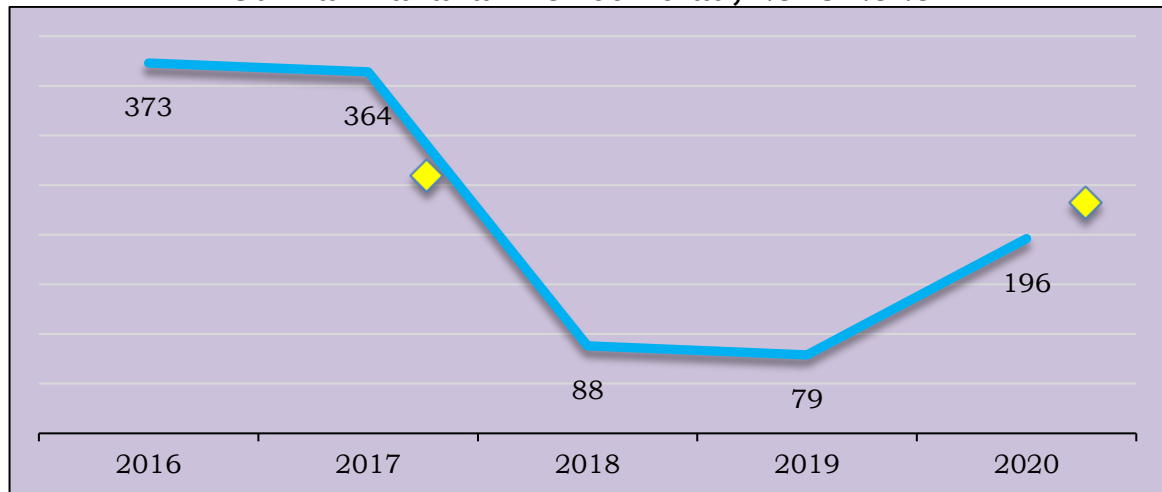
Selain ketiga indikator di atas, terdapat indikator lain terkait kualitas air minum yaitu air minum bersih. Sumber air minum bersih didefinisikan sebagai sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m]. Sudah banyak rumah tangga di Kabupaten Berau yang mengkonsumsi air minum bersih dan dengan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terdapat sebanyak 94,91 persen rumah tangga di Kabupaten Berau yang mengkonsumsi air minum bersih.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Masih cukup tingginya tindak kriminalitas di Kabupaten Berau haruslah menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pencegahan dan antisipasi berbagai kasus kriminalitas yang terjadi. Secara umum, jumlah tahanan di Kantor Polisi Resor (Polres) Berau menurun dari 2016 sampai dengan 2019 yakni dari 373 tahanan

menjadi 79 tahanan. Namun pada tahun 2020, jumlah tahanan kembali meningkat menjadi 196 tahanan.

Gambar 2.13
Jumlah Tahanan Polres Berau, 2016-2020



Sumber: Polisi Resor Berau.

Dari sisi tindak pidana, angka kriminalitas di Kabupaten Berau cenderung berfluktuasi dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 137 kasus. Pada tahun 2016, angka kriminalitas di Kabupaten Berau mencapai 4,47 tetapi kemudian bergerak naik turun dan menjadi 4,79 pada tahun 2020 dengan kasus sebanyak 114. Angka ini berarti berarti terdapat 4 sampai 5 tindak kriminalitas yang terjadi diantara 10.000 penduduk Kabupaten Berau.

Tabel 2.44
Jumlah Penduduk, Jumlah Tindak Pidana, dan Angka Kriminalitas Kabupaten Berau, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tindak Pidana	Angka Kriminalitas
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	214.828	96	4,47
2017	220.601	77	3,49
2018	226.509	83	3,66
2019	232.287	137	5,90
2020	238.214	114	4,79

Sumber: Polisi Resor Berau.

Tabel 2.45
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kecamatan,
2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay	88	92	83	83	80
Talisayan	80	100	100	100	94
Tabalar	80	90	100	100	100
Biduk-Biduk	86	100	89	89	100
Pulau Derawan	91	100	80	80	100
Maratua	71	100	100	100	0
Sambaliung	0	0	100	100	87
Tanjung Redeb	86	100	83	83	80
Gunung Tabur	75	100	69	69	89
Segah	87	75	93	93	80
Teluk Bayur	100	100	86	86	75
Batu Putih	80	80	0	0	0
Biatan	0	0	0	0	0

Sumber: Polisi Resor Berau.

Penyelesaian kasus kriminalitas di Kabupaten Berau cenderung bervariasi antar kecamatan. Pada tahun 2020, tindak pidana yang dapat diselesaikan secara penuh 100 persen adalah di Kecamatan Tabalar, Biduk-Biduk dan Pulau Derawan. Sedangkan di Kecamatan Teluk Bayur, penyelesaian tindak pidana merupakan yang paling rendah yaitu 75 persn pada tahun 2020. Selain tahun 2020, Polsek Tabalar juga dapat menyelesaikan 100 persen kasus tindak pidana pada tahun 2018 dan 2019. Di sisi lain, kasus tindak pidana di Kecamatan Talisayan yang sebelumnya dapat diselesaikan 100 persen pada tahun 2017, 2018 dan 2019, persentase penyelesaian tindak pidana di Kecamatan Talisayan pada tahun 2020 menurun menjadi 94 persen.

f. Urusan Sosial

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara umum, definisi kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok minimum. Seseorang

dikategorikan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan, dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic needs*). Sementara itu, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok individu berada dalam tingkat kekurangan dibandingkan standar kehidupan umum di lingkungan sekitarnya.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/kap/hari) maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar tersebut sering dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Berau sebesar Rp.568.600,- dimana dapat dikatakan bahwa kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Berau sebesar Rp.568.600,- per orang per bulan. Sejalan dengan harga barang dan jasa yang terus meningkat, besarnya garis kemiskinan di Kabupaten Berau juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan garis kemiskinan tersebut, terdapat sebanyak 5,19 persen penduduk Kabupaten Berau yang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau memiliki pengeluaran per orang per bulan di

bawah Rp.568.600,-. Angka ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 5,04 persen pada tahun 2018 maupun 2019.

Tabel 2.46
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Berau, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	465.161	496.385	502.564	526.615	568.500
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	11,47	11,86	11,33	11,62	12,30
Persentase Penduduk Miskin	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,97	0,49	0,57	0,66	0,70
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,23	0,07	0,11	0,12	0,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lainnya yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, selain persentase penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman kemiskinan juga meningkat dari 0,66 menjadi 0,70. Hal ini bermakna bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan bahwa penduduk yang berstatus miskin justru semakin terpuruk karena semakin menjauhi garis kemiskinan. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Berau pada tahun 2020 sebesar 0,17 dimana mengalami kenaikan dari 0,12 pada tahun 2019. Hal ini bermakna bahwa penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin mengalami kenaikan atau dengan kata lain ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

Tabel 2.47
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
Kutai Barat	8,65	8,72	9,15	9,09	9,29
Kutai Kartanegara	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31
Kutai Timur	9,16	9,29	9,22	9,48	9,55
Berau	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19
Penajam Paser Utara	7,49	7,63	7,40	7,18	7,36
Mahakam Ulu	10,65	11,29	11,62	11,25	11,44
Kota Balikpapan	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57
Kota Samarinda	4,72	4,77	4,59	4,59	4,76
Kota Bontang	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38
Kalimantan Timur	6,11	6,19	6,03	5,94	6,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau mengalami kenaikan pada tahun 2020, namun bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau masih tergolong kecil. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 misalnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau sebesar 5,19 persen sementara untuk provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,10 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Berau tahun 2020 tersebut adalah peringkat ke empat terendah dari 10 kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.48
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	1,48	1,32	1,22	1,57	1,04
Kutai Barat	1,56	0,91	1,19	1,48	1,23
Kutai Kartanegara	1,16	1,50	0,95	0,95	0,91
Kutai Timur	2,05	1,26	1,49	1,90	2,02
Berau	0,97	0,49	0,57	0,66	0,70
Penajam Paser Utara	1,04	1,11	1,18	1,00	0,87
Mahakam Ulu	2,57	0,99	0,33	1,94	1,46
Kota Balikpapan	0,30	0,23	0,67	0,26	0,38
Kota Samarinda	0,80	0,68	0,49	0,57	0,72
Kota Bontang	0,84	0,92	0,93	0,42	0,54
Kalimantan Timur	1,04	0,89	0,85	0,91	1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Tabel 2.49
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	0,43	0,27	0,31	0,40	0,21
Kutai Barat	0,37	0,16	0,26	0,41	0,28
Kutai Kartanegara	0,28	0,44	0,20	0,19	0,16
Kutai Timur	0,65	0,25	0,41	0,55	0,63
Berau	0,23	0,07	0,11	0,12	0,17
Penajam Paser Utara	0,22	0,24	0,38	0,28	0,17
Mahakam Ulu	0,96	0,18	0,02	0,55	0,29
Kota Balikpapan	0,05	0,03	0,26	0,06	0,12
Kota Samarinda	0,21	0,13	0,09	0,11	0,21
Kota Bontang	0,20	0,25	0,26	0,08	0,09
Kalimantan Timur	0,28	0,21	0,20	0,21	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Hal yang sama juga terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, dimana kedua indeks tersebut untuk Kabupaten Berau selalu berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Adapun peringkat kedua jenis indeks tersebut selalu berubah setiap tahunnya untuk Kabupaten Berau tetapi selalu masih dalam urutan rentang lima terendah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang ketat antar keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan. Dalam suatu proses pembangunan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk

dipantai karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan.

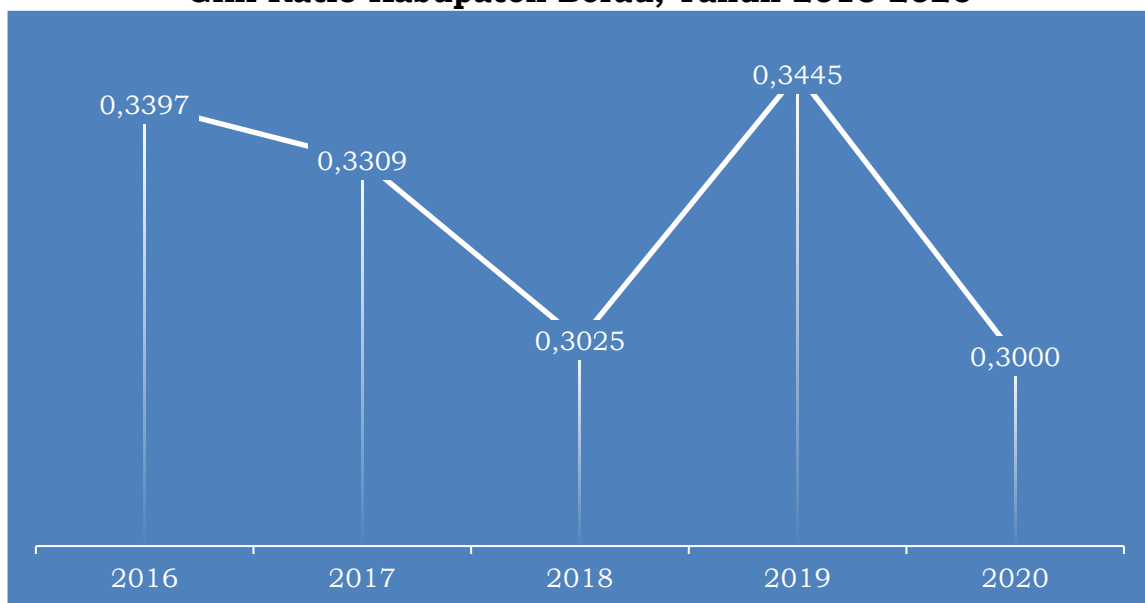
Koefisien gini (*gini ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai antara 0 dan 1. Jika suatu distribusi pendapatan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan tidak merata jika nilai koefisien gini mendekati satu. Apabila nilai koefisien gini mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila nilai koefisien gini mendekati 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan tinggi. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan kelompok masyarakat, koefisien gini dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

Koefisien gini $> 0,50$: Tingkat ketimpangan tinggi

Koefisien gini $0,40 - 0,50$: Tingkat ketimpangan sedang

Koefisien gini $< 0,40$: Tingkat ketimpangan rendah

Gambar 2.14
Gini Ratio Kabupaten Berau, Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Perkembangan koefisien gini Kabupaten Berau selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar 2.14. Koefisien gini sempat mengalami kenaikan dari 0,3025 pada tahun 2018 menjadi 0,3445 pada tahun 2019. Angka kemudian menurun menjadi 0,3000 pada tahun 2020. Dengan nilai koefisien gini yang selalu kurang dari 0,4, mengindikasikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Berau termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan pendapatan provinsi maupun nasional, tingkat ketimpangan di Kabupaten Berau tahun 2020 juga masih lebih baik, dimana pada tahun yang sama Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia memiliki koefisien gini masing-masing 0,328 dan 0,381.

Indikator penting berikutnya dalam melihat kemampuan perekonomian daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Pada tahun 2020, sebanyak 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 1.070.300,- dimana dari pengeluaran tersebut 52,88 persen merupakan pengeluaran makanan sedangkan 47,12 persen sisanya merupakan pengeluaran bukan makanan. Sebaliknya, pada kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi, sebesar 56,58 persen adalah pengeluaran untuk non makanan sedangkan untuk pengeluaran makanan hanya sebesar 34,85 persen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Engel (1994) bahwa bila selera tidak berbeda, maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan.

Tabel 2.50
Besarnya Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis
Pengeluaran di Kabupaten Berau, 2020

Jenis Pengeluaran	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Besarnya Pengeluaran				
Makanan	565.984	894.009	1.334.939	850.459
Total Bukan Makanan	504.316	1.022.411	2.495.756	1.108.397
Total Konsumsi	1.070.300	1.916.420	3.830.695	1.958.856
Persentase				
Makanan	52,88	46,65	34,85	43,42
Total Bukan Makanan	47,12	53,35	65,15	56,58
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

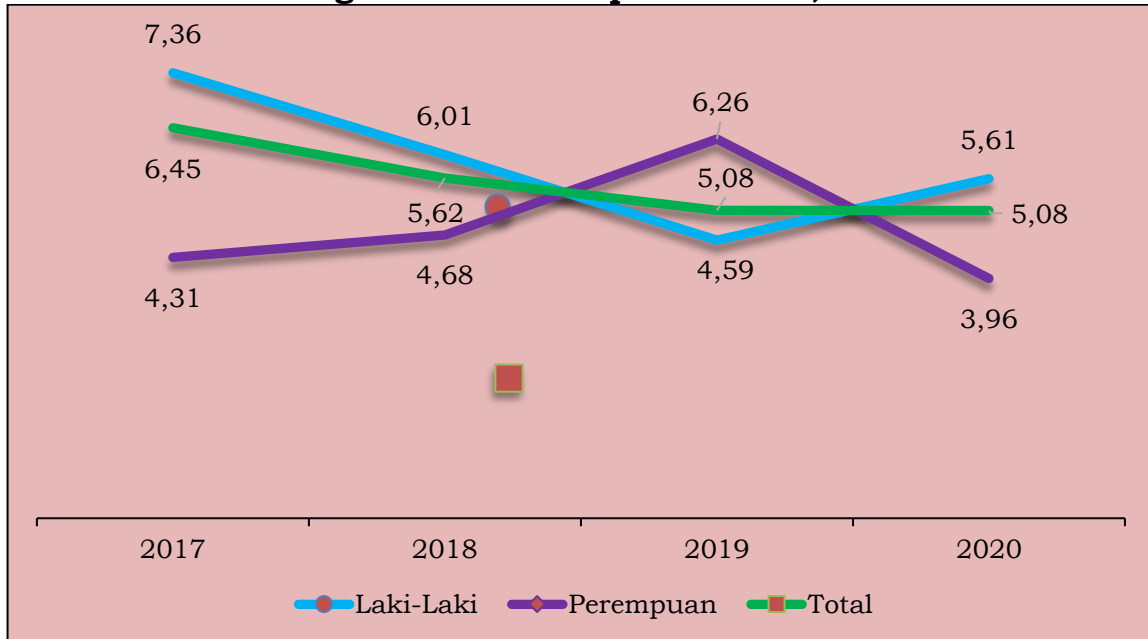
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Berau. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Urusan Tenaga Kerja

Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau menunjukkan trend menurun. Berdasarkan konsep BPS, TPT dapat diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka TPT di Kabupaten Berau tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 yaitu sebesar 5,08 persen, dimana angka ini merupakan TPT terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan TPT tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit penduduk yang menjadi beban dalam proses pembangunan ekonomi dan semakin banyak angkatan kerja yang dapat berpartisipasi menggerakkan proses ekonomi.

Gambar 2.15
Perkembangan TPT di Kabupaten Berau, 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada tahun 2019 TPT laki-laki sebesar 5,61 persen dimana angka ini lebih tinggi dari TPT perempuan yang sebesar 3,96 persen. Kondisi ini berubah dari tiga tahun sebelumnya dimana TPT perempuan lebih tinggi selalu lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Perempuan masih cenderung bekerja di bidang informal, mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada laki-laki yang melakukan pekerjaan yang sama. Tenaga kerja perempuan biasanya juga mampu menyesuaikan dengan jenis lapangan pekerjaan yang tersedia karena perubahan situasi ekonomi. Oleh karena itu, tenaga kerja perempuan lebih mampu mempertahankan pekerjaan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Tabel 2.51
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	N/A	5,54	5,00	4,55	4,52
Kutai Barat	N/A	5,87	4,86	5,08	4,97
Kutai Kartanegara	N/A	5,72	5,96	5,98	5,70
Kutai Timur	N/A	4,61	5,93	5,53	5,45
Berau	N/A	6,45	5,62	5,08	5,08
Penajam Paser Utara	N/A	4,75	4,76	6,26	6,22
Mahakam Ulu	N/A	9,05	4,17	3,69	3,49
Kota Balikpapan	N/A	10,39	9,52	7,29	9,00
Kota Samarinda	N/A	6,19	6,16	5,87	8,26
Kota Bontang	N/A	12,44	9,61	9,19	9,46
Kalimantan Timur	N/A	6,91	6,60	6,09	6,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

TPT di Kabupaten Berau selama 2016-2020 bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur tergolong rendah. Selama periode tersebut tren tingkat pengangguran menunjukkan penurunan. TPT Kabupaten Berau yang sebesar 5,08 persen pada tahun 2020 berada pada urutan keempat terendah dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Angka ini juga lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,87 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.52
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	N/A	28,83	29,78	26,02	31,11
Industri	N/A	22,59	22,92	27,20	21,16
Jasa-Jasa	N/A	48,57	47,30	46,78	47,73
Total	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

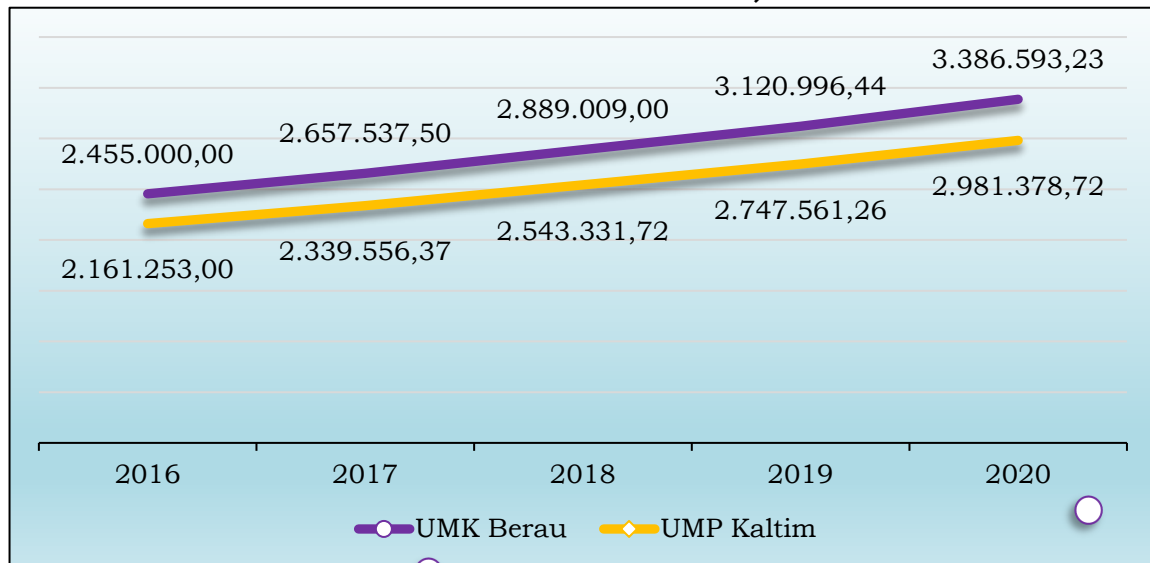
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dalam suatu proses perkembangan ekonomi, akan disertai juga dengan perubahan struktur ekonominya. Kemudian, terkait dengan proses transformasi struktur produksi tersebut, terjadi juga transformasi dalam struktur ketenagakerjaan menurut lapangan pekerjaan. Dalam hal

ini lapangan usaha penduduk dikategorikan ke dalam tiga kategori yang terdiri dari pertanian, industri dan jasa-jasa. Berdasarkan tabel 2.52 dapat terlihat bahwa selama tahun 2016 sampai dengan 2020, sebagian besar penduduk di Kabupaten Berau bekerja pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 47,73 persen. Diantara semua sektor jasa-jasa, sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Adapun penyerapan tenaga kerja pada dua sektor lainnya yaitu pertanian sebesar 31,11 persen dan sektor industri sebesar 21,16 persen. Namun, jika dibandingkan secara individu sektor, sektor pertanian yang hanya mencakup satu sektor mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Hal ini karena mudahnya penduduk untuk melakukan kegiatan di bidang ini tanpa perlu memenuhi persyaratan pendidikan tertentu.

Salah satu unsur penting dalam keterkaitannya dengan tenaga kerja adalah balas jasa tenaga kerja yang berupa upah/gaji. Balas jasa ini menjadi penentu kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekerja atau secara luas masyarakat, ditetapkan standar acuan upah/gaji suatu daerah dalam bentuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dari tahun ke tahun besaran UMK Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, UMK Kabupaten sebesar Rp. 2.455.000,0 dan terus naik hingga menjadi Rp. 3.386.593,- pada tahun 2020. Peningkatan UMK ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, besaran UMK Kabupaten Berau selalu lebih besar dari UMK Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.16
Perkembangan UMK Kabupaten Berau dan
UMP Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020



Sumber: jdih.kaltimprov.go.id

Selain itu, di Kabupaten Berau juga terdapat UMK sektor pertambangan batu bara (UMSK Batu bara) mengingat sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Berau ditopang oleh sektor pertambangan batu bara. Nilai UMSK batu bara terlihat berhubungan positif dengan UMK karena peningkatan UMK selalu diiringi dengan peningkatan UMSK batu bara. Pada tahun 2020, tercatat bahwa UMSK batu bara Kabupaten Berau mencapai sebesar Rp. 3.386.593,-; dimana sedikit lebih tinggi daripada nilai UMK Kabupaten Berau.

b. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Berau masih belum optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 46,85 persen. Meskipun demikian, tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran laki-laki, di mana tingkat pengangguran perempuan sebesar 3,96 persen sedangkan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,61 persen. Angka ini

menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi yang hampir sama dengan laki-laki sehingga ke depan pemberdayaan perempuan harus lebih ditingkatkan.

Tabel 2.53
Perkembangan IPM Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	N/A	53,43	54,39	55,38	55,10
Kutai Barat	N/A	63,18	63,72	64,70	64,27
Kutai Kartanegara	N/A	61,40	61,89	62,63	62,36
Kutai Timur	N/A	58,42	59,28	60,36	59,79
Berau	N/A	68,41	68,88	69,74	69,46
Penajam Paser Utara	N/A	64,98	65,47	65,91	65,74
Mahakam Ulu	N/A	58,54	59,23	60,28	59,81
Kota Balikpapan	N/A	75,43	76,16	76,45	76,33
Kota Samarinda	N/A	74,69	75,22	75,48	75,29
Kota Bontang	N/A	73,18	73,58	73,84	73,77
Kalimantan Timur	N/A	68,52	69,21	70,14	69,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa IPM dapat menggambarkan capaian pembangunan di suatu wilayah. Akan tetapi angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan atau belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Nilai IPG Kabupaten Berau pada tahun 2017 sebesar 87,77 dan meningkat menjadi 87,92 pada tahun 2018 dan 87,93 pada tahun 2019. Namun, di tahun terakhir, nilai IPG menurun bahkan lebih kecil dari tahun 2017 menjadi 87,61. Penurunan ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Berau tetapi juga di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selama 2016 sampai dengan 2020, nilai IPG Kabupaten Berau selalu berada di atas Provinsi Kalimantan Timur dan berada pada urutan ke empat seperti halnya peringkat IPM.

Tabel 2.54
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Provinsi
Kalimantan Timur, 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	N/A	69,78	70,64	71,41	71,15
Kutai Barat	N/A	83,30	83,52	83,84	83,87
Kutai Kartanegara	N/A	78,54	78,83	79,14	78,90
Kutai Timur	N/A	75,48	76,03	76,51	76,26
Berau	N/A	87,77	87,92	87,93	87,61
Penajam Paser Utara	N/A	86,31	86,34	86,22	86,39
Mahakam Ulu	N/A	79,82	80,18	80,89	80,98
Kota Balikpapan	N/A	89,74	89,76	89,71	89,65
Kota Samarinda	N/A	89,26	89,42	89,41	89,27
Kota Bontang	N/A	86,44	86,61	86,72	86,87
Kalimantan Timur	N/A	85,62	85,63	85,98	85,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

c. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, dibandingkan dua kebutuhan lainnya berupa sandang dan papan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Berau saat ini sedang berupaya mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah, salah satu upayanya melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan target akhir yang ingin dicapai, yakni mewujudkan masyarakat yang mandiri pangan di tingkat rumah tangga dengan pemanfaatan lahan pekarangan keluarga.

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditas pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Jika perilaku produksi yang rentan

terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Padi sebagai makanan masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau memang selalu menarik untuk dibahas. Pada tahun 2020, luas panen padi di Kabupaten Berau adalah 6.461,68 hektar, tertinggi keempat setelah Kabupaten Kutai Kartanegara, Paser dan Penajam Paser Utara. Dari luasan tersebut, produksi padi yang dihasilkan sebanyak 24.337,31 ton atau memiliki tingkat produktivitas 37,66 kuintal per hektar. Luas panen dan produksi padi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang seluas 4.771,22 hektar dengan produksi padi 16.739,31 ton. Mengingat beras merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang penting, tentu saja perlu untuk dipertimbangkan kelestarian lingkungan dengan kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu produksi padi dan beras. Karena pada kenyataanya, masih cukup banyak beras yang harus diimpor dari luar Kabupaten Berau. Berdasarkan catatan Pelabuhan Tanjung Redeb, terdapat sebanyak 11.003 ton beras yang impor masuk ke Kabupaten Berau pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9.641 ton.

Tabel 2.55
Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Timur,
2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019			2020		
	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Produkti- Vitas (Kw/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi Padi (Ton)	Produkti- Vitas (Kw/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	13.012,74	48.251,88	37,08	12.825,60	49.337,21	38,47
Kutai Barat	292,91	962,88	32,87	510,78	1.293,97	25,33
Kutai Kartanegara	31.358,20	121.202,53	38,65	31.952,96	118.199,54	36,99
Kutai Timur	4.541,74	15.926,08	35,07	4.978,75	17.322,78	34,79
Berau	4.771,22	16.739,31	35,08	6.461,68	24.337,31	37,66
Penajam Paser Utara	13.138,93	41.622,32	31,68	13.924,41	47.098,77	33,82
Mahakam Ulu	470,25	1.521,06	32,35	464,44	1.065,06	22,93
Kota Balikpapan	12,52	37,27	29,77	118,31	428,87	36,25
Kota Samarinda	2.021,86	7.212,12	35,67	2.250,75	7.752,41	34,44
Kota Bontang	87,38	342,92	39,24	80,76	368,38	45,61
Kalimantan Timur	69.707,75	253.818,37	36,41	73.568,44	267.204,30	36,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

d. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan perihal yang cukup dipertimbangkan dalam membuat kebijakan pembangunan daerah, utamanya terkait Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini dikarenakan cukup banyak kawasan pertambangan maupun penggalian, baik di Kabupaten Berau ataupun Provinsi Kalimantan Timur, yang berdampak pada pengurangan penggunaan lahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di mana tetap

menunjukkan peran dari ekosistem sendiri dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Berau. Dalam pelaksanaannya, tingginya aktivitas pertambangan dan penggalian di Kabupaten Berau cukup memberi dampak signifikan dalam penurunan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan untuk lebih waspada terhadap dampak degradasi kualitas lingkungan hidup karena akan merugikan setiap lini pembangunan saat ini dan di masa mendatang.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP-el menjadi identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang memenuhi syarat (berusia 17 tahun dan pernah/sudah menikah). Adapun salah satu elemen data yang terdapat dalam KTP-el dan menjadi bagian dari data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Adapun bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, NIK biasanya terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dengan syarat anggota keluarga tersebut sudah didaftarkan dalam KK.

Berdasarkan 2.58 terlihat bahwa terdapat 97,07 persen penduduk Kabupaten Berau berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki NIK. Namun, untuk penduduk yang berusia 0-4 tahun, persentase penduduk yang memiliki NIK masih lebih rendah yaitu sebesar 82,23 persen. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah belum terpenuhinya semua persyaratan untuk memasukkan anggota keluarga baru ke dalam KK.

Misalnya, tidak adanya buku nikah kedua orang tua. Hal ini menjadi salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan di Kabupaten Berau.

Tabel 2.56
Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	0-4 Tahun	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	80,85	96,95	96,55	95,32
Perempuan	83,92	97,87	97,71	96,54
Total	82,23	97,38	97,07	95,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Selain itu, administrasi kelahiran dan kematian juga belum tercatat dengan baik mengingat minimnya pendaftaran akta kelahiran maupun kematian, terutama di daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Jika dilihat pada penduduk yang berusia 0-17 tahun, terdapat sebanyak 94,63 persen penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran. Sedangkan pada penduduk yang berusia 0-4 tahun, baru terdapat sebanyak 84,35 persen yang sudah memiliki akta kelahiran. Sedangkan sisanya sebanyak 15,65 persen belum memiliki akta kelahiran yang dapat disebabkan karena belum diurus.³

Tabel 2.57
Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	0-4 Tahun	0-17 Tahun
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	85,20	94,41
Perempuan	83,31	94,85
Total	84,35	94,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sejalan dengan perkembangan kependudukan dan angka kelahiran yang masih cukup tinggi maka akan berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) agar terwujud penduduk yang tumbuh secara seimbang dan terbentuk keluarga berkualitas. Pada tahun 2020 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Berau mencapai sebanyak 44.099 PUS. Dari sasaran tersebut, tercapai target sebanyak 88,20 persen yakni dengan jumlah peserta KB sebanyak 38.897 peserta yang terdiri dari 35.134 peserta KB aktif dan sebanyak 3.763 peserta KB baru.

Tabel 2.58
Jumlah Peserta KB Aktif dan KB Baru Berdasarkan Jenis Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Berau, 2018-2020

Kabupaten/Kota	Peserta KB Aktif			Peserta KB Baru		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IUD	1.908	2.253	2.507	245	295	289
MOP	12	15	13		1	2
MOW	957	1.202	1.427	280	235	254
Implan	1.830	2.670	3.241	289	415	570
Kondom	642	679	728	114	155	136
Suntik	16.135	18.575	18.146	1.645	2.274	2.037
Pil	7.935	9.352	9.072	426	521	475
Total	29.419	34.746	35.134	2.999	3.896	3.763

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Selama tahun 2018 sampai dengan 2020, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) oleh PUS masih sangat kecil persentasenya dibandingkan dengan non MJKP, baik pada akseptor KB aktif maupun akseptor KB baru. Pada tahun 2020, suntikan KB masih menjadi metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 18.146 peserta KB aktif atau 51,65 persen dan 2.037 peserta KB baru atau 54,13 persen. Kontrasepsi berupa pil juga merupakan pilihan lainnya yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebanyak 25,82 dari

peserta KB aktif dan 12,62 persen dari peserta KB baru. Padahal kedua metode kontrasepsi ini merupakan metode KB hormonal yang termasuk non MJKP yang rentan terhadap kegagalan dan tingkat drop out yang cukup tinggi mencapai 23-39 persen, sementara MJKP hanya sekitar 0,5-10 persen (Bappenas, 2012). Adapun penggunaan paling sedikit adalah jenis kontrasepsi MOP yaitu sebanyak 13 peserta atau hanya 0,04 persen dari peserta KB aktif dan terdapat tambahan 2 peserta baru yang menggunakan jenis kontrasepsi MOP pada tahun 2020.

h. Urusan Perhubungan

Secara geografis, letak Kabupaten Berau berada paling jauh dari ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Namun, karena adanya infrastruktur Bandar Udara (Bandara) Kalimantan serta Pelabuhan Tanjung Redeb, arus keluar masuk orang maupun barang menjadi lebih mudah. Bandara Kalimantan ini mulai dibangun pada tahun 2010, dan mulai beroperasi dua tahun setelahnya. Bandara ini memiliki panjang landasan (*runway*) 2.250 m x 45 m, *taxiway* 179 m x 23 m dan apron 139 m x 110 m. Bandara ini merupakan bandara pertama di Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan *centre light* atau lampu yang berada di garis tengah landasan pacu. Pada tahun 2019, banyaknya pesawat yang berangkat dari Kabupaten Berau sebanyak 1.579 pesawat yang mengangkut sebanyak 106.965 penumpang. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata, setiap pesawat yang berangkat dapat mengangkut sebanyak 67 penumpang. Secara angka, jumlah pesawat dan penumpang berangkat tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni masing-masing 54,02 persen dan 52,25 persen. Adapun jumlah pesawat datang dan berangkat relatif hampir sama, tetapi secara umum lebih banyak pesawat datang. Jumlah pesawat datang pada tahun 2020 sebanyak 1.582 (menurun 53,84 persen) dengan penumpang diangkut sebanyak 102.537 orang (menurun 53,07 persen).

Tabel 2.59
Jumlah Pesawat dan Penumpang di Bandara Kalimantan
Kabupaten Berau, 2020

Bulan	Pesawat		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	276	276	17.953	17.302
Februari	244	245	16.207	17.342
Maret	252	253	15.427	13.600
April	31	32	1.470	1.611
Mei	9	9	81	460
Juni	73	73	3.117	4.470
Juli	133	131	5.572	7.468
Agustus	138	136	7.724	7.774
September	85	83	4.366	3.733
Oktober	105	103	8.097	8.474
November	116	117	10.765	11.190
Desember	120	121	11.758	13.541
Total	1.582	1.579	102.537	106.965

Sumber: Bandara Kalimantan Kabupaten Berau.

Tabel 2.60
Barang Dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb (Ton/M3/MT), 2020

Jenis Barang	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Solar	45.373	48.882	50.045	53.257	55.887	52.111
Bensin/Premium	4.000	5.932	4.560	4.287	4.298	5.637
Avtur	372	444	301	0	0	0
Batu Pecah	13.060	9.094	31.284	19.337	18.962	19.596
Batu Bara	5.257	5.257	5.257	10.751	15.756	0
Semen	5.000	10.418	7.350	0	575	6.800
Pupuk	4.011	4.210	3.458	2.150	3.141	5.240
Ammonium Nitrate	2.601	3.089	5.202	3.501	2.601	0
Mesin/Alat Berat	883	980	3.664	2.589	3.656	1.785
Pertamax	950	3.187	1.167	2.117	400	1.629
Container	1.144	1.459	1.411	1.390	1.076	1.252
Lain-Lain	10	9	156	13	67	83
Beras	909	952	1.168	705	1.271	555
Gencar	22	909	1.318	452	344	297
Bahan/Material Bangunan	4.162	0	0	0	0	1
Tiang Pancang	0	0	0	1.462	1.019	0
Sayur-Sayuran	229	166	193	167	203	210
Hewan	69	37	72	99	79	325
Lain - Lain	0	0	0	0	0	1.334
Tepung Terigu	79	90	45	102	20	42
Garam	1	0	20	15	25	40

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Jenis Barang	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Log's	0	0	0	0	0	0
Telur	0	2	0	0	4	8
Gula	0	0	0	0	25	0
Kendaraan	1	4	0	1	1	1

Lanjutan Tabel 2.60

Jenis Barang	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Solar	25.715	196.828	36.294	42.657	35.126	590.925
Bensin/Premium	483.086	3.369	5.598	6.725	4.278	4.853
Avtur	278.910	0	0	179	1.039	0
Batu Pecah	2.080	22.357	30.941	18.577	24.511	16.728
Batu Bara	0	5.258	0	0	0	25.820
Semen	6.050	2.500	6.130	5.000	2.500	11.148
Pupuk	5.740	8.174	3.185	4.276	3.358	3.196
Ammonium Nitrate	3.500	3.501	3.589	0	2.601	900
Mesin/Alat Berat	2.070	975	297	697	712	700
Petrmax	783	803	1.050	2.503	1.197	1.400
Container	1.486	1.332	1.276	1.744	1.553	1.150
Lain-Lain	5	2.407	1.902	94	39	6.735
Beras	852	966	928	1.074	870	753
Gencar	279	417	565	609	414	237
Bahan/ Mat. Bangunan	0	600	0	0	0	0
Tiang Pancang	55	0	0	0	0	0
Sayur-Sayuran	151	138	187	200	152	271
Hewan	325	100	119	99	81	113
Lain - Lain	0	0	0	0	0	0
Tepung Terigu	0	62	0	0	30	0
Garam	0	0	0	20	20	20
Log's	0	0	0	0	48	0
Telur	3	1	4	2	7	7
Gula	0	0	0	0	0	0
Kendaraan	3	3	1	1	2	0

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Redeb.

Selain melalui transportasi udara, arus barang masuk ke Kabupaten Berau yang cukup besar adalah melalui Pelabuhan Tanjung Redeb. Barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb lebih cenderung merupakan barang-barang yang secara umum tidak dapat

diproduksi di Kabupaten Berau. Tabel 2.60 menyajikan beberapa komoditas yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb selama tahun 2020. Beberapa perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Kabupaten Berau ada yang menggunakan bahan peledak dalam proses produksinya, sehingga dapat terlihat bahwa pada tahun 2020, di Pelabuhan Tanjung Redeb terdapat pembongkaran Aluminium Nitrat sebanyak 31.085 ton.

Demikian halnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus diimpor dari luar Kabupaten Berau, dimana BBM yang diangkut melalui transportasi air mencapai sebanyak 1.233.100 ton jenis solar, 536.623 ton jenis premium dan 17.186 ton jenis pertamax. Untuk komoditas primadona sektor konstruksi yakni semen terdapat sebanyak 63.471 ton dan batu pecah sebanyak 226.527 M³ yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb. Secara umum, barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Redeb merupakan barang-barang yang masih berasal dari dalam wilayah Indonesia.

Selain melakukan kegiatan bongkar barang, di Pelabuhan Tanjung Redeb juga terdapat kegiatan muat barang. Komoditas yang paling banyak dimuat di Pelabuhan Tanjung Redeb merupakan komoditas ekspor andalan Kabupaten Berau yakni batu bara, CPO, kernel dan kayu. Berdasarkan tabel 2.61 dapat terlihat bahwa batu bara merupakan komoditas dengan volume muat paling banyak yang mencapai 30.549.003 MT selama tahun 2020. Untuk komoditas CPO dan kernel, volume muat selama tahun 2020 adalah masing-masing 1.089.347 ton dan 80.177 ton. Sedangkan pengiriman kayu melalui Pelabuhan Tanjung Redeb pada tahun 2020 adalah sebanyak 548.341 M³. Pengangkutan untuk keempat komoditas ini biasanya menggunakan tongkang dengan bantuan kapal *tug boat* sebagai penarik tongkang. Keempat komoditas tersebut banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku oleh perusahaan di luar Kabupaten Berau. Penggunaan satu-satunya batu bara di dalam wilayah domestik Kabupaten Berau adalah sebagai bahan bakar dalam

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Daerah tujuan untuk pengangkutan batu bara hampir seluruhnya adalah ke luar negeri. Sedangkan untuk CPO dan sebagian besar dikirim ke daerah yang memiliki pabrik pengolahan minyak goreng kelapa sawit.

Tabel 2.61
Barang Dimuat di Pelabuhan Tanjung Redeb (Ton/M3/MT), 2020

Jenis Barang	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Batu Bara	2.902.785	2.882.156	2.970.298	2.751.427	1.879.361	3.051.015
CPO	91.418	107.202	99.665	105.548	83.038	84.639
Log's/Kayu	20.650	30.704	36.148	66.013	66.620	44.302
Karnel	6.248	5.125	7.257	8.249	8.699	3.427
Hasil Laut (Perikanan)	48	44	15.056	49	35	59
Container	1.115	1.453	1.438	1.469	921	1.347
Mesin/Alat Berat	493	295	425	290	2.420	2.552
Lain-Lain	0	9	1	1	0	21
Batu Pecah	0	0	0	0	0	0
Solar	0	0	0	0	200	0

Lanjutan Tabel 2.61

Jenis Barang	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Batu Bara	2.830.620	1.835.194	1.912.845	1.700.395	2.793.732	3.039.175
CPO	61.226	64.030	75.437	112.123	104.243	100.778
Log's/Kayu	34.988	36.757	47.136	32.662	95.864	36.497
Karnel	7.202	3.113	5.484	8.742	9.244	7.387
Hasil Laut (Perikanan)	15.014	1.346	26.046	58	48	1.894
Container	1.586	1.467	1.214	1.759	1.380	1.289
Mesin/Alat Berat	3.432	2.590	440	580	181	2.120
Lain-Lain	1	33	0	5.600	219	373
Batu Pecah	0	0		0	0	4.804
Solar	1.840	1.920	115	140	0	185

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Redeb.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan dilepaskan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah

satu yang menjadi dampak dari era yang semakin modern ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Salah satu unit kerja berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membantu dalam proses komunikasi sejak dulu hingga saat ini adalah PT Pos Indonesia (Persero) atau biasa dikenal dengan sebutan kantor pos.

Tabel 2.62
Jumlah Pos Pembantu di Kabupaten Berau, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelay					
Talisayan	1	1	1	1	1
Tabalar					
Biduk-Biduk					
Pulau Derawan					
Maratua					
Sambaliung	1	1	1	1	1
Tanjung Redeb	1	2	2	2	2
Gunung Tabur					
Segah	1	1	1	1	1
Teluk Bayur	2	1	1	1	1
Batu Putih	1	1	1	1	1
Biatan	1	1	1	1	1
Total	8	8	8	8	8

Sumber: PT. POS Indonesia Tanjung Redeb.

Keberadaan Kantor Pos Indonesia hampir di seluruh wilayah Indonesia telah didirikan, begitu juga di Kabupaten Berau telah berdiri satu cabang yang terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Berbagai upaya telah dilakukan kantor pos untuk meningkatkan jangkauan ke daerah yang lebih jauh salah satu upaya tersebut yaitu dengan membangun kantor pos pembantu di level kecamatan. Apabila dilihat dari jumlah kantor pos pembantu yang ada di wilayah Kabupaten Berau, maka terlihat belum semua kecamatan memiliki kantor pos pembantu. Secara total, jumlah kantor pos pembantu hanya sebanyak delapan unit.

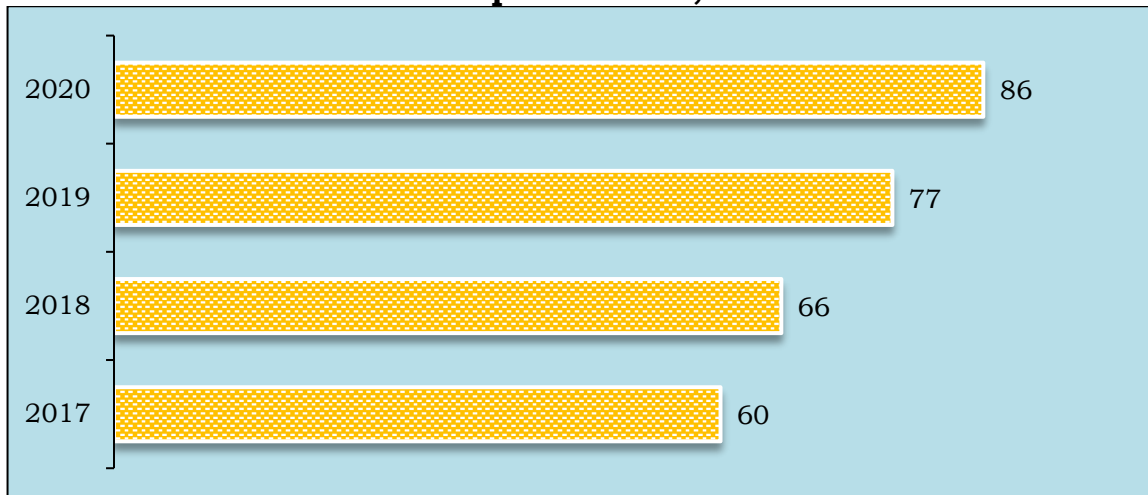
Tabel 2.63
Ketersediaan Jaringan Komunikasi di Kabupaten Berau, 2020

Kecamatan	2G	3G	4G
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelay	Ada	Ada	Ada
Talisayan	Ada	Ada	Ada
Tabalar	Ada	Ada	Ada
Biduk-Biduk	Ada	Ada	Ada
Pulau Derawan	Ada	Ada	Ada
Maratua	Ada	Ada	Ada
Sambaliung	Ada	Ada	Ada
Tanjung Redeb	Ada	Ada	Ada
Gunung Tabur	Ada	Ada	Ada
Segah	Ada	Ada	Ada
Teluk Bayur	Ada	Ada	Ada
Batu Putih	Ada	Ada	Ada
Biatan	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Kebutuhan manusia dalam berkomunikasi saat ini mendorong perkembangan teknologi jaringan komunikasi menjadi semakin canggih. Jaringan teknologi komunikasi adalah serangkaian inter koneksi antar teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Kehadiran teknologi jaringan telekomunikasi ini mampu menghubungkan antar wilayah di Indonesia meski sampai ke daerah terpencil atau perbatasan. ketersediaan jaringan komunikasi di Kabupaten Berau pada tahun 2020 untuk jaringan komunikasi 2G sudah terjangkau di seluruh kecamatan yang ada. Hal ini memberikan indikasi bahwa setiap wilayah di Kabupaten Berau telah terjangkau jaringan telekomunikasi meskipun komunikasi telepon yang digunakan sebatas telepon dan pesan singkat. Namun, perkembangan terhadap ketersediaan jaringan komunikasi, terlebih untuk jaringan 3G dan 4G harus terus ditingkatkan. Tujuannya adalah supaya penduduk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan bahkan membuat aktivitas atau pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Gambar 2.17
Jumlah Kampung/Kelurahan yang Terkoneksi Jaringan Internet
di Kabupaten Berau, 2017-2020



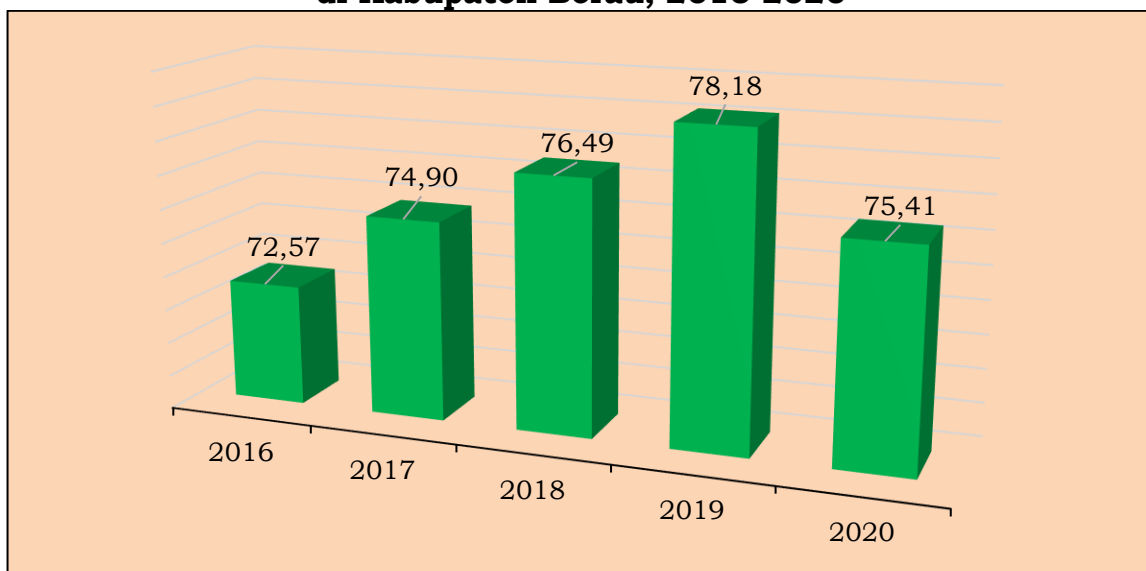
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

Berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi, maka akan menentukan akses internet oleh para penduduk. Pada masa keterbukaan informasi, ketersediaan jaringan internet sangatlah penting baik untuk kepentingan pemerintahan, sekolah, perdagangan dan sebagainya. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah kampung/kelurahan yang terkoneksi jaringan internet selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 86 kampung/kelurahan di Kabupaten Berau yang sudah terkoneksi jaringan internet. Hal ini berarti masih terdapat sebanyak 24 kampung yang belum bisa terkoneksi jaringan internet. Peningkatan ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, salah satunya melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi Informasi (BAKTI). Pada tahun 2020, BAKTI memberikan bantuan berupa *Very Small Internet Satelit* (VSAT) di 25 titik untuk wilayah pesisir dan pedalaman. Layanan internet satelit ini khusus untuk kantor kampung, sekolah dan puskesmas dengan kecepatan 2 hingga 3 Megabytes.

Dari sisi perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi, telepon genggam atau *Handphone* (HP) menjadi alat komunikasi yang lazim

dimiliki oleh masyarakat. HP merupakan perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang berfungsi sebagai alat penyampaian pesan tulisan, suara, dan bahkan video secara nirkabel (tanpa perlu tersambungkan ke jaringan telepon menggunakan kabel). Alat komunikasi ini selain mempermudah komunikasi antar pengguna tanpa harus bertatap muka, juga memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana. HP tersebut juga telah berkembang dengan fungsi tambahan yang semakin menarik, seperti media hiburan (musik, permainan, dan pemutar video), media belajar, media bisnis, dan media lainnya.

Gambar 2.18
Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Menguasai/Memiliki HP
di Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

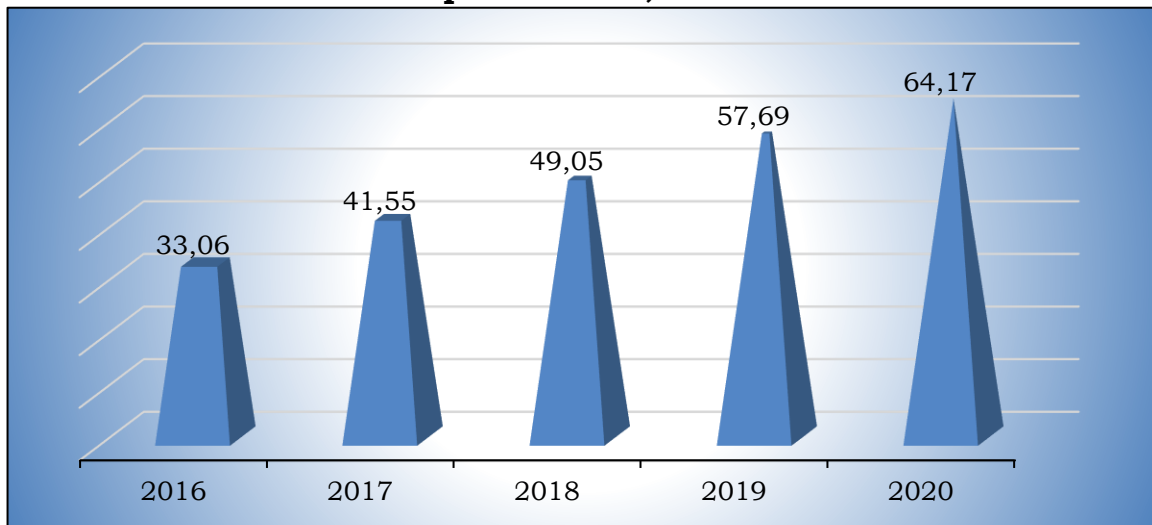
Berdasarkan gambar 2.18 terlihat bahwa kepemilikan atau penggunaan terhadap HP di Kabupaten Berau sudah cukup banyak. Pada tahun 2016 sebanyak 72,57 persen penduduk usia 5 tahun ke atas telah memiliki/menguasai HP. Persentase tersebut terus mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar 78,18 persen di tahun 2019, tetapi kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 75,41 persen. Cukup banyaknya penduduk yang memiliki atau menguasai HP di Kabupaten

Berau mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Berau telah mengikuti perkembangan zaman. Terlebih sekarang HP bukan lagi benda asing bagi masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa telah menggunakan alat komunikasi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Penemuan teknologi ini menjadi pelengkap yang penting dan berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Maka penduduk Kabupaten Berau terus berupaya agar bisa memanfaatkan jaringan teknologi dan komunikasi yang tersedia. Salah satu pemanfaatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanfaatan akses terhadap internet yang cukup besar. Hal ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk Kabupaten Berau selama kurun waktu empat tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan.

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 persentase penduduk yang mengakses internet adalah sebesar 33,06 persen. Angka ini kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 64,17 persen pada tahun 2020. Jadi, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah pengguna internet di Kabupaten Berau cukup besar. Hal tersebut merupakan dampak dari terjadinya perluasan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Berau. Dari sisi diri pribadi penduduk, internet merupakan suatu hal yang dibutuhkan karena dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Pemanfaatan yang paling sering dijumpai di lingkungan masyarakat adalah untuk hiburan, bermedia sosial dan mendapatkan informasi barang dan jasa.

Gambar 2.19
Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Mengakses Internet
di Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

j. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

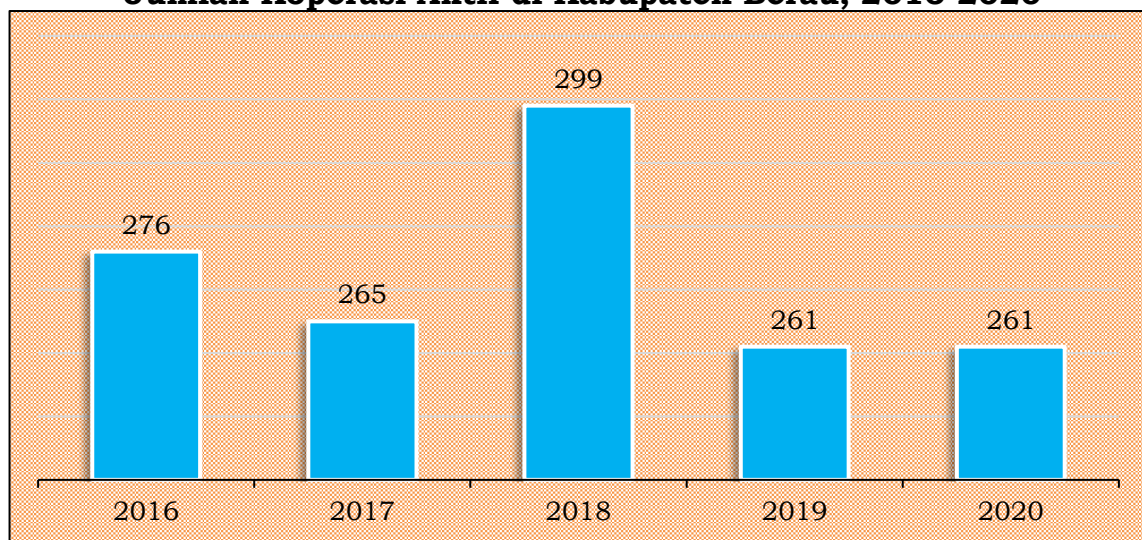
Koperasi merupakan lembaga ekonomi mikro yang berfungsi untuk mensejahterakan penduduk. Keberadaan koperasi tentunya membawa angin segar bagi para pelaku ekonomi di daerah terutama bagi mereka yang membutuhkan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk terus meningkatkan usahanya dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tersebut. Selain koperasi, unit ekonomi yang berperan penting dalam mensejahterakan penduduk adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari sudut pandang ekonomi makro, peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Di Kabupaten Berau, meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun lembaga koperasi masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Pada tahun 2020, jumlah koperasi yang masih aktif di Kabupaten Berau sebanyak 261 unit sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Kemudian dari sisi UMKM, berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, jumlah UMKM di Kabupaten Berau pada tahun 2020 sebanyak 3.234 yang terdiri dari 2.781 usaha mikro, 388 usaha kecil dan 65 usaha menengah. Jika dilihat persebarannya, sebagian besar UMKM terpusat di ibukota Kabupaten yakni Kecamatan Tanjung Redeb yaitu sebanyak 884 UMKM atau 27,33 persen dari total UMKM. Bahkan untuk jenis usaha menengah, 60,00 persen diantaranya atau 39 dari total 65 usaha menengah terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb. Jumlah UMKM yang juga banyak terdapat di

Kecamatan Sambaliung yaitu sebanyak 884 UMKM yang terdiri dari 564 usaha mikro, 38 usaha kecil. Sebaliknya, UMKM yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Biatan yaitu hanya sebanyak 32.

Tabel 2.64
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis UMKM
di Kabupaten Berau, 2020

Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelay	29	4	0	33
Talisayan	353	26	7	386
Tabalar	79	0	0	79
Biduk-Biduk	66	3	0	69
Pulau Derawan	123	24	0	147
Maratua	200	0	0	200
Sambaliung	564	38	0	602
Tanjung Redeb	677	168	39	884
Gunung Tabur	73	25	6	104
Segah	52	0	0	52
Teluk Bayur	255	78	13	346
Batu Putih	284	16	0	300
Biatan	26	6	0	32
Total	2.781	388	65	3.234

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

k. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan istilah investasi merupakan pengorbanan materi atau non materi pada masa sekarang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi, maka akan tercipta perubahan barang modal baru dan akan menyerap faktor produksi baru (termasuk tenaga kerja). Selanjutnya, investasi tersebut dapat menyebabkan penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut yang pada akhirnya akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi yang dilakukan juga dapat menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran. Investasi yang dilakukan di suatu daerah

diharapkan dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut.

Terdapat berbagai faktor penentu dalam menarik investor agar menanamkan modalnya di suatu daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat dua status permodalan yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 2.65
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Berau, 2016-2020

Tahun	Jenis Penanaman Modal	
	PMDN (Juta Rupiah)	PMA (Ribuan US\$)
(1)	(2)	(3)
2016	1.160.750,70	185.268,70
2017	3.256.571,10	20.904,10
2018	4.120.756,00	9.383,60
2019	3.084.469,90	18.765,60
2020	3.615.380,50	16.223,30

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Iklim investasi di Kabupaten Berau cukup fluktuatif baik pada PMDN maupun PMA. Pada tahun 2020, realisasi PMDN di Kabupaten Berau secara kumulatif mencapai 3.615.380,50 juta rupiah. Angka

meningkat dibanding pada tahun 2019 yang sebesar 3.084.469,90 juta rupiah. Selama lima tahun terakhir, realisasi PMDN yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4.120.756,00 juta rupiah dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 1.160.750,70 juta rupiah. Adapun PMA pada tahun 2020 sebesar 16.223,30 ribu US\$. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 18.765,60 ribu US\$. Jika dilihat, realisasi PMDN dan PMA ini berdasarkan data tersebut terlihat saling berkebalikan, artinya jika PMDN meningkat, PMA justru menurun dan begitu juga sebaliknya meskipun secara teoritis belum dapat disimpulkan hubungan diantara keduanya. Jika realisasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2018, PMA pada tahun tersebut justru merupakan yang paling kecil yakni sebesar 9.383,60 ribu US\$. Sedangkan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 185.268,70 ribu US\$.

1. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Dalam capaiannya di Kabupaten Berau, sarana dan prasarana untuk pengembangan urusan ini sudah disediakan pemerintah daerah. Namun dalam pembinaannya masih memerlukan peningkatan mutu dan kualitas.

m. Urusan Statistik

Di Kabupaten Berau terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau mempublikasikan buku Kabupaten Berau Dalam Angka dan buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha dan Produk Domestik Regional Bruto Menurut

Pengeluaran sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

n. Urusan Kebudayaan

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kabupaten Berau memiliki kebudayaan yang cukup beranekaragam baik dari sisi adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya seni. Adapun suku lokal yang turut membentuk dan menjaga kelestarian budaya di Kabupaten Berau sebanyak tiga suku yaitu Dayak, Banua dan Bajau. Kata Dayak berasal dari kata “Daya” yang berarti hulu. Ini mengacu pada tempat tinggal Suku Dayak yang sebagian besar berada di pedalaman atau daerah hulu, ditepi sungai dan hutan dan masih memegang teguh ajaran nenek moyangnya. Di Kabupaten Berau, Suku Dayak tersebar hampir di semua kecamatan. Adapun untuk Suku Banua biasanya bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Sambaliung dan Tanjung Redeb, sedangkan Suku Bajau dapat ditemukan di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua. Masing-masing dari ketiga suku tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda. Sebagai contoh, jika Suku Dayak memiliki Tarian Dayak (beraneka macam jenisnya), Suku Banua memiliki Tarian Jappin dan Suku Bajau memiliki Tarian Dalling. Sampai sekarang ini, kebudayaan Suku Dayak merupakan salah satu budaya dominan sekaligus populer yang terdapat di Pulau Kalimantan dan seringkali menarik minat wisatawan lokal maupun internasional untuk menyaksikannya.

o. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Berau memiliki Perangkat Daerah khusus yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perpustakaan daerah merupakan

salah satu program kegiatan dari Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penyebarluasan data dan informasi sekaligus sosialisasi untuk lebih mengetahui berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Berau. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, urusan kearsipan memiliki posisi penting guna menyusun setiap *database* pembangunan, baik berupa dokumen, bukti fisik, hingga dalam bentuk *softcopy* untuk menjadi bahan rujukan berbagai implementasi pembangunan.

p. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau telah menetapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-2026, dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036; serta
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

q. Urusan Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajiban penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun 2020, opini BPK dalam penilaian terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Berau mengalami perbaikan setelah sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada penilaian yang dilakukan di tahun 2017 untuk penilaian anggaran 2016.

Tabel 2.66

**Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun Penilaian 2016-2020**

Tahun Penilaian	Tahun Anggaran Dinilai	Opini Publik
(1)	(2)	(3)
2016	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Selain itu, menurut hasil penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di lingkup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun evaluasi 2020 untuk anggaran tahun 2019, Kabupaten Berau menduduki peringkat pertama dari tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri tetapi harus meningkatkan kinerja pelayanan publik, karena sebenarnya skor yang diperoleh masih berada pada ambang batas bawah nilai B bila didasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian atas evaluasi pelayanan publik pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.67
Hasil Penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Evaluasi 2016-2020

Kabupaten	2016		2017		2018		2019		2020	
	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paser	3,2845	5	2,9505	4	2,8596	5	3,0241	4	2,6945	6
Kutai Barat	3,1734	6	2,7902	6	2,8971	3	2,9690	6	3,0733	5
Kutai Kartanegara	3,4981	1	3,3182	1	3,1401	1	3,2912	2	3,3328	3
Kutai Timur	3,2856	4	2,9185	5	2,7585	6	3,0181	5	3,2008	4
Berau	3,4958	2	3,1896	2	3,0959	2	3,3642	1	3,5137	1
Penajam Paser Utara	3,3717	3	2,9947	3	2,8691	4	3,0420	3	3,3492	2
Mahakam Ulu							2,2931	7	2,4124	7

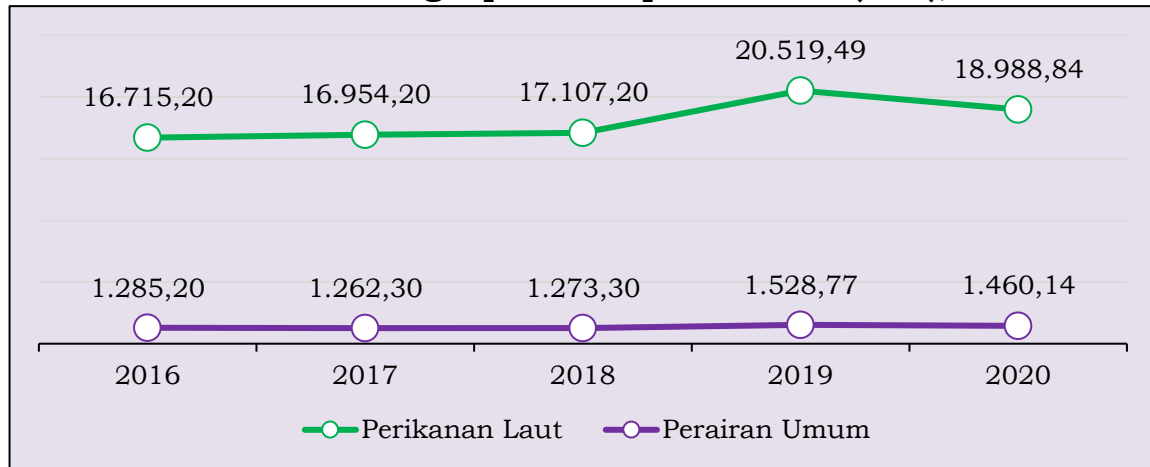
2.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan pilihan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

2.4.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Berau. Posisi Kabupaten Berau yang berada pada pesisir Pulau Kalimantan memberikan keuntungan pada produksi perikanan di Kabupaten Berau. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Perikanan dibagi ke dalam dua jenis yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan perikanan tangkap dirinci lagi menjadi perikanan laut dan perairan umum. Di Kabupaten Berau, perikanan tangkap di laut memberikan hasil produksi yang lebih banyak dibandingkan perikanan tangkap di perairan umum. Terdapat berbagai jenis ikan yang ditangkap dari laut Kabupaten Berau.

Gambar 2.21
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Berau (Ton), 2016-2020



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

Berdasarkan Gambar 2.21 dapat terlihat bahwa produksi ikan tangkap di Kabupaten Berau, baik perikanan laut maupun perairan umum mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan kemudian menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, produksi tangkapan ikan laut sebesar 18.988,84 ton dan produksi tangkapan ikan perairan umum sebesar 1.460,14 ton. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 masing-masing 7,50 persen dan 4,49 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, angka produksi perikanan tangkap tahun 2020 ini masih lebih tinggi. Produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang sebesar 20.519,49 ton untuk perikanan laut dan 1.528,77 ton untuk perairan umum.

Tabel 2.68
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) di Kabupaten Berau, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Budidaya Laut	327,00	192,78	136,10	154,10	139,15
Tambak	1.508,30	1.647,50	1.843,10	1.822,90	1.754,90
Kolam	358,00	337,90	340,50	336,80	344,86
Keramba	9,00	22,04	24,95	42,50	21,08
Total	2.202,30	2.200,22	2.344,65	2.356,30	2.259,99

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

Tidak hanya pada perikanan tangkap, penurunan produksi juga terjadi pada perikanan budidaya tahun 2020 dengan penurunan sebesar 4,09 persen yakni dari 2.356,30 ton pada tahun 2019 menjadi 2.259,99 ton pada tahun 2020. Dari total produksi tersebut, sebanyak 1.754,90 ton merupakan hasil dari budidaya tambak (mencapai 77,65 persen dari total produksi). Sedangkan yang paling sedikit produksinya adalah produksi hasil budidaya keramba yaitu sebanyak 21,08 ton. Dengan dominasi produksi yang lebih 50 persen setiap tahunnya, menjadikan budidaya tambak sebagai budidaya paling menjanjikan dibanding yang lain. Adapun jenis perikanan yang paling banyak dibudidayakan di tambak di Kabupaten Berau adalah bandeng dan udang.

2.4.2 Urusan Pariwisata

Kabupaten Berau memiliki potensi pariwisata sangat besar. Keunggulan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Berau, dianggap sebagai sektor penting yang harus mendapat dan dikembangkan oleh pemerintah. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau terbentuk dari kondisi geografis, sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Berau. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Berau dengan segala kebudayaannya. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur, berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, pemerintah pusat telah membagi ke dalam 3 (tiga) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 12 (dua belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) sebagai berikut:

- DPN 1 yaitu Long Bagun-Melak dan sekitarnya, meliputi 3 KPPN mencakup Long Apari dan sekitarnya, Long Bagun dan sekitarnya dan Melak-Kersik dan sekitarnya.

- DPN 2 yaitu Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya, meliputi 5 KPPN mencakup Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Samarinda dan sekitarnya, Bontang-Sangata dan sekitarnya, Balikpapan dan sekitarnya.
- DPN 3 yaitu: Derawan-Kayan Mentarang dan sekitarnya, mencakup Tanjung Redeb dan sekitarnya, Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya, Kayan-Mentarang dan sekitarnya, dan Tarakan dan sekitarnya.

Kabupaten Berau memiliki banyak objek wisata yang cukup menarik dan potensial untuk dipasarkan. Sayang sekali, objek-objek wisata di Kabupaten Berau belum tertata dan dikembangkan secara baik dan berstandar kepariwisataan.

Tabel 2.69
Beberapa Potensi dan Daya Tarik Obyek Wisata Kabupaten Berau

No.	Nama Objek	Bentuk Daya Tarik/Atraksi
(1)	(2)	(3)
1	Wisata Bahari Pulau Derawan	Pantai, akuarium laut, panorama alam pasir putih, olahraga pantai di Derawan
2	Bumi Pekemahan Tangap	Pemandangan alam, tempat berkemah, pusat aktivitas kegiatan pramuka Teluk Bayur
3	Pulau Samama	Panorama alam, Pasir Putih, Derawan
4	Pulau Kakaban	Panorama alam, hamparan terumbu karang, Derawan
5	Pulau Maratua	Panorama alam, pasir putih, Maratua
6	Taman Laut	Panorama alam, akuarium laut, Derawan dan sekitarnya
7	Taman Cendana	Taman rekreasi keluarga
8	Taman Sanggam	Taman rekreasi keluarga
9	Taman Segah	Wisata kuliner di sepanjang Jl. P. Antasari ke Jl. A. Yani ditepi Sungai Segah sebagai tempat rekreasi keluarga, untuk menikmati lebih baik pada malam hari.
10	Pulau Sangalaki	Pulau tempat penyu bertelur, Derawan.
11	Keraton Kerajaan Gunung Tabur	Wisata sejarah, merupakan peninggalan kerajaan yang pernah hidup ratusan tahun silam, Gunung Tabur.
12	Keraton Kerajaan Sambaliung	Wisata sejarah, merupakan peninggalan kerajaan yang pernah hidup ratusan tahun silam, Sambaliung.
13	Kuburan, Sumur Tuadan Benteng Belanda Pulau Derawan	Wisata sejarah yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda, Derawan.
14	Batarbang	Kesenian tradisional bernuansa Islam yang dipertunjukkan dalam hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya serta penyambutan tamu, di hampir seluruh tempat di Kabupaten Berau.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Nama Objek	Bentuk Daya Tarik/Atraksi
(1)	(2)	(3)
15	Tari Dalling	Tarian yang berasal dari wilayah pesisir yang mempertunjukkan atraksi tarian yang indah, tari suku Bajau.
16	Gusung Batimbang	Akuarium laut, panorama alam pasir putih di Derawan.
17	Gusung Tenggalau	Akuarium laut, panorama alam pasir putih di Derawan.
18	Danau Haji Buang (Pulau Maratua)	Airnya jernih, rasa asin, dihuni oleh ubur- ubur tidak menyengat, Maratua.
19	Danau Ubur-Ubur (Pulau Kakaban)	menyengat, Derawan (P. Kakaban).
20	Gua Angkal-angkal	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
21	Payung-Payung	Batu yang menyerupai payung, Maratua.
22	Hutan Mangrove	Hamparan tumbuhan bakau, Maratua, Teluk Sulaiman.
23	Goa Pangeran	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
24	Goa Tangkapa	Memiliki struktur yang unik, Maratua.
25	Tebing Panji-Panji	Pemandangan alam, bisa melihat punggung hewan yang terbang, Maratua.
26	Gua Tembakau	Goa yang ditumbuhi sepucuk tanaman tembakau, Kelay.
27	Batu Anjing	Batu yang menyerupai anjing, Kelay.
28	Batu Kapen	Batu bisa untuk berteduh saat air sungai surut, Kelay.
29	Batu Lungun	Tempat penguburan mayat, Kelay.
30	Gua Lungun	Tempat penguburan mayat, Kelay.
31	Batu Tembak	Batu yang tersusun menyerupai susunan persenjataan, Kelay.
32	Tari Leleng Dayak	Sebuah pertunjukan seni tari dayak, tari Suku Dayak.
33	Tebing Batu Putih	Pemandangan dan lokasi panjat tebing, Kelay.
34	Goa Ching Yang	Goa kecil dan sempit di Kecamatan Kelay.
35	Kampung Bena Baru	Kampung budaya, merupakan kehidupan sehari-hari suku dayak kenyah dengan adat istiadat, musik serta tari-tarian tradisional, dan benda-benda kerajinan/cagar budaya asli dari suku dayak kenyah.
36	Danau Labuan Cermin	Airnya jernih dan dua rasa, Biduk-Biduk.
37	Air Terjun Danum Baputar	Airnya jernih dan ketinggian 12 meter, Teluk Sulaiman.
38	Air Terjun Wirittasi	Airnya deras dan ketinggian 6 meter, Teluk Sulaiman.
39	Pantai Sungai Serai	Wisata keluarga, Tanjung Batu.
40	Pantai Teluk Sulaiman	Pemandangan dan panorama alam, Teluk Sulaiman.
41	Tao Pe Kong	Wisata religi masyarakat tionghoa di Kabupaten Berau.
42	Kersik	Kehidupan masyarakat dan panorama alam.
43	Penangkaran rusa	Penangkaran rusa.
44	Kuburan Nisan Kuda	Kuburan dengan nisan berbentuk kuda, Derawan.
45	Kawasan Karst Merabu	Goa Purba di Bloyot dan Danau Nyadeng di Kampung Merabu.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Beragamnya potensi obyek wisata yang mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sektor pariwisata melalui terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, sarana dan prasarana yang memadai hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Namun pengembangan potensi pariwisata tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah serta maksimal.

Tabel 2.70
Statistik Pariwisata Kabupaten Berau, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Potensi Pariwisata yang Telah Didata	159	103	172	173	180
Jumlah Hotel dan Akomodasi	277	283	292	348	334
Kunjungan Wisatawan	130.023	207.780	285.880	301.015	127.396
- Wisatawan Mancanegara	2.573	4.376	2.586	8.323	220
- Wisatawan Domestik	127.450	203.404	283.294	292.692	127.176

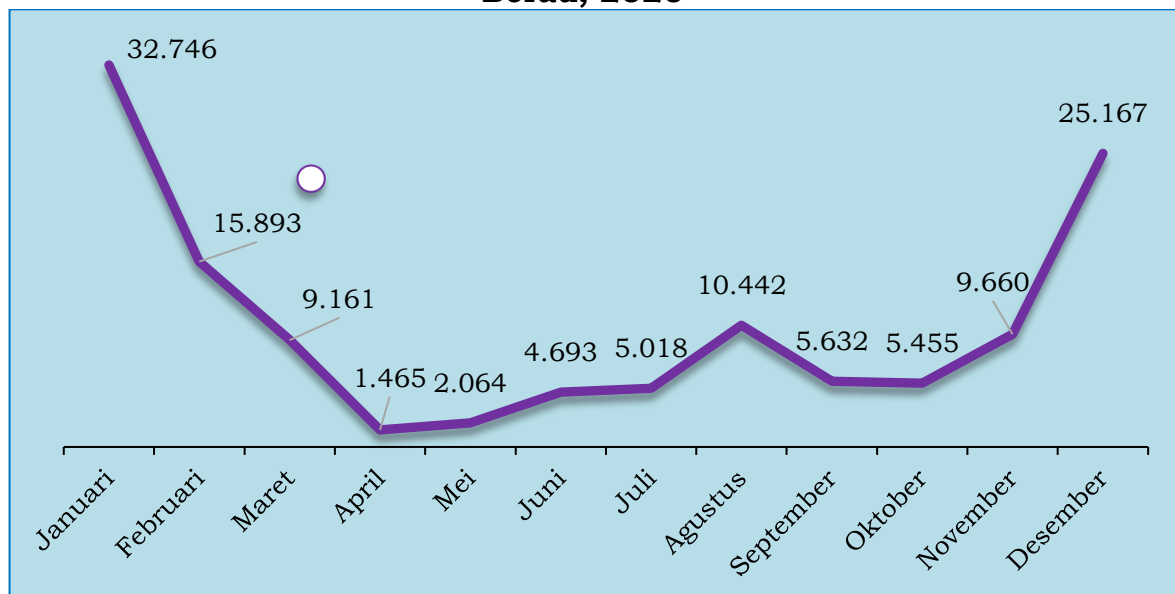
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Selanjutnya, berdasarkan definisi Aiest tersebut maka salah satu hal terpenting dari kawasan pariwisata adalah tersedianya akomodasi wisatawan untuk beristirahat. Namun demikian ada aspek yang harus tetap di perhatikan dalam pendirian akomodasi di kawasan wisata yaitu penyediaan akomodasi atau tempat beristirahat yang memadai dan melibatkan penduduk setempat dalam pengelolaannya. Dengan demikian, penduduk di kawasan daerah wisata dapat memperoleh kesempatan berusaha dengan mendirikan sebuah penginapan. Bahkan bisa juga dengan memanfaatkan sebagian bangunan yang dimilikinya (biasa disebut dengan *home stay*). Selama kurun waktu lima tahun perkembangan jumlah akomodasi di Kabupaten Berau mengalami peningkatan. Pada awalnya ada sebanyak 277 unit akomodasi pada tahun 2016 kemudian terus meningkat menjadi 334 unit akomodasi pada tahun 2020. Peningkatan jumlah akomodasi ini juga saling berkaitan

dengan pariwisata Kabupaten Berau yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun salah satu indikator untuk melihat suatu wilayah memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah dari jumlah kunjungan wisatawan. Kabupaten Berau merupakan daerah yang kaya akan tempat wisata, sehingga tentu memiliki banyak tempat wisata yang dikunjungi wisatawan domestik dan asing. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau pada tahun 2016 sebanyak 130.023 kunjungan yang terdiri dari 2.573 wisatawan mancanegara dan 127.450 wisatawan domestik. Sampai dengan tahun 2019, angka ini terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 8.323 kunjungan wisatawan asing dan 292.692 kunjungan wisatawan domestik. Namun, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan menurun, dimana wisatawan asing menurun 97,36 persen menjadi 220 kunjungan dan wisatawan domestik menurun 56,55 persen menjadi 127.176 kunjungan.

Gambar 2.22
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Setiap Bulan di Kabupaten Berau, 2020



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Adapun perkembangan kunjungan wisatawan setiap bulannya selama tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.21. Pada Januari 2020, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 32.746 wisatawan, dimana angka ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2020. Dengan kondisi kesehatan dunia yang sedang bermasalah termasuk juga di Indonesia, kunjungan wisatawan mulai menurun sejak bulan Februari dan puncaknya pada bulan April, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau hanya 1.465 kunjungan. Selanjutnya, perkembangan kunjungan wisatawan terus berfluktuasi dan dapat kembali mencapai angka yang cukup tinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 25.167 kunjungan. Adapun dari total kunjungan wisatawan asing sebanyak 220 kunjungan, 192 kunjungan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret. Sedangkan selama Mei sampai dengan Desember, jumlah kunjungan wisatawan asing hanya sebanyak 28 kunjungan.

Adapun aset yang dimiliki Kabupaten Berau terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya menjadi prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau. Selain itu, potensi wisata Kabupaten Berau yang beragam menjadikan sektor pariwisata Kabupaten Berau menjadi sektor utama bagi pembangunan wilayah dan perekonomian di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata agar potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Berau dapat dimaksimalkan. Adapun dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata yaitu: 1) tersedianya objek dan daya tarik wisata, 2) adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata dan 3) tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan objek wisata, tabel berikut menyajikan jumlah potensi pariwisata yang telah didata di Kabupaten Berau pada tahun 2020.

**Tabel 2.71
Jumlah Potensi Pariwisata di Kabupaten Berau, 2020**

Kecamatan	Jumlah Potensi Pariwisata
(1)	(2)
Kelay	15
Talisayan	7
Tabalar	9
Biduk-Biduk	12
Pulau Derawan	22
Maratua	13
Sambaliung	7
Tanjung Redeb	2
Gunung Tabur	11
Segah	12
Teluk Bayur	23
Batu Putih	22
Biatan	25
Total	180

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

2.4.3 Urusan Pertanian

Dalam perekonomian Kabupaten Berau, kegiatan pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan ketersediaan lahan, kategori ini masih menjadi alternatif pilihan ketika seseorang tidak mampu memasuki lapangan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus atau ketika belum mendapatkan pekerjaan baru setelah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun pemanfaatan lahan yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Berau adalah untuk kegiatan kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, kontribusi kategori ini dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Berau relatif berfluktuasi naik turun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian mencapai 11,28 persen dan kemudian bergerak naik turun menjadi 10,85 persen pada tahun 2017, 10,99 persen pada tahun 2018 dan 10,69 persen pada tahun 2019. Pada tahun terakhir, kontribusi sektor ini mengalami kondisi yang meningkat dan bahkan mencapai

angka tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 11,64 persen pada tahun 2020.

▪ **Subsektor Pertanian Tanaman Pangan**

Target utama pembangunan sektor pertanian Indonesia antara lain pencapaian swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani. Berbagai informasi dan data pertanian dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan perencanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi program baik di bidang pertanian maupun bidang lain yang terkait dengan sektor pertanian seperti sektor industri, perdagangan dan jasa. Data pertanian khususnya data produksi menjadi salah satu data strategis dalam perekonomian secara umum. Banyak kondisi yang dipengaruhi oleh keberadaan data produksi terutama produksi pertanian tanaman pangan komoditi padi dan palawija.

Tabel 2.72
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Berau, 2018-2020

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi Padi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	6.401,38	19.422,59	30,34
2019	4.771,22	16.739,31	35,08
2020	6.461,68	24.337,31	37,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Dalam periode tiga tahun terakhir, produktivitas padi di Kabupaten Berau menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2018, luas panen di Kabupaten Berau mencapai 6.401,38 ha dengan padi yang dihasilkan sebanyak 19.422,59 ton. Dengan kondisi ini, produktivitas padi pada tahun tersebut sebesar 30,34 kw/ha. Produktivitas meningkat pada dua tahun berikutnya menjadi masing-masing 35,08 kw/ha pada tahun 2019

dan 37,66 kw/ha pada tahun 2020. Adapun produksi padi pada tahun 2020 tersebut adalah 24.337,31 ton yang dihasilkan dari panen seluas 6.461,68 ha.

Selain padi, tanah di Kabupaten Berau dapat juga ditanami berbagai macam tanaman palawija, antara lain: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Diantara berbagai tanaman palawija tersebut, jagung merupakan palawija yang memiliki luas panen terbesar di Kabupaten Berau. Hal ini sesuai dengan program Kementerian Pertanian yang menggandeng Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengembangkan produksi jagung hibrida berbasis teknologi. Pada tahun 2020, produksi jagung di Kabupaten Berau mencapai 48.785,93 ton dengan produktivitas sebesar 54,50 kw/ha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi jagung tahun 2020 ini menurun cukup tajam yakni dari 65.550 ton pada tahun 2018 dan 75.337 ton pada tahun 2019.

Tabel 2.73
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Palawija
di Kabupaten Berau, 2020

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi Padi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jagung	8.951,30	48.785,93	54,50
Kedelai	32,00	46,41	14,50
Kacang Tanah	142,10	183,17	12,89
Kacang Hijau	19,00	10,80	5,68
Ubi Kayu	109,40	3141,70	287,18
Ubi Jalar	58,50	1079,63	184,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Adapun palawija yang memiliki produksi terbesar kedua di Kabupaten Berau adalah ubi kayu dengan total produksi pada tahun 2020 sebesar 3.141,70 ton. Produktivitas dari tanaman ubi kayu ini merupakan yang paling besar dibandingkan tanaman palawija lainnya yaitu sebesar 287,18 kw/ha. Di sisi lain, tanaman kacang hijau memiliki

luas panen, produksi dan produktivitas terkecil yaitu dengan masing-masing nilai 19,00 ha, 10,80 ton dan 5,68 kw/ha.

▪ **Subsektor Perkebunan**

Dari enam subsektor pertanian, subsektor perkebunan memiliki peran terbesar dalam pembentukan PDRB pertanian yang mencapai 50,97 persen pada tahun 2020. Kabupaten Berau memiliki struktur tanah gambut yang cocok untuk berbagai jenis tanaman perkebunan antara lain kelapa, karet, kopi, lada, cengkeh, kakao, dan kelapa sawit. Secara umum, produksi dari berbagai jenis tanaman perkebunan tersebut mengalami penurunan, hanya tanaman kelapa sawit dan kakao yang produksinya mengalami kenaikan pada tahun 2020.

Tabel 2.74
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Berau, 2020

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Luas Tanaman Menghasilkan (ha)	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/ha)	Jumlah Petani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karet	5.184,20	1.265,50	81.897	64,72	2.801
Kelapa Dalam	2.428,18	2.224,52	3.482.739	1.565,61	3.057
Kelapa Sawit	139.171,13	112.834,13	2.223.826.191	19.708,81	39.184
Kakao	1.253,05	880,55	787.660	894,51	1.041
Lada	2.568,60	1.441,30	827.018	573,80	2.562
Kopi	80,50	66,00	11.660	176,67	169
Pala	299,00	9,50	145	15,26	448
Kemiri	5,00	5,00	800	160,00	11
Cengkeh	3,50	2,50	399	159,60	1

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, komoditas perkebunan yang memiliki produksi terbesar pada tahun 2020 adalah kelapa sawit. Dari tanaman yang sudah menghasilkan seluas 112.834,13 ha, produksi kelapa sawit pada tahun 2020 sebesar 2.223.826.191 kg tandan buah segar. Dengan semakin bertambahnya pabrik CPO yang

beroperasi di Kabupaten Berau, menjadikan pemasaran hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, para petani lebih memilih menanam kelapa sawit dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Berdasarkan tabel 2.74 dapat terlihat bahwa jumlah petani kelapa sawit merupakan yang paling banyak mencapai sebanyak 39.184 orang pada tahun 2020.

Produksi tanaman perkebunan terbesar kedua di Kabupaten Berau adalah tanaman kelapa yaitu sebanyak 3.482.739 kg. Tanaman jenis ini banyak ditemukan di daerah-daerah pesisir seperti Kecamatan Biduk-Biduk, Maratua dan Batu Putih. Adapun tanaman karet yang memiliki luas tanam sebesar 5.184,20 ha, yang sudah menghasilkan baru seluas 1.265,50 ha dengan produksi sebanyak 81.897 kg getah karet. Hal ini dimungkinkan karena tanaman karet yang belum memasuki usia panen atau sudah masuk usia panen tetapi tidak disadap karena harga jual yang murah. Kemudian dilihat dari sisi produktivitas, komoditas kelapa sawit memiliki produktivitas paling tinggi yaitu sebesar 19,71 ton/ha yang berarti setiap hektar penanaman kelapa sawit mampu menghasilkan panen kisaran 19,71 ton.

2.4.4 Urusan Kehutanan

Kabupaten Berau memiliki hutan yang cukup luas hingga mencapai lebih dari 15 juta km². Selain menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan, hutan memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Sesuai Undang-undang RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU itu dinyatakan tiga fungsi hutan yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan fungsinya tersebut, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dari ketiga jenis hutan

tersebut, jenis yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Berau adalah hutan produksi yang mencapai 11.914,77 km² yang terdiri dari 483,62 km² hutan produksi konversi, 6.525,79 km² hutan produksi terbatas dan 4.905,36 km² hutan produksi tetap. Hutan produksi ini sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Termasuk dalam hutan jenis ini adalah hutan yang ditanam dan dirawat oleh perusahaan kayu dimana di kemudian hari akan diambil kayunya ketika sudah memasuki umur panen.

Tabel 2.75
Luas Kawasan Hutan menurut Fungsinya di Kabupaten Berau

Tata Guna Hutan Kesepakatan	Luas (Km2)
(1)	(2)
Hutan Lindung	3.602,54
Hutan Mangrove	3,18
Suaka Marga Satwa	0,59
Hutan Produksi Konversi	483,62
Hutan Produksi Terbatas	6.525,79
Hutan Produksi Tetap	4.905,36
Total	15.521,09

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036.

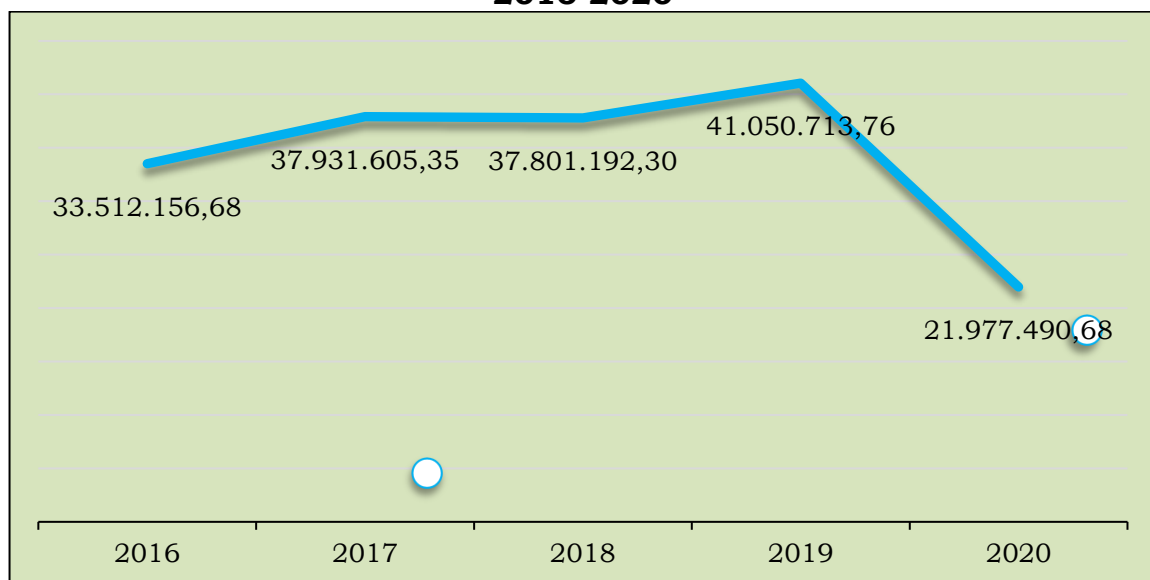
2.4.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Berau, kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar adalah kategori pertambangan dan penggalian yaitu dengan kontribusi sebesar 56,43 persen pada tahun 2020. Dalam kategori pertambangan dan penggalian itu sendiri, sebanyak 82,27 persen merupakan kontribusi dari pertambangan batu bara. Kenaikan dan penurunan pada kategori pertambangan dan penggalian sangat bergantung pada eksplorasi dan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau. Dengan demikian, gejolak pada kegiatan pertambangan batu bara akan berpengaruh terhadap kategori pertambangan dan penggalian secara keseluruhan. Pada tahun 2018, total produksi batu bara di Kabupaten Berau menurun 0,34 persen atau mengalami penurunan produksi sebesar 0,13 juta metrik ton yaitu dari 37,93 juta metrik ton pada tahun

2017 menjadi 37,80 metrik ton pada tahun 2018. Adapun total produksi batu bara di Kabupaten Berau selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar 2.23.

Meskipun kategori ini memiliki nilai tambah yang cukup besar dan pengaruh ke kategori yang lainnya cukup kuat, namun komoditas utama kategori tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional. Terjadinya goncangan harga batu bara di tingkat internasional, tentu berdampak cukup kuat pada permintaan dan produksi batu bara di daerah. Akibatnya, perekonomian total daerah yang bergantung pada sektor ini juga akan terdampak cukup kuat. Selain itu, sangat disayangkan bahwa batu bara merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang ketersediannya dapat habis kapan saja. Akan lebih baik jika dikembangkan alternatif komoditas lain seperti komoditas hasil pertanian.

Gambar 2.23
Perkembangan Produksi Batu Bara di Kabupaten Berau (Metrik Ton), 2016-2020

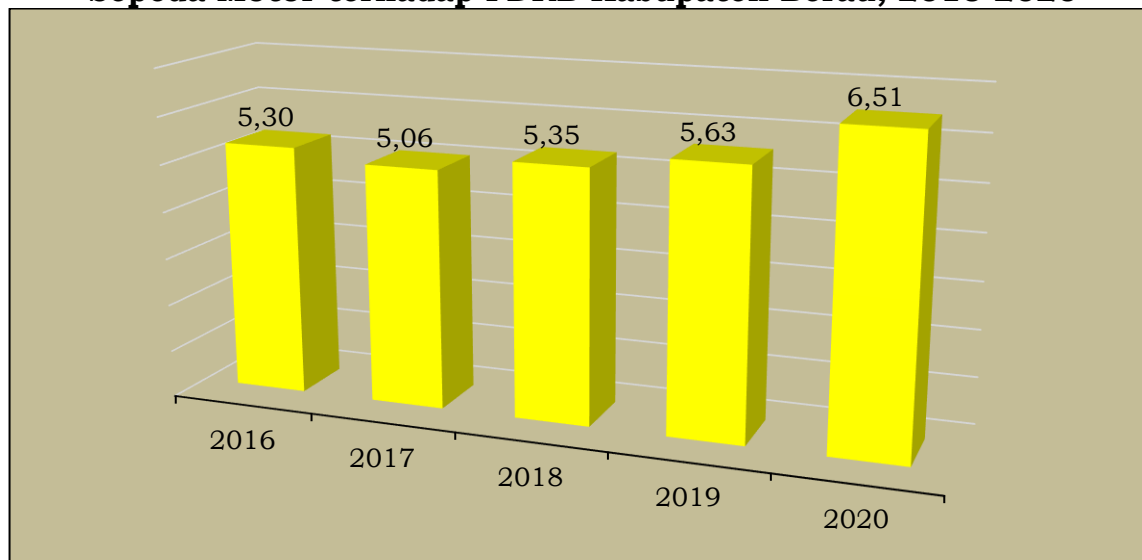


Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

2.4.6 Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang merepresentasikan perekonomian rakyat atau usaha mikro kecil. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu ada persyaratan tertentu. Perdagangan tersebut terjadi karena ketidakmampuan penduduk untuk menghasilkan barang sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, pada aktivitas di luar kategori pertanian, kegiatan perdagangan mampu menyerap 30,65 persen tenaga kerja dengan jumlah usaha mencapai 52,17 persen dari total usaha/perusahaan di Kabupaten Berau.

Gambar 2.24
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Berau, 2016-2020



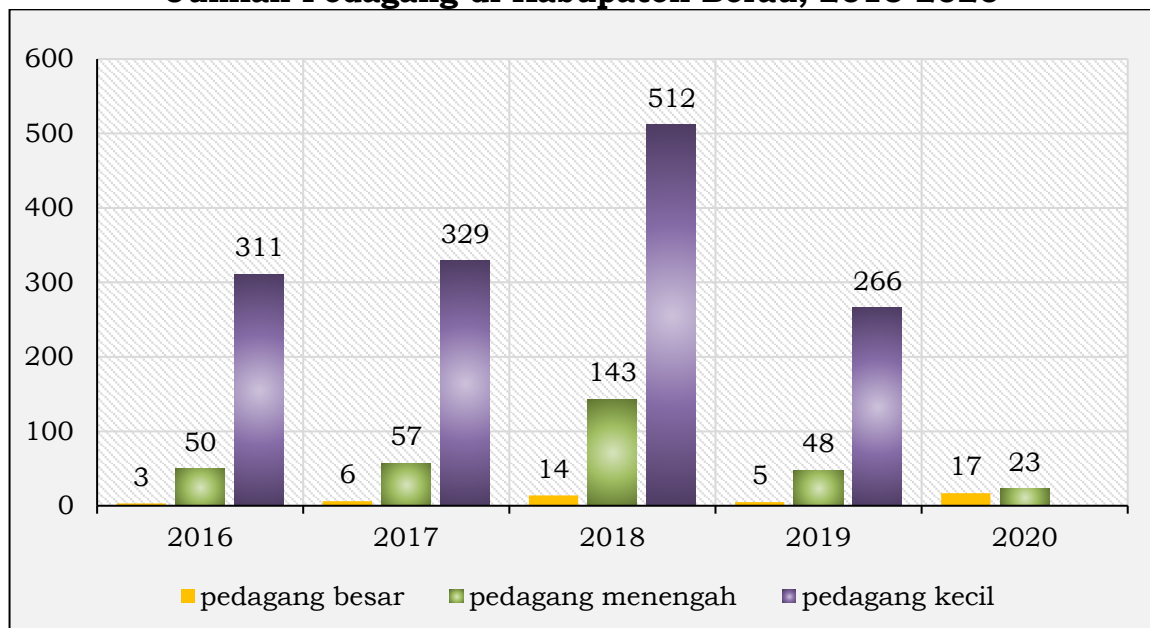
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

Selama tahun 2016 sampai dengan 2019, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berada pada urutan empat kategori penyumbang PDRB Kabupaten Berau. Kemudian karena menurunnya aktivitas transportasi dan pergudangan pada tahun 2020, peringkat kontribusi dari kategori ini menanjak menjadi berada pada

urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 6,51 persen. Adapun besarnya kontribusi kategori ini pada tahun-tahun sebelumnya adalah 5,30 persen (2016), 5,06 persen (2017), 5,35 persen (2018) dan 5,63 persen (2019).

Sebelum tahun 2020, jenis pedagang dibedakan menjadi tiga yaitu pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil. Pada tahun 2019, jenis pedagang yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Berau adalah pedagang kecil yang mencapai 266 pedagang, sedangkan pedagang besar dan perdagangan menengah masing-masing 5 pedagang dan 48 pedagang. Mulai tahun 2020, pedagang hanya dibedakan menjadi dua jenis yaitu pedagang *supplier* dan pedagang eceran dimana pada tahun 2020 jumlah untuk masing-masing jenis pedagang tersebut sebanyak 17 pedagang dan 23 pedagang.

Gambar 2.25
Jumlah Pedagang di Kabupaten Berau, 2016-2020



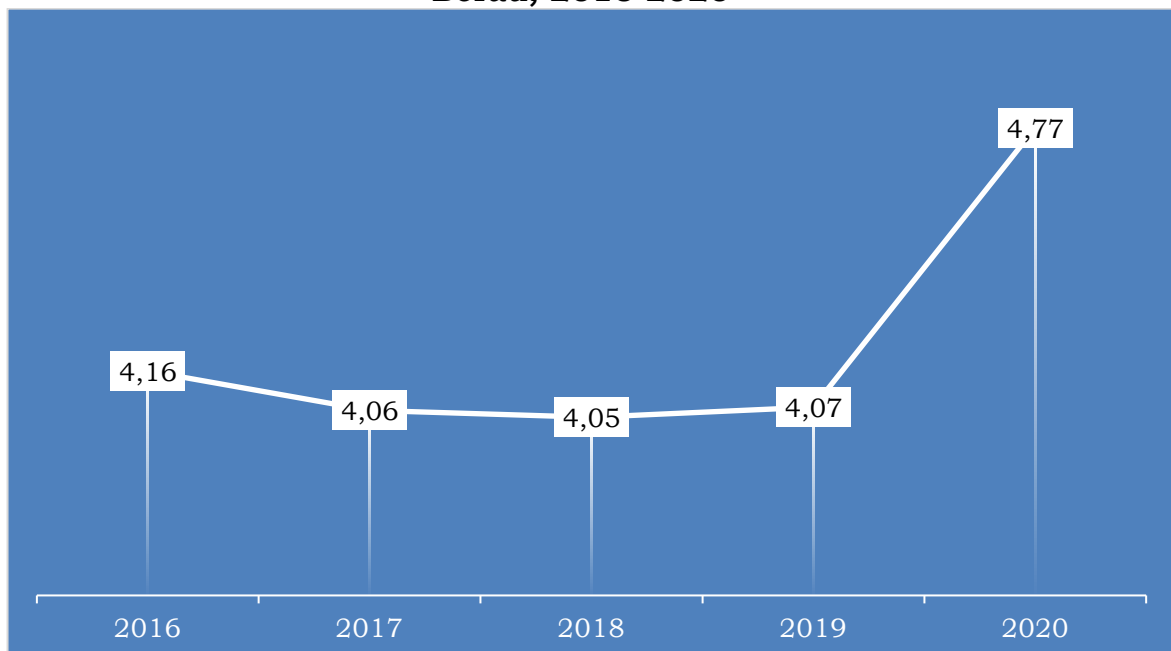
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

2.4.7 Urusan Perindustrian

Pada beberapa daerah sentra industri, peran kategori industri pengolahan dalam perekonomian masih menjadi yang paling dominan pada tahun 2020 seperti Jawa Barat (41,19 persen), Jawa Tengah (34,52

persen) dan Jawa Timur (30,69 persen). Adapun untuk di Kabupaten Berau peran kategori ini masih cukup rendah dan hanya berkisar di bawah lima persen setiap tahunnya. Pada tahun 2020, besarnya kontribusi kategori industri pengolahan mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 4,77 persen. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, angka kontribusi kategori ini masing-masing 4,16 persen (2016), 4,06 persen (2017), 4,05 persen (2018) dan 4,07 persen (2019). Peningkatan angka kontribusi ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan bahan baku dalam industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Pada tahun 2020, terdapat penambahan satu pabrik pengolahan CPO sehingga total pabrik CPO yang beroperasi di Kabupaten Berau menjadi sebanyak 11 unit. Dengan penambahan tersebut, sejalan dengan teori produksi, semakin banyak barang modal dan bahan baku maka output yang dihasilkan akan semakin besar.

Gambar 2.26
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Berau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.

2.4.8 Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu program nasional yang ingin diwujudkan pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan. Kabupaten Berau memiliki potensi cukup besar sebagai wilayah tujuan program transmigrasi terutama dalam bidang pertanian.

2.5 PEMETAAN KESELARASAN ANTARA INDIKATOR TPB/SDG DENGAN INDIKATOR RPJMD (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mengindikasikan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan nasional yang seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui indikator kinerja pembangunan daerah. Pemetaan keselarasan indikator SDG's tingkat kabupaten dengan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Berau dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 2.76

**Pemetaan Keselarasan antara Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/SDGs dengan Indikator RPJMD
(Permendagri 86 Tahun 2017)**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
I					Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	II	8	1	1(b)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,70	3,01	2,07	5,61	-3,35	
1.2	II	10	1	1(g)	Tingkat inflasi	%	2,85	3,15	3,24	1,66	0,78	
1.3a	II	8			PDRB ADHB	Juta Rp	30.814.337,3 ₁	35.656.556,1 ₈	37.661.474,1 ₄	39.102.605,4	35.469.298,5 ₅	
1.3b	II	8	1	1(a)	PDRB Per Kapita	Juta Rp	143,44	161,63	166,27	168,34	148,90	
1.4	II	10	1	1*	Indeks gini	%	0,3397	0,3309	0,3025	0,3445	0,3000	
1.5	I	1	2	1*	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	94,63	94,59	94,96	94,96	94,81	
1.6	I	16	1	1(a)	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	N/A	70	75	99	74	
1.7	I	8	5	2*	Tingkat pengangguran	%	N/A	6,45	5,62	5,08	5,08	
1.8	II	8	1	1(b)	Pendapatan perkapita	Juta	143,44	161,63	166,27	168,34	148,90	
1.9	II	8			Paritas daya beli (perkapita/ tahun)	Rp	11675000	11843000	12207000	12726000	12018000	
1.10.a	I	1	2	1(a)	Jumlah Penduduk	Jiwa	214.828	220.601	226.509	232.287	238.214	
1.10.b	I	1	2	1(b)	Pertumbuhan Penduduk	%	2,84	2,69	2,68	2,55	2,55	
1.11	I	1		1.a.2*	IPM	%	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71	
II					Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1					Pendidikan							
2.1.3	I	4	5	1*	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	8,96	8,98	9,25	9,52	Disdik
2.1.4a	I	4	6	1.(a)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	31,77	33,71	35,48	25,68	30,07	Disdik
2.1.4b	I	4	2	2.(a)	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	104,35	108,81	108,94	106,89	105,78	Disdik
2.1.4c	I	4	4	1*	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	103,77	101,62	81,42	82,85	82,89	Disdik
2.1.4d	I	4		4.a.1*	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	95,07	85,75	89,67	93,50	92,61	Disdik
2.1.5a	I	4	4	1.(g)	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	92,05	96,41	99,23	99,06	99,04	Disdik
2.1.5b	I	1	4	1.(h)	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	81,41	81,44	79,19	78,86	79,64	Disdik
2.1.5c	I	4		4.a.1*	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	66,20	68,34	71,32	70,82	71,19	Disdik

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2					Kesehatan							
2.2.1	I	3	2	2.(c)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Per 1.000 Kelahiran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinkes
2.2.2	I	3	3	2.(b)	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06	Dinkes
2.2.3	I	2	1	1.(a)	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,23	0,07	0,04	0,03	0,12	Dinkes
2.2.4	I	3	9	3.(b)	Rata-rata Lama Rawat Inap	Hari	5,69	7,06	6,23	5,33	4,83	Dinkes
2.2.5	I	3	7	1.(c)	Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir menurut penolong proses kelahiran terakhir							Dinkes
	I	3			- Dokter Kandungan	%	42,36	42,57	46,27	31,42	32,92	Dinkes
	I	3			- Dokter Umum	%	3,32	0,89	0,63	5,2	1,11	Dinkes
	I	3			- Bidan	%	54,32	55,35	50,68	61,55	65,51	Dinkes
	I	4	1	1.(b)	- Tenaga Kesehatan Lainnya	%	0,00	1,18	1,57	1,82	0,00	Dinkes
	I	3			- Dukun	%	0,00	0,00	0,86	0,00	0,46	Dinkes
	I	3			- Lainnya	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinkes
2.2.6	I	1	4	1.(c)	Persentase Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk							Dinkes
	I	3			- MOW	%	2,60	3,62	3,82	3,72	4,32	Dinkes
	I	3			- MOP	%	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	Dinkes
	I	3			- IUD/Spiral	%	5,82	6,67	6,64	6,59	7,19	Dinkes
	I	3			- Suntikan	%	54,40	53,13	54,85	53,95	51,89	Dinkes
	I	3			- Susuk KB/Implan	%	5,72	5,16	6,54	7,98	9,80	Dinkes
	I	3			- Pil	%	29,08	28,64	25,79	25,55	24,54	Dinkes
	I	3			- Kondom	%	2,33	2,72	2,33	2,16	2,22	Dinkes
2.2.7	I	1	4	1.(b)	Persentase Balita Yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi							Dinkes
	I				- Hb < 7 Hari	Orang	3.096	3.634	3.596	3.596	3.748	Dinkes
	I				- BCG	Orang	4.480	4.692	4.546	4.546	4.771	Dinkes
	I				- DPT-HB-Hib3	Orang	4.521	4.728	4.819	4.897	4.545	Dinkes
	I				- Polio 4	Orang	4.399	4.720	4.803	4.797	4.554	Dinkes

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	I				- Campak	Orang	4.376	4.545	4.940	4.649	4.324	Dinkes
	I				- Imunasi dasar lengkap	Orang	4.248	4.476	4.877	4.581	4.061	Dinkes
2.3					Pertanahan							
2.3.1	IV	15	1	1.(b)	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%	71,57	66,46	73,46	66,38	76,23	Distanah
2.4					Ketenagakerjaan							
2.4.1	II	8	3	1.(d)	Persentase Penduduk yang Kegiatan Utamanya Bekerja	%	N/A	61,74	64,04	63,70	63,97	Disnakertrans
III	Fokus Budaya dan Olahraga											
3.1					Kebudayaan							
3.1.1	I	8	9	1.(d)	Jumlah grup kesenian	Grup	30	52	52	52	52	Disbudpar
3.1.2	I	8	9	1.(f)	Jumlah gedung kesenian	Unit	3	3	3	3	3	Disbudpar
3.2					Pemuda dan Olahraga							
3.2.1	I	3		4.c.1(a)	Jumlah klub olahraga	Klub	108	113	119	123	125	Dispora
3.2.2	I	3		4.c.1(b)	Jumlah gedung olahraga	Unit	2	2	2	2	2	Dispora
Aspek Pelayanan Umum												
A	Urusan Pemerintahan Wajib											
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1.1					Urusan Pendidikan							
1.1.1a	I	4	2	2.(b)	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	97,65	98,82	99,23	99,25	99,37	Disdik
1.1.1b	I	4	2	2.(c)	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	97,15	97,92	98,03	97,80	97,59	Disdik
1.1.1c	I	4	2	2.(d)	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%	75,55	84,77	77,07	79,23	81,38	Disdik
1.1.2a	I	4	2	2.(e)	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SLTP/MTs	Per 10.000	10,52	10,24	10,02	10,12	9,99	Disdik
1.1.2b	I	4	2	2.(f)	Rasio ketersediaan sekolah SLTA/MA/SMK	Per 10.000	1,72	1,68	1,59	1,55	1,51	Disdik
1.1.3a	I	4	2	2.(g)	Rasio Murid terhadap Guru SD/MI Negeri	Per 1 Guru	14,34	13,73	13,84	14,04	15,07	Disdik
1.1.3a	I	4	2	2.(h)	Rasio Murid terhadap Guru SD/MI Swasta	Per 1 Guru	14,44	13,90	14,29	13,17	13,42	Disdik
1.1.3b	I	4	2	2.(i)	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs Negeri	Per 1 Guru	13,99	14,18	13,99	13,28	13,35	Disdik
1.1.3b	I	4	2	2.(j)	Rasio Murid terhadap Guru SLTP/MTs Swasta	Per 1 Guru	9,09	9,76	11,58	10,34	10,24	Disdik

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1.3c	I	4	2	2.(k)	Rasio Murid terhadap Guru SLTA/MA Negeri	Per 1 Guru	14,69	15,37	15,39	15,24	15,78	Disdik
1.1.3c	I	4	2	2.(l)	Rasio Murid terhadap Guru SMK Negeri	Per 1 Guru	9,79	11,13	11,96	11,52	11,60	Disdik
1.1.3c	I	4	2	2.(m)	Rasio Murid terhadap Guru SLTA/MA/SMK Swasta	Per 1 Guru	11,04	11,30	13,96	12,91	12,40	Disdik
1.1.4a	I	4		4.c.1(c)	Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs dalam kondisi bangunan baik	%	N/A	34,89	96,98	95,37	N/A	Disdik
1.1.4b	I	4		4.c.1(d)	Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs dalam kondisi bangunan baik	%	N/A	34,89	96,98	95,37	N/A	Disdik
1.1.4c	I	4			Rasio Murid SD/MI Negeri terhadap sekolah		177,03	180,27	182,88	187,86	190,79	Disdik
1.1.4c	I	4			Rasio Murid SD/MI Swasta terhadap sekolah		183,31	193,54	205,54	206,93	215,71	Disdik
1.1.4d	I	4			Rasio Murid SLTP/MTs Negeri terhadap sekolah		245,39	252,32	255,55	244,43	239,44	Disdik
1.1.4d	I	4			Rasio Murid SLTP/MTs Swasta terhadap sekolah		120,42	124,42	131,25	113,73	106,59	Disdik
1.1.4e	I	4			Rasio Murid SLTA/MA Negeri terhadap sekolah		334,19	357,38	380,81	384,88	413,19	Disdik
1.1.4e	I	4			Rasio Murid SMK Negeri terhadap sekolah		247,25	265,75	273,50	295,25	303,13	Disdik
1.1.4e	I	4			Rasio Murid SLTA/MA/SMK Swasta terhadap sekolah		140,15	148,69	166,33	189,33	194,25	Disdik
1.1.4f	I	4			Rasio Murid SMK terhadap sekolah		210,29	217,07	220,79	244,50	253,71	Disdik
1.1.5a	I	4			Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	%	0,01	0,00	0,00	0,35	0,00	Disdik
1.1.5b	I	4			Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	%	2,85	1,28	1,97	2,20	2,41	Disdik
1.1.5c	I	4			Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	24,46	15,23	22,94	20,77	18,62	Disdik
1.1.6a	I	4			Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdik
1.1.6b	I	4			Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdik
1.1.6c	I	4			Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdik
1.1.7a	I	4			Angka Melanjutkan SD/MI ke SLTP/MTs	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdik
1.1.7b	I	4			Angka Melanjutkan SLTP/MTs ke SLTA/MA/ SMK	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disdik
1.1.7c	I	4			Persentase Penduduk tidak mempunyai ijazah	%	12,18	13,04	17,44	12,85	9,39	Disdik
1.1.7d	I	4			Persentase Penduduk Berijazah SD Sederajat	%	32,01	23,43	21,45	19,77	21,64	Disdik

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1.7e	I	4			Persentase Penduduk Berijazah SMP Sederajat	%	14,36	23,33	19,81	19,87	21,09	Disdik
1.1.7f	I	4			Persentase Penduduk Berijazah SMA Sederajat	%	30,98	30,15	29,20	36,42	35,92	Disdik
1.1.7g	I	4			Persentase Penduduk Berijazah Sarjana/Diploma	%	10,47	10,04	12,10	11,09	11,96	Disdik
1.1.8	I	4			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	86,2	87,68	91,95	92,1		Disdik
1.1.9	I	4			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	13,29	13,30	13,31	13,32	Disdik
1.2					Urusan Kesehatan							
1.2.1	I	2	2	2.(d)	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	1,84	1,10	2,09	1,11	1,10	Dinkes
1.2.1	I	2	2	2.(e)	Jumlah Posyandu	Unit	251	257	264	267	268	Dinkes
1.2.2a	I	2	2	2.(f)	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	8,84	9,52	9,27	9,04	8,82	Dinkes
1.2.2a	I	2	2	2.(g)	Jumlah Puskesmas Perawatan	Unit	19	21	21	21	21	Dinkes
1.2.2b	I	2	2	2.(h)	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	50,74	49,41	48,12	48,22	47,02	Dinkes
1.2.2b	I	2	2	2.(i)	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	109	109	109	112	112	Dinkes
1.2.2c	I	2	2	2.(j)	Rasio puskesmas keliling per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	13,96	14,96	14,57	14,21	0,00	Dinkes
1.2.2c	I	2	2	2.(k)	Jumlah puskesmas keliling	Unit	30	33	33	33	33	Dinkes
1.2.3	I	2	2	2.(l)	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	0,47	0,91	0,88	0,86	0,84	Dinkes
1.2.3	I	2	2	2.(m)	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	2	2	2	2	Dinkes
1.2.4	I	2	2	2.(n)	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	45,62	53,04	50,33	48,22	54,99	Dinkes
1.2.4	I	2	2	2.(o)	Jumlah Dokter umum	Orang	54	75	71	74	86	Dinkes
1.2.4	I	2	2	2.(p)	Jumlah dokter spesialis	Orang	19	19	20	19	27	Dinkes
1.2.4	I	2	2	2.(q)	Jumlah dokter gigi	Orang	25	23	23	19	18	Dinkes
1.2.5a	I	2	2	2.(r)	Rasio tenaga medis bidan per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	123,82	125,57	129,80	133,46	142,31	Dinkes

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.2.5a	I	2	2	2.(s)	Jumlah Bidan	orang	266	277	294	310	339	Dinkes
1.2.5b	I	2	2	2.(t)	Rasio tenaga medis perawat per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	280,69	279,24	270,19	267,34	277,48	Dinkes
1.2.5b	I	2	2	2.(u)	Jumlah perawat	Orang	603	616	612	621	661	Dinkes
1.2.6	I	2	2	2.(v)	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	94,85	98,95	98,90	98,10	98,40	Dinkes
1.2.7	I	3	2	2.(a)	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	Per 1.000 KH	16,60	17,76	18,40	19,30	22,60	Dinkes
1.2.8	I	3	2	1*	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	Per 1.000 KH	18,00	20,82	22,00	21,10	25,70	Dinkes
1.2.9	I	3	1	1*	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran	Per 100.000 KH	170,00	183,67	154,60	96,70	153,10	Dinkes
1.2.10	I	3	9	3.(b)	Angka Kesakitan (Morbiditas)	%	19,69	11,25	16,28	14,44	15,66	Dinkes
1.2.11	I	1	3	1.(e)	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	96,89	86,19	98,10	99,00	93,10	Dinkes
1.2.12	I	1	4	1.(l)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90,00	90,91	89,09	89,09	53,60	Dinkes
1.2.13	I	2	1	1.(b)	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinkes
1.2.14	I	3	3	4.(b)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Per 100.000	203,42	28,86	73,70	212,70	84,40	Dinkes
1.2.15	I	17	18	1.(b)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.16	I	3	2	3.2.1(a)	Cakupan kunjungan bayi	%	73,75	67,42	77,10	75,70	56,30	Dinkes
1.2.17	I	3		3.b.1.(b)	Jumlah puskesmas	Unit	19	21	21	21	21	Dinkes
1.2.18	I	3		3.b.1.(c)	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	109	109	109	112	112	Dinkes
1.2.19	I	3	3	2.(a)	Angka prevalensi HIV/AIDS	1000 KH	0,20	0,91	0,02	0,01	0,14	Dinkes
1.2.20	I	3	3	1.(b)	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinkes
1.2.21	I	3	3	4.(a)	Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,42	0,53	0,4	0,09	0,50	Dinkes
1.2.22	I	3	3	5*	Angka kematian akibat malaria	Jiwa	0	0	0	0	0	Dinkes
1.2.23	I	3	3	3*	Angka prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Jiwa	207,30	182,47	181,44	216,54	29,03	Dinkes
1.3					Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3.1	III	9	1	1.(d)	Panjang jalan dalam kondisi baik	KM	N/A	795,92	635,46	567,43	N/A	DPUPR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3.2	III	9	1	1.(e)	Rasio Jaringan Irigasi	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.3	III	10	2	1(c)	Rasio tempat ibadah per satuan per 100.000 penduduk	Per 1.000 Penduduk	174,56	170,44	164,67	170,05	169,60	Setda Bag. Kesra (Bukan Kewenangan DPUPR)
1.3.3	III	10	2	1(d)	Jumlah Masjid	Unit	205	206	206	228	221	Setda Bag. Kesra (Bukan Kewenangan DPUPR)
1.3.3	III	10	2	1(e)	Jumlah Gereja dan Kapel Katholik	Unit	38	38	38	38	54	Setda Bag. Kesra (Bukan Kewenangan DPUPR)
1.3.3	III	10	2	1(f)	Jumlah Gereja Protestan	Unit	131	131	128	128	128	Setda Bag. Kesra (Bukan Kewenangan DPUPR)
1.3.3	III	10	2	1(g)	Jumlah Pura	Unit	1	1	1	1	1	Setda Bag. Kesra (Bukan Kewenangan DPUPR)
1.3.3	III	1	4	1.(e)	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	%	77,92	59,54	81,97	89,61	91,76	DPUPR
1.3.3	III	1	4	1.(e)	Akses terhadap sanitasi layak	%	73,73	76,93	77,17	83,89	81,52	DPUPR
1.3.9	III	9	1	1.(f)	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.10	III	9	2	1.(b)	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.11	III	15	3	1.(e)	Luas lahan pertanian yang terlayani	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.12	III	6	2	1.(b)	Kapasitas air baku	Lt/Detik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.13	III	1	4	1.(c)	Cakupan layanan air minum	%	16,22	19,57	18,32	6,82	9,70	DPUPR
1.3.14	III				Jumlah DAS Kritis	DAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.15	III				Jumlah Pelanggan air bersih	Pelanggan	16.120	17.370	20.118	22.917	28.367	DPUPR
1.3.16	III				Volume air yang disalurkan	M ³	8.745.904	8.658.261	10.738.255	11.741.604	14.366.826	DPUPR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.3.17	III				Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.18	III				Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.19	III				Ketaatan terhadap RTRW	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.20	III				Luas wilayah produktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.21	III				Luas wilayah industri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.3.22	III				Luas wilayah perkotaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPUPR
1.4					Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1.4.1	III	6			Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	%	79,90	88,77	87,97	93,45	94,91	DPUPR
1.4.2	II	7			Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	98,35	97,85	98,90	99,79	99,54	DPKP
1.4.3	III	6			Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	77,92	59,54	81,97	89,61	91,76	DPKP
1.4.4	III	11	1	1.(d)	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	%	96,36	95,01	98,41	98,38	97,97	DPKP
1.4.5	III	11	1	1.(e)	Rasio permukiman layak huni		80,48	99,30	100	99,53	99,15	DPKP
1.4.6	III	11	1	1.(f)	Persentase pemukiman kumuh	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPKP
1.4.7	II	9			Persentase Rumag Tangga Menurut Rata-Rata Luas Lantai per Kapita							DPKP
	II	9			- < 10 m2	%	23,19	25,39	16,29	20,97	19,19	DPKP
	II	9			- >= 10 m2	%	76,81	74,60	83,71	79,03	80,81	DPKP
1.4.8	III	11			Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding							DPKP
	III	11			- Tembok	%	22,20	22,89	28,47	34,45	28,60	DPKP
	III	11			- Kayu	%	76,51	76,94	71,53	65,02	70,67	DPKP
	III	11			- Bambu/Lainnya	%	1,28	0,17	0,00	0,53	0,73	DPKP
1.4.9	III	11			Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap							DPKP
	III	11			- Beton	%	1,89	2,71	1,42	1,80	0,18	DPKP
	III	11			- Genteng	%	3,58	0,03	3,20	2,52	2,03	DPKP
	III	11			- Asbes	%	2,04	4,53	1,98	5,80	0,88	DPKP
	III	11			- Seng	%	87,29	91,32	92,86	88,70	95,45	DPKP
	III	11			- Bambu/Kayu/Sirap	%	4,46	1,41	0,54	1,07	1,46	DPKP

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	III	11			- Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia/Lainnya	%	0,74	0,00	0,00	0,12	0,00	DPKP
1.4.10	III	6			Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum							DPKP
	III	6			- Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	%	56,32	63,88	61,74	74,79	76,70	DPKP
	III	6			- Ledeng Meteran/Eceran	%	16,22	19,57	18,32	6,82	9,70	DPKP
	III	6			- Sumur Terlindung	%	5,54	7,57	3,67	5,72	5,02	DPKP
	III	6			- Sumur Tak Terlindung	%	4,22	1,85	4,85	4,21	3,42	DPKP
	III	6			- Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	%	4,08	2,31	1,13	1,32	1,11	DPKP
	III	6			- Lainnya	%	2,22	1,71	2,67	3,54	1,86	DPKP
1.4.11	III	6			Persentase Rumah Tangga Fasilitas Jamban							DPKP
	III	6			- Sendiri	%	89,56	90,48	91,56	92,44	96,57	DPKP
	III	6			- Bersama	%	5,10	3,41	2,36	5,00	1,06	DPKP
	III	6			- MCK/Komunal/Umum	%	1,33	2,20	6,08	1,46	0,64	DPKP
	III	6			- Tidak Ada	%	4,01	3,90	0,00	1,09	1,73	DPKP
1.4.12	III	11	6	1.(c)	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DLHK
1.5					Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1.5.1	I	3			Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kepolisian Daerah
1.5.2	I	3			Angka Kriminalitas	Per 10.000 Penduduk	4,47	3,49	3,66	5,90	4,79	Kepolisian Daerah
1.5.3	I	3			Jumlah Tindak Pidana	Kasus	96	77	83	137	114	Kepolisian Daerah
1.6					Urusan Sosial							
1.6.1	I	3			Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	15	15	15	15	15	Dinsos
1.6.1	I	10	3	1.(d)	Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	11,47	11,86	11,33	11,62	12,30	Dinsos
1.6.2	I	1	3	1.(d)	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinsos
1.6.4	II	10			Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Rp.	1.401.701,06	1.499.680,10	1.697.645,36	1.940.938,98	1.958.856,18	Dinsos
1.6.5	II	10			Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	54,76	51,95	53,90	55,43	56,58	Dinsos

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
2.1					Urusan Tenaga Kerja							
2.1.1	II	8			Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,00	67,85	67,11	67,40	N/A	Disnakertrans
2.1.2	II	8			Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	38.23 %	58.98 %	72.72 %	70 %	95 %	Disnakertrans
2.1.3	II	8	9	1*	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,45	5,62	5,08	5,08	N/A	Disnakertrans
2.1.4	II	8			Keselamatan dan perlindungan	%	86 %	96.54 %	95.53 %	99.64%	78 %	Disnakertrans
2.1.5	II	8			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		102	1.485	88	115	90	Disnakertrans
2.1.6	II	8			Jumlah wirausaha baru		3	4	5	20	2	Disnakertrans
2.1.7	II	8			Tingkat lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Disnakertrans
2.1.8	I	1			Persentase keluarga miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disnakertrans
2.1.9	II	8			Tingkat UMK	Rp.	2.455.000,00	2.657.537,50	2.889.009,00	3.120.996,44	3.386.593,23	Disnakertrans
2.1.10	II	8			Pencari Kerja yang ditempatkan	%	77.22 %	73.51 %	91.75 %	90.76 %	94 %	Disnakertrans
2.1.10	II	8			Penduduk yang kegiatan utamanya bekerja	%	N/A	61,74	64,04	63,70	63,97	Disnakertrans
2.2					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.1	I	5	6	1.(a)	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	%	N/A	43,58	48,58	44,57	45,60	DPPKBP3A
2.2.2	I	5			Partisipasi perempuan di Lembaga swasta	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPKBP3A
2.2.3	I	5			Jumlah KDRT	Kasus	7	9	4	1	5	DPPKBP3A
2.2.4	I	3			Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPKBP3A
2.2.5	I	3			Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	N/A	43,55	43,62	43,54	46,85	DPPKBP3A
2.2.6	I	5	3	1.(b)	Jumlah kasus yang telah ditangani unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak	Kasus	76	57	76	68	80	DPPKBP3A
2.3					Urusan Pangan							
2.3.1	III	2	1	2*	Rasio pemenuhan pangan (beras)	%	75	73	75	70	70	Dinas Pangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.3.2	III	2			Jumlah produksi padi	Ton	N/A	N/A	19.422,59	16.739,31	24.337,31	Dinas Pangan
2.3.3	III	2	1	1*	Ketersediaan pangan daerah	%	75	72	74	60	58	Dinas Pangan
2.3.4	III	12			Produktivitas padi	Kw/Ha	N/A	N/A	30,34	35,08	37,66	Dinas Pangan
2.3.6	III	12			Ketersediaan pangan utama	Ton	18.864,77	18.452,42	19.598,75	16.361,57	15.951,54	Dinas Pangan
2.4					Urusan Pertanian							
2.4.1	IV	16			Persentase luas lahan bersertifikat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distanah
2.4.2	IV	16			Penyelesaian kasus tanah Negara	%	N/A	N/A	0	6	4	Distanah
2.4.3	IV	16			Penyelesaian izin lokasi	%	N/A	0	1	0	3	Distanah
2.5					Urusan Lingkungan Hidup							
2.5.1	III	11		11.b.2*	Persentase penanganan sampah	%	17.92	20.88	20.74	27.82	45.14	DLHK
2.5.4	III	6			Pencemaran status mutu air		N/A	N/A	N/A	N/A	1.939	DLHK
2.5.5	III	11			Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	N/A	N/A	3.3	1.9	1.1	DLHK
2.5.6	III	11			Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0.0103	0.0100	0.0098	0.0127	0.0161	DLHK
2.5.7	III	13			Persentase penegakan hukum lingkungan	%	N/A	N/A	3.3	1.9	1.1	DLHK
2.5.8	III	13			Indeks Kualitas Lingkungan	-	N/A	N/A	N/A	81.18	78.53	DLHK
2.5.9	III	13			Jumlah perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya (output)	Perusahaan	18	21	21	20	23	DLHK
2.5.10	IV				Peningkatan SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Orang	37	80	82	82	80	DLHK
2.5.11	III	11			Tercapainya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Perusahaan	28	28	28	28	28	DLHK
2.5.12	III	6	5	1.(g)	Pemantauan kualitas DAS Sungai Kelay dan Sungai Segah	%	100	100	100	100	100	DLHK
2.6					Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.6.1	I	3			Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	84,83	83,55	94,5	98,05	99,22	Disdukcapil
2.6.2	I	3			Rasio bayi berakte kelahiran	%	97,40	99,27	99,52	99,56	99,30	Disdukcapil
2.6.2	I	1	4	1.(j)	Jumlah akte lahir yang dikeluarkan	Orang	8.287	16.056	31.478	62.212	123.785	Disdukcapil
2.6.3	I	3			Rasio pasangan berakte nikah	%						Disdukcapil

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.6.3	I	3			Kepadatan penduduk	Jiwa/Km ²	9,79	10,05	10,32	10,59	10,86	Disdukcapil
2.6.3	I	3			Laju pertumbuhan penduduk	%	2,84	2,69	2,68	2,55	2,55	Disdukcapil
2.7					Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.7.1	I	3			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		0	0	0	0	0	DPMK
2.7.2	I	3			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	110	110	110	110	110	DPMK
2.7.3	I	3			Jumlah LSM	Unit	10	10	10	10	12	DPMK
2.7.4	I	1			LPM Berprestasi	Unit			6	6	6	DPMK
2.7.5	I	1			PKK aktif	Unit	110	110	110	110	110	DPMK
2.7.6	I	3			Posyandu	Unit	251	257	264	267	268	DPMK
2.7.7	I	3			Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMK
2.7.8	I	3			Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPMK
2.8					Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.8.1	I	3			Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DPPKBP3A
2.8.2	I	3			Rasio akseptor KB terhadap PUS	-	0,86	0,86	0,84	0,85	0,88	DPPKBP3A
2.8.3	I	3			Cakupan peserta KB aktif	Pasangan	28.525	22.828	29.419	34.746	35.134	DPPKBP3A
2.8.4	I	3			Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga	2.370	2.573	2.773	3.633	N/A	DPPKBP3A
					Keluarga Sejahtera I	Keluarga	20.581	21.100	22.345	24.036	N/A	DPPKBP3A
					Keluarga Sejahtera II	Keluarga	15.462	17.780	24.085	36.754		DPPKBP3A
2.8.5	I	5			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	N/A	87,77	87,92	87,93	87,61	DPPKBP3A
2.9					Urusan Perhubungan							
2.9.1	II	9			Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	764.799	742.267	764.589	673.160	347.906	Dishub
2.9.2	II	9			Rasio ijin trayek	Per 1.000	0,094	0,063	0,063	0,038	0,038	Dishub
2.9.3	II	9			Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang	Kali	138	121	87	57	60	Dishub
2.9.4	II	9			Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	8	9	9	9	10	Dishub
2.9.5	II	9			Kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	100	100	100	100	Dishub
2.9.6	II	9			Kapasitas Daya Mampu Jalan diatas 10 ton	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishub

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.9.7	II	9			Ketersediaan infrastruktur jalan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishub
2.9.8	II	9			Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	Kecamatan	0	0	0	0	0	Dishub
2.9.9	II	9			Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan penyeberangan	Kecamatan	0	0	0	0	0	Dishub
2.9.10	II	9			Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	Kecamatan	1	0	0	0	0	Dishub
2.9.12	II	9			Jumlah kendaraan bermotor	Unit	114.665	122.871	133.791	146.096	153.152	Dishub
2.9.13	II	9			Panjang jalan	Km		2.219,36	2.248,36	2.248,36		Dishub
2.9.14	II	9			Jumlah unit angkutan mobil penumpang umum	Unit	94	63	63	38	38	Dishub
2.9.15	II	9			Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	279.071	254.572	241.843	230.673	138.404	Dishub
2.9.16	II	9			Jumlah kapal datang di pelabuhan Tanjung Redeb	Kapal	2.862	3.513	3.854	3.981	3.330	Dishub
2.9.16	II	9			Jumlah kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Redeb	Kapal	2.921	3.612	3.954	4.073	3.421	Dishub
2.9.17	II	9			Jumlah pesawat berangkat dari Bandara Kalimantan	Pesawat	3.724	3.361	3.557	3.434	1.579	Dishub
2.9.17	II	9			Jumlah pesawat datang ke Bandara Kalimantan	Pesawat	3.704	3.363	3.535	3.427	1.582	Dishub
2.9.16	II	9			Jumlah penumpang berangkat dari Bandara Kalimantan	Orang	247.924	246.703	263.361	223.994	106.965	Dishub
2.9.16	II	9			Jumlah penumpang datang ke Bandara Kalimantan	Orang	237.804	240.992	259.385	218.493	102.537	Dishub
2.9.17	II	9			Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	764.799	742.267	764.589	673.160	347.906	Dishub
2.9.18	II	9			Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	485.728	487.695	522.746	442.487	209.502	Dishub
2.10					Urusan Komunikasi dan Informatika							
2.10.5	II	8			Web site milik pemerintah daerah	-	1	1	1	1	1	Diskominfo
2.10.6	II	8			Pameran/expo	-	1	1	1	1	1	Diskominfo
2.10.7	II	8			Rasio ketersediaan daya listrik	%	N/A	11	21	N/A	N/A	Diskominfo
2.10.8	II	1	4	1.(k)	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	%	98,35	97,85	98,90	99,79	99,54	Diskominfo
2.10.9	II	8			Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki HP/telepon	%	72,57	74,90	76,49	78,18	75,41	Diskominfo

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.10.10	II	10	1	1.(b)	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet	%	33,06	41,55	49,05	57,69	64,17	Diskominfo
2.10.11	II	9			Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100	Diskominfo
2.11					Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.11.1	II	8			Persentase koperasi aktif	%	77,09	72,60	75,70	61,85	57,74	Diskoperindag
2.11.2	II	8			Jumlah koperasi	Unit	358	365	395	422	452	Diskoperindag
2.11.3	II	8			Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	TDI	TDI	TDI	TDI	TDI	Diskoperindag
2.11.4	II	8			Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	263	1224	1372	1372	3235	Diskoperindag
2.12					Urusan Penanaman Modal							
2.12.3a	II	8			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Juta Rp.	1.160.750,70	3.256.571,10	4.120.756,00	3.084.469,90	3.615.380,50	DPMPPTSP
2.12.3b	II	8			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Ribu US\$	185.268,70	20.904,10	9.383,60	18.765,60	16.223,30	DPMPPTSP
2.13					Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
2.13.1	I	4			Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	48	48	48	49	49	Dispورا
2.13.9	I	4			Jumlah Cabang Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Cabang	43	45	47	50	52	Dispورا
2.13.10	I	4			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Buah	N/A	N/A	3	1	1	Dispورا
2.14					Urusan Statistik							
2.14.1	IV	4	4	1(a)	Buku Kabupaten Berau Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1	BPS
2.14.2	IV	4	4	1(b)	Buku PDRB Kabupaten Berau	Buku	2	2	2	2	2	BPS
2.15					Urusan Kebudayaan							
2.15.1	I	11	4	1.(b)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	10	8	10	18	4	Disbudpar
2.15.2	I	11	4	1.(c)	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	0	0	0	0	0	Disbudpar
2.15.3	II	11	4	1.(d)	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	631	631	631	631	631	Disbudpar
2.15.4	II	11	4	1.(e)	Jumlah Kecamatan yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Disbudpar
2.15.5	I	11	4	1.(f)	Jumlah Suku Lokal yang telah didata	Suku	3	3	3	3	3	Disbudpar
2.16					Urusan Perpustakaan							

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.16.1	I	1		1.a.2(a)	Jumlah perpustakaan	Unit	254	259	263	264	264	Dispusip
2.16.2	I	4		1.a.2(b)	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	190.903	233.606	261.213	461.058	532.779	Dispusip
2.16.3	I	4		1.a.2(c)	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	51.519	51.779	52.659	53.979	61.659	Dispusip
2.17					Urusan Kearsipan							
2.17.1	IV			1.a.2(d)	Jumlah SKPD/OPD yang menerapkan asrsip baku	OPD	45	46	46	48	48	Dispusip
2.17.2	IV			1.a.2(e)	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapat pelatihan/bimbingan	Orang	19	13	15	21	21	Dispusip
2.18					Urusan Perencanaan Pembangunan							
2.18.1	IV	11		11.b.2(a)	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1	Baplitbang
2.18.2	IV	11		11.b.2(b)	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	Baplitbang
2.18.3	IV	11		11.b.2(c)	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	Baplitbang
2.18.4	IV	11		11.b.2(d)	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	N/A	N/A	N/A	84,47	85,53	Baplitbang
2.19					Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.							
2.19.1	I	10	2	1(a)	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Kesbangpol
2.19.2	I	10	2	1(b)	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Kesbangpol
2.20					Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.20.1	IV	16	1	3.(b)	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 Penduduk	4,05	3,72	3,36	2,63	2,31	SatpoPP
2.20.2	IV	16	1	3.(c)	Rasio Jumlah Linmas	Per 10.000 Penduduk	16,29	15,87	15,45	15,07	14,69	SatpoPP
2.20.3	IV	8	1	1(a)	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,70	3,01	2,07	5,61	-3,35	
2.20.4	I	1	2	1(c)	Persentase penduduk miskin	%	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19	
2.20.6	IV	16	6	2.(b)	Penegakan PERDA	Kasus	89	150	222	69	23	SatpoPP
2.20.7	IV	16	1	3.(d)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	SatpoPP
2.20.8	IV	12	8	1.(b)	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	81.25	77.53	79.44	79.44	Sekretariat Daerah

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.20.9	IV	16	5	1.(a)	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekretariat Daerah
2.20.10	IV	10	3	1.(a)	Indeks demokrasi	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekretariat Daerah
2.20.11	IV	10	3	1.(b)	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	-	77,78	82,38	84,14	89,36	Sekretariat Daerah
2.20.12	IV	16	6	1.(b)	Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Nilai	52,24	53,40	60,06	62,86	63,50	Sekretariat Daerah
2.20.12	IV	16	6	1.(b)	Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	Sekretariat Daerah
2.20.13	IV	16	6	1.(b)	Hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,1896	3,0959	3,3642	3,5137	Menunggu hasil evaluasi dan scoring	Sekretariat Daerah
2.20.13	IV	16	6	1.(b)	Hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat	2	2	1	1	Menunggu hasil evaluasi dan scoring	Sekretariat Daerah
2.20.14	IV	16	6	3.(d)	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBKWBMM	Perangkat Daerah	N/A	N/A	6	10	4	Sekretariat Daerah
2.20.15	IV	16	5	1.(a)	Menurunnya kasus KKN	Kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekretariat Daerah
2.20.16	IV	16	6	1.(a)	Opini laporan keuangan pemerintah kabupaten	-	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	BPKAD
2.20.17	IV	17	19	2.(e)	Persentase akurasi updatang data kepegawaian	%	0	87	85	92	84	BPKAD
2.20.18	IV	17	19	2.(f)	Persentase Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat PNS	%	100	100	128	100	100	BPKAD
2.20.19	IV	17	19	2.(g)	Persentase Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	%	29,17	126,67	126,67	107,69	40,00	BPKAD
2.20.20	IV	17	19	2.(h)	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100	100	100	50	BPKAD
2.20.21	IV	17	19	2.(i)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS	%	100	100	100	100	50	BPKAD
2.20.22	IV	8	10	1*	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bapenda
2.20.23	IV	3	8	2.(b)	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bapenda
2.20.24	II	8	9	1.(j)	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	87	94	96	123	126	Bapenda

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.20.25	II	8	9	1.(k)	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Unit	277	283	292	348	334	Bapenda
B	Urusan Pemerintahan Pilihan											
1					Urusan Kelautan dan Perikanan							
1.1	II	2	3	1(g)	Volume ekspor perikanan		N/A	N/A	N/A	5.031,00	4.656,80	Dinas Perikanan
1.3	II	2	3	1(j)	Produksi hasil penangkapan perikanan		18.000,40	18.216,50	18.380,50	22.058,26	20.448,98	Dinas Perikanan
1.2	II	2	3	1(h)	Produksi perikanan budidaya		2.202,30	2.200,22	2.344,65	2.356,30	2.259,99	Dinas Perikanan
1.2	II	2	3	1(i)	Produksi perikanan tangkap di laut		16.715,20	16.954,20	17.107,20	20.529,49	18.988,84	Dinas Perikanan
1.4	II	2	3	1(k)	Produksi perikanan tangkap di perairan Umum		1.285,20	1.262,30	1.273,30	1.528,77	1.460,14	Dinas Perikanan
1.5	II	2	3	1(l)	Produksi perikanan budidaya di darat		1.875,30	2.007,44	2.208,55	2.202,20	2.120,84	Dinas Perikanan
1.6	II	2	3	1(m)	Produksi perikanan budidaya di laut		327,00	192,78	136,10	154,10	139,15	Dinas Perikanan
1.7	II	2	3	1(n)	Konsumsi ikan		N/A	N/A	N/A	14.309,81	15.526,72	Dinas Perikanan
1.8	II	2	3	1(o)	Cakupan bina kelompok nelayan		22	16	27	36	31	Dinas Perikanan
2					Urusan Pariwisata							
2.1	II	8	9	2*	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	130.023	207.780	285.880	301.015	127.396	Disbudpar
2.2	II	8	9	1.(c)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,82	1,75	1,80	1,87	2,04	Disbudpar
2.3	II	8	9	1.(g)	Jumlah Potensi Pariwisata yang telah di data	Obyek	159	103	172	173	180	Disbudpar
2.4	II	8	9	1.(i)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang ada	Jenis	8	8	8	8	8	Disbudpar
3					Urusan Pertanian							
3.1	I	2	3	1(a)	Produktivitas padi sawah dan ladang	Ton/Ha	N/A	N/A	30,34	35,08	37,66	Distanak
3.2	I	2	3	1(b)	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	11,28	10,85	10,99	10,69	11,64	Distanak
3.3	I	2	3	1(c)	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,52	0,50	0,53	0,54	0,59	Distanak
3.4	I	2	3	1(d)	Kontribusi sektor pertanian perkebunan terhadap PDRB	%	4,85	5,01	5,10	4,98	5,93	Distanak
3.5	I	2	3	1(e)	Cakupan bina kelompok petani	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distanak

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.6	I	2	3	1(f)	Produksi padi	Ton	N/A	N/A	19.422,59	16.739,31	24.337,31	Distanak
3.7	I	2			Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-1,39	6,12	6,97	2,03	-3,81	Distanak
3.8	I	2			Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Kg	703.327	1.026.856	1.007.675	1.368.792	842.270	Distanak
3.9	I	2			Jumlah produksi daging ayam/unggas	Kg	1.899.684	1.809.510	1.812.877	2.644.166	2.325.479	Distanak
3.10	I	2			Jumlah usaha pengolahan hasil ternak	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distanak
4					Urusan Kehutanan							
4.1	III	15	3	1.(a)	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishut
4.2	III	15	3	1.(b)	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishut
4.3	III	15	3	1.(c)	Kerusakan Kawasan Hutan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishut
4.4	II	8	9	2(h)	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	4,54	4,06	4,06	3,80	3,62	Dishut
4.5	II	8	9	2(i)	Produk ikutan hasil hutan	Ton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dishut
4.6	III	15	1	1.(d)	Luas Hutan	Ha	1.552.108,62	1.552.108,62	1.552.108,62	1.552.108,62	1.552.108,62	Dishut
4.7	III	15	1	1.(e)	Luas Hutan lindung	Ha	360.254,31	360.254,31	360.254,31	360.254,31	360.254,31	Dishut
4.8	III	15	1	1.(f)	Luas Hutan Produksi terbatas	Ha	652.579,32	652.579,32	652.579,32	652.579,32	652.579,32	Dishut
4.9	III	15	1	1.(g)	Luas Hutan Produksi tetap	Ha	490.535,67	490.535,67	490.535,67	490.535,67	490.535,67	Dishut
4.10	III	15	1	1.(h)	Luas Hutan produksi yang dikonversi	Ha	48.362,28	48.362,28	48.362,28	48.362,28	48.362,28	Dishut
4.11	III	15	1	1.(i)	Luas Hutan lainnya	Ha	377,05	377,05	377,05	377,05	377,05	Dishut
5					Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
5.1	II	7	3	1*	Rasio elektrifikasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distamben
5.2	II	7	2	1*	Bauran Energi Baru Terbarukan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distamben
5.3	II	7	3	1(a)	Persentase desa berlistrik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distamben
5.4	III	15	1	1.(c)	Pertambangan tanpa ijin	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Distamben
5.5	II	8	9	2(f)	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	60,13	62,42	61,49	60,83	56,43	Distamben
5.6	II	7	3	1(b)	Produksi listrik	MWh	150.204,48	152.322,20	168.288,41	184.260,23	193.565,52	Distamben
5.7	II	8	9	2(g)	Produksi (Tonase) Batu bara dan Tambang Lainnya	MT	33.512.156,68	37.931.605,35	37.801.192,30	41.050.713,76	21.977.490,68	Distamben
6					Urusan Perdagangan							
6.1	II	8	1	1.(b)	Nilai ekspor produk olahan nomigas dan non batu bara	Juta Rp	154.282,50	161.205,88	164.215,20	168.542,22	172.330,4	Diskoperinda g

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Kode Pilar	Kode Rekening SDGs			Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Indikator			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.2	II	8	1	1.(c)	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	5,30	5,06	5,35	5,63	6,51	Diskoperinda g
6.3	II	8	1	1.(d)	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rp	154.282,50	161.205,88	164.215.20	168.542.22	172.330,4	Diskoperinda g
6.4	II	8	1	1.(e)	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	13,2	13,9	14,22	14,98	7,56	Diskoperinda g
6.5	II	8	1	1.(f)	Jumlah pedagang besar	Unit	3	6	14	5		Diskoperinda g
6.5	II	8	1	1.(g)	Jumlah pedagang menengah	Unit	50	57	143	48	17*	Diskoperinda g
6.5	II	8	1	1.(h)	Jumlah pedagang kecil	Unit	311	329	512	266	23*	Diskoperinda g
7					Urusan Perindustrian							
7.1	II	8	9	2(e)	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	Industri	13	32	39	39	149	Diskoperinda g
7.2	II	9	3	1*	Kontribusi sector Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,16	4,06	4,05	4,07	4,77	Diskoperinda g
7.3	II	8	9	2(a)	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	-0,44	3,48	4,80	4,42	-0,45	Diskoperinda g
7.4	II	8	9	.2(b)	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	9,7	11,23	12,05	13,44	15,24	Diskoperinda g
7.5	II	8	9	2(c)	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor		2	2	9	12	19	Diskoperinda g
7.6	II	8	9	2(d)	Jumlah IKM	IKM	762	791	898	898	897	Diskoperinda g
7.7	II	9	5	1*	Tenaga kerja industri	Orang	TDI	TDI	TDI	TDI	TDI	Diskoperinda g
7.8	II	9	2	1(a)	Nilai invests industri	(000 Rp)	TDI	TDI	TDI	TDI	TDI	Diskoperinda g
7.9	II	9	2	1(b)	Nilai produksi industri	(000 Rp)	TDI	TDI	TDI	TDI	TDI	Diskoperinda g
8					Urusan Transmigrasi							
8.1	II	8			Jumlah Kawasan transmigrasi	Kawasan	35	35	35	35	35	Disnakertran s
8.2	II	8			Transmigran swakarsa	Jiwa	352	-	-	-	-	Disnakertran s

Keterangan:

* Pengelompokkan jenis pedagang berubah menjadi “supplier” dan “eceran”.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu serta proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan keuangan masa lalu.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Salah satu indikator untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Indikator DDF dihitung melalui perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total Pendapatan dalam APBD seperti pada Tabel 3.1 berikut. DDF digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD.

Tabel 3.1
Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab. Berau

Tahun	Realisasi PAD (Rupiah)	Realisasi Total Pendapatan	DDF (%)	Keterangan Rasio
2016	208.260.995.212	2.001.188.086.730	10,41%	RENDAH
2017	219.128.132.527	1.844.144.418.276	11,88%	RENDAH
2018	210.402.270.000	2.319.684.177.500	9,07%	SANGAT RENDAH
2019	225.595.330.000	2.952.852.953.659	7,64%	SANGAT RENDAH
2020	236.054.849.539	2.358.599.762.531	10,01%	RENDAH
Rata-rata	219.888.315.455,60	2.295.293.879.739,30	9,58%	SANGAT RENDAH

Sumber: Data Laporan Keuangan Kab. Berau yang diolah.

Nilai DDF Kabupaten Berau terendah menyentuh level 7,64% pada tahun 2019 (terendah dalam 5 tahun terakhir). Berdasarkan besaran nilai rata-rata DDF tahun 2015-2020, Kabupaten Berau masuk dalam kategori “sangat rendah” dengan kisaran rata-rata 9,58%. Hal ini menunjukkan kemandirian pemerintah daerah masih sangat rendah dalam pembiayaan pembangunan melalui PAD.

Pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Berau sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan serta bantuan dari provinsi. Hal ini akan menyebabkan berbagai kemungkinan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Berau. Apabila dana Transfer dari Pusat atau dari Provinsi mengalami penurunan/perlambatan, maka bisa dipastikan kegiatan-kegiatan di pemerintahan juga akan mengalami perlambatan.

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Periode 2016-2020, pendapatan daerah Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,34% dengan rata-rata komposisi masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 89,36%, disusul oleh pendapatan asli daerah (9,58%) dan lain-lain pendapatan yang sah (1,77%).

Sementara itu dari sisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 2,41%. Rata-rata belanja operasi sebesar 51,84%, belanja modal sebesar 34,36%, belanja tak terduga sebesar 1,48% dan belanja transfer sebesar 12,91%.

Rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Berau periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 3.2
Ralisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	2.001.188.086.730	1.844.144.418.276	2.319.684.177.500	2.952.852.953.659	2.358.599.762.531	3,34%
1.1	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208.260.995.212	219.128.132.527	210.402.270.000	225.595.330.000	236.054.849.539	2,54%
1.1.1	Pajak Daerah	38.864.730.630	48.728.109.332	63.879.234.000	74.856.935.000	61.155.380.768	9,49%
1.1.2	Retribusi Daerah	13.528.076.879	14.668.769.120	13.835.154.000	10.996.655.000	9.133.667.582	-7,56%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.710.149.182	27.005.937.319	24.495.339.000	23.988.399.000	14.320.626.363	-0,54%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	141.158.038.520	128.725.316.756	108.192.543.000	115.753.341.000	151.445.174.826	1,42%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.792.927.091.518	1.625.016.285.749	2.076.490.949.500	2.688.372.189.659	2.072.258.447.992	2,94%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.569.562.312.518	1.322.969.047.749	1.773.330.506.500	2.137.020.376.000	1.790.867.960.060	2,67%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.499.485.101.718	1.186.720.354.749	1.682.458.853.000	2.017.537.589.000	1.632.445.409.260	1,71%
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.389.213.392.258	1.065.372.026.772	1.496.701.257.000	1.822.083.957.000	1.496.627.499.758	1,50%
1.1.1.1.1.1	DBH	846.086.145.258	524.840.124.772	935.300.128.000	1.225.153.328.000	940.039.002.758	2,13%
a.	Bagi Hasil Pajak	78.913.381.687	60.147.031.854			66.829.654.662	-3,27%
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	767.172.763.571	464.693.092.918	935.300.128.000	1.225.153.328.000	873.209.348.096	2,62%
1.1.1.1.1.2	DAU	543.127.247.000	540.531.902.000	561.401.129.000	596.930.629.000	556.588.497.000	0,49%
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	110.271.709.460	121.348.327.977	185.757.596.000	195.453.632.000	135.817.909.502	4,26%
1.1.1.1.2.1	DAK Fisik	110.271.709.460	121.348.327.977	185.757.596.000	195.453.632.000	58.565.706.178	-11,89%
1.1.1.1.2.2	DAK Non Fisik					77.252.203.324	
1.2.1.2	Dana Intensif Daerah						
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.4	Dana Keistimewaan						
1.2.1.5	Dana Desa	65.077.210.800	83.206.738.000	90.871.653.500	108.830.771.000	114.600.667.800	11,98%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	5.000.000.000	53.041.955.000	-	10.652.016.000	43.821.883.000	54,36%
1.2.2	Dana Transfer Antar Daerah	223.364.779.000	302.047.238.000	303.160.443.000	551.351.813.659	281.390.487.932	4,73%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	134.057.639.000	217.243.113.000	261.960.443.000	316.392.813.659	163.890.487.932	4,10%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	89.307.140.000	84.804.125.000	41.200.000.000	234.959.000.000	117.500.000.000	5,64%
1.3	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	32.790.958.000	38.885.434.000	50.286.465.000	15,32%
1.3.1	Pendapatan Hibah			32.790.958.000	38.885.434.000	50.286.465.000	15,32%
2	BELANJA DAERAH	2.294.485.000.000	1.896.041.664.000	2.121.998.966.000	2.956.501.088.000	2.584.811.294.981	2,41%

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
2.1	BELANJA OPERASI	1.272.019.000.000	1.053.476.488.000	1.174.662.531.000	1.320.043.780.000	1.325.322.679.581	0,82%
2.1.1	Belanja Pegawai	708.504.000.000	616.227.210.000	637.641.425.000	684.985.366.000	599.693.389.369,00	-3,28%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	544.619.000.000	417.807.547.000	504.783.537.000	605.090.808.000	598.352.362.154,99	1,90%
2.1.2	Belanja Hibah	18.080.000.000	15.702.231.000	29.703.859.000	23.720.606.000	126.671.928.057,00	47,60%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	816.000.000	3.739.500.000	2.533.710.000	6.247.000.000	605.000.000,00	-5,81%
2.2	Belanja Modal	787.457.000.000	517.552.139.000	635.123.455.000	1.286.548.152.000	846.165.248.625,35	1,45%
2.3	Belanja Tak Terduga	70.000.000	2.500.000.000			102.906.267.153,60	330,00%
2.4	Belanja Transfer	234.939.000.000	322.513.037.000	312.212.980.000	349.909.156.000	310.417.099.621	5,73%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.452.000.000	5.056.249.000	5.591.073.000	8.095.452.000	9.265.205.000,00	15,79%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	230.487.000.000	317.456.788.000	306.621.907.000	341.813.704.000	301.151.894.621,00	5,49%
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH (A)	939.593.429.783	643.929.257.352	607.733.624.198	805.457.105.337	-	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	939.593.429.783	643.929.257.352	607.733.624.198	805.457.105.337		-3,78%
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
3.2.3	Penerimaan Kembali Investasi Daerah						
3.2.4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	5.900.000.000	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					5.900.000.000	
3.2.2	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang						
	PEMBIAYAAN NETTO	939.593.429.783	643.929.257.352	607.733.624.198	805.457.105.337	-	
						5.900.000.000	

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Berau yang diolah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Berau terdapat pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Berau**

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
TOTAL ASET	2,59%
ASET LANCAR	-3,40%
Kas dan Setara Kas	-5,03%
Piutang Pendapatan	68,16%
Persediaan	-18,57%
INVESTASI JANGKA PANJANG	-2,93%
Investasi Permanen	-2,93%
ASET TETAP	3,87%
Tanah	6,96%
Peralatan dan Mesin	7,74%
Gedung dan Bangunan	3,63%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13,12%
Aset Tetap Lainnya	16,57%
Konstruksi dalam Pengerjaan	-2,36%
Akumulasi Penyusutan	28,87%
ASET LAINNYA	23,08%
Aset Tak Berwujud	6,99%
Aset Lain-Lain	24,40%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,59%
KEWAJIBAN	105,86%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	105,86%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	554,38%
Utang Jangka Pendek Lainnya	105,27%
EKUITAS	2,29%
Ekuitas	2,29%

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2015-2018, dapat di lihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Analisis Neraca Kabupaten Berau

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis				Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	
1	Rasio Likuiditas					
	a. Rasio Lancar	110,05	26,08	2,81	11,37	9,31
	b. Rasio Quick	107,07	24,89	2,76	11,19	9,06
2	Rasio Solvabilitas					
	a. Rasio Total Hutang Terhadap Aset	0,0012	0,0039	0,0307	0,0101	0,0117
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,0012	0,0039	0,0316	0,0102	0,0118

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, rasio lancar dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami fluktuatif. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,81. Hal ini mengindikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya melalui aset lancar hanya sebesar 2,81 kali. Kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 11,37. Rasio lancar perlu dijaga jangan sampai menurun tiap tahunnya. Penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel 3.4 diatas, juga terjadi fluktuasi dengan rata-rata 9,06. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Berau dalam membayar kewajiban jangka pendek cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan setiap tahunnya.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,0117. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah Kabupaten Berau cukup baik.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0118.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai disini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Proporsi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka persentasenya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

**Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Aparatur**

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)×100%
1	Tahun 2016	708.504.000.000	2.294.485.000.000,00	30,88%
2	Tahun 2017	616.227.210.000	1.903.541.664.000,00	32,37%
3	Tahun 2018	637.641.425.000	2.124.998.966.000,00	30,01%
4	Tahun 2019	684.985.366.000	2.956.501.088.000,00	23,17%
5	Tahun 2020	599.693.389.369	2.590.711.294.980,94	23,15%
Rata-Rata		649.410.278.074	2.374.047.602.596	27,35%

Proporsi belanja aparatur mengalami fluktuatif cenderung menurun setiap tahunnya. Proporsi belanja aparatur terbesar terdapat pada tahun 2017, yaitu sekitar 32,37% dari total anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBD. Dan yang paling terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 23,15% dari total anggaran belanja dan pembiayaan. Rata-rata proporsi belanja aparatur selama periode 2016-2020 masih tergolong baik yaitu sebesar 27,35% dari total belanja dan pembiayaan dalam APBD.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Kabupaten Berau 2016-2020

1) Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, melihat penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. sehingga diperoleh SiLPA. Perkembangan defisit riil anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Berau Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.001.188.086.730,02	1.844.144.418.276,17	2.319.684.177.500,00	2.952.852.953.659,46	2.358.599.762.530,83
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	2.294.485.000.000,00	1.896.041.664.000,00	2.121.998.966.000,00	2.956.501.088.000,00	2.584.811.294.980,94
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000.000,00
Defisit Riil		-293.296.913.269,98	-51.897.245.723,83	197.685.211.500,00	-3.648.134.340,54	-232.111.532.450,11
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	939.593.429.783,05	646.296.516.513,07	594.399.270.789,24	792.084.482.289,24	788.436.347.948,70
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		939.593.429.783,05	646.296.516.513,07	594.399.270.789,24	792.084.482.289,24	788.436.347.948,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan		646.296.516.513,07	594.399.270.789,24	792.084.482.289,24	788.436.347.948,70	556.324.815.498,59

Kondisi keuangan Kabupaten Berau selama kurun waktu 2016-2020 hampir setiap tahunnya mengalami defisit anggaran (kecuali tahun 2018). Defisit anggaran ini bisa di tutupi dengan berbagai sumber, dan yang paling utama bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya. Dengan adanya silpa tahun anggaran sebelumnya, komposisi APBD bisa terpenuhi dan semua kegiatan bisa terlaksana.

2) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disajikan pada Tabel 3.7. dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2016-2020 sebagian besar diperoleh dari pelampauan penerimaan dana perimbangan.

Tabel 3.7
Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Berau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% Dari SILPA	Rp	% Dari SILPA	Rp	% Dari SILPA	Rp	% Dari SILPA	Rp	% Dari SILPA
1	Jumlah SiLPA	589.572.043.730	100,00%	254.304.440.476	100,00%	584.255.648.500	100,00%	568.127.464.659	100,00%	337.467.645.550	100,00%
2	Pelampauan penerimaan PAD	-20.518.405.788	-3,48%	21.809.683.727	8,58%	-32.325.730.000	-5,53%	12.366.887.000	2,18%	4.265.429.539	1,26%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	110.937.417.518	18,82%	289.166.137.549	113,71%	708.106.386.500	121,20%	865.857.031.659	152,41%	440.551.645.992	130,55%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	0,00%	-	0,00%	32.790.958.000	5,61%	4.062.634.000	0,72%	12.819.365.000	3,80%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	499.153.032.000	84,66%	-56.671.380.800	-22,28%	-124.315.966.000	-21,28%	-314.159.088.000	-55,30%	-120.168.794.981	-35,61%

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

- **Akuntabilitas**, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan;
- **Profesionalitas**, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah;
- **Proporsionalitas**, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah;
- **Transparansi**, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik;
- **Pengawasan** yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

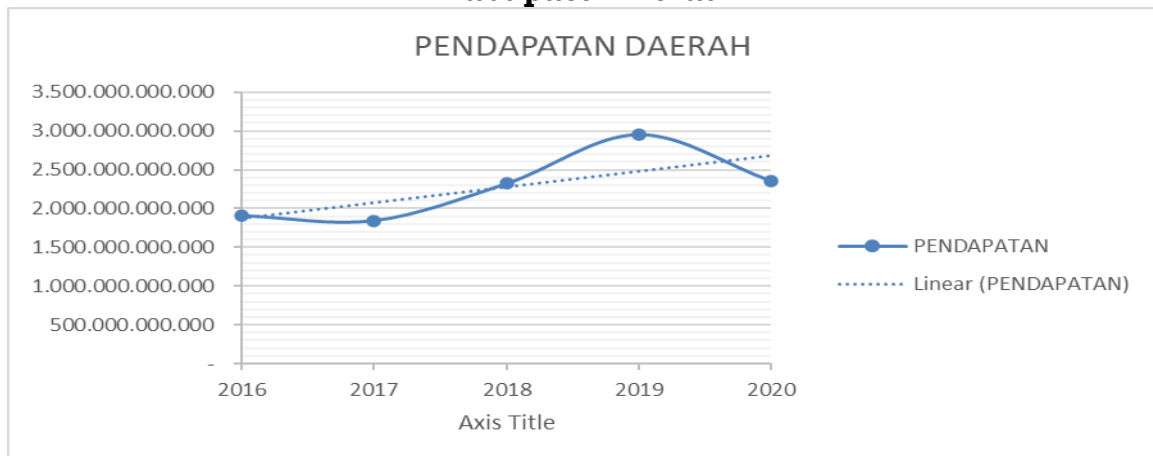
3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2021-2026

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2026

Perkembangan penerimaan APBD Kabupaten Berau pada periode 2016-2020 menunjukkan fluktuatif (Gambar 3.1). Pada tahun 2016, penerimaan APBD sebesar 1,9 trilyun rupiah, yang kemudian mengalami penurunan hingga sebesar 1,84 trilyun Rupiah pada tahun 2017, dan mengalami peningkatan drastis hingga mencapai 2,92 trilyun rupiah

pada tahun 2019 dan kembali turun dikarenakan pandemi COVID-19 diangka 2,35 trilyun. Meskipun fluktuatif, garis tren linier penerimaan APBD Kabupaten berau masih menunjukkan peningkatan/bernilai positif.

Gambar 3.1
Perkembangan dan Tren Perkembangan Penerimaan APBD
Kabupaten Berau



Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2016-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD unsur pariwisata;
- b. Meningkatkan kembali efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain

- itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
 - f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
 - g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Berau antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
 - h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
 - i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2021-2026 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.8 berikut.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026**

KODE REKENING	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN					
		APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	1.986.655.243.000	1.570.000.000.000	2.189.803.698.000	2.432.597.000.000	2.578.097.000.000	2.625.097.000.000
4.1	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	202.816.911.000	200.000.000.000	221.206.698.000	240.000.000.000	256.000.000.000	265.500.000.000
4.1.01	a. Pajak Daerah	65.550.000.000	73.800.000.000	75.000.000.000	80.000.000.000	85.000.000.000	90.000.000.000
4.1.02	b. Retribusi Daerah	10.329.936.000	11.133.063.000	11.500.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	16.500.000.000
4.1.03	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.980.600.000	19.720.425.493	20.500.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	32.000.000.000
4.1.04	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.956.375.000	95.346.511.507	114.206.698.000	120.000.000.000	125.000.000.000	127.000.000.000
4.2	2. Pendapatan Transfer	1.746.371.232.000	1.332.532.900.000	1.931.129.900.000	2.155.129.900.000	2.284.629.900.000	2.322.129.900.000
4.2.01	a. Transfer Pemerintah Pusat	1.515.136.207.000	1.122.871.467.000	1.525.468.467.000	1.729.468.467.000	1.849.968.467.000	1.876.468.467.000
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	1.346.248.003.000	1.122.871.467.000	1.351.818.045.000	1.553.818.045.000	1.671.318.045.000	1.693.818.045.000
4.2.01.01.01	a) Dana Transfer Umum	1.141.290.147.000	1.122.871.467.000	1.143.818.045.000	1.343.818.045.000	1.458.818.045.000	1.478.818.045.000
4.2.01.01.01.01	(1) Dana Bagi Hasil (DBH); dan	576.883.922.000	576.541.679.000	585.000.000.000	785.000.000.000	900.000.000.000	920.000.000.000
4.2.01.01.02.01	(2) Dana Alokasi Umum (DAU)	564.406.225.000	546.329.788.000	558.818.045.000	558.818.045.000	558.818.045.000	558.818.045.000
4.2.01.01.03	b) Dana Transfer Khusus (DAK)	204.957.856.000	-	208.000.000.000	210.000.000.000	212.500.000.000	215.000.000.000
4.2.01.01.03.01	(1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik); dan	125.253.201.000	-	127.000.000.000	128.000.000.000	130.000.000.000	132.000.000.000
4.2.01.01.04.01	(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	79.704.655.000	-	81.000.000.000	82.000.000.000	82.500.000.000	83.000.000.000
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah (DID)	46.650.509.000		46.650.422.000	46.650.422.000	46.650.422.000	46.650.422.000
4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus (DOK)						
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan						
4.2.01.05	5) Dana Desa	122.237.695.000		127.000.000.000	129.000.000.000	132.000.000.000	136.000.000.000
4.2.02	b. Transfer Antar-Daerah	231.235.025.000	209.661.433.000	405.661.433.000	425.661.433.000	434.661.433.000	445.661.433.000

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

KODE REKENING	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN					
		APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil; dan	231.235.025.000	209.661.433.000	215.661.433.000	220.661.433.000	225.661.433.000	230.661.433.000
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	-	-	190.000.000.000	205.000.000.000	209.000.000.000	215.000.000.000
4.3	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000
4.3.01	a. Hibah;	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000	37.467.100.000
4.3.02	b. Dana Darurat;	-					
4.3.03	c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-					

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2015-2019, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2021-2026 akan diarahkan pada:

1. Menitik beratkan pada Urusan Wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
2. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
3. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Pemenuhan Belanja fungsi pengawasan sejumlah 0,3% dari jumlah belanja daerah sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Pemenuhan Belanja untuk pengembangan kompetensi ASN sejumlah 0,3% dari jumlah belanja daerah sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
8. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

9. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM dan sektor-sektor lain yang terkena imbas dari COVID-19 guna pemulihan terhadap ekonomi masyarakat;
10. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
11. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Berdasarkan kebijakan diatas disertai prediksi pendapatan yang sudah dihitung pada subbab sebelumnya, maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 disusun seperti pada Tabel 3.9 berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Berau Periode 2021-2026**

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1.851.971.934.755	1.894.346.374.809	2.189.803.698.000	2.432.597.000.000	2.578.097.000.000	2.625.097.000.000
Belanja Operasi	1.160.793.058.634	1.152.071.635.199	1.331.757.887.928	1.479.415.824.285	1.567.903.560.821	1.596.487.228.293
- Belanja pegawai	587.400.924.947	567.211.658.839	655.678.499.239	728.376.498.620	771.942.605.357	786.015.505.814
- Belanja barang dan jasa	516.746.505.116	527.081.435.218	609.289.246.854	676.843.862.937	717.327.667.718	730.404.910.499
- Belanja hibah	55.049.628.571	56.150.621.142	64.908.318.488	72.104.993.234	76.417.781.795	77.810.916.244
- Belanja bantuan sosial	1.596.000.000	1.627.920.000	1.881.823.347	2.090.469.494	2.215.505.952	2.255.895.735
Belanja Modal	418.387.539.625	426.755.290.418	493.315.438.784	548.011.521.552	580.789.526.452	591.377.610.509
Belanja Tidak Terduga	23.991.641.496	61.743.760.292	71.373.808.092	79.287.340.506	84.029.724.075	85.561.628.046
Belanja Transfer	248.799.695.000	253.775.688.900	293.356.563.195	325.882.313.657	345.374.188.652	351.670.533.152
- Belanja bagi hasil	7.562.000.000	7.713.240.000	8.916.258.241	9.904.843.556	10.497.278.200	10.688.648.841
- Belanja bantuan keuangan	241.237.695.000	246.062.448.900	284.440.304.955	315.977.470.101	334.876.910.452	340.981.884.311

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, Pemerintah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti disajikan pada Tabel 3.10. Komponen belanja wajib mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 3.10
Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat**

URAIAN	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
BELANJA WAJIB MENGIKAT	922.737.890.014	687.716.210.520	1.093.099.012.362	1.213.641.615.511	1.285.879.805.831	1.309.214.478.992
BELANJA OPERASI	644.046.553.518	436.182.190.455	722.468.641.074	802.571.961.348	850.575.893.103	866.082.317.794
Belanja Pegawai	587.400.924.947	359.816.033.621	655.678.499.239	728.376.498.620	771.942.605.357	786.015.505.814
Belanja Hibah	55.049.628.571	76.003.156.834	64.908.318.488	72.104.993.234	76.417.781.795	77.810.916.244
Belanja Bantuan Sosial	1.596.000.000	363.000.000	1.881.823.347	2.090.469.494	2.215.505.952	2.255.895.735
BELANJA TAK TERDUGA	23.991.641.496	61.743.760.292	71.373.808.092	79.287.340.506	84.029.724.075	85.561.628.046
Belanja Tak Terduga	23.991.641.496	61.743.760.292	71.373.808.092	79.287.340.506	84.029.724.075	85.561.628.046
TRANSFER	248.799.695.000	186.250.259.773	293.356.563.195	325.882.313.657	345.374.188.652	351.670.533.152
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.900.000.000	3.540.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.900.000.000	3.540.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000

Sumber: Data RKPD 2022 Kab. Berau yang di olah.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2019-2023 seperti disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau
Periode 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pendapatan	1.986.655.243.000	1.570.000.000.000	2.189.803.698.000	2.432.597.000.000	2.578.097.000.000	2.625.097.000.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	775.029.134.210	805.604.669.887	775.171.124.174	745.887.274.757	717.709.689.247	690.596.576.013
	Total Penerimaan	2.761.684.377.210	2.375.604.669.887	2.964.974.822.174	3.178.484.274.757	3.295.806.689.247	3.315.693.576.013
	Dikurangi:						
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	922.737.890.014	687.716.210.520	1.093.099.012.362	1.213.641.615.511	1.285.879.805.831	1.309.214.478.992
	Kapasitas Kemampuan Keuangan	1.838.946.487.196	1.687.888.459.367	1.871.875.809.812	1.964.842.659.246	2.009.926.883.416	2.006.479.097.021

Tabel 3.12
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Berau
Periode 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Kemampuan Keuangan	1.838.946.487.196	1.687.888.459.367	1.871.875.809.812	1.964.842.659.246	2.009.926.883.416	2.006.479.097.021
Prioritas I	919.473.243.598	843.944.229.684	935.937.904.906	982.421.329.623	1.004.963.441.708	1.003.239.548.511
Prioritas II	643.631.270.519	590.760.960.778	655.156.533.434	687.694.930.736	703.474.409.196	702.267.683.957
Prioritas III	275.841.973.079	253.183.268.905	280.781.371.472	294.726.398.887	301.489.032.512	300.971.864.553
Total Belanja Prioritas	1.838.946.487.196	1.687.888.459.367	1.871.875.809.812	1.964.842.659.246	2.009.926.883.416	2.006.479.097.021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 158, Prioritas I akan dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II akan dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan, Prioritas III akan dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memetakan dan menguraikan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan dan isu strategis yang akan dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Berau pada periode 2021-2026 mendatang. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan karenanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan dan menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional dan isu strategis tingkat regional/daerah.

4.1. KAJIAN ATAS DOKUMEN RTRW KAB. BERAU 2016-2036

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Berau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036, Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Berau antara lain:

- a. Pembangunan kawasan sentra industri;
- b. Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan kawasan pertanian;
- d. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan;
- e. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- f. Pengelolaan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
- g. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan;
- h. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah tersebut, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain:

- a. Strategi pembangunan kawasan sentra industri meliputi:
 - 1) Memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri;
 - 2) Membangun infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - 3) Menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - 4) Mendorong pertumbuhan sosial ekonomi disekitar kawasan industri.
- b. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan Pariwisata secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) Mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
 - 2) Meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - 3) Meningkatkan pemasaran pariwisata;
 - 4) Mengembangkan industri pariwisata;
 - 5) Meningkatkan kelembagaan kepariwisataan.
- c. Strategi pengembangan kawasan pertanian meliputi:
 - 1) Mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) Perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan berkelanjutan;
 - 3) Mengembangkan kawasan terpadu mandiri;
 - 4) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 5) Mengembangkan produk unggulan lokal.
- d. Strategi peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) Mendukung pemanfaatan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - 2) Membantu mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L);
 - 3) Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

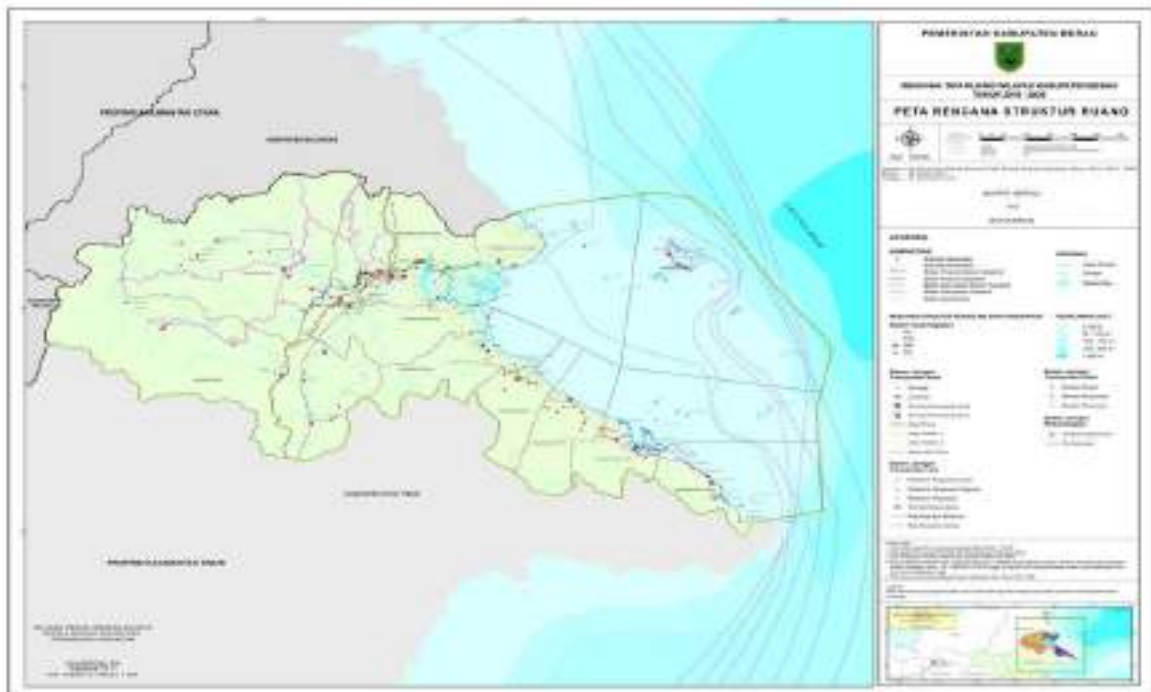
- 4) Membantu mengembangkan Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna meningkatkan produksi lokal; dan
- 5) Membantu mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.
- e. Strategi pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya meliputi:
 - 1) Mendukung meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kawasan lindung;
 - 2) Mendukung peningkatan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan
 - 3) Ikut membantu mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.
- f. Strategi pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumberdaya secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) Menetapkan batas kawasan konservasi laut kabupaten;
 - 2) Melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - 3) Mengembangkan budidaya perikanan;
 - 4) Mengoptimalkan fungsi hutan mangrove;
 - 5) Mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - 6) Mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- g. Strategi pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah meliputi:
 - 1) Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - 2) Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - 3) Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi;
 - 4) Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - 5) Mengembangkan sistem jaringan prasarana permukiman.
- h. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:

- 1) Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
- 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
- 3) Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- 4) Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

4.1.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Berau

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Berau digambarkan dalam peta seperti pada gambar dibawah.

Gambar 4.1
Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Berau



A. Rencana Sistem Kegiatan

Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Berau meliputi sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Rencana fungsi utama Kawasan perkotaan terdiri dari:

✓ **PKW** sebagai Pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pemerintahan kota, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, Pusat pelayanan jasa pariwisata, Pusat transportasi darat dan laut regional, Pendidikan tinggi, Pusat pelayanan kesehatan, Pusat Siaran dan Telekomunikasi, Pusat Olah Raga skala Provinsi, Pengendalian Lingkungan Kelautan, Pusat transportasi laut regional dan internasional, Pusat perikanan tangkap, Pusat Penelitian Kelautan, Pusat Industri, Pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan, Pengembangan perikanan tangkap; PKW adalah **Perkotaan Tanjung Redeb.**

✓ **PKL** sebagai Pusat transportasi udara regional, Pusat pengembangan agropolitan, Pelayanan Pariwisata, Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan, Pendidikan tinggi, Pengembangan Agroindustri dan Agribisnis, Pengembangan budidaya perikanan darat, Pengembangan energi / kelistrikan, Pengelolaan / industri pengelolaan perkebunan, Pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas Pergudangan, Industri. PKL terdiri dari: **Perkotaan Merancang; Perkotaan Tepian Buah; Perkotaan Tanjung Batu; Perkotaan Talisayan; Perkotaan Mangkajang; Perkotaan Labanan; Perkotaan Sido Bangen dan Perkotaan Biduk-Biduk.**

✓ **PPK** sebagai Pelayanan kegiatan perikanan tangkap, Pelayanan kegiatan budidaya tambak, Industri rakyat, Pelayanan Jasa dan Perdagangan, Pengembangan Pertanian, Pengembangan Perkebunan, Pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat. PPK Terdiri dari: **Sambakungan; Kasai; Teluk Harapan; Bebanir/Bangun; Tumbit Melayu; Tubaan; Biatan Lempake; Tembudan; Batu Putih; Merapun; Long Keluh; Merasa; Bukit Makmur; dan Long Laai.**

Sistem Pedesaan terdiri dari **PPL** yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan yang terdiri dari: Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur; Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan; Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan; Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan; Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua; Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua; Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua; Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung; Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung; Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung; Kampung Bena Baru Kecamatan Sambaliung; Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung; Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung; Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung; Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung; Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung; Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung; Kampung UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung; Kampung UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung; Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung; Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur; Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar; Kampung Semurut Kecamatan Tabalar; Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar; Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar; Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar; Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan; Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan; Kampung Manunggul Jaya Kecamatan Biatan; Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan; Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan; Kampung Karangan Kecamatan Biatan; Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan; Kampung Sumber Mulya Kecamatan Talisayan; Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan; Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan; Kampung

Suka Murya Kecamatan Talisayan; Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan; Kampung Capuak Kecamatan Talisayan; Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan; Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan; Kampung Campu Sari Kecamatan Talisayan; Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih; Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih; Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih; Kampung Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih; Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih; Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk; Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk; Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk; Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk; Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk. Kampung Merabu Kecamatan Kelay; Kampung Mapulu Kecamatan Kelay; Kampung Panaan Kecamatan Kelay; Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay; Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay; Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay; Kampung Long Duhung Kecamatan Kelay; Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay; Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay; Kampung Long Sului Kecamatan Kelay; Kampung Pandan Sari Kecamatan Segah; Kampung Siduung Indah Kecamatan Segah; Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah; Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah; Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah; Kampung Long Ayan Kecamatan Segah; Kampung Long Ayap Kecamatan Segah; Kampung Punan Mahakam Kecamatan Segah; dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah.

Tabel 4.1
Hirarki Kota dan Fungsi Pusat Pelayanan Dalam Rencana Struktur Ruang Kab. Berau

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi	Hirarki	Fungsi
1	PKW	Tanjung Redeb	I	- Pusat pemerintahan tingkat kabupaten - Pusat pemerintahan kota - Pusat perdagangan dan jasa regional

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Sistem Pusat Pelayanan	Lokasi	Hirarki	Fungsi
				- Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional - Pusat pelayanan jasa pariwisata - Pusat transportasi darat dan laut regional - Pusat Pendidikan tinggi - Pusat pelayanan kesehatan - Pusat Siaran dan Telekomunikasi - Pusat Olah Raga skala Provinsi - Pusat Pengendalian Lingkungan Kelautan - Pusat transportasi laut regional dan internasional - Pusat perikanan tangkap - Pusat Penelitian Kelautan - Pusat Industri - Pusat pengembangan pola perhubungan laut dan penyeberangan - Pusat Pengembangan perikanan tangkap
2	PKL	- Perkotaan Merancang - Perkotaan Tepian Buah - Perkotaan Tanjung Batu - Perkotaan Talisayan - Perkotaan Mangkajang - Perkotaan Labanan - Perkotaan Sido Bangen - Perkotaan Biduk-Biduk	II	- Pusat transportasi udara regional - Pusat pengembangan agropolitan - Pelayanan Pariwisata - Pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian tanaman pangan - Pendidikan tinggi - Pengembangan Agroindustri dan Agribisnis - Pengembangan budidaya perikanan darat - Pengembangan energi / kelistrikan, Pengelolaan / industri pengelolaan perkebunan - Industrin
3	PPK	- Sambakungan - Kasai - Teluk Harapan; - Bebanir/Bangun - Tumbit Melayu - Tubaan - Biatan Lempake - Tembudan - Batu Putih - Merapun - Long Keluh - Merasa - Bukit Makmur - Long Laai	III	- Pelayanan kegiatan perikanan tangkap - Pelayanan kegiatan budidaya tambak - Industri rakyat - Pelayanan Jasa dan Perdagangan - Pengembangan Pertanian - Pengembangan Perkebunan - Pelayanan pengelolaan perkebunan rakyat
4	PPL	Semua kampung di Kabupaten Berau	IV	Pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Berau dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem prasaran utama terdiri dari Sistem jaringan transportasi darat; Sistem jaringan perkeretaapian; Sistem jaringan transportasi laut; dan Sistem jaringan transportasi udara. Sedangkan sistem prasarana jaringan lainnya terdiri dari: Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat Kabupten Berau terdiri dari:

- a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang terdiri dari:
 - 1) Jaringan jalan arteri primer meliputi:
 - a) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Kelay - Kecamatan Teluk Bayur - Kecamatan Tanjung Redeb;
 - b) Jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Gunung Tabur - Kabupaten Bulungan.

**Tabel 4.2
Rincian Jalan Arteri Primer Kab. Berau**

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-1)	Panj. (Km.)
1.	021	SP.3 Muara Wahau - Kelay (KM. 100 - Muara Wahau/PDC)	103,374
2.	022	Kelay – Labanan (Labanan – KM. 50)	67,383
3.	023	Labanan – Tanjung Redeb	15,685
4.	023.11K	Jl. Jenderal Gatot Subroto (Tanjung Redeb)	1,794
5.	023.12K	Jl. Bujangga (Tanjung Redeb)	0,766
6.	023.13K	Jl. Pulau Sambit (Tanjung Redeb)	1,440
7.	023.14K	Jl. Pemuda (Tanjung Redeb)	1,180
8.	024.11K	Jl. SA. Maulana (Tanjung Redeb)	0,575
9.	024	Tanjung Redeb - Bts. Bulungan	54,706
		TOTAL	246,90

- 2) Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 - a) Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Redeb - Kecamatan Sambaliung - Kecamatan Tabalar - Kecamatan Biatan - Kecamatan Talisayan - Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur);
 - b) Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Tabur - Kecamatan Pulau Derawan - Kabupaten Bulungan (Mangkupadi);
 - c) Pembangunan ruas jalan Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur - Bandara Kalimantan.
- 3) Jaringan jalan lokal primer meliputi:
 - a) Peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih - Kecamatan Biduk-Biduk;
 - b) Pembangunan ruas jalan Simp. Usiran - Kampung Kasai;
 - c) Pembangunan ruas jalan Jembatan Kelay III (Sambaliung) - Mantaritip;
 - d) Pembangunan ruas jalan Jembatan Sungai Segah III - jalan Nasional Berau Bulungan;
 - e) Pembangunan ruas jalan Bandara - Jembatan Kelay III;
 - f) Pembangunan ruas jalan lingkaran Jembatan Segah III - Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur;
 - g) Pembangunan ruas jalan Kampung Kasai - Kampung Teluk Semanting - Kampung Tanjung Batu;
 - h) Pembangunan ruas jalan Kampung Bukit Makmur - Kampung Harapan Jaya;
 - i) Pembangunan ruas jalan Kampung Birang - jalan Nasional Berau - Bulungan;
 - j) Pembangunan ruas jalan Kampung Samburakat - Kampung Sembakungan;
 - k) Pembangunan ruas jalan Sei Sembarata - Sei Birang - jalan Nasional Berau Bulungan;

- l) Pembangunan ruas jalan Jembatan Sungai Berau I;
 - m) Pembangunan ruas jalan Kelay Lingkar Dalam;
 - n) Pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Kampung Teluk Sulaiman - Teluk Sumbang;
 - o) Peningkatan jalan poros desa;
 - p) Peningkatan jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan;
 - q) Pembangunan jalan tembus untuk membuka daerah terisolir dan daerah yang mempunyai potensi perekonomian; dan
 - r) Pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten Berau.
- 4) Jembatan meliputi:
- a) Pembangunan Jembatan Kelay III;
 - b) Pembangunan Jembatan Sungai Berau I;
 - c) Pembangunan Jembatan Sungai Segah III; dan
 - d) Perbaikan dan perawatan jembatan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Berau.

**Tabel 4.3
Sebaran Lokasi dan Kondisi Jembatan Di Kab. Berau**

No	Nama	Lokasi	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi	Kampung/ Kecamatan
1	Jemb Sei Lenggo	Lenggo Teluk sulaiman	20	7	Baik	Tembudan, Batu putih
2	Jemb Sei Semurut	Semurut	30	7	Baik	Tabalar
3	Jemb Sei Labuan Kelambu	Lenggo-Teluk Sulaiman	60	6	Baik	Labuan kelambu kec. Biduk-biduk
4	Jemb Sei Lempot	Lenggo-Teluk Sulaiman	30	4	Baik	Biduk Biduk
5	Jemb Sepinang	Lenggo-Teluk Sulaiman	30	6	Baik	Batu Putih
6	Jemb Sei Kakawan	Sei Kakawan	25	6	Baik	Batu Putih
7	Jemb Sei Sunggalit	Sei Sunggalit	25	6	Baik	Batu Putih
8	Jemb Sei Lati	Sei Lati	60	6	Baik	Gunung Tabur
9	Jemb Sei Talasau	Sei Talasao	40	6	Baik	Gunung Tabur
10	Jemb Si Birang	Sei Birang	60	6	Baik	Teluk Bayur
11	Jemb Sei Siduung2	Sei Siduung 2	60	6	Baik	Teluk Bayur
12	Jemb Sei Siduung1	Sei siduung 1	80	6	Baik	Segah
13	Jemb Sei Siduung3	Sei Siduung 3	40	6	Baik	Segah
14	Jemb Eka Sapt-Sumber	Sei Eka Sapt	30	7	Baik	Talisayan
15	Jemb Segah	Segah	120	6	Baik	Segah

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Nama	Lokasi	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi	Kampung/ Kecamatan
16	Jemb Cepuak	Cepoak	25	6	Baik	Talisayan
17	Suaran	Suaran	25	7	Baik	Sambaliung
18	Suaran	Suaran	25	8	Baik	Sambaliung
19	Suaran	Suaran	30	8	Baik	Sambaliung
20	Suaran	Suaran	20	8	Baik	Sambaliung
21	Suaran	Suaran	20	8	Baik	Sambaliung
22	Mangkajang	Mangkajang	12	6	Baik	Sambaliung
23	Sei Semukat	TRH	30	8	Baik	Tabalar
24	Semurut Kecil	TRH	30	8	Baik	Tabalar
25	Sei Seguntur	Tubaan	20	8	Baik	Tabalar
26	Box Culvert	Tubaan	9	6,5	Baik	Tabalar
28	Sei Berantai	Bapinang	20	8	Baik	Tabalar
29	Alam	Bapinang	60	8	Baik	Tabalar
30	Alam	Bapinang	20	8	Baik	Tabalar
31	Sei Bapinang	Bapinang	20	8	Baik	Biatan
32	Lempake	Lempake	25	8	Baik	Biatan
33	Lempake	Lempake	40	7	Baik	Biatan
34	Talisayan	Talisayan	55	7	Baik	Talisayan
35	Sei Dumaring I	Talisayan	40	8	Baik	Talisayan
36	Sei Dumaring I	Talisayan	45	8	Baik	Talisayan
37	Sambaliung	Sambaliung	0	0	Baik	Sambaliung
38	Bangun	Bangun	40	8	Baik	Sambaliung
39	Suaran	Suaran	20	7	Baik	Sambaliung
40	Gunung Tabur	Gunung Tabur	364	8	Baik	Gunung Tabur
41	Gunung Tabur	Gunung Tabur	30	8	Baik	Gunung Tabur
42	Gunung Tabur	Gunung Tabur	20	8	Baik	Gunung Tabur
43	Gunung Tabur	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
44	Maning Besar	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
45	Maning Kecil	Gunung Tabur	40	8	Baik	Gunung Tabur
46	-	Sambaliung	20	8	Baik	Sambaliung
47	-	Kelay	20	8	Baik	Kelay
48	Sei Alam	Sei alam	20	8	Baik	Kelay
49	-	Kelay	142	10	Baik	Kelay
50	-	Kelay	30	10	Baik	Kelay
51	-	Kelay	60	10	Baik	Kelay
52	-	Kelay	20	8	Baik	Kelay
53	Sei Mali	Kelay	20	8	Baik	Kelay
54	Sei Labaan	Kelay	30	8	Baik	Kelay
55	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
56	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
57	-	Kelay	25	8	Baik	Kelay
58	Sei Mayong	Kelay	40	10	Baik	Kelay
59	Jembatan Gantung	Merapun	120	1,55	Baik	Merapun

No	Nama	Lokasi	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi	Kampung/ Kecamatan
60	A Yani	Jl. Jend A Yani	16	9	Baik	Tanjung Redeb
61	Dr Soetomo	Jl. Dr Soetomo	8	4	Baik	Tanjung Redeb
62	Pulau Sambit	Jl. Pulau Sambit	15	15	Baik	Tanjung Redeb
63	Jalan Bujangga	Jalan Bujangga	10	8	Baik	Tanjung Redeb
64	Jalan Bujangga	Jalan Bujangga	20	8	Baik	Tanjung Redeb
65	Jalan Gatot Subroto	Jalan Gatot Subroto	10	8	Baik	Tanjung Redeb
66	Jalan Gatot Subroto	Jalan Gatot Subroto	8	8	Baik	Tanjung Redeb
67	Jemb Sei Rinding	Jl. Marsma Iswahyudi	25	15	Baik	Tanjung Redeb
68	Jemb Sei Kalimantan	Jl. Marsma Iswahyudi	25	17	Baik	Tanjung Redeb

b. Pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari:

- 1) Pengoptimalan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Bayur;
- 2) Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Talisayan;
- 3) Pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a) Terminal penumpang di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur;
 - b) Terminal penumpang di Kecamatan Biduk-Biduk;
 - c) Terminal penumpang di Kecamatan Kelay;
 - d) Terminal penumpang di Kecamatan Biatan; dan
 - e) Terminal penumpang di Kecamatan Segah.
- 4) Pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Teluk Bayur;
- 5) Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi:
 - a) Pembangunan Jembatan Timbang di Labanan Kecamatan Teluk Bayur dan Tembudan Kecamatan Batu Putih;
 - b) Relokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;

- c) Halte meliputi seluruh IKK kecamatan di Kabupaten Berau (tersebar).
- c. Pengembangan jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan armada meliputi:
 - a) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - b) Angkutan Kota Dalam Kabupaten;
 - c) Angkutan Perdesaan Dalam Kabupaten.
 - 2) Pengembangan trayek ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan transportasi.
- d. Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang terdiri dari:
 - 1) Pengembangan alur pelayaran sungai Tanjung Redeb - Teluk Bayur - Segah;
 - 2) Pengembangan alur pelayaran sungai dan penyeberangan Tanjung Redeb - Tanjung Batu - Pulau Derawan - Maratua dan Pulau sekitarnya; dan
 - 3) Pembangunan dermaga meliputi:
 - a) Dermaga rakyat Sambaliung;
 - b) Dermaga wisata Gayam.
 - c) Dermaga meliputi:
 - 1. Kasai Kecamatan pl. Derawan
 - 2. Teluk Semanting Kecamatan Pl. Derawan
 - 3. Batumbuk Kecamatan Pl. Derawan
 - 4. Kaniungan Besar Kecamatan Biduk-biduk
 - 5. Semurut Kecamatan Tabalar
 - 6. Biatan Lempake Kecamatan Biatan
 - 7. Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

2. Sistem Jaringan Perkeretaapian

Sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Berau meliputi:

- a. Pembangunan jaringan jalur kereta api meliputi:
 - 1) Jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb;
 - 2) Jalur Tanjung Redeb-Muara Wahau-Sangata
 - 3) Jalur Tanjung Redeb – Sekerat – Bontang.
- b. Pembangunan stasiun kereta api Tanjung Redeb (Kelas Besar).

3. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Tatanan Kepelabuhan meliputi:
 - 1) Pelabuhan Pengumpul yang meliputi Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari Terminal Tanjung Redeb dan Terminal Mantaritip.
 - 2) Pelabuhan Pengumpan yang meliputi:
 - a) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang terdiri dari Pelabuhan Maratua; Pelabuhan Talisayan; Pelabuhan Biatan; dan Pelabuhan Tembudan;
 - b) Pelabuhan Pengumpan Regional yang terdiri dari Pelabuhan Teluk Sulaiman; dan Pelabuhan Tanjung Batu.
 - 3) Pelabuhan/Terminal Khusus terdiri dari: Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Pl. Derawan; Kecamatan Kelay; Kecamatan Biatan; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Tabalar; dan Kecamatan Pulau Derawan.
- b. Alur Pelayanan yang terdiri dari:
 - 1) Balikpapan – Samarinda - Sangatta - Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan);
 - 2) Tarakan – Malinau – Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Tanjung Batu.

4. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Pengembangan dan Peningkatan fungsi bandar udara Kalimantan sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
- b. Pembangunan dan Pengembangan bandar udara pengumpan baru di Kecamatan Maratua sebagai bandar udara pengumpan;
- c. Pembangunan dan Pengembangan bandar udara baru di Kecamatan Batu Putih; dan
- d. Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara khusus, meliputi bandar udara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung.

5. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Pengembangan depo BBM berupa pengembangan depo BBM di Kecamatan Gunung Tabur.
- b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan; dan
 - 2) Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.
- c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati 3 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur;
 - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung;
 - 3) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur;
 - 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik meliputi:

- a) Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Existing)
- b) Biduk-biduk : 350 kwp (Rencana)
- c) Batu Putih : 170 kwp (Rencana)
- d) Talisayan : 350 kwp (Rencana)
- e) Tabalar : 170 kwp (Rencana)
- f) Maratua : 170 kwp (Rencana)
- g) Kelay : 170 kwp (Rencana)
- h) Segah : 170 kwp (Rencana)
- 5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay;
- 6) Pembangunan energi alternatif meliputi:
 - a) Pembangkit listrik tenaga angin/bayu;
 - b) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan
 - c) Pembangkit energi biogas.
- 7) Pembangunan Gardu Induk (GI) baru meliputi:
 - a) Kecamatan Teluk Bayur (Existing)
 - b) Kecamatan Teluk Bayur (Rencana)
 - c) Kecamatan Sambaliung (Rencana)
- d. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terdiri dari:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb – Tanjung Selor;
 - 2) Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:
 - a) SUTM 20 KV dari Teluk Bayur – PLTD Sambaliung;
 - b) SUTM 20 KV dari Tj. Batu – Batu Batu (Gn. Tabur)

6. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Pengembangan jaringan terestrial berupa pengembangan jaringan distribusi telepon kabel dan prasarana penunjang telepon kabel sampai ke tingkat ibukota perdesaan untuk memenuhi kebutuhan

sambungan telepon rumah tangga 60%, kebutuhan sosial 20%, dan kebutuhan komersial 20%;

- b. Pengembangan jaringan satelit pada daerah yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi;
- c. Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- d. Pengembangan jaringan nirkabel (telepon selular) dengan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama pada titik-titik zona yang tersebar di wilayah kecamatan Kabupaten Berau.

7. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air Kabupten Berau terdiri dari:

- a. Sistem wilayah sungai dan daerah aliran sungai meliputi:
 - 1) WS Berau-Kelay yang terdiri dari: DAS Sajau; DAS Binai; DAS Mangkupadie; DAS Pidada; DAS Malinau; DAS Berau; DAS Pantai; DAS Liu Padai; DAS Tabalar; DAS Lempake; DAS Pegat; DAS Lungsuran Naga; DAS Derawan; DAS Maratua Payung-Payung; DAS Martua Teluk Alulu;
 - 2) WS Karangan yang terdiri dari: DAS Petuang; DAS Bakil; DAS Benuyaan; DAS Sumberagung; DAS Kayuindah; DAS Talisayan; DAS Dumaring; DAS Lobangkelatak; DAS Kalriabu; DAS Muhammad; DAS Labuankelambu; DAS Sandaran; DAS Kembalun; DAS Manubara; DAS Karangan; DAS Tanjung Buaya.
- b. Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang meliputi:
 - 1) DI Buyung Buyung seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 2) DI Gurimbang seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 3) DI Pulau Besing seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

- 4) DI Semurut seluas kurang lebih 510 (lima ratus sepuluh) hektar;
 - 5) DI Talisayan seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) hektar;
 - 6) DI Merancang seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 7) DI Tasuk seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 8) DI Tumbit Melayu seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar;
 - 9) DI Siduung seluas kurang lebih 500 (seratus) hektar;
 - 10) DI Pujut seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 11) DI Tabalar seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 12) DI Samburakat seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 13) DI Bebanir Muara seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - 14) DI Pulau Aji seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - 15) DIR Karangan seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 16) DIR Sukan seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 17) DIR Semanting seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
 - 18) DI Suaran seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
 - 19) DI Teluk Sumbang seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 - 20) DI Semurut II seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 21) DI Batu Putih seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 22) DI Biatan Lempake seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - 23) DI Pandan Sari seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
 - 24) DI Bukit Makmur seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar;
 - 25) DI Tabalar Muara seluas kurang lebih 1000 (seribu) hektar.
- c. Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir dan bangunan konservasi.

8. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Sistem jaringan prasarana lingkungan Kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Pengelolaan jaringan air baku meliputi:
 - 1) Peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb dari 200 lt/dtk menjadi 600 lt/dtk;
 - 2) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sambaliung Kecamatan Sambaliung 60 lt/dtk;
 - 3) Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) Talisayan Kecamatan Talisayan 50 lt/dtk;
 - 4) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Merancang Kecamatan Gunung Tabur 17 lt/dtk;
 - 5) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Labanan Kecamatan Teluk Bayur 100 lt/dtk;
 - 6) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan 10 lt/dtk;
 - 7) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb 20 lt/dtk;
 - 8) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelay Kecamatan Kelay 10 lt/dtk;
 - 9) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biduk-biduk Kecamatan Biduk-biduk 20 lt/dtk; dan
 - 10) Instalasi Pengolah Air (IPA) dengan sistem desalinasi air laut (SWRO) Kecamatan Maratua 2,5 lt/dtk;
 - 11) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tepian Buah Kecamatan Segah 20 lt/dtk;
 - 12) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tubaan Kecamatan Tabalar 10 lt/dtk;
 - 13) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batu Putih Kecamatan Batu Putih 10 lt/dtk;
 - 14) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kasai Kecamatan Pl. Derawan 10 lt/dtk;

- 15) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biatan Lempake Kecamatan Biatan 10 lt/dtk;
 - 16) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Suaran Kecamatan Sambaliung 10 lt/dtk.
- b. Pengendalian banjir meliputi:
- 1) Normalisasi sungai;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
 - 3) Pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan pintu air;
 - 4) Pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
 - 5) Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap Kawasan permukiman mandiri; dan
 - 6) Penanaman pohon di sempadan sungai dan lahan-lahan kritis.
- c. Pengelolaan jaringan persampahan meliputi:
- 1) Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (*sanitary landfill*) meliputi:
 - a) Optimalisasi TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb;
 - b) Rencana pembangunan TPA yang representatif disekitar PKW Perkotaan Tanjung Redeb jika TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb telah melebihi kapasitas;
 - c) Pembangunan TPA di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan;
 - d) Pembangunan TPA di Talisayan Kecamatan Talisayan; dan
 - e) Pembangunan TPA di Tepian Buah Kecamatan Segah.
 - 2) Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi: Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Biatan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Segah; Kecamatan Kelay; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Maratua; Kampung Pulau Derawan.

- 3) Pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di permukiman;
 - 4) Peningkatan prasarana pengelolaan sampah permukiman; dan
 - 5) Peningkatan prasarana pengelolaan limbah medis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. Pengelolaan jaringan drainase terdiri dari:
- 1) Pengembangan drainase mikro meliputi pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan; dan penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer, sekunder dan tersier.
 - 2) Pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai.
- e. Pengelolaan jaringan air limbah meliputi: pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat; dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat meliputi:
- 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) diKecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Maratua;
 - 2) Peningkatan fungsi Incenerator di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Tanjung Redeb;
 - 3) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di permukiman; dan
 - 4) Peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan permukiman.
- f. Jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdiri dari:
- 1) Jalur evakuasi bencana gelombang pasang/abrasi dan tsunami melalui jalan provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi: Kecamatan Maratua; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan

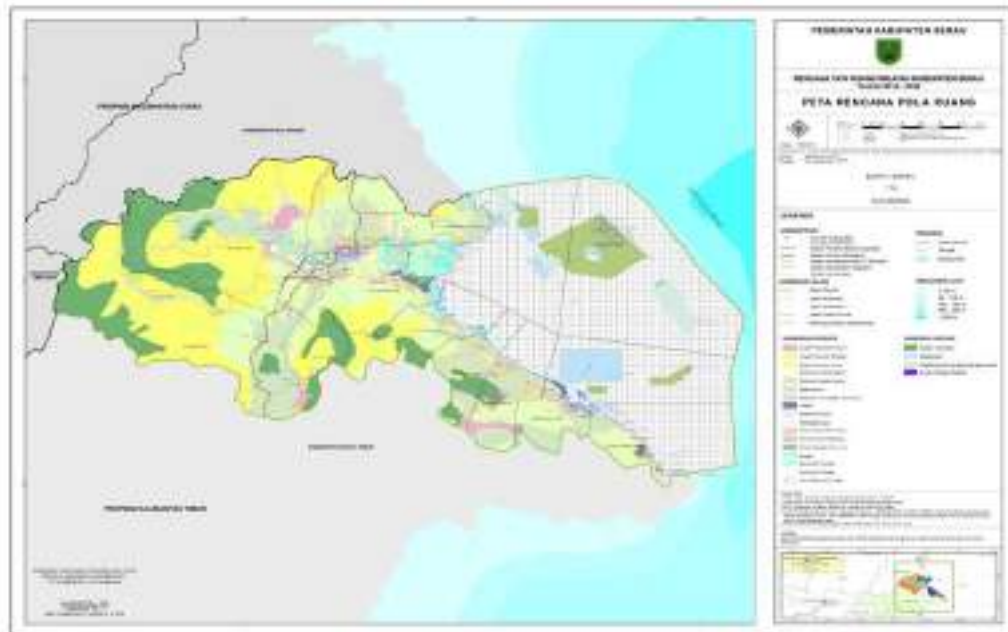
Biatan; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Biduk Biduk.

- 2) Jalur evakuasi bencana banjir melalui jalan poros desa (jalan kabupaten) menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi: Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur; dan Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung.
- 3) Jalur evakuasi rawan gerakan tanah melalui jalan kabupaten dan poros desa menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi meliputi: Kecamatan Kelay; Kecamatan Segah; Kecamatan Sambaliung; dan Kecamatan Gunung Tabur.
- 4) Jalur evakuasi rawan kebakaran melalui jalan kabupaten dan poros desa menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi. Meliputi: Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Segah; Kecamatan Kelay; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Biatan; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Maratua.

4.1.2.Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Berau

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Kabupaten Berau, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi rencana pola ruang untuk Kawasan lindung dan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya. Rencana pola ruang di Kabupaten Berau dapat dilihat secara jelas pada peta berikut ini.

Gambar 4.2
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Berau



1. Rencana Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung Kabupaten Berau seluas kurang lebih 461.375,83 (empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 12,48% (dua belas koma empat puluh delapan persen) dengan cara: mempertahankan kawasan hutan lindung; mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan; merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di Kawasan pesisir; dan mengembangkan ekowisata. Kawasan lindung yang dimaksud terdiri dari:

- a) Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 360.254,31 Ha atau sekitar 78,08% yang meliputi: Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Biatan, Kecamatan Biduk-biduk, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Kelay, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Segah, Kecamatan Tabalar; dan Kecamatan Talisayan.
- b) Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya berupa:

- Kawasan bergambut yang terdiri dari Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk Biduk;
 - Kawasan resapan air yang terdiri dari Kecamatan Kelay; Kecamatan Segah; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; dan Kecamatan Tabalar.
- c) Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:
- Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 3.983,63 Ha yang meliputi Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Pl. Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan.
 - Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi seluas kurang lebih 38.167,72 Ha terletak di setiap Kecamatan yang dilewati sungai.
 - Kawasan sekitar waduk/embung/bending meliputi Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Pl. Derawan.
 - Kawasan sekitar mata air meliputi Kecamatan Kelay; Kecamatan Segah; dan Kecamatan Gunung Tabur.
 - Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luasnya 30% dari luar perkotaan yang meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau (RTH) publik, berupa hutan kota, taman kota, jalur hijau jalan dan sungai, Tempat Pemakaman Umum (TPU) terletak di Perkotaan Tanjung Redeb.
 - b. Ruang terbuka hijau (RTH) privat, berupa kebun atau pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan.
- d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri dari:
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: Komplek Keraton Gunung Tabur di Kecamatan Gunung Tabur; Komplek Keraton Sambaliung di Kecamatan Sambaliung;

Bangunan peninggalan Belanda di Kecamatan Teluk Bayur; dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan di Kecamatan Teluk Bayur.

- Kawasan suaka marga satwa seluas kurang lebih 59,37 Ha meliputi kawasan Pulau Semama dan perairannya di Kecamatan Pl. Derawan.
 - Kawasan padang lamun (kawasan konservasi laut) seluas kurang lebih 58.593,12 Ha meliputi Kecamatan Maratua dan Kecamatan Pl. Derawan.
 - Kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 317,67 Ha meliputi Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Pl. Derawan.
- e) Kawasan lindung geologi berupa karst seluas 345.226,54 Ha meliputi Kecamatan Batu Putih, Biatan, Biduk-biduk, Gunung Tabur, Kelay, Sambaliung, Segah, Tabalar, dan Talisayan.
- f) Kawasan rawan bencana meliputi:
- Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Teluk Bayur; dan Kecamatan Sambaliung.
 - Kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Segah; Kecamatan Kelay; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Talisayan.
 - Kawasan rawan kebakaran meliputi Kecamatan Segah; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Biatan; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Kelay; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Maratua; dan Kecamatan Biduk Biduk.
 - Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Tabalar;

Kecamatan Biatan; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Biduk Biduk.

- g) Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah yang terdiri dari: Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Batu Putih; dan Kecamatan Biduk Biduk.

2. Rencana Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.191.477,27 Ha yang terdiri dari:
- Kawasan hutan produksi meliputi : Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Teluk Bayur.
 - Kawasan hutan produksi terbatas berada di Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah dan Kecamatan tabalar.
 - Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi terdapat di Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Teluk Bayur.
- b) Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari:
- Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang lebih 63.846,44 Ha meliputi:
 - a. Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.468,33 Ha meliputi : Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah;

Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur.

- b. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 46.378,11 Ha meliputi: Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biatan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Talisayan; dan Kecamatan Teluk Bayur.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas utama berupa sayur-sayuran dan buah-buahan meliputi Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Kelay; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Segah; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.
- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, kakao, lada, dan kelapa seluas kurang lebih 433.758,78 Ha meliputi Kecamatan batu putih; Kecamatan Biduk-biduk; Kecamatan Biatan; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Segah; Kecamatan Kelay; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Teluk Bayur.
- Kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi meliputi:
 - a. Kecamatan Kelay (sapi, kambing,babi);
 - b. Kecamatan Talisayan (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - c. Kecamatan Tabalar (sapi, kerbau, kambing);
 - d. Kecamatan Biduk-Biduk (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - e. Kecamatan Pulau Derawan (sapi, kambing);
 - f. Kecamatan Maratua (kambing);
 - g. Kecamatan Sambaliung (sapi, kambing, babi);
 - h. Kecamatan Tanjung Redeb (sapi, kerbau, kambing);

- i. Kecamatan Gunung Tabur (sapi, kerbau, kambing, babi);
 - j. Kecamatan Segah (sapi, kambing, babi);
 - k. Kecamatan Teluk Bayur (sapi, kambing);
 - l. Kecamatan Batu Putih (sapi, kerbau, kuda, kambing);
 - m. Kecamatan Biatan (sapi, kerbau, kambing); dan
 - n. Kecamatan Pl. Derawan (sapi potong).
- c) Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap berupa kawasan perikanan tangkap di perairan umum dan laut meliputi : perairan Kecamatan Pulau Derawan; perairan Kecamatan Maratua; perairan Kecamatan Sambaliung; perairan Kecamatan Gunung Tabur; perairan Kecamatan Tabalar; perairan Kecamatan Biatan; perairan Kecamatan Batu Putih; perairan Kecamatan Talisayan; perairan Kecamatan Biduk Biduk.
 - Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari: kawasan perikanan budidaya air tawar (Ikan Mas; Ikan Mujair; Ikan Patin; Ikan Gabus; Lele dan Udang Galah) dan kawasan perikanan budidaya air laut (Kerapu dan Lobster).
 - Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - Sarana dan prasarana perikanan.
- d) Kawasan peruntukan pertambangan di kelompokkan menjadi:
- Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang meliputi Kecamatan Biatan; Kecamatan Biduk Biduk; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Kelay; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Segah; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Teluk Bayur.
 - Wilayah Usaha Mineral Logam.
 - Wilayah Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- e) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.786,43 Ha meliputi:
- Peruntukan industri besar berupa kawasan industri di Kecamatan Sambaliung, Batu Putih dan Biduk Biduk;
 - Peruntukan industri menengah meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pabrik es meliputi: kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; kampung Giring-giring dan kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk Biduk;
 - b. Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - c. Kawasan industri perikanan Kecamatan Batu Putih.
 - Peruntukan industri kecil dan mikro berupa meubel, terasi, batu bata dan olahan perikanan meliputi Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Biatan; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Gunung Tabur.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata seluas kurang lebih 41.024,61 Ha terdiri dari:
- Pengembangan wisata alam meliputi:
 - a. Pengembangan wisata bahari yang terdapat di Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Talisayan.
 - b. Pengembangan wisata minat khusus yang terdapat di Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Maratua; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Kelay; Kecamatan Segah dan Kecamatan Talisayan.
 - c. Pengembangan wisata alam/ekowisata yang terdapat di Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Biatan; Kecamatan Batu Putih; Kecamatan Biduk-Biduk

Kecamatan Kelay; Kecamatan Segah; Kecamatan Talisayan;
Kecamatan Maratua.

- Pengembangan wisata sejarah meliputi Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Kelay.
- Pengembangan wisata budaya yang terdiri dari:
 - a. Wisata budaya Banua meliputi Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung;
 - b. Wisata budaya Dayak meliputi Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah;
 - c. Wisata budaya Bajau meliputi Kecamatan Derawan dan Kecamatan Maratua.
- Pengembangan wisata buatan terdiri dari:
 - a. Wisata Tangap, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur;
 - b. Wisata Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur;
 - c. Wisata kuliner dan belanja di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - d. Wisata religi di Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur dan Sambaliung;
 - e. Wisata rekreasi di Kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung.
- g) Kawasan peruntukan permukiman meliputi:
 - Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 50.145,82 Ha meliputi Kecamatan Talisayan; Kecamatan Tabalar; Kecamatan Kelay; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Segah; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Maratua; Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.
 - Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 16.161,52 Ha meliputi Kecamatan Tanjung Redeb; Kecamatan Sambaliung;

Kecamatan Gunung Tabur; Kecamatan Teluk Bayur; Kecamatan Segah; Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Talisayan.

- h) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Maratua; Pulau Rabu-rabu; Pulau Panjang; Pulau Derawan; Pulau Semama; Pulau Sangalaki; Pulau Kakaban; Pulau Sambit; Pulau Blambangan; Pulau Mataha; Pulau Bilang-bilangan; Pulau Balikukup; Pulau Kaniungan Kecil; Pulau Kaniungan Besar.
- i) Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi:
- Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - b. Arteleri Medan (ARMED) di Kecamatan Teluk Bayur;
 - c. Polisi Resort (POLRES) di Kecamatan Tanjung Redeb;
 - d. Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Sambaliung;
 - e. Pos Angkatan Laut (POSAL) meliputi: Kecamatan Pulau Derawan; Kecamatan Pulau Maratua dan Kecamatan Biduk-biduk;
 - f. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di setiap Kecamatan;
 - g. Polisi Sektor (POLSEK) di setiap Kecamatan;
 - h. Squadron Helikopter (SERBU) Penerbat TNI AD di Bandara Kalimantan Kecamatan Teluk Bayur.
 - Kawasan bumi perkemahan seluas kurang lebih 195,4 Ha adalah Bumi Perkemahan Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur.
 - Kawasan pendidikan tinggi terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Gunung Tabur.
 - Kawasan Hutan Rakyat terdapat di Kecamatan Kelay, Tanjung Batu, Sambaliung, dan Talisayan.
 - Kawasan Unit Penyimpanan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 4.4
Pola Ruang Wilayah Kabupaten Berau (Luas dalam Ha)**

NO	KAWASAN / POLA RUANG	KECAMATAN													GRAND TOTAL
		BATU PUTIH	BIATAN	BIDUK - BIDUK	GN. TABUR	KELAY	MARATUA	PI. DERAWAN	SAMBALIUNG	SEGAH	TABALAR	TALISAYAN	TG. REDEB	TELUK BAYUR	
A.	Kawasan Lindung	2.736,75	22.410,48	1.039,84	2.678,60	184.412,83	30.588,28	35.966,04	11.834,98	124.556,96	31.863,69	12.042,68	99,98	1.144,71	461.375,82
1	Hutan Lindung	1.127,47	21.675,06			176.465,07			3.993,06	117.820,97	27.949,99	11.222,70			360.254,32
2	Mangrove Padang Lamun (Konservasi)	311,02		2,46				4,20							317,68
3	Laut)						30.588,28	28.004,84							58.593,12
4	Sempadan Pantai	1.019,44	141,81	936,05				1.008,79	98,90		463,73	314,91			3.983,63
5	Sempadan Sungai	278,82	593,61	101,33	2.678,60	7.947,76		6.888,84	7.743,02	6.735,99	3.449,97	505,07	99,98	1.144,71	38.167,70
6	Suaka Marga Satwa							59,37							59,37
B.	Kawasan Budidaya	354.793,52	96.792,08	241.956,97	193.653,52	471.241,42	531.037,42	406.433,13	204.501,69	399.572,25	151.870,39	150.114,20	2.340,68	30.553,60	3.234.860,87
1	Hutan Produksi Konversi	2.643,38	4.699,59		860,66	7.105,82			2.432,28	14.756,88	1.514,63	14.231,83		117,22	48.362,29
2	Hutan Produksi Terbatas		2.156,73		20.551,83	286.437,27		5.775,52	37.605,60	253.418,73	46.633,65				652.579,33
3	Hutan Produksi Tetap	35.639,78	11.773,79	32.379,45	93.879,24	73.198,76		42.474,28	93.645,83	43.321,73	31.391,84	23.080,22		9.750,74	490.535,66
4	Industri	1.349,49		2.466,81					6.970,12						10.786,42
5	Kawasan Peruntukan Perikanan	57.925,28						19.197,10	4.037,55		2.284,96	22,37			83.467,26
6	Laut Teritorial (12 mill)	192.236,92	20.775,77	174.045,92			442.754,04	269.135,26	1.848,63		44.247,27	49.327,05			1.194.370,86
7	Pariwisata Darat	5.693,93		4.356,73			2.471,29	1.390,86			240,31	244,78			14.397,90
8	Pariwisata Laut	3.741,03	2.762,52	5.865,23			3.473,10				4.958,61	2.693,43			23.493,92

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

NO	KAWASAN / POLA RUANG	KECAMATAN													GRAND TOTAL
		BATU PUTIH	BIATAN	BIDUK - BIDUK	GN. TABUR	KELAY	MARATUA	PL. DERAWAN	SAMBALIUNG	SEGAH	TABALAR	TALISAYAN	TG. REDEB	TELUK BAYUR	
9	Perkebunan	36.765,99	42.196,24	20.915,82	45.544,14	94.505,48		28.309,22	19.863,31	74.423,56	13.600,84	48.152,20		9.481,99	433.758,79
10	Permukiman Perdesaan	2.728,25	3.974,78	1.888,25	1.458,66	6.550,02	417,78	1.077,85	15.649,76	6.497,90	1.971,38	6.170,04		1.761,16	50.145,83
11	Permukiman Perkotaan				2.503,18			1.063,75	4.507,79	1.277,02		509,60	2.174,87	4.125,32	16.161,53
12	Pertanian Lahan Basah		1.508,58		2.652,00				6.504,78	2.799,35	2.272,68	492,40		1.238,54	17.468,33
13	Pertanian Lahan Kering	1.725,31	6.691,48		23.193,56				4.574,08	266,47	1.421,75	5.169,97		3.335,49	46.378,11
14	Sungai	60,24	252,60	38,76	3.010,25	3.444,07	468,90	9.822,06	6.861,96	2.810,61	1.332,47	20,31	165,81	743,14	29.031,18
15	Taman Wisata Alam Laut	14.283,92					81.452,31	28.187,23							123.923,46
GRAND TOTAL		357.530,27	119.202,56	242.996,81	196.332,12	655.654,25	561.625,70	442.399,17	216.336,67	524.129,21	183.734,08	162.156,88	2.440,66	31.698,31	3.696.236,69

4.1.3. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten Berau terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) berupa Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa:
 - a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang terdiri dari:
 - Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB);
 - Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan;
 - Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki;
 - Kawasan Hutan Lindung Lesan;
 - Taman-taman / objek wisata alam;
 - Kawasan Karst.
 - b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi yang terdiri dari:
 - Kawasan Agropolitan;
 - Kawasan Minapolitan;
 - Kawasan Pusat Industri Perkebunan;
 - Kawasan Industri Mangkajang.
 - c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam di Kabupaten Berau meliputi Pulau Kakaban; Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit; Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha dan Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup.
 - d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM di Kabupaten Berau berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua.

4. Kawasan Andalan Nasional (KAN) meliputi Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya.

**Tabel 4.5
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Berau**

No	Kawasan Strategis	Keterangan
1	Nasional	Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2	Provinsi	Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3	Kabupaten	a. Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup: 1. Kawasan Heart Of Borneo (HOB); 2. Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki; 3. Kawasan Hutan Lindung Lesan; 4. Taman-taman/ objek wisata alam; 5. Kawasan Karst. b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi: 1. Kawasan KTM Labanan; 2. Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara; 3. Kawasan Pusat Industri Perkebunan; dan 4. Kawasan Industri Mangkajang. c. Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam di Kabupaten Berau meliputi: 1. Pulau Kakaban; 2. Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit; 3. Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha; dan 4. Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup. d. Kawasan Strategis untuk kepentingan HANKAM di Kabupaten Berau berupa bandara udara HANKAM di Pulau Maratua e. Kawasan Andalan Nasional (KAN) meliputi Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya

4.1.4. Arahannya Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Berau berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Penetapan kawasan Strategis. Arahannya pemanfaatan ruang Kabupaten Berau disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.6
Arahan Pemanfaatan Ruang Kab. Berau**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																
Program Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan																
1.	Perwujudan Sistem Perkotaan	a. Pemantapan fungsi Perkotaan Tanjung Redeb sebagai PKW: - Peningkatan Pusat pemerintahan kabupaten; - Pembangunan Pusat pendidikan skala kabupaten – Perguruan Tinggi; - Pengembangan Pusat pelayanan kesehatan; - Pemantapan fungsi terminal tipe A	Perkotaan Tanjung Redeb												DINAS PU, KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
		b. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan sebagai PKL: - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; - Peningkatan pusat pemerintahan kabupaten; - Pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala regional; - Pembangunan Perdagangan dan Jasa Regional; - Pembangunan Terminal Tipe C; - Industri Pengolahan Ikan	Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, dan Talisayan, Teluk Bayur, Kelay, Biatan, Pulau Derawan, dan Segah													
		c. Pengembangan Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp):	Perkotaan Biduk-biduk													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		- Pembangunan perdagangan dan jasa skala lokal; - Peningkatan ruas jalan; - Pembangunan/ peningkatan sarana kesehatan														
		d. Pemantapan percepatan kawasan yang tidak termasuk PKL dan PKLp sebagai PPK	Sambakungan, Kasai, Teluk Harapan, Bebanir/Bangun, Tumbit Melayu, Tubaan, Biatan Lempake, Tembudan, Batu Putih, Merapun, Long Keluh, Merasa, Bukit Makmur, Sido Bangen, dan Long Laai,													
2	Perwujudan Sistem Perdesaan	Pemantapan percepatan kawasan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Pulau Besing Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan, Kampung Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan, Kampung Pegat Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan,													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
			Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua, Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua, Kampung Teluk Alulu Kecamatan Maratua, Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung, Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung, Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung, Kampung Bena Baru Kecamatan Sambaliung, Kampung Tumbit Dayak Kecamatan Sambaliung, Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung, Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambaliung, Kampung Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung, Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung, Kampung UPT Sukan Tengah III Kecamatan Sambaliung, Kampung UPT Sukan Tengah IV Kecamatan Sambaliung, Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung, Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, Kampung Semurut Kecamatan Tabalar, Kampung Harapan													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
			Maju Kecamatan Tabalar, Kampung Tabalar Ulu Kecamatan Tabalar, Kampung Tabalar Muara Kecamatan Tabalar, Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan, Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan, Kampung Manunggal Jaya Kecamatan Biatan, Kampung Biatan Ulu Kecamatan Biatan, Kampung Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan, Kampung Karangan Kecamatan Biatan, Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan, Kampung Sumber Mulya Kecamatan Talisayan, Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan, Kampung Purna Sari Jaya Kecamatan Talisayan, Kampung Suka Murya Kecamatan Talisayan, Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan, Kampung Capuak Kecamatan Talisayan, Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan, Kampung Tunggal Bumi Kecamatan Talisayan, Kampung Campu Sari Kecamatan Talisayan, Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih, Kampung Sumber Agung													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
			Kecamatan Batu Putih, Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih, Kampung Lobang Kelatak Kecamatan Batu Putih, Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih, Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Merabu Kecamatan Kelay, Kampung Mapulu Kecamatan Kelay, Kampung Panaan Kecamatan Kelay, Kampung Muara Lesan Kecamatan Kelay, Kampung Lesan Dayak Kecamatan Kelay, Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay, Kampung Long Duhung Kecamatan Kelay, Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay, Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay, Kampung Long Sului Kecamatan Kelay, Kampung Pandan Sari Kecamatan Segah, Kampung													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
			Siduung Indah Kecamatan Segah, Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah, Kampung Harapan Jaya Kecamatan Segah, Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah, Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah, Kampung Long Ayan Kecamatan Segah, Kampung Long Ayap Kecamatan Segah, Kampung Punan Mahakam Kecamatan Segah, dan Kampung Punan Segah Kecamatan Segah,													
Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama																
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan dan jembatan	- pemeliharaan arteri primer - pemeliharaan kolektor primer 1 - peningkatan kolektor primer 2 - peningkatan kolektor primer 3 - peningkatan lokal primer: - pembangunan dan pemeliharaan jembatan: a. Pembangunan Ruas Jalan Simp. Usiran - Kampung Kasai; b. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Kelay III (Sambaliung) – Mantaritip; c. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Segah III - Jalan Nasional Berau Bulungan; d. Pembangunan Ruas Jalan Bandara - Jembatan Kelay III;														Dishub, Dinas PUPR

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		e. Pembangunan Ruas Jalan lingk Jembatan Segah III - Simpang Stasiun Kecamatan Teluk Bayur; f. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Kasai - Kampung Teluk Semanting - Kampung Tanjung Batu; g. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Bukit Makmur - Kampung Harapan Jaya; h. Pembangunan Ruas Jalan Kampung Birang - Jalan Nasional Berau- Bulungan; i. Pembangunan Ruas jalan Kampung Samburakat - Kampung Sembakungan; j. Pembangunan Ruas Jalan Sei Sembarata - Sei Birang - Jalan Nasional Berau Bulungan; k. Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Sungai Berau I; l. Pembangunan Jalan Kelay Lingk Dalam; m. Pembangunan Ruas Jalan yang menghubungkan Kampung Teluk Sulaiman – Teluk Sumbang ; n. Peningkatan jalan poros desa; o. Peningkatan jalan lingkungan perkotaan dan pedesaan; p. Pembangunan jalan tembus untuk membuka daerah terisolir dan daerah yang mempunyai potensi perekonomian q. Pemeliharaan kondisi jalan di Kabupaten Berau.														

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
2	Pengembangan Terminal Penumpang	a. pengoptimalan fungsi terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Bayur; b. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Talisayan; c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi : - Terminal penumpang di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur; - Terminal penumpang di Kecamatan Biduk-Biduk; - Terminal penumpang di Kecamatan Kelay (Sido Bangun); - Terminal penumpang di Kecamatan Biatan (Biatan Lempake); - Terminal penumpang di Kecamatan Segah (Tepian Buah). d. Pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Teluk Bayur e. Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan meliputi : - Pembangunan Jembatan Timbang di Labanan Kecamatan Teluk Bayur dan Tembudan Kecamatan Batu Putih ; - Relokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ; - Halte meliputi seluruh IKK Kecamatan di Kabupaten Berau (tersebar).														

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana		
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional		Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020									
3	Pembangunan Dermaga	Pembangunan Dermaga: - Dermaga di Sambaliung - Dermaga wisata gayam - Dermaga meliputi: a. Kasai Kecamatan Pl. Derawan b. Teluk Semanting Kecamatan Pl. Derawan c. Batumbuk Kecamatan Pl. Derawan d. Kaniungan Besar Kecamatan Biduk-biduk e. Semurut Kecamatan Tabalar f. Biatan Lempake Kecamatan Biatan g. Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur															Dishub, Dinas PUPR
4	Pengembangan Jalur Keretaapi	Pembangunan rel kereta api: 1. jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb; 2. jalur Tanjung Redeb – Muara Wahau – Sangatta 3. Tanjung Redeb - Sekerat – Bontang.	jalur Malinau – Sesayap – Tanjung Redeb; jalur Tanjung Redeb – Muara Wahau – Sangatta; Tanjung Redeb - Sekerat – Bontang														Kementerian Perhubungan, Dishub, Dinas PUPR
5	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Pembangunan Stasiun Kereta Api di Tanjung Redeb (Kelas Besar)	Tanjung Redeb														Kementerian Perhubungan, Dishub, Dinas PUPR
6	Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul meliputi: - Pelabuhan Tanjung Redeb terdiri dari Terminal Tanjung Redeb dan Terminal Mantaritip	Tanjung Redeb - Mantaritip														
		Pengembangan Pelabuhan Pengumpan meliputi: 1. Pelabuhan Pengumpan Lokal: a. Pelabuhan Maratua; b. Pelabuhan Talisayan; c. Pelabuhan Biatan; dan															

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020								
		d. Pelabuhan Tembudan. 2. Pelabuhan Pengumpan Regional a. Pelabuhan Teluk Sulaiman; dan b. Pelabuhan Tanjung Batu														
		Pengembangan Pelabuhan /Terminal khusus meliputi: a. Kecamatan Gunung Tabur; b. Kecamatan Teluk Bayur c. Kecamatan Sambaliung; d. Kecamatan Segah; e. Kecamatan Pl. Derawan; f. Kecamatan Kelay; g. Kecamatan Biatan; h. Kecamatan Batu Putih; i. Kecamatan Talisayan; j. Kecamatan Biduk-biduk; k. Kecamatan Tabalar; dan l. Kecamatan Pulau Derawan														
7	Alur Pelayanan	a. Balikpapan Sangatta - Tanjung Redeb – Makassar (Sulawesi Selatan); b. Tarakan – Selor - Tanjung Redeb - Tanjung Batu.														
8	Peningkatan Transportasi udara	- Peningkatan Bandara Kalimarau - Pembangunan Bandara Maratua melalui beberapa tahap pembangunan, yaitu: 1. Pra Studi Kelayakan bandar udara di Maratua 2. Studi Kelayakan bandar udara di Maratua 3. Masterplan bandar udara di Maratua 4. Rencana Teknis Terperinci bandar udara di Maratua														Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020								
		5. Detail Engineering Desain (DED) bandar udara di Maratua 6. pembangunan bandar udara di Maratua. - Pembangunan dan Pengembangan bandara perintis di Kecamatan Batu Putih - Bandara khusus berupa bandara Mangkajang di Kecamatan Sambaliung														
Program Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya																
1	Sistem Prasarana Energi	Pengembangan Depo BBM berupa pengembangan Depo BBM di Kecamatan Gunung Tabur	Gunung Tabur													
		Pengembangan jaringan Pipa dan Gas Bumi meliputi: a. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap Kecamatan; dan b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) pada lokasi yang strategis.														
		pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi: 1. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati 5 x 7 MW dan 1 x 12 di Kecamatan Gunung Tabur; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sambaliung 7 MW di Kecamatan Sambaliung; 3. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Bayur 2 x 7 MW di Kecamatan Teluk Bayur; 4. pembangunan Pembangkit Listrik														

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik, meliputi: - Pulau Derawan Kec. Derawan 170 KWP (Eksisting) - Biduk-biduk: 350 KWp (Rencana) - Batu PUtih: 170 KWp (Rencana) - Talisayan: 350 KWp (Rencana) - Tabalar: 170 KWp (Rencana) - Maratua: 170 KWp (Rencana) - Kelay: 170 KWp (Rencana) - Segah: 170 KWp (Rencana) 5. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Kelay; 6. pembangunan energi alternatif meliputi: - pembangkit listrik tenaga angin/bayu; - pembangkit listrik tenaga mikro hidro; dan - pembangkit energi biogas. 7. pembangunan satu unit Gardu Induk (GI) baru meliputi: - Teluk Bayur; - Sambaliung. 8. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi: a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV interkoneksi Tanjung Redeb – Tanjung Selor; dan b. pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi: - SUTM 20 KV dari Teluk Bayur – PLTD														

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		Sambaliung - SUTM 20 KV dari Th. Batu – Batu-batu (Gunung Tabur)														
2	Sistem Prasarana Telekomunikasi	- Perluasan jaringan telekomunikasi - Optimalisasi dan pemeliharaan telekomunikasi - Pengembangan jaringan telekomunikasi bersama														Telkom
		- Pengembangan jaringan telekomunikasi internet														Telkom
		- Pengembangan BTS bersama antar operator														Swasta
3	Sistem Prasarana Sumberdaya Air	- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air bersumber dari sungai - Pengelolaan wilayah sungai secara berkelanjutan - Pengamanan daerah irigasi														Dinas Pengelolaan SDA
		Optimalisasi dan pengembangan sumber air minum 1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb; 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sambaliung Kecamatan Sambaliung; 3. Pembangunan baru Instalasi Pengolahan Air (IPA) Talisayan Kecamatan Talisayan 50 lt/dtk; 4. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Merancang Kecamatan Gunung Tabur 17 lt/dtk; 5. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Labanan Kecamatan Teluk Bayur 100 lt/dtk; 6. Instalasi Pengolahan Air (IPA)													Dinas Pengelolaan SDA	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
		Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan 10 lt/dtk; 7. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb 20 lt/dtk; 8. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelay Kecamatan Kelay 10 lt/dtk; 9. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biduk-biduk Kecamatan Bidukbiduk 20 lt/dtk; dan 10. Instalasi Pengolah Air (IPA) dengan sistem desalinasi air laut (SWRO) Kecamatan Maratua 2,5 lt.dtk; 11. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tepian Buah Kecamatan Segah 20 lt/dtk; 12. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tubaan Kecamatan Tabalar 10 lt/dtk; 13. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batu Putih Kecamatan Batu Putih 10 lt/dtk; 14. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kasai Kecamatan Pl. Derawan 10 lt/dtk; 15. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Biatan Lempake Kecamatan Biatan 10 lt/dtk; dan 16. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Suaran Kecamatan Sambaliung 10 lt/dtk;														
		Pengembangan sistem pengendali banjir														Dinas Pengelolaan SDA
4		Pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada setiap rumah														DLHK

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
	Sistem Prasarana Lainnya	Pengembangan sistem pengolahan limbah B3														DLHK
		· optimalisasi TPA di Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb; · Rencana pembangunan TPA yang representatif disekitar PKW Perkotaan Tanjung Redeb jika TPA Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb telah melebihi kapasitas; - pembangunan TPA di Tanjung Batu - pembangunan TPA di Talisayan - pembangunan TPA di Tepian Buah - Pembangunan TPS - pengembangan sistem komposting kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah - peningkatan sistem sanitary landfill dan sistem 3R	Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Talisayan Kecamatan Talisayan Tepian Buah Kecamatan Segah Pembangunan TPS: a) Kecamatan Tanjung Redeb ; b) Kecamatan Teluk Bayur; c) Kecamatan Gunung Tabur; d) Kecamatan Sambaliung e) Kecamatan Talisayan; f) Kecamatan Biatan ; g) Kecamatan Tabalar ; h) Kecamatan Segah ; i) Kecamatan Kelay ; j) Kecamatan Batu Putih ; k) Kecamatan Biduk-biduk ; l) Kecamatan Maratua; dan m) Kampung Pulau Derawan													DLHK
B. PERWUJUDAN POLA RUANG																
KAWASAN LINDUNG																
1	Program Perwujudan dan Pengelolaan Kawasan Lindung	Penetapan Hutan lindung Kabupaten melalui penegasan batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung berupa pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi	Batu Putih, Biatan, Biduk - biduk, Gunung Tabur, Kelay, Maratua, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, dan Talisayan													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan														Dinas KPH Provinsi / KPH

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
																Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Pelaksanaan Rehabilitasi hutan lindung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang pelimpahan penguasaan dan atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung pada masyarakat dan lembaga non pemerintah														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Sosialisasi perwujudan kawasan lindung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Pengawasan dan pengendalian pada kawasan lindung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN
		Penanaman tanaman tahunan pada kawasan hutan lindung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020									
		Program pengembangan perekonomian hutan lindung melalui jasa lingkungan														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN	
2	Program Perwujudan Kawasan Yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	- Penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; - Pelaksanaan dan Penataan kawasan resapan air pada kawasan konservasi dan resapan air; - Rehabilitasi lahan kritis; - Pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan disekitar kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Segah, Kelay, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Tabalar													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	
3	Program Perwujudan Kawasan Perlindungan setempat	Penetapan dan perlindungan sempadan sungai, Danau/Waduk/ Embung	Sempadan pantai: Kecamatan Pulau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk Sempadan Sungai: Tiap Kecamatan di Kabupaten Berau Sempadan Danau/ Waduk/Embung: Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan: Tiap kawasan perkotaan dan perdesaan (20 % umum dan 10% privat)													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		Penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai	Sempadan Sungai: Kecamatan Pulau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai dan sungai	Di tiap sempadan pantai dan sungai kabupaten													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Berau	Di tiap Kecamatan yang berada pada DAS Kabupaten													Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Penyusunan Revitalisasi Kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai)														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Identifikasi DAS dengan Kerusakan dan Pendangkalan Tinggi														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020									
																	BPN DLHK
		Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Masterplan DAS Kabupaten	Di tiap Kecamatan yang berada pada bagian DAS kabupaten														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Normalisasi Danau/Waduk/Embung	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Pengamanan pantai Selatan Kabupaten Berau untuk melindungi kawasan permukiman serta sarana	Kecamatan Pulau Derawan, Tanjung Redeb, Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Biduk-Biduk														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020									
		dan prasarana dari abrasi laut dan potensi tsunami															Baplitbang BPN DLHK
		Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Danau, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung														Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Pelaksanaan memberikan fungsi lindung															Dinas KPH Provinsi / KPH Dinas Pertanian Baplitbang BPN DLHK
		Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Di PKW, PKL dan PKLp, serta PPK														PU Baplitbang BPN
		Pengembangan RTH Perkotaan															PU Baplitbang BPN
		Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Sekitar Danau/Waduk	Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung														
4	Program Perwujudan Kawasan	Penetapan kawasan suaka alam dan cagar budaya	Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur,														Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
	Suaka Alam dan Cagar Budaya		kawasan perairan Pulau Semama, kawasan perairan Pulau Sangalaki, kawasan perairan Pulau Kakaban, kawasan perairan Pulau Maratua													Baplitbang BPN
		Penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal												Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN		
		Pengembangan kawasan suaka alam berbasis lingkungan												Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN		
		pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya berwawasan lingkungan pada kawasan tersebut												Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN		
5	Program perwujudan kawasan bencana alam	Masterplan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Banjir, Gerakan Tanah/ Longsor, dan gelombang pasang/ abrasi	(1) Kawasan rawan gerakan tanah meliputi: a. Kecamatan Segah; b. Kecamatan Kelay; c. Kecamatan Sambaliung; d. Kecamatan Tabalar; e. Kecamatan Biatan; dan f. Kecamatan Biduk-Biduk (2) Kawasan rawan banjir meliputi: a. Kecamatan Segah; b. Kecamatan Teluk Bayur; c. Kecamatan Pulau Derawan; d. Kecamatan Sambaliung; e. Kecamatan Biatan;												GTL Baplitbang BPN	
		Pemasangan tanda peringatan dini terhadap daerah rawan bencana Pada daerah rawan Kawasan Rawan Banjir, Gerakan Tanah/ Longsor, dan gelombang pasang/ abrasi													GTL Baplitbang BPN	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta	
			f. Kecamatan Talisayan; dan g. Kecamatan Tanjung Redeb (3) Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: a. Kecamatan Pulau Derawan; b. Kecamatan Maratua; c. Kecamatan Tabalar; d. Kecamatan Biatan; e. Kecamatan Talisayan; f. Kecamatan Batu Putih; dan g. Kecamatan Biduk-Biduk.													
6	Program Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	Identifikasi dan inventarisasi kajian kawasan lindung geologi (Karst)	Batu Putih, Biduk Biduk, Tabalar													GTL Baplitbang BPN
		Sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan														GTL Baplitbang BPN
7	Program Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya	- Identifikasi dan inventarisasi kawasan lindung lainnya - pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan - Penetapan kawasan lindung lainnya - Kegiatan pelestarian terhadap terumbu karang dan hutan mangrove	Batu Putih, Biduk Biduk, Pulau Derawan, Sambaliung, Tabalar, Talisayan													Baplitbang BPN KPH
KAWASAN BUDIDAYA																
1	Program Perwujudan	- Pemantapan tata batas dan status hutan dengan pemasangan papan	Hutan Produksi: Batu Putih, Biatan, Biduk													KPH Pertanian

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
	Kawasan hutan Produksi	informasi dan pemagaran - Identifikasi dan klasifikasi tingkat kerusakan kawasan hutan - Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan kritis berbasis partisipasi masyarakat - Penyusunan program pemanfaatan hutan secara partisipatif dengan tetap menekankan pada fungsi lindung - Pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan - Pembangunan sentra industri pengolahan	Biduk, Gunung Tabur, Kelay, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Teluk Bayur Hutan Produksi Terbatas: Biatan, Gunung Tabur, Kelay, Pulau Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar													Baplitbang BPN
2	Program perwujudan kawasan pertanian	Identifikasi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, Kecamatan Talisayan													Pertanian Baplitbang BPN
		Identifikasi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Di tiap Kecamatan yang dilalui oleh Daerah Irigasi													Pertanian Baplitbang BPN
		Penyusunan masterplan agropolitan														Pertanian Baplitbang BPN
		Pengembangan pertanian organik														Pertanian Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020									
		Pengembangan perkebunan besar swasta	Kelapa Sawit: Talisayan, Kelay, Pulau Derawan, Segah, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk, Biatan, Gunung Tabur Budidaya Gaharu: Kelay Budidaya Rotan: Biduk-biduk														Pertanian Baplitbang BPN
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian	Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, Kecamatan Talisayan														Pertanian Baplitbang BPN
		Studi kelayakan pengembangan sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan dan perkebunan	Di tiap Kecamatan														Pertanian Baplitbang BPN
		Pengembangan industri pertanian berbasis agro	Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Biatan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, Kecamatan Talisayan														Pertanian Baplitbang BPN
3	Program Perwujudan Kawasan Perikanan	- Fasilitasi pembangunan dan pengembangan prasarana budidaya perikanan air tawar dan tambak - Peningkatan dan pembangunan balai benih ikan - Revitalisasi lingkungan perumahan nelayan - Pembangunan perumahan dan prasarana permukiman nelayan															DKP Baplitbang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		- Peningkatan fungsi pelayanan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) - Peningkatan kapasitas dan kelembagaan koperasi nelayan - Sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna dan teknologi ramah lingkungan dalam usaha perikanan														
4	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan	Penataan kawasan pertambangan	Kecamatan Kelay, Segah, Gunung Tabur, Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung, Tabalar													ESDM Baplitbang BPN
		Pengelompokkan wilayah pertambangan berdasarkan nilai ekonomi, pemanfaatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan														ESDM Baplitbang BPN
		Penetapan wilayah pertambangan sesuai pengelompokan dengan tahap pengelolaannya (eksploitasi)														ESDM Baplitbang BPN
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang izin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan) melalui AMDAL kegiatan Eksploitasi														ESDM Baplitbang BPN
5	Program Perwujudan Kawasan Industri	- Pengembangan industri - Peningkatan prasarana penunjang perindustrian	(1) Peruntukan industri besar berupa Kawasan industri Mangkajang di Kecamatan Sambaliung (industri PULp/ bubur kertas) (2) Peruntukan industri menengah meliputi: a. kawasan peruntukan pabrik es meliputi: 1. Kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di													Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
			Kecamatan Sambaliung; dan 2. Kampung Biduk-biduk di Kecamatan Biduk-biduk b. kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb; (3) Peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: a. Kecamatan Pulau Derawan (Terasi, ebi, ikan kering, pengolahan makanan); b. Kecamatan Tabalar (Terasi, ikan kering, ebi); c. Kecamatan Biatan (Ikan kering, terasi, ebi); d. Kecamatan Batu Putih (Ikan kering, terasi, ebi); e. Kecamatan Tanjung Redeb Industri jasa (bengkel, mebeul, penjahit, percetakan, industri makanan); f. Kecamatan Sambaliung (Mebeul, batu bata, industri makanan, minyak nilam/ sirih); g. Kecamatan Gunung Tabur (Mebeul, bata merah, industri makanan)													

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber dana				Pelaksana
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Swasta		
				2016	2017	2018	2019	2020									
		Fasilitasi pelatihan dan bantuan modal untuk industri kecil/ rumah tangga	industri kecil dan kerajinan berada di seluruh Kecamatan Pada tiap jenis kegiatan industri														Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN
		Pengembangan kelembagaan pengelolaan dan jejaring industri															Perdagangan dan Industri Baplitbang BPN
6	Program Perwujudan Kawasan Pariwisata	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Berau															Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN
		Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata	Pengembangan wisata alam a. Pengembangan wisata bahari meliputi: 1. Kecamatan Pulau Derawan; 2. Kecamatan Maratua 3. Kecamatan Biduk-Biduk; 4. Kecamatan Batu Putih, dan 5. Kecamatan Talisayan. b. Pengembangan wisata sejarah, dan pendidikan meliputi: 1. Kecamatan Gunung Tabur; 2. Kecamatan Sambaliung; 3. Kecamatan Tanjung Redeb; dan 4. Kecamatan Teluk Bayur c. Pengembangan wisata alam / ekowisata meliputi: 1. Kecamatan Kelay; dan 2. Kecamatan Segah Pengembangan wisata budaya a. Wisata budaya Banua												Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN		
		Pengembangan promosi pariwisata														Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN	
		Pengembangan Pusat-Pusat oleh-oleh khas daerah														Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN	
		Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata														Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN	
		Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata														Pariwisata dan Kebudayaan Baplitbang BPN	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
			meliputi: 1. Kecamatan Gunung Tabur; dan 2. Kecamatan Sambaliung. b. Wisata budaya Dayak meliputi: 1. Kecamatan Kelay; dan 2. Kecamatan Segah. c. Wisata budaya Bajau meliputi: 1. Kecamatan Derawan; dan 2. Kecamatan Maratua. Pengembangan wisata buatan: a. Wisata Tangab, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur b. Wisata Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur c. Wisata kuliner dan belanja di Kecamatan Tanjung Redeb d. Wisata Religi di Tanjung Redeb, Gunung Tabur dan Sambaliung; dan e. Wisata rekreasi di Kecamatan tanjung Rdeb dan Sambaliung													
7	Program Perwujudan Kawasan Permukiman	- Identifikasi kawasan permukiman yang relatif aman dari ancaman bencana alam ataupun bencana geologi - Revitalisasi kawasan permukiman perkotaan - Revitalisasi kawasan permukiman kumuh														PU Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasional		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
		- Penyusunan program pembangunan prasarana dan sarana permukiman - Pengendalian pemanfaatan ruang permukiman														
8	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Lainnya	Penataan kawasan pertahanan dan keamanan	a. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Redeb; b. Arteleri Medan (ARMED) di Kecamatan Teluk Bayur c. Polisi Resort (POLRES) di Kecamatan Tanjung Redeb; d. Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Teluk Bayur; e. Pos Angkatan Laut (POSAL) meliputi: 1. Kecamatan Pulau Derawan; 2. Kecamatan Pulau Maratua; dan 3. Kecamatan Biduk-biduk. f. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di setiap Kecamatan; g. Polisi Sektor (POLSEK) di setiap Kecamatan h. Squadron Helokopter (SERBU) Penerbat TNI AD di Bandara Kalimantan Kecamatan Tanjung Redeb													Baplitbang Hankam
		Penataan kawasan Bumi Perkemahan	Bumi Perkemahan Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur													PU Baplitbang BPN
		Pengembangan prasarana perdagangan skala kabupaten dan regional	Di tiap Kecamatan													PU Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																
1	Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Kawasan Heart Of Borneo (HOB); 2. Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki 3. Kawasan Hutan Lindung Lesan; 4. Taman-taman/ objek wisata alam 5. Kawasan Karst													PU Baplitbang BPN
2	Penanganan Kawasan Strategis Ekonomi	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Kawasan KTM Labanan 2. Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara; 3. Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pilau Mataha 4. Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup													PU Baplitbang BPN
3	Pengembangan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	1. Pulau Kakaban 2. Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit 3. Pesisir dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha; 4. Pesisir dan Kepulauan Manimbora dan Balikukup													PU Baplitbang BPN
4	Pengembangan Kawasan Strategis HANKAM	Penyusunan Rencana Terperinci Ruang (RTR) KSK	Bandara udara HANKAM di Maratua													PU Baplitbang BPN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber dana				Pelaksana	
				2016-2020					2021-2025	2026-2030	2031-2036	Kabupaten	Provinsi	Nasiona		Swasta
				2016	2017	2018	2019	2020								
5	Pengembangan Kawasan Andalan Nasional (KAN)		Tanjung Redeb dan sekitarnya													PU Baplitbang BPN

4.2. KAJIAN ATAS DOKUMEN RPJPD KAB. BERAU 2006-2026

RPJPD Kabupaten Berau memasuki tahapan terakhir. Tema pembangunan jangka panjang Kabupaten Berau pada tahap ke IV (2022-2026) adalah “***Berau yang sejahtera dan berdaya saing dalam pembangunan yang berkelanjutan***”. Terlihat dari temanya, pada tahapan ini difokuskan pada perwujudan Berau sejahtera yang berarti visi pembangunan tercapai. Selain itu, titik penting dalam tema tersebut adalah pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan yang berarti hasil pembangunan daerah yang dicapai tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Berau. Adapun arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan pada tahap IV ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berorientasi kerakyatan dan berkelanjutan menggunakan pendekatan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri.
 - b. Pengembangan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan.
 - c. Pengembangan sektor pariwisata yang berorientasi Ekowisata.
 - d. Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi (Pulau Derawan-Pulau Maratua-Pulau Sangalaki).
 - e. Pengembangan iklim investasi.
 - f. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - g. Peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam berwirausaha.
 - h. Perluasan akses lapangan kerja.
 - i. Pengembangan kemitraan usaha pertanian dalam arti luas.
 - j. Pengembangan sumber daya alam yang terbarukan dan berkelanjutan.

2. Untuk mewujudkan kualitas SDM yang menguasai iptek berbasis imtak dan budaya menggunakan pendekatan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar masyarakat.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
 - c. Peningkatan kerukunan dan pelayanan kegiatan keagamaan seluruh umat beragama.
 - d. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, pemuda, dan perlindungan anak.
3. Untuk Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur daerah menggunakan pendekatan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.
 - b. Pengembangan energi listrik terbarukan.
 - c. Peningkatan kualitas dan sinergitas pemanfaatan ruang.
4. Dan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menggunakan pendekatan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengendalian, pengawasan dan supremasi hukum.
 - b. Peningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan internal.
 - c. Peningkatan pelayanan prima dan terpadu.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Berau disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
**Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan
Kabupaten Berau untuk Tahap ke IV (2022-2026)**

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi (Arah Kebijakan)	Sasaran pokok	Indikator Sasaran Pokok
1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berorientasi Kerakyatan Dan Berkelanjutan					
Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh dan mandiri	Meningkatkan struktur dan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan klaster industri	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri
			Peningkatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan non migas	Ekspor bersih perdagangan
			Pengembangan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	LPE sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan
			Pengembangan sektor pariwisata yang berorientasi Ekowisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Jumlah wisatawan
			Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi (Pulau Derawan-Pulau Maratua-Pulau Sangalaki)	Meningkatnya destinasi wisata Berau	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
			Pengembangan iklim investasi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Realisasi investasi dalam negeri (PMDN)
Meratanya distribusi ekonomi masyarakat	Menurunnya Indeks Gini	Indeks Gini	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Menurunnya Tingkat kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
			Peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam berwirausaha	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendapatan perkapita
			Perluasan akses lapangan kerja	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka
			Pengembangan entrepreneurship	Meningkatnya jumlah wirausaha	Jumlah wirausaha
Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan	Meningkatnya swasembada pangan	Rasio ketersediaan pangan
			Pengembangan kemitraan usaha pertanian dalam arti luas	meningkatkan pendapatan petani	Jumlah pendapatan rumah tangga petani
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran sungai	Pengembangan sumber daya alam yang terbarukan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan energi terbarukan	Persentase Bauran energi terbarukan
				Meningkatnya RTH dan luas tutupan lahan	Persentase RTH
					Tutupan Lahan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi (Arah Kebijakan)	Sasaran pokok	Indikator Sasaran Pokok
2. Mewujudkan Kualitas SDM yang Menguasai Iptek Berbasis Imtak dan Budaya					
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas hidup masyarakat	IPM	Peningkatan kualitas pendidikan dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang unggul	Angka Harapan Lama Sekolah
			Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
Terwujudnya masyarakat yang religius, bermoral, dan beretika	Meningkatnya kualitas iman dan takwa	Angka kriminalitas (kasus)	Peningkatan kerukunan dan pelayanan kegiatan keagamaan seluruh umat beragama	Meningkatnya fasilitas peribadatan	Jumlah sarana peribadatan yang aktif
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan dalam kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah dan berjiwa sportif			Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, pemuda, dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur daerah					
Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur secara merata	Meningkatnya pemerataan dan integrasi jaringan infrastruktur	Jumlah Kecamatan yang terakses	Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar yang berkualitas	Presentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih
					Presentase rumah tangga yang bersanitasi
					luas pemukiman lingkungan kumuh
		Peningkatan kualitas dan sinergitas pemanfaatan ruang	Meningkatnya keterpaduan tata ruang wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang	
	Meningkatnya pemenuhan tenaga listrik	Rasio elektrifikasi	Pengembangan energi listrik terbarukan	Meningkatnya pemerataan akses listrik	Presentase rumah tangga yang terakses listrik
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara konsisten dengan mengutamakan kepentingan publik					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengendalian, pengawasan dan supremasi hukum	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Predikat kinerja pemerintah daerah
			Peningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan internal	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK
			Peningkatan pelayanan prima dan terpadu	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masvarakat

Sumber: Perubahan RPJPD Berau 2006-2026.

4.3. KAJIAN ATAS DOKUMEN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah di Kabupaten Berau yang merupakan *anak* dari provinsi Kalimantan Timur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, masih diuraikan beberapa masalah dalam lingkup daerah di provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1. Masih Adanya Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan yang Belum Optimal.** Belum meratanya pembangunan di Kalimantan Timur menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah. Jauhnya jarak antara sebagian besar kabupaten ke Ibu Kota provinsi, luasnya wilayah, dan kurangnya pembangunan yang terintegrasi menyebabkan tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi wilayah-wilayah pengembangan usaha. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal.
- 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan.** Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan

provinsi lain di Pulau Kalimantan. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara). Harga batu bara di level internasional mengalami penurunan sehingga Strategi ke depan yang perlu dikembangkan adalah mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang diikuti dengan pengembangan kontribusi berbasis potensi lokal non-tambang yang lebih berkerakyatan secara berkelanjutan. Demikian pula dengan berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi di bidang perkebunan dan pertanian guna mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau. Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis dilakukan terintegrasi hulu – hilir dan dibungkus dalam strategi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

3. **Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup.** Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. IKLH yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Kepatuhan pada peraturan lingkungan hidup dan konsistensi pada pengendalian kerusakan lingkungan dan pencegahan peningkatannya harus dijalankan secara wajib oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan daerah. Keberlanjutan ekosistem menjamin keberlanjutan pembangunan.
4. **Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar.** Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. Permasalahan utama yang terjadi berkaitan dengan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar terbangun. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada beberapa sektor

seperti transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih dan ketenagalistrikan.

5. **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.** Masalah pokok terkait dengan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok; Pertama, belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan kedua, belum optimalnya kualitas demokratis daerah.
6. **Belum Optimalnya Daya Saing SDM.** Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kaltim sudah lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kaltim, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kaltim secara keseluruhan belum optimal. Belum optimalnya daya saing SDM Kaltim disebabkan oleh beberapa faktor dari berbagai aspek/urusan. Beberapa persoalan antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam proses pembangunan serta perlindungan sosial terutama untuk PMKS yang belum komprehensif. Sektor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Berdasarkan beberapa permasalahan pokok di atas, Provinsi Kalimantan Timur dengan tema RPJMD 2018-2023 yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” memiliki 5 misi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, antara lain:

- **Misi 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.** Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.
- **Misi 2: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.** Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi

ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

- **Misi 3: Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.** Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- **Misi 4: Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.** Upaya untuk mendukung ekonomi hijau, diperlukan komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan

ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya balancing terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”.

▪ **Misi 5: Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

Guna mencapai visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan prioritas pembangunan daerah 2019-2023 mendatang, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja.
2. Peningkatan nilai tambah daya saing produk komoditi unggulan daerah.
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi.
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar.

5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.
6. Peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah dan keualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan daerah dituangkan dalam arah tematik tahunan pembangunan provinsi yang membuat arah kebijakan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam menyusun strategi supaya tidak menyimpang dari prioritas pembangunan yang sudah di rencanakan.

Tabel 4.8
Arah Tematik Tahunan Pembangunan Prov. Kalimantan Timur

Tahun	Arahan Tematik Pembangunan
2019	Memperkuat daya saing investasi untuk mempercepat hilirisasi industri
2020	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi
2021	Menumbuhkembangkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan
2022	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas
2023	Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Timur

Arah kebijakan dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Berau antara lain:

Tabel 4.9
**Arah Kebijakan Dan Fokus Pembangunan RPJMD
Prov. Kalimantan Timur Untuk Kab. Berau**

Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan
Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis	Rehabilitasi Kawasan eks galian tambang dan Kawasan hutan lindung
Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan Kawasan produktif budidaya perikanan.
Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk, pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
Pengembangan industri pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata
Peningkatan pelayanan infrastruktur di Kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi dan jalan produksi.
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu.

4.4. PENELAAHAN ATAS DOKUMEN RPJMD DAERAH SEKITAR

Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan dua daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bulungan, 2021-2026, maka kebijakan terkait antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kab. Bulungan	Penyelesaian tapal batas wilayah	BA Kesepakatan No 16/BADII/TimVII/V/2021
2.	Kab. Kutai Timur	Tidak ada kebijakan bersama	

4.5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal. Semenjak diundangkannya keistimewaan Kabupaten Berau pada Undang-undang No.27 tahun 1959, permasalahan yang ada di daerah muncul dan juga hilang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya teknologi dan ekonomi dunia. Akan tetapi masih ada pekerjaan rumah yang banyak dalam memajukan Kabupaten Berau. Berikut ini Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Berau dalam pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai

saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perekonomian Daerah	1) Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif dan akan semakin rendah di tengah pelambanan ekonomi global 2) Perekonomian didominasi oleh sektor primer (Pertambangan dan Perkebunan) yang sangat tergantung pada permintaan ekspor 3) Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh secara signifikan pada upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan; 4) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal.	a. Sangat tergantung pada permintaan ekspor dunia atas batu bara dan kelapa sawit; b. Berkurangnya permintaan akan produk unggulan daerah di tengah krisis ekonomi global sebagai dampak pandemi Covid 19; a. Sektor pariwisata dan UMKM sebagai sektor unggulan lainnya di Kab. Berau belum signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. b. Nilai tambah (<i>value added</i>) dan produktivitas sektor di luar pertambangan dan perkebunan masih rendah; a. Kontribusi sektor pertambangan batubara dan perkebunan sawit tidak signifikan pengaruhnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal di Berau; b. Belum optimalnya upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, misalnya pertanian, UMKM; c. Kualifikasi SDM lokal belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di sektor pertambangan batubara dan perkebunan sawit. d. Sumber lapangan usaha masyarakat masih didominasi dari sektor pertanian dengan nilai tambah (<i>value added</i>) yang rendah; e. Hasil jual produk pertanian cenderung rendah dan rendahnya daya tawar (<i>bargaining position</i>) petani karena belum optimalnya peran kelompok tani; f. Terjadinya kelangkaan pupuk, kekeringan, banjir serta anjloknya harga gabah pada musim panen, yang pada akhirnya berdampak pada penghasilan petani. a. Pendapatan Daerah masih sangat tergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat; b. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		5) Masih rendahnya PDRB perkapita Kabupaten Berau dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2019 Kabupaten Berau masuk dalam peringkat 6 dari 10 daerah dan masih di bawah PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Timur 6) Angka ketergantungan Kabupaten Berau tergolong tinggi yaitu 48,06 di tahun 2019. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 48 orang usia non produktif.	a. Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tergolong tinggi setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,71% pertahun; b. Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>); c. Banyaknya pendatang dari luar Kabupaten Berau.
2	Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang cenderung meningkat. Untuk P1 meningkat dari 0,57 di tahun 2018 menjadi 0,66 di tahun 2019 dan P2 dari meningkat 0,11 di tahun 2018 menjadi 0,12 di tahun 2019. Angka kemiskinan akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah.	a. Pelambatan ekonomi daerah global, nasional dan daerah; b. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di perkotaan; c. Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia; d. Kantong kemiskinan terkonsentrasi di kampung-kampung, di mana pada tahun 2019 di Kab Berau terdapat 20 kampung tertinggal, 55 kampung berkembang, 23 kampung maju, dan 1 kampung mandiri; e. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi; f. Sebagian besar bahan penyumbang kemiskinan masih didatangkan dari luar Kab. Berau sehingga harga cenderung mahal; g. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri; h. Pola konsumsi masyarakat yang tidak sehat, di mana penyumbang kemiskinan kedua terbesar adalah rokok.
3	Angka Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah.	a. Pertumbuhan ekonomi Berau sangat tergantung pada sub sektor Pertambangan batu bara dan perkebunan sawit besar yang cenderung padat modal; b. Pelambatan ekonomi daerah global, nasional dan daerah; c. Banyaknya pendatang ke Kab. Berau; d. Rendahnya investasi dan penanaman modal daerah; e. Tenaga kerja yang kurang terampil;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	1) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka usia harapan hidup Kab. Berau (71,94) masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kaltim (74,22) 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,31 dan 9,25, masih di bawah Provinsi Kaltim dengan nilai 13,69 dan 9,70 di tahun 2019 3) Masih rendahnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran perkapita (Rp. 12.726.000/tahun di tahun 2019) dan akan semakin rendah karena pengaruh pelambanan ekonomi	f. Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM; g. Keterbatasan modal usaha. a. Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat; b. Tingginya angka kesakitan 2019 sehingga menempati peringkat ke-3 Kalimantan Timur c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga medis; d. Masih tingginya angka penyakit DBD, yaitu sebanyak 495 kasus di tahun 2019 e. Masih tingginya angka kematian bayi. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 75 kasus. f. Belum optimalnya tenaga medis di bidang kesehatan terutama yang ada di wilayah perbatasan; g. Jauhnya akses transportasi antar kecamatan sehingga menjadi kendala dalam pendistribusian alat kesehatan. a. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; b. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang pendidikan informal, formal dan non formal serta pendidikan dasar baik jenjang SD/MI dan SMP/MTs, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada; c. Akses sarana pendidikan yang masih sulit terjangkau oleh masyarakat pedalaman; d. Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum optimal; e. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil. a. Tingginya harga kebutuhan dasar rumah tangga yang sebagian besar masih didatangkan dari luar Kabupaten Berau; b. Sumber-sumber penghasilan utama masyarakat memiliki nilai tambah yang rendah;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			c. Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berdampak langsung dengan pendapatan masyarakat; d. Berkurangnya pendapatan masyarakat karena pelambatan ekonomi yang menyebabkan daya beli menurun
5	Infrastruktur	1) Masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Ada sekitar 12,58% pengguna listrik non PLN dan 0,21% yang belum menggunakan listrik di tahun 2019	a. Sebagian besar pemukiman di Kabupaten Berau cenderung tersebar dan topografi sangat luas b. Potensi sumber energi air jauh dari pemukiman, sehingga salah satu sumber energi alternatif yang dipakai adalah tenaga surya dengan biaya investasi relatif tinggi
		2) Cakupan layanan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Berau	a. Kondisi geografis Kab berau menyebabkan beberapa daerah belum menikmati layanan telekomunikasi b. Pembangunan tower oleh provider memperhitungkan jumlah penduduk dan profit
		3) Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan	a. Pembukaan jalan terhambat oleh lahan perkebunan masyarakat, kawasan pertambangan, kawasan hutan
			b. Jarak antar kampung berjauhan
			c. Lokasi perkampung tidak menetap dan penduduknya sedikit
			d. Struktur tanah yang relatif labil
			e. Kondisi medan yang berbukit
		4) Kondisi jalan yang kurang memadai. Sepanjang 638,58 km jalan dalam kondisi rusak dan 193,48 km rusak berat.	a. Curah hujan yang tinggi
			b. Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
			c. Struktur tanah yang relatif labil
		5) Terbatasnya fasilitas air minum/air bersih	a. Distribusi air belum mencapai kawasan pulau; b. Belum tersedianya jaringan listrik untuk operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA). c. Terbatasnya pendataan sumber-sumber air bersih;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			d. IPA yang telah dibangun tidak memiliki manajemen untuk mengoperasikannya.
6	Tata Kelola Pemerintahan	1) Masih tingginya ketergantungan fiskal pada dana perimbangan (69,96%) dan akan semakin terbatas sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan pelambanan ekonomi;	a. Sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah belum dikelola secara optimal; b. Belum optimalnya perkembangan sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran); c. Kurangnya inovasi daerah.
		2) Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah;	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah; b. Forum Perangkat dan Forum Lintas Perangkat Daerah belum berjalan efektif. c. Data daerah yang belum akurat dan sinkron.
		3) Belum optimalnya peran Pemerintahan Kampung/Desa	a. Kualitas SDM yang masih rendah; b. Belum optimalnya peran BUMK (Badan Usaha Milik Kampung); c. Masih minimnya kegiatan ekonomi dan produksi di daerah pedesaan terutama daerah terdalam dan terpencil d. Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan
7	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup	a. Terus menurunnya kondisi hutan Berau; b. Habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin rusak c. Residu aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan d. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) e. Pencemaran air semakin meningkat f. Kualitas udara di wilayah perkotaan semakin menurun g. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan urusan hutan lingkungan hidup h. Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup i. Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengubah pola tata kelola yang ada saat ini. Penyusunan peraturan teknis harus melibatkan pemangku kepentingan tata kelola lingkungan dan kehutanan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, dan perubahan iklim diprediksi masih akan terus berlangsung	Pandemi Covid-19 yang membawa dampak pada tingginya angka PHK berpotensi mendorong terjadinya pembukaan lahan pada areal-areal hutan sebagai media bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup
		Perubahan tatanan perilaku selama masa pandemi Covid-19 telah membawa dampak langsung pada pengelolaan sampah.	Saat ini, kita semua membutuhkan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19. Namun perlu ada upaya mitigasi terhadap risiko penularan kembali virus Covid-19 dari sampah masker yang telah digunakan
		Tekanan terhadap kapasitas fiskal yang terjadi pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi ketersediaan anggaran pemerintah untuk pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan dan penyediaan fasilitas sampah serta limbah, pencegahan banjir, perawatan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan lainnya	Restrukturisasi anggaran yang difokuskan pada penanganan pandemic Covid-19.

Selain permasalahan pokok diatas, masih terdapat permasalahan yang membutuhkan upaya tambahan dalam penanganannya sesuai dengan arahan dokumen KLHS RPJMD Kab. Berau, antara lain:

- Hasil capaian proyeksi BAU indikator korban bencana sampai dengan tahun 2030 di Kabupaten Berau cenderung terus mengalami peningkatan, bahkan mencapai angka 3.500. Angka proyeksi tersebut sangatlah tinggi dan amat berbahaya. Maka diperlukan upaya tambahan guna menurunkan angka capaiannya dan bahkan menekan korban bencana sekecil mungkin.
- Hasil capaian TPB terkait indikator prevalensi obesitas, Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2030 yang di perkirakan mencapai angka 2000 kasus. Oleh karena itu perlu upaya tambahan bagi instansi terkait, guna menekan angka proyeksi ini.
- Hasil proyeksi capaian TPB menunjukkan bahwa total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB di Kabupaten Berau terus mengalami penurunan, bahkan sampai dengan tahun 2030 yang merupakan tahun akhir dari capaian TPB.
- Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman memiliki kecenderungan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2030.
- Hasil capaian proyeksi BAU, korban bencana sampai dengan tahun 2030 di Kabupaten Berau cenderung terus mengalami peningkatan, bahkan mencapai angka 3500. Begitupun dengan kerugian secara ekonomi yang diakibatkan bencana yang diperkirakan mencapai Rp55.862.624.606 pada tahun 2030.

2. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pendidikan.

- a) Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil;
- b) Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan masih belum maksimal;
- c) Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa masih belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang masih belum melek aksara;
- d) Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum optimal;
- e) Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya sehingga tujuan dari mdgs pun belum bisa tercapai;
- f) Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal masih dibawah capaian rata-rata nasional dan Provinsi;
- g) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan;
- h) Belum optimalnya dampak dari manajemen berbasis sekolah;
- i) Akses sarana pendidikan yang masih sulit terjangkau oleh masyarakat pedalaman;
- j) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
- k) Peningkatan pendidikan non formal masih kurang;
- l) Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang Pendidikan Informal, Formal dan Non Formal serta Pendidikan Dasar baik jenjang SD/MI dan SMP/mts, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- m) PAUD yang berkualitas masih terbatas;

- n) Pengembangan proses belajar mengajar belum sepenuhnya berbasis IT.

2) Urusan Kesehatan.

- a) Masih tingginya angka kematian bayi (sebanyak 75 kasus pada tahun 2019);
- b) Masih tingginya presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) tahun 2019 yaitu sebesar 5,3% dan jauh dari target yaitu sebesar 3,6%;
- c) Masih ada sekitar 3,53% balita kekurangan gizi pada tahun 2019;
- d) Masih perlunya pembangunan Rumah Sakit Tipe B serta sarana dan prasarananya;
- e) Masih tingginya angka penyakit DBD, yaitu sebanyak 495 kasus di tahun 2019;
- f) Belum optimalnya tenaga medis di bidang kesehatan terutama yang ada di wilayah perbatasan;
- g) Belum meratanya pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat;
- h) Masih rendahnya cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 69,4%;
- i) Cakupan Desa siaga Aktif (Purnama dan Mandiri) masih rendah, hanya 16,16% dari target 60% di tahun 2019;
- j) Belum semua bidan desa tinggal di desa dan belum semua dukun bermitra dengan bidan kampung;
- k) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga medis;
- l) Kurangnya komitmen petugas puskesmas terhadap pentingnya posyandu dan masih adanya posyandu yang tidak aktif;
- m) Jauhnya akses transportasi antar Kecamatan sehingga minimnya distribusi alat kesehatan yang memadai.

3) Rumah Sakit Umum Daerah

- a) *Respons time* pelayanan rumah sakit yang kurang baik;
- b) Pencairan klaim BPJS masih belum tepat waktu yang mengakibatkan terganggunya keuangan rumah sakit dan berdampak pula terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- c) Sistem Informasi Rumah Sakit yang belum sempurna;
- d) Kurangnya sarana dan prasarana di rumah sakit menyebabkan terganggunya pelayanan;
- e) Masih ada prosedur pelayanan yang dirasa rumit oleh pasien;
- f) Kurang nyamannya ruang tunggu pelayanan di rumah sakit yang menimbulkan berbagai macam komplain dari pasien;
- g) Jumlah tenaga medis dan non medis masih kurang.

4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan;
- b) Lemahnya perencanaan jaringan irigasi, air baku serta pentaagunaan sungai, rawa dan pantai;
- c) Akibat struktur tanah di sebagian besar Pulau Kalimantan adalah rawa, mengakibatkan badan jalan yang terbangun cepat mengalami kerusakan;
- d) Sebagian jalan poros kampung masih berstatus KBK;
- e) Permasalahan sosial dalam upaya pembebasan lahan untuk memenuhi infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur sumber daya air lainnya (irigasi dan lain-lain);
- f) Belum optimalnya pengawasan dalam pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW.

5) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Kurangnya penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan dan perkotaan;
- b) Masih terdapat penduduk yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR);
- c) Permukiman kumuh yang semakin meluas, luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas;
- d) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), seperti ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi dan prsarana persampahan;
- e) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.

6) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a) Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan perda, baik internal dalam wilayah kota Kabupaten maupun lintas wilayah;
- b) Merebaknya aksi amuk masa dan ancaman provokasi;
- c) Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan;
- d) Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal;
- e) Masih Banyaknya aparaturnya yang belum memahami dan bersertifikasi dalam penanganan bencana di setiap Kecamatan dan pendanaan yang terbatas;
- f) Keterbatasan personil, peralatan dan daya dukung dari instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana;
- g) Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak;
- h) Situasi dan kondisi sosial-politik yang rentan memicu konflik horisontal dan konflik antar kelas;
- i) Kurangnya dukungan lembaga sosial-politik dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman.

7) Urusan Sosial

- a) Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal;
- b) Belum efektifnya penyaluran bansos sesuai database masyarakat miskin yang terupdate;
- c) Presentase angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 5,04%, dibawah target RPJM sebesar 4,89%.

8) Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a) Kurangnya balai pelatihan untuk melatih para pencari kerja guna meningkatkan SDM;
- b) Masih terbatasnya lapangan kerja;
- c) Permintaan tenaga kerja berkualifikasi khusus pada setiap perekrutan pegawai (pabrik, perusahaan, dsb) belum bisa terpenuhi dikarenakan terbatasnya SDM yang berkualifikasi;
- d) Tenaga kerja/angkatan kerja sebagian besar berpendidikan rendah yaitu tidak sekolah sampai dengan tamat sekolah dasar;
- e) Tenaga kerja pendatang menjadi pesaing tenaga kerja lokal dalam merebut kesempatan kerja atau peluang berusaha di Kabupaten Berau;
- f) Perdagangan bebas atau pasar bebas membawa implikasi terhadap semakin ketatnya persaingan usaha antar pelaku ekonomi;
- g) Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (*Clean and Clear*) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan);
- h) Perlu adanya penataan tapal batas antara desa ex UPT dengan desa lama maupun tapal batas bersama desa ex UPT;
- i) Masih adanya klaim masyarakat terhadap tanah Negara pencadangan tanah transmigrasi sebagai tanah adat sehingga menghambat implementasi Program Penempatan Transmigrasi Baru;

- j) Masyarakat desa yang berurbanisasi ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tanpa dilengkapi keahlian/skil yang sesuai kebutuhan.
- 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a) Kekerasan terhadap perempuan dan Anak terutama kekerasan seksual meningkat;
 - b) Pengetahuan dan keterampilan pengasuhan Anak sesuai Standar Ilmu Pengasuhan (Psikologi) oleh orang tua belum merata;
 - c) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab Berau.
 - d) Masih adanya perkawinan usia anak;
 - e) Belum optimalnya Pemberdayaan Pada Lansia (Potensia) perempuan.
- 10) Urusan Pangan**
- a) Produksi beras lokal dan kedelai terus menurun dan jauh dari target;
 - b) Kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah terhadap penciptaan/pengembangan produk pertanian dan manajemen pasca panen;
 - c) Jumlah lumbung pangan masyarakat yang di bangun masih belum sesuai target;
 - d) Pengembangan Desa Mandiri Pangan belum terlaksana secara optimal;
 - e) Belum optimalnya ketersediaan keanekaragaman pangan lokal alternatif.
- 11) Urusan Pertanahan**
- a) Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan terutama di daerah terpencil;
 - b) Rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c) Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa tanah.

12) Urusan Lingkungan Hidup

- a) Rendahnya dukungan nyata pemerintah dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan (khususnya penurunan kondisi hutan di Kabupaten Berau);
- c) Potensi lahan kritis di Kabupaten Berau cukup besar dan setiap tahun arealnya semakin luas karena tidak dilakukan reklamasi secara sempurna;
- d) Belum optimalnya penanganan pencemaran air sungai;
- e) Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak;
- f) Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun".

13) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Peralatan komputer pendukung SIAK sudah tidak memadai (pengadaan tahun 2012);
- b) Belum maksimalnya pelaksanaan pencatatan administrasi kependudukan daerah;
- c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranana dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Keberadaan kantor pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kurang sesuai untuk pelayanan publik.

14) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih rendahnya kualitas aparatur desa;
- b) Minimnya kegiatan ekonomi dan produksi di daerah pedesaan terutama daerah terdalam dan terpencil;
- c) Belum optimalnya pembentukan/revitalisasi BUMK;
- d) Rendahnya budaya gotong royong masyarakat pada masyarakat Kampung dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

15) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tingginya;
- b) Belum optimalnya sosialisasi perencanaan keluarga sehat dan sejahtera.

16) Urusan Perhubungan

- a) Belum terwujudnya pelayanan transportasi yang handal yang merupakan tujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah;
- b) Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi;
- c) Belum meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar transportasi secara merata dan berkualitas.

17) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Belum meratanya akses komunikasi masyarakat;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

18) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Rendahnya kuantitas maupun kualitas usaha mikro masyarakat;
- b) Belum optimalnya upaya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dalam mendukung ekowisata dan agribisnis.

19) Urusan Penanaman Modal

- a) Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus perijinan;
- b) Belum kondusifnya iklim investasi daerah;
- c) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif;
- d) Dukungan anggaran terhadap DPMPSTSP setiap tahunnya masih sangat kecil;

- e) Penambahan fasilitas PC, laptop, scanes, printer, server UPS, mesin fotocopy dan meubelair kantor sangat kurang;
- f) Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor belum tertarik berinvestasi di Kabupaten Berau.

20) Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

- a) Tidak adanya/masih minimnya venue untuk cabor-cabor sehingga sulit sekali untuk mengadakan latihan;
- b) Masih maraknya penyalahgunaan obat-obat terlarang dan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan sosial generasi muda yang merupakan maslah komplek dan dapat mengancam masa depan generasi muda;
- c) Belum optimalnya dukungan pemerintahan daerah terhadap pengembangan organisasi kepemudaan dan olahraga daerah;
- d) Kurang optimalnya pembinaan atlet usia dini yang merupakan usia emas serta perlu peningkatan kualitas sumber cabang olahraga serta antusiasme guru olahraga/pelatih sekolah tingkat SD, SMP dan SLTA;
- e) Kurang minatnya masyarakat pada olahraga tradisional, rekreasi dan bahari.

21) Urusan Statistik

- a) Minimnya data yang *up to date* sebagai bahan monitoring evaluasi pembangunan daerah.

22) Urusan Kebudayaan

- a) Pembinaan dan pengembangan kesenian dan budaya yang berkesinambungan di Kabupaten Berau belum optimal;

- b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya di Kabupaten Berau (panggung pentas, event, lomba dan lain-lain);
- c) Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan.

23) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- a) Minimnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan daerah;
- b) Dokumentasi dan dokumen penting belum terarsipkan dengan optimal.

24) Urusan Pariwisata

- a) Rendahnya kualitas infrastruktur perhubungan menuju tempat wisata;
- b) Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemasaran pariwisata daerah;
- c) Belum adanya komitmen bersama antar Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun sarana dan prasarana untuk destinasi wisata yang ada serta kemudahan transportasi dan aturan kejelasan untuk tarif;
- d) Keterbatasan kemampuan berbahasa Indonesia ataupun bahasa asing masih rendah dikalangan masyarakat sehingga mempersulit komunikasi dalam mempromosikan destinasi lain di wilayahnya;
- e) Tidak adanya kejelasan tentang pungutan yang dilakukan oleh kampung (pengelola destinasi wisata);
- f) Belum adanya SOP tentang pengunjung untuk menjaga dan melestarikan alam serta pengoptimalan untuk limbah sampah dari hasil kunjungan;

- g) Belum adanya zonasi-zonasi destinasi wisata yang baru yang terintegrasi dan masterplan dan kajian lingkungan untuk destinasi wisata baru;
- h) Belum bersinerginya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Belum optimalnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah;
- b) Belum efektifnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Berau;
- c) Masih maraknya penangkapan ikan dengan cara *destruktive fishing* (bom, potas dan lain-lain) sehingga mengancam kelestarian ikan tersebut.

26) Urusan Pertanian

- a) Hasil jual produk tanaman pangan belum sepenuhnya dinikmati petani;
- b) Terjadinya kelangkaan pupuk, kekeringan, banjir serta anjloknya harga gabah pada musim panen, yang pada akhirnya berdampak pada penghasilan petani;
- c) Belum efektifnya pemanfaatan potensi pertanian dan pengembangan agribisnis di Kabupaten Berau;
- d) Potensi lahan kritis di Kabupaten Berau cukup besar dan setiap tahun arealnya semakin luas karena tidak dilakukan reklamasi secara sempurna, terutama di bekas tambang batubara;
- e) Produktivitas rata-rata ternak masih rendah;
- f) Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke peruntukan non pertanian tanaman pangan tidak diikuti dengan pembukaan lahan baru yang berimbang;
- g) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi dan bendungan yang ada;

- h) Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian;
- i) Penjualan daging beku impor di pasar tradisional semakin banyak, sehingga permintaan daging segar berkurang;
- j) Penurunan produksi padi sawah pada tahun 2019 sebesar 28,94% yang diakibatkan kemarau, penurunan tingkat kesuburan tanah, alih fungsi lahan.

27) Urusan Perkebunan

- a) Masalah legalitas lahan dan status kawasan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan perluasan kebun komoditi unggulan;
- b) Tingkat kesuburan lahan pada kawasan perkebunan di kabupaten berau relatif rendah, sehingga menghambat proses produksi dari sektor perkebunan;
- c) Rendahnya minat petani untuk mengelola komoditi karet akibat rendahnya harga jual *lumb* di pasaran 4-5 tahun belakangan ini;
- d) Perkebunan sawit monokultur masih menjadi primadona di masyarakat. Akan tetapi, harga sawit di pasaran dunia menunjukkan tren penurunan. dan komoditas tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas perkebunan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan karena menyebabkan berkurangnya penangkapan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga meracuni lingkungan di areal perkebunan;
- e) Produktifitas komoditas perkebunan masih belum mencapai optimal;
- f) Rantai pasok untuk komoditas perkebunan masih kurang efisien dan panjang;
- g) Adanya konflik di lahan perkebunan atau gangguan usaha perkebunan;

- h) Kemitraan petani/pekebun dengan perusahaan belum terjalin dengan baik. Saat ini hanya terjadi kemitraan dalam hal jual beli TBS (tandan buah segar sawit);
- i) Belum optimalnya pemanfaatan limbah industri perkebunan;
- j) Pendataan lahan pekebun swadaya/ mandiri belum optimal.

28) Urusan Kehutanan

- a) Terus menurunnya kondisi hutan di Kabupaten Berau.

29) Urusan Perdagangan dan Perindustrian

- a) Belum optimalnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok;
- b) Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha;
- c) Tidak terpenuhinya target persiapan gedung UPTD meterologi mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan kemeterologian;
- d) Rendahnya kuantitas maupun kualitas usaha industri mikro masyarakat;
- e) Hilirisasi produk yang belum optimal.

30) Urusan Penunjang Daerah

- a) Belum optimalnya kapasitas kinerja pelayanan lembaga Pemerintah;
- b) Belum optimalnya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar pimpinan daerah;
- c) Belum optimalnya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d) Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah;

- e) Kurangnya peminat dari anggota Korpri Kabupaten Berau untuk mengambil perumahan Korpri yang dibangun oleh PT. Kaltim Mandiri Development dikarenakan lokasi yang sangat jauh;
- f) Permasalahan pembebasan lahan perumahan KORPRI jalan Dr; Murjani 3 yang masih belum ada ketentuan dari tim penilai harga tanah;
- g) Peningkatan status tanah milik KORPRI yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Kelurahan Sungai Bedungun menjadi sertifikat.

31) Urusan Pendukung Daerah

- a) Dokumen RPJMD, Renstra, RKT dan DPA belum sepenuhnya selaras sehingga pada saat penyusunan perencanaan strategis sampai penyusunan laporan-laporan, terdapat data yang tidak akurat dan tidak sinkron dalam penyamparan laporan;
- b) Koordinasi antar instansi masih perlu dibenahi/ditingkatkan;
- c) Masih lambatnya laporan yang disampaikan oleh bidang-bidang yang mengelola kegiatan, sehingga berpengaruh terhadap pembuatan laporan berkala yang akan dievaluasi;
- d) Rendahnya koordinasi dan prosedur perencanaan dan penganggaran;
- e) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya berkaitan dengan aset daerah;
- f) Rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g) Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas serta penuntasan pendataan dan administrasi aset pemda;

- h) Minimnya penganggaran IT dalam pengelolaan aset daerah;
- i) Belum optimalnya pemetaan dan perumusan kebijakan tentang pemanfaatan aset potensial daerah;
- j) Terbatasnya SDM teknis bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- k) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
- l) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
- m) Masih kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah, baik di Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, terkait pendapatan daerah;
- n) Kurang pedulinya pegawai dengan data mereka sendiri tentang peningkatan pendidikan, penambahan anggota keluarga, atau pindah domisili;
- o) Masih banyaknya PNS yang belum memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian terutama yang menyangkut disiplin PNS dan kode etik PNS;
- p) Masih banyaknya pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah yang kurang memahami dalam memproses SIM Presensi Kehadiran Pegawai guna pembayaran TPP disiplin;
- q) PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), sering terlambat mengusulkan berkas pensiun;
- r) Masih belum maksimalnya hasil kajian/penelitian yang belum diimplementasikan oleh Perangkat Daerah;
- s) Masih kurangnya implementasi inovasi Perangkat Daerah;
- t) Masih kurangnya kuantitas penelitian sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

32) Urusan Pengawasan

- a) Belum seluruhnya pengelola keuangan pada unit organisasi memenuhi kompetensinya;
- b) Lemahnya pengendalian internal pada organisasi Pemerintah Daerah;
- c) Masih kurangnya SDM berbasis IT, tehnik sipil dan Akuntansi;
- d) Kurangnya respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja;
- e) Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki saat ini relatif masih terbatas;
- f) Belum seimbang rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan obyek pemeriksaan.

33) Urusan Kewilayahan

- a) Terbatasnya sarana prasarana di wilayah perbatasan Negara (Kecamatan Maratua);
- b) Keterlambatan kepastian pengaturan bantuan yang sesuai dengan program Pemerintah dari Dinsos Kabupaten maupun Provinsi;
- c) Minimnya Tenaga Lapangan di Kampung; Tidak adanya petugas Pos Kessos yang dapat mengetahui secara cepat masyarakat yang butuh pelayanan cepat di bidang Bansos;
- d) Dikarenakan kondisi geografis Kecamatan yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus surat-surat penting ke Kabupaten;
- e) Masih terdapat urusan tapal batas kampung belum tuntas;
- f) Terbatasnya jumlah aparat mengenai pegawai Kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus

dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;

- g) Sarana dan prasarana pelayanan umum masyarakat masih kurang atau belum berfungsi secara optimal;
- h) Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Camat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terutama yang harus selesai di Kecamatan mengingat kondisi geografis yang cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten Berau;
- i) Tidak adanya bimbingan teknis dari Perangkat Daerah kabupaten yang melibatkan Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan tupoksi Perangkat Daerah Kabupaten;
- j) Belum adanya pelimpahan kewenangan dalam menentukan data untuk masyarakat kategori tidak mampu;
- k) Belum adanya dasar hukum berupa Perbup terkait hak keuangan Camat selaku kepala wilayah Kecamatan dalam menerima fasilitas dan operasional jabatan seperti rumah dinas, listrik, air PDAM, dan peralatan rumah tangga;
- l) Terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Kabupaten;
- m) Masih kurangnya SDM yang mumpuni terutama dalam hal perencanaan dan keuangan serta IT;
- n) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

34) Urusan Pemerintahan Umum

- a) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik dan dalam pelaksanaan pembinaan politik;

- b) Masih maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat dan aparat sipil;
- c) Masih rendahnya tingkat pemenuhan dan pemahaman ekonomi, sosial dan budaya serta peran fungsi organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d) Masih belum optimal kondisi ketenteraman dan ketertiban di masyarakat;
- e) Masih rendahnya pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat.

4.6. ISU STRATEGIS

4.6.1 Isu Strategis Level Global

1. *Sustainable Development Goals (SDG's)* Sebagai Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*)

SDG's merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG's (*Millenium Development Goals*), SDG's memiliki 5 (lima) pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global berikut ini:

- 1) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- 2) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;

- 4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- 7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
- 8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- 9) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
- 11) Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- 13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan

memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

- 16) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Resesi Ekonomi Global Pasca Pandemi COVID-19

Resesi ekonomi adalah suatu kondisi dimana suatu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif selama 2 (dua) kwartal berturut-turun. Hingga saat ini, sejumlah negara dari benua Eropa, Amerika, hingga ASEAN terjebak dalam resesi.

Resesi ekonomi mengakibatkan penurunan secara terus-menerus pada setiap aktivitas di sektor ekonomi, misalnya perdagangan (ekspor dan impor), kesempatan kerja, investasi, dan yang pasti juga keuntungan perusahaan. Dalam sejarah perekonomian modern, salah satu resesi ekonomi terbesar yang pernah terjadi adalah pada periode 1930-1940. Di mana saat itu ekonomi Amerika Serikat nyaris hancur total.

Resesi bagi Pemerintah Daerah, sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang negatif akan meningkatkan angka pengangguran, angka kemiskinan dan berkurangnya pendapatan daerah. Sementara bagi masyarakat, resesi akan membawa sejumlah konsekuensi, berupa:

- 1) Adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Dampak yang langsung terasa dari adanya resesi ekonomi di suatu negara adalah adanya PHK. PHK terjadi karena permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan

berkurang atau bahkan berhenti sama sekali. Akibatnya perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi pegawai atau bahkan perusahaan terpaksa berhenti beroperasi atau bangkrut.

2) Menurunnya daya beli masyarakat.

Sebagai dampak dari adanya PHK dan juga karena berkurangnya pendapatan masyarakat atau karena masyarakat sengaja menahan pengeluarannya, maka daya beli masyarakat akan menurun. Akibatnya produk yang dihasilkan oleh UMKM misalnya, tidak laku di pasaran. Aktivitas ekonomi berkurang seperti domino, karena kemampuan masyarakat untuk membeli berkurang. Demikian terjadi seperti siklus jika tidak ada campur tangan dari pemerintah misalnya melalui penyaluran bantuan langsung tunai, subsidi dan sebagainya yang bertujuan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

3) Investasi terancam

Investasi yang sudah dilakukan oleh pemilik modal harus dilakukan penyesuaian. Hancurnya harga saham pada beberapa perusahaan go public akan menyebabkan investasi di perusahaan dimaksud menjadi tidak menarik lagi. Akibatnya masyarakat akan menjual sahamnya dan menggantinya dengan jenis investasi yang relatif stabil dan aman seperti misalnya di investasi emas atau obligasi pemerintah.

3. Konflik di Kawasan Laut Natuna Utara

Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Natuna Utara, dulu disebut Laut Tiongkok Selatan (LTS). Selain kawasan LTS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah

kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan Samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerjasama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar.

4. Tantangan Terhadap Perkembangan Revolusi Industri 4.0

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir telah terbantu oleh kehadiran revolusi, baik dari segi kualitas maupun efisiensi waktu. Maka sudah sepatutnya untuk mengetahui transformasi di depan mata saat ini, yaitu industri 4.0. Dijuluki sebagai revolusi industri keempat, era otomatisasi dan interkonektivitas saat ini sedang menuju puncaknya. Industri 4.0 adalah tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem *cyber-physical*, *internet of things (IoT)*, komputasi awan (*Cloud Computing*), dan komputasi kognitif.

Hal yang “menakutkan” dalam era industri 4.0 adalah otomatisasi produksi oleh mesin yang memiliki kemampuan belajar (*Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan*). Sebuah mesin yang mampu melakukan tugas manusia secara lebih akurat, cepat, tidak butuh jaminan kesehatan, tidak butuh pesangon, tidak butuh

makan dan istirahat, dan tidak akan melakukan demo. Bagi pemerintah daerah, hal yang perlu diantisipasi dengan kelahiran Industri 4.0 akan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan pada industri-industri manufaktur akan semakin berkurang digantikan oleh mesin-mesin canggih yang bisa berpikir layaknya manusia. Menurut *world economic forum* dalam beberapa tahun sebanyak 75 juta lapangan kerja akan hilang.

Sektor yang paling banyak terkena dampak adalah sektor pertanian dan padat karya, seperti tenaga pembersih atau *cleaning service*, dan operator mesin. Pekerjaan sebagai buruh merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap otomatisasi dan digitalisasi karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan rutin yang berulang. Bagi Kabupaten Berau, kelahiran industri 4.0 mengancam sub sektor penyerap tenaga kerja lokal yaitu pertambangan dan perkebunan. Tenaga kerja lokal yang terserap pada kedua sub-sektor tersebut umumnya berketerampilan rendah, bekerja sebagai buruh, tukang rumput, kuli panggul dan sebagainya. Dalam beberapa tahun ke depan ancaman terhadap lapangan kerja penduduk lokal di sub-sektor pertambangan dan sub-sektor perkebunan diperkirakan semakin meningkat, selain dibayangi oleh pelemahan harga komoditas yang mau tidak mau menuntut perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi juga adanya ancaman industri 4.0.

Tantangan yang sekaligus menjadi pertanyaan, dapatkah Kabupaten Berau menyesuaikan diri dengan transformasi luar biasa ini? Nyatanya ada tantangan serta peluang yang cukup besar dalam menjalankan industri 4.0.

5. Penetapan Indonesia sebagai Negara Maju oleh AS

Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, Indonesia pun dinobatkan sebagai negara maju. Hal ini terlihat dalam perubahan dalam Undang-Undang Pemulihan Perdagangan (*Trade Remedy Law*). Konsekuensinya, Indonesia saat ini tergabung dalam G20, yakni kelompok negara dengan perekonomian besar di dunia.

Dengan status ini, Indonesia menghadapi tantangan dalam ekonomi global karena perdagangan Indonesia ke AS tak lagi bisa mendapatkan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP). GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Akibatnya biaya ekspor barang-barang dari Indonesia ke AS akan menjadi tinggi. Produk Indonesia harus bisa bersaing di pasaran Amerika Serikat dengan negara-negara maju lainnya.

6. Ketidakpastian Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan dan Pertambangan

Sebagai dampak dari melambannya ekonomi global, menurut *press release* Bank Indonesia, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu turunnya aktivitas ekspor impor Indonesia, antara lain penetapan tarif impor Amerika Serikat dan sentimen Brexit. Prediksi serupa juga muncul dalam beberapa indikator dari *World Trade Organization* (WTO) dan *IFO World Economic Survey*, yang menunjukkan kalau intensitas perdagangan akan terus menurun secara gradual, disertai dengan volume ekspor global yang juga menurun selama enam bulan ke depan.

Kondisi ini akan berdampak pada harga komoditas global seperti menurunnya harga minyak dunia dan batu bara. Penurunan harga batubara disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi batubara di Tiongkok serta pasokan AS,

sementara permintaan global rendah. Jika benar demikian, tentu akan membawa malapetaka bagi perekonomian Indonesia, pasalnya batubara merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Hal yang sama juga akan terjadi pada harga komoditas pertanian seperti *Crude Palm Oil* atau CPO diprediksi akan menurun sejalan dengan berkurangnya permintaan karena pelambanan ekonomi ini.

Fluktuasi harga kedua produk ini, akan sangat berpengaruh pada perekonomian Kab. Berau yang selama ini sangat tergantung pada sub Sektor Pertambangan batu bara dan Perkebunan kelapa sawit dan karet. Batu bara, CPO dan karet merupakan produk yang sangat rentan terhadap permintaan dari luar negeri dan karenanya harganya juga cenderung mengikuti perkembangan harga di tingkat global.

4.6.2 Isu Strategis Level Nasional

1. Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur

Terpilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara tentunya ditanggapi pro dan kontra oleh berbagai pihak, tergantung sudut pandang masing-masing. Namun dari segi pertumbuhan perekonomian wilayah, semakin banyak kota semakin baik perekonomian suatu wilayah. Kota merupakan penyumbang PDB terbesar, sekitar 80% (Bank Dunia, 2016). Menurut data World Economic Forum, 2016, Di United Kingdom (Inggris) misalnya, London menyumbangkan lebih dari setengah GDP Britain, kemudian di Amerika, koridor Boston-NY-Washington ditambah LA Raya menyumbang sekitar sepertiga GDP Amerika. Berkaca pada data tersebut, semakin banyak kota di Kaltim, semakin baik bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kaltim.

Kota akan mendorong proses urbanisasi. Berdasarkan data Bank Dunia (2016) tiap 1% pertumbuhan urbanisasi berkorelasi

dengan peningkatan pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*), 13% di India, 10% di China, 7% di Thailand dan 4% di Indonesia. Kota merupakan tempat berkumpulnya orang yang sangat banyak. Konektivitas ini menimbulkan berbagai macam ide, meningkatkan pengetahuan dan inovasi. Dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan penduduk kota akan meningkat pula. Ditambah dengan inovasi, produktivitas penduduk perkotaan akan semakin meningkat sehingga pendapatan akan meningkat pula. Kondisi ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Kota tidak bisa berdiri sendiri. Kota butuh suplai pangan, kayu, batu bara, minyak dan sebagainya dari area diluar perkotaan atau dari area hinterland. Seiring dengan meningkatnya populasi kota, maka suplai yang dibutuhkan akan lebih besar. Diperkirakan penduduk IKN sekitar 1,5 juta orang.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara diyakini bakal memberikan dampak yang besar bagi sejumlah daerah di sekitarnya termasuk Kab Berau yang berjarak lebih kurang 600 km dari IKN. Sebagai daerah yang kaya akan destinasi wisata, Kabupaten Berau mempunyai peluang dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam struktur perekonomian Kab. Berau. Selain itu, dengan semakin berkembangnya daerah wisata akan menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitarnya sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Sektor pariwisata Kabupaten Berau cukup potensial dan dapat menjadi daerah utama tujuan wisata di Kalimantan Timur yang ke depannya bakal menjadi Ibu Kota Negara baru di Republik ini.

2. Penyederhanaan Regulasi Demi Mendorong Kemudahan Investasi Nasional (*Easy of Doing Business*, EoDB)

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) yang pada tahun ini (laporan akhir 2019) berada di posisi 73 dan di target naik keposisi 50 di tahun 2021. Sejumlah perbaikan dilakukan terutama dari sisi regulasi yang dianggap menghambat investasi untuk masuk ke dalam negeri. Untuk memperbaiki posisi EoDB Indonesia, pemerintah akan fokus pada perbaikan di lima kategori:

- Pertama, indikator *getting credit*. Pemerintah menggeser agenda RUU Jaminan Fidusia menjadi RUU Jaminan Benda Bergerak, mendorong percepatan penyusunan NA dan RUU Jaminan Benda Bergerak dengan substansi mengakomodir 6 poin yang belum dipenuhi pada sub-indikator *Strenght of Legal Right Index*, dan merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Kedua, indikator *protecting minority investors*. Pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan pengaturan tanggung jawab penuh direksi atas kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi yang memiliki benturan kepentingan, pengaturan tanggung jawab personal direksi (*fiduciary duty*) jika terbukti bersalah yang mengakibatkan kerugian perusahaan untuk membayar kerugian perusahaan, menghilangkan opsi pengenyampingan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan perubahan kebijakan tentang komite audit agar secara eksklusif terdiri atas anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris (organ pengawas).

- Ketiga, indikator *trading across borders*. Dalam hal ini, pemerintah melakukan reformasi dengan cara membenahi prosedur, waktu, dan biaya pada setiap tahapan dalam perdagangan antar wilayah (ekspor-impor) melalui pelabuhan Indonesia yang diatur dalam Perdirjen Perhubungan Laut Nomor HK. 103/2/18/DJPL tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersil. Aturan ini sudah berjalan.
- Keempat, indikator *enforcing contracts*. Untuk memperbaiki indikator ini Mahkamah Agung (MA) sudah diterbitkan dua peraturan Mahkamah Agung (MA) yakni Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Kelima, indikator *resolving insolvency*. Melakukan penambahan skor dalam *reorganization proceedings index* (0-3), karena hanya kreditur konkuren sebagai kreditur tanpa jaminan yang kepentingannya terpengaruh oleh rencana reorganisasi yang berhak memberikan suara atas rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam pasal 149 jo pasal 151 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Selain itu, kedepan pemerintah akan memperbaiki layanan investasi seperti: Penyiapan *Call Center*, untuk menampung keluhan dan pengaduan investor dalam merealisasikan kegiatan investasinya; Menjemput dan Memfasilitasi, kebutuhan investor termasuk pendampingan yang bersifat *end-to-end* dalam merealisasikan kegiatan investasinya; Satgas Penyelesaian Investasi, pembentukan SPI dalam rangka menyelesaikan permasalahan investasi; dan *Command Center*, monitoring

pelayanan perizinan di BKPM, Kementerian/Lembaga, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perbaikan ini memberikan dampak bagi investor berupa kepastian hukum dan kepastian berusaha, percepatan waktu penyelesaian realisasi investasi, dan efisiensi biaya bagi investor.

3. Terbatasnya Anggaran Pemerintah Pusat Akibat COVID-19

Kementrian Keuangan memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun 2020. Penurunan pendapatan akibat wabah COVID-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Pendapatan negara hingga bulan Mei 2020 masih tertekan akibat pandemi COVID-19, di mana situasi pelemahan ekonomi global dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan negara. penerimaan seluruh sektor usaha di Januari hingga Mei 2020 tumbuh negatif. Kementrian Keuangan menyampaikan, sampai dengan akhir bulan Mei 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp 664,32 triliun. Tetapi capaian pendapatan negara dan hibah tersebut menyusut 9,02% (yoy).

Kementrian keuangan memangkas sekitar Rp94,2 triliun aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun ini untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau COVID-19. Pemangkasan dilakukan pada pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp856,9 triliun menjadi Rp762,7 triliun. Penyesuaian dana transfer ke daerah didapat dari hasil pengurangan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan lainnya. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan terus terjadi sampai di temukannya vaksin sebagai antivirus.

Kabupaten Berau secara kemandirian fiskal masih tergantung dari dana transfer (rata-rata sebesar 70%) tentu akan

merasakan dampak yang sangat signifikan dikarenakan terbatasnya anggaran/pendapatan daerah. Pembangunan akan lebih selektif bahkan mungkin akan pasif dikarenakan anggaran yang ada dialihkan ke penanganan pasca COVID-19. Oleh karena itu, situasi yang demikian haruslah di sikapi dengan perencanaan yang matang, agar proyek-proyek pembangunan strategis Kabupaten Berau masih tetap berjalan dan tepat sasaran.

4. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 (Nawa Cita Jilid II)

Pemerintah merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi. Ketujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
- 5) Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Dalam upaya untuk mendorong hasil pembangunan yang semakin berkualitas, Bappenas telah menyusun dan menetapkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 6,54% di tahun 2024. IPEI merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

IPEI adalah instrumen yang telah dikembangkan Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu (1) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas 8 (delapan) sub-pilar dengan 21 (dua puluh satu) indikator. Secara lebih spesifik ukuran IPEI adalah sebagai berikut:

No	Pilar	Sub Pilar	Indikator
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1) Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan PDRB riil perkapita; 2. Kontribusi manufaktur terhadap PDRB; 3. Rasio kredit perbankan terhadap PDRB

No	Pilar	Sub Pilar	Indikator
		2) Kesempatan Kerja	1. Tingkat kesempatan kerja; 2. Persentase penduduk bekerja penuh; 3. Persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.
		3) Infrastruktur Ekonomi	1. Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN; 2. Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam; 3. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang.
2	Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	1) Ketimpangan	1. Rasio pendapatan gini; 2. Sumbangan pendapatan perempuan; dan 3. Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota.
		2) Kemiskinan	1. Persentase penduduk miskin; 2. Rata-rata konsumsi protein perkapita perhari
3	Perluasan akses dan kesempatan	1) Kapabilitas Manusia	1. Angka harapan lama sekolah; 2. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan 3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.
		2) Infrastruktur Dasar	1. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak; 2. Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air sendiri
		3) Keuangan Inklusif	1. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif; 2. Rasio kredit perbankan UMKM

4.6.3 Isu Strategis Level Regional/Daerah

1. Pengembangan Agro-Industri Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan agroindustri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur mengingat pengembangan sektor ini akan meningkatkan potensi ekonomi lokal serta memunculkan daya saing daerah. Dalam lingkup Kabupaten Berau sendiri, rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan industri dapat menjadi pemicu untuk menggabungkan kedua sektor tersebut menjadi salah satu potensi daerah untuk menciptakan produk unggulan Kabupaten Berau. Pendekatan yang digunakan dalam agroindustri adalah dengan mengembangkan pusat-pusat subsektor pertanian dan dikoneksikan dengan manufakturnya sehingga terjadi interkoneksi, interpendensi, dan interelasi pada kawasan industri. Agroindustri juga memiliki kelebihan lain karena pengembangannya akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan kelembagaan sosial yang secara otomatis menjadi daya tarik bagi investor-investor.

2. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional

Khusus untuk bidang kepariwisataan, Kabupaten Berau mempunyai banyak obyek wisata yang berpotensi besar dalam pengembangannya karena memiliki nilai jual skala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, fokus pengembangan pembangunan daerah berbasis kepariwisataan akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian wilayah baik kepariwisataan itu sendiri maupun sektor lain yang berkaitan. Meskipun bukan leading sector dalam pembentukan perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional, sektor pariwisata juga merupakan stimulus bagi berkembangnya sektor-sektor lain

seperti jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pemasaran, sosial budaya, lingkungan dan sebagainya.

Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor lain, kegiatan kepariwisataan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan pula dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bisnis, hingga pemerintahan. Kegiatan yang memiliki nilai lebih di Kabupaten Berau tersebut belum tergali sepenuhnya karena pengolahan dan pengembangan potensi sumber daya kepariwisataan yang belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, pengembangan kepariwisataan Kabupaten Berau akan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas perekonomian sebagai pengganti sektor pertambangan dan penggalan yang semakin lama semakin menurun sumber dayanya. Untuk saat ini, Kabupaten Berau memiliki gugusan Pulau Derawan dan Maratua yang menjadi andalan pariwisata dimana kunjungan wisatawan cukup tinggi di wilayah tersebut. Namun jika dilihat dari potensinya, peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata baik di gugusan Pulau Derawan dan Maratua maupun tempat lain seharusnya dapat lebih dioptimalkan sehingga menjadi suatu resort pariwisata bukan saja level internasional, tetapi memiliki nilai lebih berupa *prestise*.

3. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Sektor Pengelolaan SDA

Untuk mewujudkan *good governance* sudah merupakan hal mutlak bagi pemerintah daerah untuk mencanangkan pemberantasan dan pencegahan korupsi pada seluruh elemen pemerintahan. Komitmen seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum akan menjadikan suasana kinerja menjadi lebih baik dan

nyaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itulah diperlukan transparansi anggaran baik mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi hasil pembangunan daerah. Terkait pengelolaan sumber daya alam, pada tahun 2014 KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi atas pertambangan mineral dan batubara yang berlokasi di 12 provinsi yakni Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kegiatan tersebut melibatkan instansi pemerintah pusat yang terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain dicabutnya izin-izin yang tidak memenuhi ketentuan, dibayarkannya kewajiban keuangan yang selama ini diabaikan oleh pelaku usaha, penegakan aturan, dan pengawasan yang diperketat dengan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya di 2015, gerakan penyelamatan Sumber Daya Alam ini diperluas ke Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi serta Sektor Kelautan di 34 Provinsi.

Provinsi Kaltim telah menyusun rencana aksi penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya minyak dan gas alam di wilayahnya. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang menggagas penetapan moratorium pertambangan di Indonesia, Kaltim dinilai sebagai pelopor gerakan penyelamatan sumber daya alam (SDA) di daerah. Tindakan tersebut sejalan dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) rencana aksi bersama gerakan nasional penyelamatan SDA di Indonesia antara KPK dengan semua Departemen Kementerian

yang meliputi sektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Ada delapan hal yang menjadi sasaran dari gagasan tersebut yaitu:

- 1) Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basis data, perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- 2) Mendorong perbaikan tata kelola di sektor SDA;
- 3) Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya;
- 4) Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan terkait;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA;
- 6) Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam pengelolaan SDA;
- 7) Mendorong perlindungan dan pemulihan kekayaan alam;
- 8) Mendorong pembangunan sistem pengendalian anti korupsi.

Kabupaten Berau yang telah menandatangani MoU Gerakan Nasional Penyelamatan SDA tersebut diharapkan pencegahan tindakan korupsi di sektor pengelolaan SDA semakin berkurang, sehingga kekayaan alam yang masih ada di Negara ini dapat terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan pemanfaatannya.

4. Dampak Pembangunan Pasca Penanganan Pandemi Virus COVID-19

Pada awal bulan januari Tahun 2020 Kota Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok menjadi perhatian dunia, ini disebabkan oleh merebaknya virus corona yang diduga bertransmisi dari hewan ke

manusia. Virus yang memiliki gejala awal seperti flu ini, ternyata tidak bisa disepelekan. Di Indonesia, pemerintah pusat mengumumkan kasus positif corona pertama pada awal bulan Maret lalu. Langkah-langkah strategis kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat seperti halnya himbauan untuk *social distancing* dengan bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Tak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga bergerak cepat, Provinsi Kalimantan Timur sepakat untuk melakukan *lockdown* bila kasus positif corona merebak. Kesepakatan tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Menindaklanjuti hal ini Pemerintah Kabupaten Berau membentuk tim penanganan dan pemantauan ODP, PDP, dan pergerakan orang dipintu masuk dan keluar Kabupaten Berau. Pembatasan ruang gerak masyarakat menjadi salah satu kunci pencegahan perluasan virus COVID-19. Selain pencegahan persiapan penanganan di Rumah Sakit juga menjadi langkah preventif untuk percepatan perawatan pasien yang sudah dalam pengawasan maupun yang sudah positif terkena virus corona.

Salah satu dampak yang cukup besar dirasakan masyarakat adalah kemungkinan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, karena kinerja perdagangan lokal, nasional dan internasional akan turun drastis. Hal ini cukup menyita perhatian dan fokus pemerintah, hal ini perlu disiasati dengan langkah strategis guna menghadapi guncangan ekonomi global akibat virus COVID-19. Beberapa kemungkinan dampak ekonomi yang terlihat dari virus corona ini adalah pendapatan dari sektor pariwisata yang berimplikasi pada perdagangan, pendapatan resort (pariwisata), usaha mikro dan makro masyarakat kemungkinan turun. Walaupun kasus pandemi virus COVID-19 ini ditahun 2020, namun dampak ekonominya akan masih terasa di tahun 2021. Dengan ini pemerintah Kabupaten Berau harus mulai menyiasati

langkah-langkah strategis ekonomi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi akan dapat diantisipasi sejak dini.

5. Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Antar Daerah

Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Berau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi luas wilayah Kabupaten Berau tidak mengalami penambahan. Hal ini, berimplikasi pada meningkatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Berau. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2019 merupakan tertinggi ke 2 (di bawah Kabupaten Kutai Timur) yaitu di angka 2,55 dan jauh diatas provinsi yang hanya diangka 1,9. Meningkatnya kepadatan pendudukan akan menyebabkan berbagai masalah sosial dan kejahatan apabila tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan serta program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, kepadatan penduduk Kabupaten Berau di tahun 2019 mencapai menjadi 6,28 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan penduduk antar Kecamatan memiliki ketimpangan yang sangat tinggi dikarenakan distribusi penduduk yang tidak merata di mana pada daerah pedalaman/terpencil dengan luas wilayah yang jauh lebih besar dibanding wilayah yang lebih maju memiliki penduduk sedikit jika dibandingkan wilayah yang lebih maju. Ibukota Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Redeb) pada tahun 2018 memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, mencapai 2.846 jiwa/km² yang berarti dalam wilayah seluas 1 km² dihuni kurang lebih 2.846 jiwa dan tahun 2019 kepadatan tersebut turun menjadi 2.778,21. Adapun Kecamatan Maratua merupakan wilayah dengan kepadatan

penduduk paling rendah, hanya sebesar 0,95 jiwa/km² (tidak mencapai satu) dan tahun 2019 turun menjadi 0,71 jiwa/km². Perlu ada nya program-program yang mampu mendorong penduduk untuk ber migrasi ke daerah-daerah yang tingkat kepadatannya masih rendah supaya tingkat ketimpangan antar daerah di Kabupaten Berau menjadi lebih seimbang.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Kabupaten Berau bergantung kepada sektor pertambangan dan penggalian. Kegiatan penambangan dan penggalian cepat atau lambat akan memberikan dampak negative pada lingkungan. Oleh karena itu, perlu alternatif lain dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Berau. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui penataan kawasan permukiman/Kawasan kumuh dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini

7. Kontribusi Pada Perubahan Iklim

Indonesia telah berkomitmen untuk penurunan emisi di tahun 2030 sebesar 29% dengan pendanaan sendiri dan akan meningkat menjadi sebesar 41% dengan dukungan internasional, sebagaimana tercantum pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Dan Bappenas juga telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>).

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang beriklim tropis, berdasarkan areal luas lahan, Berau merupakan kabupaten terbesar ketiga di Kalimantan Timur, di mana lebih dari 75% wilayahnya masih tertutup hutan. Luasnya tutupan hutan ini memiliki peran penting dan menjadi garda terdepan dalam upaya internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Berau telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi dampak negative perubahan iklim melalui pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik, diantaranya melalui PKHB.

Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah ditunjuk oleh Kementerian LHK RI dengan Kerjasama World Bank menjadi provinsi *implementasi program Forest Carbon Facility Partnership* (FCPF) – Carbon Fund (<https://www.forestcarbonpartnership.org/country/indonesia>).

Dalam paparan yang disampaikan oleh Bappeda Kaltim pada tanggal 12 April 2021, disebutkan beberapa indikasi *major project* yang akan dijalankan di Berau diantaranya adalah “implementasi program penurunan emisi FCPF”. Perlu diketahui bahwa program ini tidak hanya terkait dengan sektor kehutanan (melalui perhutanan social), namun juga terkait dengan pelaksanaan rencana aksi di sub sektor perkebunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara singkat, isu-isu strategis yang dihadapi Kab. Berau untuk 5 tahun kedepan seperti pada Tabel 4.11 berikut.

**Tabel 4.11
Penentuan Isu Strategis Kab. Berau**

No	ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS LEVEL GLOBAL	
1	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) sebagai kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium (<i>Millenium Development Goals</i>)
2	Ancaman resesi ekonomi global pasca pandemik COVID-19
3	Konflik di kawasan Laut Natuna Utara
4	Tantangan terhadap perkembangan revolusi industri 4.0
5	Penetapan Indonesia sebagai negara maju oleh AS
6	Ketidakpastian perkembangan harga komoditas perkebunan dan pertambangan
ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL	
1	Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur
2	Penyederhanaan regulasi demi mendorong kemudahan investasi nasional (<i>Easy of Doing Business</i> , EoDB)
3	Terbatasnya anggaran pemerintah pusat akibat COVID-19
4	7 (tujuh) agenda pembangunan nasional 2020-2024 (Nawa Cita Jilid II)
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
ISU STRATEGIS LEVEL REGIONAL/DAERAH	
1	Pengembangan agro-industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
2	Pengembangan potensi pariwisata level internasional
3	Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor pengelolaan SDA
4	Dampak pembangunan pasca penanganan pandemi virus COVID-19
5	Pertumbuhan penduduk dan ketimpangan antar daerah
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7	Kontribusi pada perubahan iklim
8	Penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat (terutama masyarakat pekerja)
9	Penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
10	Penyediaan fasilitas dasar air, sanitasi layak dan sampah
11	Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
12	Pengelolaan ekosistem daratan dan masalah kebencanaan

BAB V

VISI, MISI

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Visi, misi dalam konteks ini merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 yaitu Ibu Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan Bapak H. Gamalis, S.E. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1. VISI

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yaitu Ibu Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan Bapak H. Gamalis, S.E. adalah:

**“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya
Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara berkelanjutan”**

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	MAJU	Maju adalah suatu kondisi yang dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Berau yang Maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.
2.	SEJAHTERA	Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.
3.	SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL	Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan.

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
4.	TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN	Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kab. Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan (<i>unrenewable resources</i>) di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumberdaya ekonomi terbarukan (<i>renewable resources</i>) seperti Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM. Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

5.2. MISI

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*).

Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai

standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka

pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (*renewable resources*), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kab. Berau. Di samping itu, telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus

mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

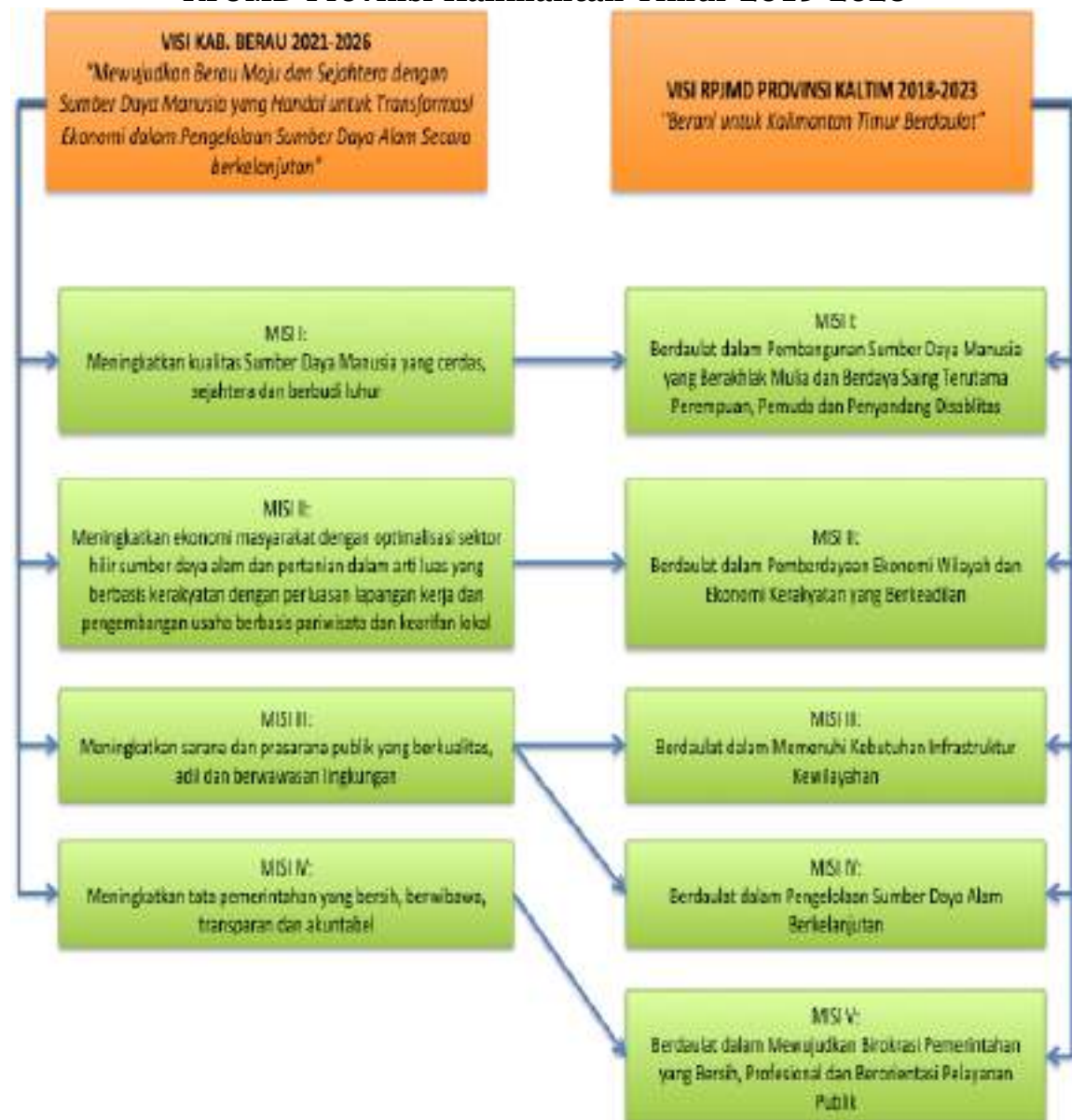
Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

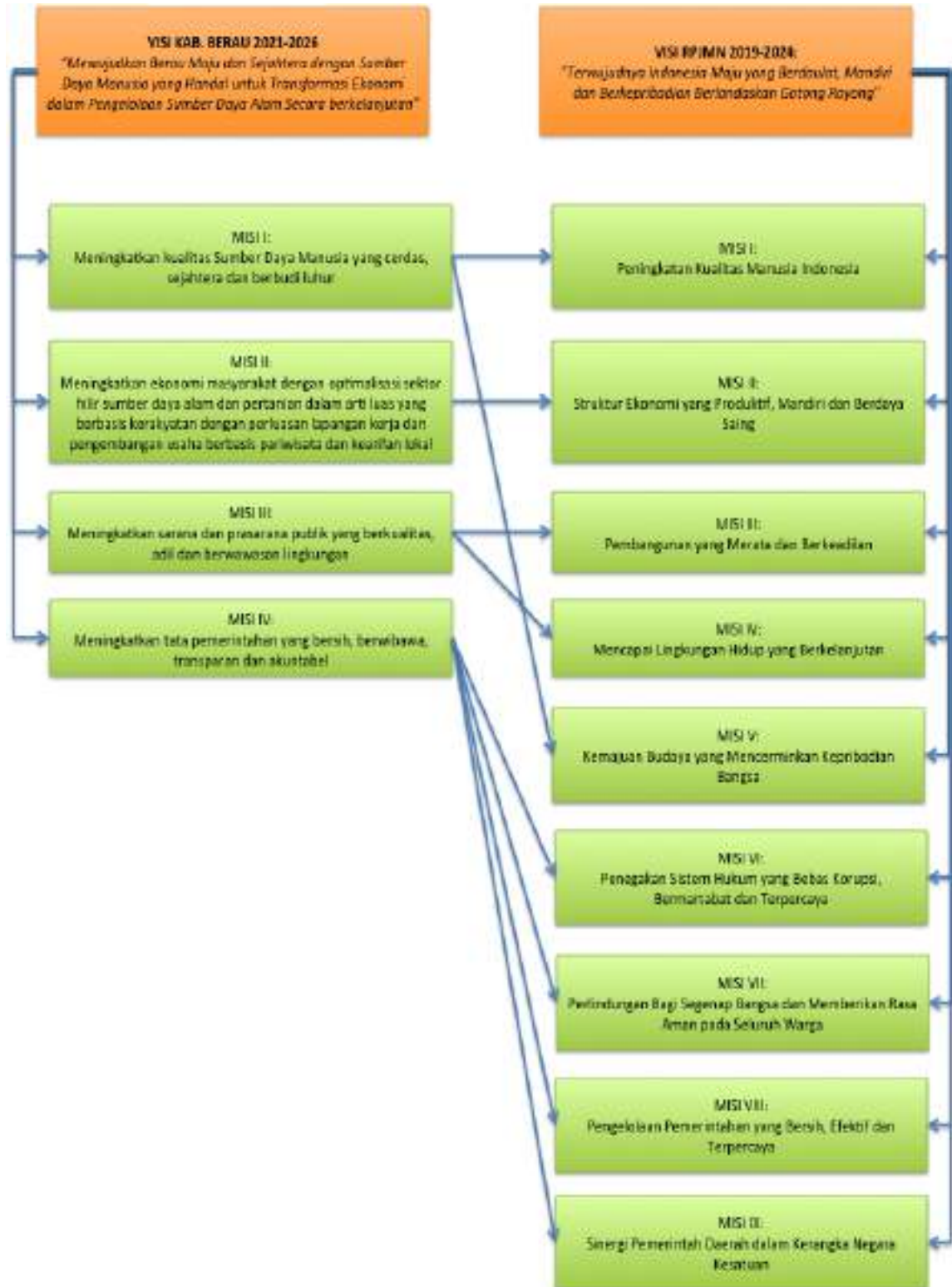
Selain untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau di atas juga disusun dalam rangka untuk

mendukung pencapaian prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dengan skema keterkaitan antara visi dan misi Berau dengan visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1
Skema Keterkaitan Visi-Misi
RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023



**Gambar 5.2
Skema Keterkaitan Visi-Misi
RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan
RPJMN 2020-2024**



Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolok ukur dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Berau selama periode 2021-2026. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangun yang di selaraskan dengan indikator makro Provinsi dan Nasional. Indikator makro ini merupakan penunjuk atas dampak (*impact*) pembangunan lokal, regional, dan nasional. Dengan hubungan, bahwa tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator makro pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau bisa dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 5.1
Penyelarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berau

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					Indikator Pembangunan	Realisasi	RPJMD PERUBAHAN PROV. KALTIM 2019-2023					Indikator Pembangunan	Realisasi	RPJMD KABUPATEN BERAU 2021-2026						
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	Laju Pertumbuhan ekonomi	-2,85	- 1,00	3,5 +- 1	3,5 +- 1		Laju Pertumbuhan ekonomi	-3,35	1,29	2,29	3,79	4,29	4,79	5,29		
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Tingkat Kemiskinan	6,64	6,05	6,00	5,90		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,87	6,81	6,75	6,50		Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41		
4	Indek Pembangunan Manusia						Indek Pembangunan Manusia	76,24	76,7 5	77,2 5	77,7 5		Indek Pembangunan Manusia	74,71	74,9 9	75,1 0	75,5 0	75,8 9	76,2 9	76,6 9		
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp)						PDRB Per Kapita (Juta Rp)	160,11	167,50	170,00	175,00		PDRB Per Kapita (Juta Rp)	148,90	151,45	154,04	156,67	159,35	162,08	164,85		
6	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca						Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca						Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416.564	403.903	391.466	379.179	366.998	354.906	342.901		
7	Indeks Reformasi Birokrasi						Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (53,25)	CC (55)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (70)	BB (76)		
8	LPE Non Migas dan Batubara (%)						LPE Non Migas dan Batubara (%)	-1.56	1.5	2	2,50		LPE Non Migas dan Batubara (%)									
9	Indeks Gini						Indeks Gini	0,328	0,313	0,313	0,308		Indeks Gini	0,300	0,300	0,300	0,290	0,290	0,290	0,280		
10	Nilai Tukar Petani						Nilai Tukar Petani	111,65	112	113	114		Nilai Tukar Petani									
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,95	75,95	76,05	76,15		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									

* Sumber: RPJMN, Lampiran 4. Arah Pembangunan Wilayah, Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Data Indikator Makro Kabupaten Berau yang diolah.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.

Tujuan : Mewujudkan masyarakat Berau yang berdaya saing.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan.

Misi Kedua : Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mantap dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau.

Sasaran 2 : Menurunnya angka kemiskinan.

Tujuan Kedua : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sasaran 2 : Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis *sustainable tourism*.

Sasaran 3 : Meningkatnya produksi sektor primer.

Sasaran 4 : Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan.

Misi Ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Tujuan Pertama : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar.

Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah.

Tujuan Kedua : Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi Keempat : Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

Sasaran pembangunan daerah secara spesifik terangkai menjadi sebuah arsitektur kinerja berupa “*impact*” yang saling terhubung di mana indikator tujuan merupakan *lagging* indikator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati (2026).

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Berau 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 5.2
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia Meningkat dari 74,71 Menjadi 76,69 Di akhir periode	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,10	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83	
					Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,70	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26	
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,60	72,71	72,71	
					Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%	29,60%	44,90%	66,60%	99,90%	100,00%	100,00%	
2	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi meningkat dari -3,35% menjadi 5,29% di akhir periode	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	4,41	
				Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84	4,84	
		Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	PDRB Per Kapita meningkat dari 148,9 Juta/tahun menjadi 164,848 juta/tahun diakhir periode	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	Presentase Usaha mikro dan kecil	24,00%	0,00%	6,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	40,00%	
				Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	na	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,03	
				Meningkatnya Produksi Sektor Primer	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09	
				Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	80	82	83	84,1	85,1	85,1	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Gini Menurun dari 0,300 Menjadi 0,280 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	68,50
					Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20%	10,70%	11,20%	11,70%	12,70%	13,70%	13,70%
					Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79,00	83,00	86,00	90,00	93,00	97,00	97,00
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%	13,00%	21,00%	23,00%	25,00%	30,00%	33,00%
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94
					Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,2	0,2
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75
					Indeks SPBE	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
		Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Emisi Gas Rumah Kaca Menurun dari 416.564 menjadi 342.901 diakhir periode	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79	56,79
					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,87	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,784	89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari CC (53,25) menjadi BB (76) di akhir periode	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	BB (72)	BB (72)
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Status Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah kab. Berau	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
					Survei Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	A (90,12)	A (92,16)	A (94,06)	A (96,26)	A (98)	A (98)
	4	6	6	13	25								

* Sumber: Data Baplitbang Kab. Berau yang diolah.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026. Strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Rumusan strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Berau periode 2021-2026.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Pemerintah Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Secara umum, strategi Pemerintah Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kab. Berau dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kab. Berau 2021-2026

Visi: <i>“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur		
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan, dilakukan melalui: 1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif. 2. Peningkatan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. 3. Pengembangan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan di Kab. Berau akan dilaksanakan melalui: 1. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan; 3. Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan 4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 5. Meningkatkan status akreditasi Puskesmas menjadi akreditasi Utama 6. Memberikan dukungan penuh terhadap penanganan pandemi covid 19
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal		
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Upaya menurunkan angka pengangguran di Kab. Berau akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Visi: “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
mantap dan berdaya saing	Menurunnya Angka Kemiskinan	3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;
		4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
		Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya:
		1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;
		2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak COVID-19;
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan wirausahaan;
		4. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.
		Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:
		1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM;
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM;
Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>		3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.
		Upaya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i> akan dilakukan melalui:
		1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Visi: <i>"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3. Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2. Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
	Meningkatnya produksi sektor primer	Upaya peningkatan produksi sektor primer akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3. Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Visi: “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Pengembangan dan penguatan kemitraan yang ideal antar petani/pekebun dengan swasta, termasuk di dalamnya penyuluhan, penerapan <i>good agriculture practices</i> ” dan meningkatkan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan; 6. Peningkatan efisiensi rantai pasok masing-masing komoditas unggulan; 7. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; 8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan keragaman konsumsi pangan, akan dilakukan melalui upaya: 1. Meningkatkan diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 2. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani; 3. Melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap daerah rawan pangan; dan 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan.
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan		
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	Upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui: 1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; 3. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 4. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 5. Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 6. Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 7. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan perdesaan terpadu; 8. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; 9. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; 10. Mengurangi luasan lahan kumuh; 11. Mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder; 12. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, dan 13. Memaksimalkan tugas dan fungsi POKJA PKP dan Forum PKP Kabupaten Berau dalam mendukung kebijakan pengurangan luasan Kawasan kumuh.
		Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah akan dilakukan melalui:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Visi: <i>"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan"</i>		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Pembangunan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2. Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; dan 3. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah.
Meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Upaya meningkatkan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan dilakukan melalui: 1. Pengawasan dan pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas berbagai kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup; 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, meliputi pengembangan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3); 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 5. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 7. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 8. Optimalisasi upaya pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pihak swasta.
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui: 1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat; 3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan rencana pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Pada sisi lain, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau juga harus sinergis dan selaras dengan 5 (lima) sasaran prioritas nasional tahun 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 6.1
Prioritas Pembangunan Nasional 2019-2024



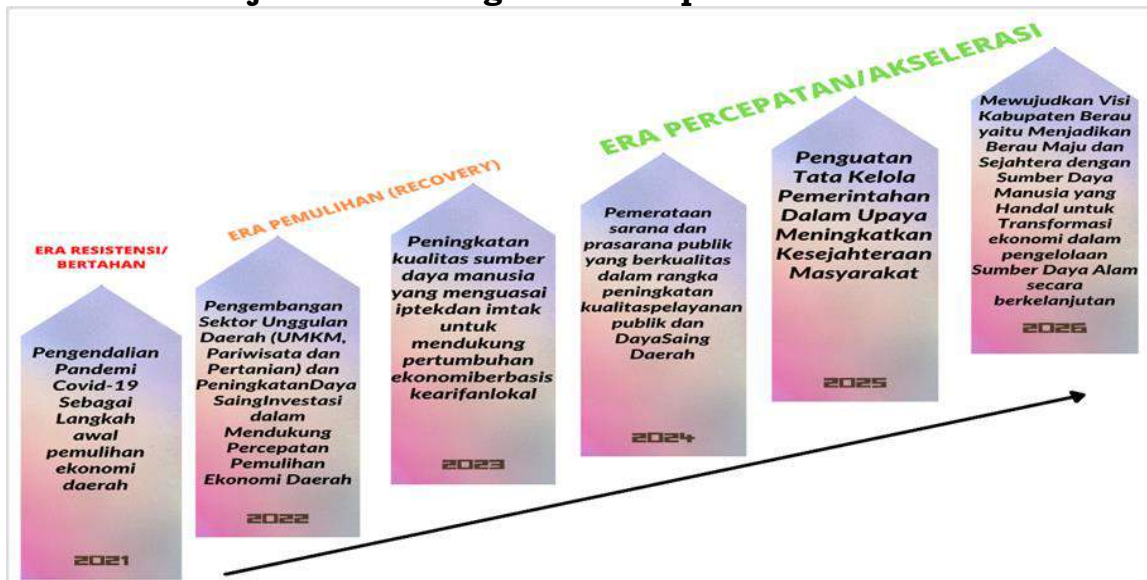
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026

Gambar 6.2
Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023



Selanjutnya, 5 (lima) sasaran prioritas Nasional dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di atas menjadi dasar untuk perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026



Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya visi pembangunan RPJMD Kabupaten Berau di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Arah kebijakan Kabupaten Berau dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Resistensi/Bertahan. Tahapan ini berada pada tahun pertama (2021) periode pembangunan. Pembangunan pada tahapan ini akan lebih difokuskan pada upaya untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Karena itu, maka strategi pembangunan akan lebih ditekankan pada upaya untuk:
 - a. Pemulihan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi dan sosial akibat pandemi (kelompok rentan (di bawah garis kemiskinan), pekerja yang kena PHK, pelaku usaha yang terpaksa menutup usaha mereka karena permintaan produk menurun terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur dan pertanian;
 - b. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19: pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, APD, masker, obat-obatan dan vaksin (angka kesakitan dan penyebaran penyakit menular), mengurangi tingkat kematian penduduk yang terkena COVID-19 (angka kematian);
 - c. Menjaga daya beli masyarakat dengan cara mempercepat belanja Pemda dan dana desa, BLT, subsidi, relaksasi pajak;
 - d. Mendorong aktivitas produksi;
 - e. Mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur;

- f. Ketersediaan pangan; serta
 - g. Pemulihan kepercayaan masyarakat.
2. Tahapan Pemulihan (*Recovery*). Tahapan ini berada pada periode 2022-2023. Pada tahapan ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada upaya untuk bertahan dari dampak pandemi. Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi pembangunan akan lebih ditekankan pada upaya untuk:
- a. Memberikan stimulus ekonomi dan investasi guna mempercepat pulihnya sektor pariwisata, UMKM, pertanian, perdagangan, investasi dan penguatan sistem ketahanan pangan;
 - b. Mempercepat penajaman program kredit usaha, termasuk perluasan sasaran;
 - c. Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - d. Reformasi sistem ketahanan bencana;
 - e. Reformasi sistem kesehatan nasional (penguatan gernas, *health security* dan sumber daya).
3. Tahapan Percepatan/Akeselerasi. Tahapan ini berada pada periode 2024-2026 yang merupakan periode akhir dari RPJMD 2021-2026. Pada tahapan ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada upaya:
- a. Percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat (*no one left behind*).

- b. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.
- c. Pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan.

Arah kebijakan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya, diikuti dengan fokus pembangunan daerah supaya pencapaian visi Kepala Daerah di akhir periode bisa terwujud. Adapun fokus pembangunan dari masing-masing arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2
Fokus Pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026**

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengendalian pandemi COVID-19 sebagai langkah awal pemulihan ekonomi daerah, dengan fokus pembangunan berupa: 1. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, APD, masker, obat2an dan vaksin serta sosialisasi protokol kesehatan; 2. Perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan rentan berupa bantuan langsung tunai dan non tunai; 3. Subsidi beban biaya secara langsung dalam kendali pemerintah (pusat dan daerah) bagi masyarakat yang terdampak; 4. Melakukan relaksasi pajak dan retribusi daerah; 5. Memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako;	Pengembangan sektor unggulan daerah (UMKM, pariwisata dan pertanian) dan peningkatan daya saing investasi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, dengan fokus pembangunan berupa: 1. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan secara merata; 3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan seluruh lapisan masyarakat; 4. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan pendidikan; 5. Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai iptek dan imtak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal, dengan fokus pembangunan berupa: 1. Penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu; 2. Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal /Kesetaraan; 3. Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;	Pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan fokus pembangunan berupa: 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, baik formal maupun non formal; 2. Pemerataan mutu pendidikan sampai ke daerah pelosok; 3. Pembangunan rumah sakit tipe B; 4. Penyusunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya yang menghubungkan antar kampung/kelurahan/kecamatan dengan Ibukota Kabupaten; 5. Pembangunan prasarana dan sarana sosial yang merata dan berkeadilan antara daerah perkotaan dan perdesaan; 6. Pembangunan jaringan jalan	Penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pembangunan berupa: 1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat 3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum; 4. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-	Mewujudkan visi Kabupaten Berau yaitu menjadikan Berau maju dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan fokus pembangunan: 1. Pemantapan kualitas SDM di semua bidang; 2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar 3. Pemantapan Konektivitas telekomunikasi; 4. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan industri rumah tangga;

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
6. Mendukung aktivitas dunia usaha atau aktivitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan untuk menangani COVID-19; 7. Mendorong dan mempercepat belanja pemerintah pada kegiatan padat karya untuk kegiatan produktif dan kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur; 8. Mengefektifkan APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan dampak COVID-19.	Kesejahteraan Sosial); 6. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri kerakyatan dan usaha kecil menengah; 7. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata daerah; 8. Perwujudan kemitraan antara pemerintah dan swasta; 9. Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya; 10. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan ekraf; 11. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat; 12. Peningkatan sarana prasarana utilitas	4. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh daerah Kab. Berau; 5. Melakukan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 6. Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan; 7. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat;	penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 7. Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 8. Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 9. Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 10. Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 11. Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 12. Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; 13. Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; 14. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum;	unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum 5. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi 6. Memaksimalkan fungsi balai pelatihan kerja (BLK) dalam menjaring tenaga kerja yang profesional dan siap bekerja dengan keahlian yang dibutuhkan di dunia usaha. 7. Mempermudah proses perizinan dunia usaha dan industri	5. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat; 6. Meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan; 7. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani; 8. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan; 9. Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	daerah, khususnya kelistrikan dan air minum; 13. Peningkatan pemerataan dan kualitas jaringan jalan Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup; 14. Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah; 15. Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi dan penempatan kerja; 16. Penggunaan sistem informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik; 17. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, memberikan insentif kepada	8. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, pangan, perkebunan rakyat dan perikanan; 9. Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata; 10. Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi serta jalan produksi; 11. Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu; 12. Memberikan pelatihan secara intens kepada para pelaku usaha dalam memberikan branding/nilai tambah terhadap produk yang dijual; 13. Menyediakan "wadah" pasar, baik offline maupun online guna memasarkan produk kearifan lokal	15. Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi; 16. Penyesuaian pembangunan infrastruktur sesuai RTRW Berau. 17. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh khususnya perkotaan. 18. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar air minum , sanitasi masyarakat di Kawasan kumuh sesuai standard kualitas yang berlaku. 19. Peningkatan Peran dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan Pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.		permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM; 10. Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas,

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pelaku usaha IKM; 18. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 19. Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pemberian	masyarakat; 14. Mempermudahkan proses perizinan dan perbantuan modal usaha bagi pelaku usaha; 15. Modernisasi Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dalam mempermudah pekerjaan; 16. Penguatan sentra-sentra industri/manufaktur di setiap kampung/kecamatan sebagai basis ekonomi rakyat; 17. Peningkatan budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS sehingga masyarakat Berau mampu bersaing di era global.			mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN					
ERA RESISTENSI/BERTAHAN	ERA PEMULIHAN (RECOVERY)		ERA PERCEPATAN/AKSELERASI		
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 20. Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan guna memastikan kelancaran distribusi orang dan barang; 21. Memaksimalkan fungsi pasar sebagai sentra perdagangan produk unggulan daerah. 22. Identifikasi produk potensial ekspor minimal 1 produk yang dibarengi dengan pendampingan				

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1. Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.

6.3.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021-2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji

kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:

- 1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
- 2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis;
- 4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu;
- 5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung;
- 7) Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota;
- 8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
- 9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
- 10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
- 11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
- 12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;
- 13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);

- 14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
- 15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
- 16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;
- 17) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;
- 18) Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.3 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.3
Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
17	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kab. Berau Periode 2021-2026

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022		2023		2024		2025			2026		Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur						401.50 4.628.3 99,00		544.555 .897.71 2,40		644.51 9.242.2 81,84		1.133.5 66.174. 902,22		688.14 5.637.5 08,85		730.223 .248.34 5,78		3.961.7 61.892. 550,09			
Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing				Indek Pembangunan Manusia		74,71	74,99	401.50 4.628.3 99,00	75,10	544.555 .897.71 2,40	75,50	644.51 9.242.2 81,84	75,89	1.133.5 66.174. 902,22	76,29	688.14 5.637.5 08,85	76,69	730.223 .248.34 5,78	76,69	3.961.7 61.892. 550,09	
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				Harapan Lama Sekolah		13,32	13,53	136.31 8.867.8	14,10	195.025 .904.21	14,29	267.84 8.513.1	14,47	270.165 .892.65	14,65	269.01 7.713.2	14,83	283.588 .635.41	14,83	1.421.9 65.526.	
				Rata-rata Lama Sekolah		9,52	9,69	89	9,70	8	9,84	38	9,98	0	10,12	38	10,26	6	10,26	550	
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	76,17	134.078. 736.589, 00	77,22	190.810. 323.018, 00	78,28	263.501. 013.138, 00	79,35	265.605. 767.650, 00	80,44	264.234. 331.988, 20	81,54	278.570. 835.103, 97	81,54	1.396.80 1.007.48 7,17	Dinas Pendidikan	
				Angka partisipasi kasar SD/MI	104,29	105,33		106,39		107,45		108,52		109,61		110,71		110,71			
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95,82	96,78		97,75		98,72		99,71		100,00		100,00		100			
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,79	96,18		96,58		96,97		97,37		97,77		98,17		98,17			
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76,53	78,37		80,25		82,18		84,15		86,17		88,24		88,24			
				Angka partisipasi sekolah SD/MI	100,34	101,34		102,36		103,38		104,41		105,46		106,51		106,51			
				Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91,85	92,77		93,70		94,63		95,58		96,54		97,50		97,50			
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01		0		0		0		0		0,00		0,00			
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02		0,01		0		0		0		0,00		0,00			
				Angka Kelulusan	-	-		-		-		-		-		-		-			
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100		100		100		100		100		100,00		100			
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100		100		100		100		100		100,00		100			
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105,59	100,00		100,00		100		100		100		100		100			
				Angka melek huruf	99,42	99,46		99,49		99,53		99,56		99,6		99,64		99,64			
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		87,11		87,11			

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	2.240.13 1.300,00	-	4.215.58 1.200,00	-	4.347.50 0.000,00	-	4.560.12 5.000,00	-	4.783.38 1.250,00	-	5.017.80 0.312,50	-	25.164.5 19.062,5 0	Dinas Pendidikan	
				PAUD	33,13	33,46		33,80		34,13		34,48		34,82		35,17		35,17			
				SD	76,36	77,12		77,89		78,67		79,46		80,26		81,06		81,06			
				SMP	94,38	95,32		96,28		97,24		98,21		99,19		100,00		100			
				Rasio murid/guru sekolah	-	-		-		-		-		-		-		-			
				Rasio murid/guru SD Negeri	15	15		15		15		15		15		15,00		15,00			
				Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19					
				Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36					
				Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76					
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	-		-		-		-		-		-					
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan				Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	265.18 5.760.5 10	72,28	349.529 .993.49 4	72,38	376.67 0.729.1 44	72,49	863.400 .282.25 2	72,60	419.12 7.924.2 71	72,71	446.634 .612.92 9	72,71	2.539.7 96.366. 000		
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%		29,60%		44,90%		66,60%		99,90%		100%		100%			100%
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80	166.362. 353.500, 00	7,80	233.911. 501.400. 00	7,80	248.861. 162.940. 00	7,80	723.210. 957.928, 00	7,80	265.698. 795.314, 00	7,80	278.719. 908.877, 00	7,80	1.736.01 1.743.35 9,00	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,00	22,00		20,00		19,00		18,00		18,00		18,00					
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	10,00		10,00		9,00		8,00		8,00		7,00		7,00			
				Angka kematian anak balita	15,00	17,00		16,00		15,00		15,00		15,00							
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30,00	60,00		80,00		90,00		95,00		98,00		100,00					
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60,00	67,00		70,00		75,00		80,00		83,00		85,00		85,00			
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		(KLB) / Wabah < 24 jam																		
		Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59,00	110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		85,00				
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00				
		presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,90	93,60		94,10		94,60		95,00		95,00		95,00		95,00				
		Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79,00	85,00		87,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49		0,48		0,47		0,46		0,45		0,85		0,85				
		Angka kejadian Malaria	0,00	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1				
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79,00	100,00	4.122.686.896,00	100,00	10.355.968.000,00	100,00	11.737.162.000,00	100,00	12.100.594.000,00	100,00	12.316.713.000,00	100,00	12.536.056.000,00	100,00	63.169.179.896,00	Dinas Kesehatan	
				Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00					
				Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103,00	110,00		120,00		125,00		135,00		140,00		145,00					
				Jumlah Tenaga Bidan	303,00	310,00		320,00		325,00		330,00		335,00		340,00					
				Jumlah Tenaga Perawat	584,00	600,00		615,00		630,00		645,00		660,00		675,00					
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100,00	100,00	936.677.000,00	100,00	1.166.562.000,00	100,00	1.476.453.000,00	100,00	1.831.184.000,00	100,00	2.297.015.000,00	100,00	2.914.807.000,00	100,00	10.622.698.000	Dinas Kesehatan	
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00		73,00		76,00		80,00		82,00		85,00					
				Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00					
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan	59,00	83,80	790.000.000,00	87,90	1.275.000.000,00	91,60	1.384.500.000,00	95,00	1.615.950.000,00	95,00	1.679.545.000,00	95,00	1.550.499.500,00	95,00	8.295.494.500,00	Dinas Kesehatan	
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35,00		45,00		50,00		55,00		55,00		55,00					

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100%	100%	92.157.2 71.804	100%	101.372. 998.984	100%	111.510. 298.883	100%	122.661. 328.771	100%	134.927. 461.648	100%	148.420. 207.813	100%	711.049. 567.904	RSUD dr. Abdul Rivai	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100%	100%	496.820. 100	100%	546.502. 110	100%	601.152. 321	100%	661.267. 553	100%	727.394. 308	100%	800.133. 739	100%	3.833.27 0.132	RSUD dr. Abdul Rivai	
2	1 4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 1	19 per 1000 kelahira n	18 per 1000 kelahira n	319.951. 210	17 per 1000 kelahira n	901.461. 000	16 per 1000 kelahira n	1.100.00 0.000	15 per 1000 kelahira n	1.319.00 0.000	14 per 1000 kelahira n	1.481.00 0.000	13 per 1000 kelahira n	1.693.00 0.000	13 per 1000 kelahira n	6.814.41 2.210	Dinas Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak	
Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal									74.487. 599.79 0,00		159.198 .906.19 4,00		125.96 5.328.2 86,80		141.186 .843.76 8,38		143.22 9.575.5 98,82		155.750 .974.20 0,10		799.81 9.227.8 38,10
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing					Laju Pertumbuhan ekonomi	-3,35	1,29	55.568. 421.92 4,00	2,29	65.748. 088.194 ,00	3,79	66.742. 128.28 6,80	4,29	74.351. 843.768 ,38	4,79	77.437. 625.59 8,82	5,29	82.882. 829.200 ,10	5,29	422.73 0.936.9 72,10	
Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau					Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	974.99 9.818	4,84	4.359.0 72.000	4,73	4.772.0 00.000	4,62	5.538.2 00.000	4,51	6.132.0 20.000	4,41	6.765.2 22.000	4,41	28.541. 513.81 8	
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Keria	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	629.999. 818	70%	1.284.07 2.000	75%	1.342.00 0.000	75%	1.476.20 0.000	75%	1.623.82 0.000	80%	1.786.20 2.000	80%	8.142.29 3.818	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20%	20%	70.000.0 00	25%	2.475.00 0.000	25%	2.750.00 0.000	30%	3.314.00 0.000	30%	3.685.40 0.000	35%	4.073.94 0.000	35%	16.368.3 40.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	275.000. 000	100%	600.000. 000	100%	680.000. 000	100%	748.000. 000	100%	822.800. 000	100%	905.080. 000	100%	4.030.88 0.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Menurunnya Angka Kemiskinan				Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	54.593. 422.10 6	5,07	61.389. 016.194	5,01	61.970. 128.28 7	4,95	68.813. 643.768	4,90	71.305. 605.59 9	4,84	76.117. 607.200	4,84	394.18 9.423.1 54	
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani		100%	1.160.00 0.000	100%	1.910.00 0.000	100%	1.625.00 0.000	100%	3.750.00 0.000	100%	1.500.00 0.000	100%	4.100.00 0.000	100%	14.045.0 00.000	Dinas Sosial
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial		100%	-	100%	3.754.00 0.000	100%	2.730.00 0.000	100%	2.730.00 0.000	100%	2.730.00 0.000	100%	2.730.00 0.000	100%	14.674.0 00.000	
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100%	-	100%	365.000. 000	100%	395.000. 000	100%	395.000. 000	100%	395.000. 000	100%	395.000. 000	100%	1.945.00 0.000	Dinas Sosial
2	1	3	Program Pemberdayaan Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD	50		80		100		120		150		160		160		Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Kampung
				Persentase LPM Berprestasi	TAD	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase PKK aktif	100	100	1.764.99 8.909	100	3.150.00 0.000	100	3.770.00 0.000	100	4.600.00 0.000	100	5.430.00 0.000	100	6.050.00 0.000	100	24.764.9 98.909	
				Persentase Posyandu aktif	26,4	26,4		100		100		100		100		100		100		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	10		15		20		25		30		35		35		
4	1	2	Program Pemerintahan Dan	Presentase menigkatnya Kinerja Penyelenggaraan	100%	100%	1.145.00 0.000	100%	2.453.80 0.000	100%	2.500.00 0.000	100%	2.500.00 0.000	100%	2.500.00 0.000	100%	2.500.00 0.000	100%	13.598.8 00.000	Bagian Tata Pemerintaha n

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Daerah kab. Berau																	
				Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100%	100%	29.530.0 00.000	100%	30.650.0 00.000	100%	30.150.0 00.000	100%	32.450.0 00.000	100%	34.522.0 00.000	100%	34.796.0 00.000	100%	192.098. 000.000	Bagian Kesra	
				Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.	-	87%	900.000. 000	90%	1.690.00 0.000	92%	1.913.00 0.000	95%	2.099.30 0.000	97%	2.329.23 0.000	98%	2.523.15 3.000	98%	11.454.6 83.000	Bagian Hukum dan Perundangu ndagan	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	20.093.4 23.197	100%	17.416.2 16.194	100%	18.887.1 28.287	100%	20.289.3 43.768	100%	21.899.3 75.599	100%	23.023.4 54.200	100%	121.608. 941.245	Kecamatan	
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan				PDRB Per Kapita (Juta Rp)	148,90	151,45	18.919. 177.86 6,00	154,04	93.450. 818.000 ,00	156,67	59.223. 200.00 0,00	159,35	66.835. 000.000 ,00	162,08	65.791. 950.00 0,00	164,85	72.868. 145.000 ,00	164,85	377.08 8.290.8 66,00		
Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)				Presentase Usaha mikro dan kecil	24%	0%	1.760.0 00.000	6%	1.760.0 00.000	3%	2.100.0 00.000	2%	2.460.0 00.000	2%	2.820.0 00.000	3%	3.140.0 00.000	40%	14.040. 000.00 0		
2	1	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45%	0%	960.000. 000	5%	550.000. 000	5%	590.000. 000	5%	630.000. 000	5%	670.000. 000	5%	710.000. 000	70%	4.110.00 0.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan	
2	1	7	8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	5 UKM	120.000. 000	5 UKM	170.000. 000	10 UKM	200.000. 000	15 UKM	250.000. 000	20 UKM	300.000. 000	25 UKM	350.000. 000	25 UKM	1.390.00 0.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	3	0	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	80.000.0 00	120 SKA	100.000. 000	150 SKA	150.000. 000	180 SKA	200.000. 000	200 SKA	250.000. 000	220 SKA	260.000. 000	1220 SKA	1.040.00 0.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	3	0	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	250.000. 000	3 Pasar	400.000. 000	3 Pasar	450.000. 000	4 Pasar	500.000. 000	4 Pasar	550.000. 000	4 Pasar	600.000. 000	4 pasar	2.750.00 0.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	3	0	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.0 00	12 Laporan	60.000.0 00	12 Laporan	70.000.0 00	12 Laporan	80.000.0 00	12 Laporan	90.000.0 00	12 Laporan	100.000. 000	12 Laporan	450.000. 000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	3	0	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0	300.000. 000	0,2%	480.000. 000	0,2%	640.000. 000	0,2%	800.000. 000	0,2%	960.000. 000	0,2%	1.120.00 0.000	1%	4.300.00 0.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,97	3.143.5 74.986, 00	0,98	22.460. 160.000 ,00	0,99	18.035. 000.00 ,00	1,00	21.695. 000.000 ,00	-	23.500. 000.00 ,00	-	27.220. 000.000 ,00	1,03	116.05 3.734.9 86,00		
3	2	6	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari	15.295.1 60.000	3 Hari	11.035.0 00.000	4 Hari	12.845.0 00.000	4 Hari	13.300.0 00.000	4 Hari	16.020.0 00.000	4 Hari	70.513.7 36.012			
3	2	6	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinas i Wisata	7 Destinas i Wisata	7 Destinas i Wisata	7 Destinas i Wisata	7 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	8 Destinas i Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	2	6	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30 Orang	64.999.8 00	30 Orang	2.300.00 0.000	60 Orang	2.250.00 0.000	90 Orang	2.300.00 0.000	120 Orang	2.350.00 0.000	150 Orang	2.350.00 0.000	150 Orang	11.614.9 99.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	2	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	5 Event	719.999. 400	6 Event	2.665.00 0.000	7 Event	2.200.00 0.000	7 Event	3.500.00 0.000	7 Event	4.250.00 0.000	7 Event	4.950.00 0.000	7 Event	18.284.9 99.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Menigkatnya Produksi Sektor Primer				Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	12.865. 602.88 0,00	11,79	65.550. 658.000 ,00	11,86	35.293. 200.00 0,00	11,94	38.345. 000.000 ,00	12,01	34.871. 950.00 0,00	12,09	37.778. 145.000 ,00	12,09	224.70 4.555.8 80,00		
3	2	7	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.00 0	2.250.00 0	2.317.50 0	2.385.00 0	2.475.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	2.520.00 0	Dinas Perkebunan	
					Kelapa Dalam	3.483	4.071	5.571	6.871	8.371	9.471	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980		
					Kakao	788	900	1.200	1.400	1.595.00 0.000	1.700	1.754.50 0.000	1.929.95 0.000	1.929.95 0.000	1.950	2.100	2.122.94 5.000	2.100	9.556.38 1.174		
					Karet	82	185	205	255		300				400	515		515			
					Lada	827	919	1.019	1.219		1.340				1.455	1.500		1.500			
3	2	7	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Luas Kebun yang dikembangkan	50	119.996. 760	60	1.675.00 0.000	100	1.700.00 0.000	100	1.750.00 0.000	100	2.075.00 0.000	100	2.175.00 0.000	100	9.494.99 6.760	Dinas Perkebunan	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Prasarana Pertanian																	
3	2 7	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	306.283. 916	6000	2.030.00 0.000	7500	2.460.00 0.000	10000	2.525.00 0.000	12500	2.580.00 0.000	15000	2.655.00 0.000	15000	12.556.2 83.916	Dinas Perkebunan
3	2 7	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	174.991. 800	15	450.000. 000	20	550.000. 000	20	550.000. 000	25	650.000. 000	25	650.000. 000	130	3.024.99 1.800	Dinas Perkebunan
3	2 7	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelomp ok Tani	10 Kelomp ok Tani	378.714. 800	10 Kelomp ok Tani	1.150.00 0.000	10 Kelomp ok Tani	1.255.00 0.000	10 Kelomp ok Tani	1.275.00 0.000	10 Kelomp ok Tani	1.280.00 0.000	10 Kelomp ok Tani	1.285.00 0.000	60 Kelomp ok Tani	6.623.71 4.800	Dinas Perkebunan
3	2 7	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	2.789.89 8.494	3,15	22.124.5 00.000	3,26	9.945.00 0.000	3,37	10.920.0 00.000	3,49	12.120.0 00.000	3,62	13.332.0 00.000	3,62	71.231.3 98.494	Dinas Pertanian dan Pternakan
				Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65		5,75		5,85		5,95		6		6		
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62		3,77		3,9		4,02		4,17		4,25		4,25		
				Produksi Daging Sapi	470	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		484,28		
				Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		2093,17		
3	2 7	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973. 232	300	7.645.00 0.000	400	2.145.00 0.000	450	2.393.00 0.000	550	2.675.00 0.000	550	2.942.50 0.000	550	18.600.4 73.232	Dinas Pertanian dan Pternakan
3	2 7	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	199.999. 800	2535	2.788.90 0.000	3305	1.998.20 0.000	4000	2.477.50 0.000	4700	2.942.00 0.000	5000	3.236.20 0.000	5000	13.642.7 99.800	Dinas Pertanian dan Pternakan
3	2 7	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi	33	273.876. 200	33	1.125.00 0.000	40	1.400.00 0.000	42	1.525.00 0.000	44	1.675.00 0.000	45	1.842.50 0.000	45	7.841.37 6.200	Dinas Pertanian dan Pternakan	
3	2 7	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875. 088	85	2.230.00 0.000	86	2.020.00 0.000	87	2.750.00 0.000	88	1.420.00 0.000	89	1.562.00 0.000	89	10.578.8 75.088	Dinas Pertanian dan Pternakan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	2	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,9 8 ton	23.399,7 4 ton	5.267.22 1.788	24.101,3 ton	17.942.2 58.000	24.824,7 8 ton	7.425.00 0.000	25569,5 3	7.275.00 0.000	26336,6 1	2.275.00 0.000	27126,7 1	2.675.00 0.000	27126,7 1	42.859.4 79.788	Dinas Perikanan
3	2	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya		2.379.90 ton	1.253.78 4.828	2.403,7 ton	3.410.00 0.000	2.427,74 ton	1.600.00 0.000	2,452.01 ton	1.650.00 0.000	2.476,53 ton	1.750.00 0.000	2,501.30 ton	1.800.00 0.000	2,501.30 ton	11.463.7 84.828	Dinas Perikanan
3	2	5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				4,486.31 ton	1.530.00 0.000	4,620.90 ton	1.200.00 0.000	4,759.53 ton	1.500.00 0.000	4,902.32 ton	1.500.00 0.000	5,049.39 ton	1.500.00 0.000	5,049.39 ton	7.230.00 0.000	Dinas Perikanan
Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan				Score Pola Pangan Harapan	78,05	78,05	1.150.0 00.000, 00	80,00	3.680.0 00.000, 00	82,00	3.795.0 00.000, 00	83,00	4.335.0 00.000, 00	84,10	4.600.0 00.000, 00	85,10	4.730.0 00.000, 00	85,10	22.290. 000.00 0,00	
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26.694 ton	20.000 ton	50.000.0 00	20.500 ton	830.000. 000	21.000 ton	950.000. 000	21.500 ton	1.030.00 0.000	22.000 ton	1.100.00 0.000	22.500 ton	1.000.00 0.000	22.500 ton	4.960.00 0.000	Dinas Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	78,05	950.000. 000	80,00	2.350.00 0.000	82,00	2.320.00 0.000	83,00	2.680.00 0.000	84,10	2.850.00 0.000	86,00	3.080.00 0.000	86,00	14.230.0 00.000	Dinas Pangan
				Persentase Penguatan cadangan pangan	50%	60%		80%		90%		100%		100%		100%				
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40, 15 %	45%	150.000. 000	50%	500.000. 000	60%	525.000. 000	60%	625.000. 000	60%	650.000. 000	60%	650.000. 000	60%	3.100.00 0.000	Dinas Pangan
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan							517.08 4.990.5 05,00		583.895 .030.54 0,00		648.64 5.000.2 63,20		801.403 .895.00 0,00		755.74 1.018.7 50,00		843.279 .934.06 119,20		4.150.0 49.869. 119,20	
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah				Indeks Gini	0,3000	0,3000	509.35 1.970.1 24,00	0,3000	575.841 .517.74 4,00	0,29	639.63 4.600.2 63,20	0,29	791.851 .770.00 0,00	0,29	745.38 5.932.5 00,00	0,28	832.860 .538.49 9,00	0,28	4.094.9 26.329. 130,20	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	469.89 2.970.1 24	66,50	511.067 .517.74 4	67,00	575.27 0.600.2 63	67,50	658.657 .520.00 0	68,00	675.30 4.520.0 00	68,50	751.106 .546.00 0	68,50	3.641.2 99.674. 131	
				Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20%		10,70%		11,20%		11,70%		12,70%		13,70%				
				Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	79,00		83,00		86,00		90,00		93,00		97,00				

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%		13,00%		21,00%		23,00%		25,00%		30,00%		30,00%			
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59		99,64		99,69		99,74		99,84		99,94					
				Rasio rumah layak huni	0,195	0,195		0,196		0,197		0,198		0,199		0,20		0,20			
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	44.177.000.000	13,09%	55.700.000.000	21,25%	61.600.000.000	22,97%	67.300.000.000	24,95%	72.500.000.000	29,76%	79.570.000.000	32,61%	380.847.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%	144.808.148.260	83%	150.140.454.840	86%	164.262.520.000	90%	172.462.520.000	93%	131.862.520.000	97%	167.862.846.000	97%	931.399.009.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71%	77%		80%		83%		87%		89%		94%		94%			
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,0%	15,0%	20.467.000.000	19,0%	13.100.000.000	37,0%	16.100.000.000	38,0%	16.100.000.000	39,0%	13.100.000.000	40,0%	22.100.000.000	40,0%	100.967.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 unit	71	43.400.000.000	78	54.350.000.000	85	64.350.000.000	92	74.350.000.000	99	84.350.000.000	106	94.350.000.000	106	415.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	Program Penyelenggaraa n Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	66	205.064.020.864	66,5	213.260.173.592	67	244.616.190.951	67,5	303.300.000.000	68	342.300.000.000	68,5	350.800.000.000	68,5	1.659.340.385.407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	75.000.000	0,196	1.650.000.000	0,197	2.050.000.000	0,198	1.900.000.000	0,199	4.500.000.000	0,200	6.900.000.000	0,20	17.075.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	85%	2.366.801.000	88%	1.950.000.000	91%	1.175.000.000	93,86%	675.000.000	97%	675.000.000	100%	575.000.000	100%	7.416.801.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,14%	0,14%		0,11%		0,08%		0,05%		0,03%		0,00%		0,00%			

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	4	4		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,11%	90,35%	410.000. 000	90,90%	450.000. 000	91,17%	900.000. 000	91,45%	900.000. 000	91,72%	500.000. 000	91,72%	500.000. 000	91,72%	3.660.00 0.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1		4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	52,0	9.125.00 0.000	61,3	7.650.00 0.000	71,0	7.900.00 0.000	80,7	8.670.00 0.000	90,3	9.517.00 0.000	100,0	10.448.7 00.000	100,00	53.310.7 00.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2		1 0	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah			-	100%	12.816.8 89.312	100%	12.316.8 89.312	100%	13.000.0 00.000	100%	16.000.0 00.000	100%	18.000.0 00.000	100	72.133.7 78.624	Dinas Pertanahan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah					Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	39.459. 000.00 0,00	55,00	64.774. 000.000 ,00	60,00	64.364. 000.00 0,00	65,00	133.194 .250.00 0,00	70,00	70.081. 412.50 0,00	75,00	81.753. 992.499 ,00	75,00	453.62 6.654.9 99,00	
					Indeks SPBE	1,30	1,3		1,3		1,4		1,4		1,5		1,6		1,6		
2		1 5	2	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	11.429.0 00.000	55	17.299.0 00.000	60	14.474.0 00.000	65	16.501.0 00.000	70	24.301.0 00.000	75	32.101.0 00.000	75	116.105. 000.000	Dinas Perhubunga n
2		1 5	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	28.030.0 00.000	2	41.675.0 00.000	2	40.325.0 00.000	2	106.950. 000.000	2	37.050.0 00.000	2	40.755.0 00.000	12	294.785. 000.000	Dinas Perhubunga n
2		1 6	2	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE		1,3		1,3	5.800.00 0.000	1,4	9.565.00 0.000	1,4	9.743.25 0.000	1,5	8.730.41 2.500	1,6	8.897.99 2.499	1,6	42.736.6 54.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup					Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416.564	403.903	7.733.0 20.381, 00	391.466	8.053.5 12.796, 00	379.179	9.010.4 00.000, 00	366.998	9.552.1 25.000, 00	354.906	10.355. 086.25 0,00	342.901	10.419. 395.562 ,00	342.901	55.123. 539.98 9,00	
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	7.733.0 20.381	56,39	8.053.5 12.796	56,49	9.010.4 00.000	56,59	9.552.1 25.000	56,69	10.355. 086.25 0	56,79	10.419. 395.562	56,79	55.123. 539.98 9	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	85,87	85,97		86,07		86,17		86,37		86,47		86,47				
					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,78	89,79		89,79		89,80		89,80		89,81		89,81		89,81		
2	1 1	3		Program Pengendalian	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	514.506. 735	90%	994.999. 150	90%	1.071.70 0.000	90%	1.149.02 5.000	90%	1.236.88 6.250	90%	1.285.39 5.562	90%	6.252.51 2.697	Dinas Lingkungan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																Hidup dan Kebersihan	
2	1	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38	90%	74.993.0 00	90%	74.993.0 00	90%	78.700.0 00	90%	82.600.0 00	90%	86.700.0 00	90%	91.000.0 00	90%	488.986. 000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah	97,58	90%	7.143.52 0.646	90%	6.983.52 0.646	90%	7.860.00 0.000	90%	8.320.50 0.000	90%	9.031.50 0.000	90%	9.043.00 0.000	90%	48.382.0 41.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel								325.32 5.606.7 84,00		358.809 .749.82 9,00		378.61 9.185.8 01,50		422.762 .077.75 3,25		508.33 3.093.7 63,40		524.963 .940.68 2,43		2.512.8 40.701. 516,95	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN					Indeks Reformasi Birokrasi		B	325.32 5.606.7 84,00	B	358.809 .749.82 9,00	A	378.61 9.185.8 01,50	A	422.762 .077.75 3,25	A	508.33 3.093.7 63,40	A	524.963 .940.68 2,43	A	2.512.8 40.701. 516,95	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah					Opini BPK	WTP	WTP	317.78 6.283.2 88	WTP	346.444 .589.36 4	WTP	355.28 8.045.1 94	WTP	400.084 .974.61 6	WTP	481.35 2.681.8 16	WTP	497.898 .879.91 7	WTP	2.398.8 55.454. 194	
					Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)		B (65)		B (67)		B (68)		BB (72)		BB (72)				
					Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	sangat tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi				
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	278.340. 781.180	WTP	289.932. 000.000	WTP	291.022. 000.000	WTP	325.624. 950.943	WTP	393.053. 541.132	WTP	393.294. 849.358	WTP	1.971.26 8.122.61 3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu							
				Persentase SILPA terhadap APBD	25,93	21,04		20		20		19		19							
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%	1.244.34 0.488	100%	4.145.34 2.300	100%	4.345.34 2.300	100%	4.545.34 2.300	100%	4.695.34 2.300	100%	4.845.34 2.300	100%	23.821.0 51.988	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	85%		90%		95%		100%		100%							
				Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%					

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Aset yang termanfaatkan	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%		Badan Pendapatan Daerah
				Presentase penghapusan aset	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%		
				Kontribusi PAD dalam APBD	10.01%	10,50%	2.865.19 0.548	10,50%	3.724.72 4.712	11%	4.842.17 2.026	11%	6.294.82 3.634	11,5%	8.183.27 0.724	12%	10.638.2 51.941	12%	36.548.4 33.585	
			Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	2.865.19 0.548	100%	3.724.72 4.712	100%	4.842.17 2.026	100%	6.294.82 3.634	100%	8.183.27 0.724	100%	10.638.2 51.941	100%	36.548.4 33.585		
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah	-	1.902.84 0.108.00 0	1.952.00 0.000	1.882.32 8.900.00 0	2.147.20 0.000	1.931.12 9.900.00 0	2.361.92 0.000	2.155.12 9.900.00 0	2.598.11 2.000	2.284.62 9.900.00 0	2.857.92 3.200	2.322.12 9.900.00 0	3.143.71 5.520	2.322.12 9.900.00 0	15.060.8 70.720	Badan Pendapatan Daerah
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100%	100%	2.649.99 9.770	100%	1.920.00 0.000	100%	1.920.00 0.000	100%	1.920.00 0.000	100%	1.920.00 0.000	100%	1.920.00 0.000	100%	12.249.9 99.770	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembang an
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	2.509.99 8.988	100%	3.129.50 0.000	100%	3.129.50 0.000	100%	3.129.50 0.000	100%	3.129.50 0.000	100%	3.129.50 0.000	100%	18.157.4 98.988	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembang an
6	1	2	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	2.063.15 6.500	80%	5.821.29 0.140	80%	7.567.67 7.182	85%	9.837.98 0.337	85%	12.789.3 74.438	85%	16.626.1 86.769	85%	54.705.6 65.365	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	1.944.17 7.850	80%	4.084.84 7.200	80%	5.310.30 1.360	80%	6.903.39 1.768	85%	8.974.40 9.298	85%	11.666.7 32.088	85%	38.883.8 59.564	Inspektorat
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100	19.801.4 49.316	100	25.664.9 60.300	100	27.546.9 60.300	100	30.236.0 50.000	100	34.566.0 50.000	100	38.696.0 50.000	100	176.511. 519.916	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum		80%	1.470.00 0.000				-		-		-		-	1.470.00 0.000	Sekretariat daerah	
2	1 3	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	50	79.998.1 00	65	2.150.00 0.000	70	2.400.00 0.000	75	2.700.00 0.000	80	3.000.00 0.000	90	3.300.00 0.000	90	13.629.9 98.100	Dinas Pemberdaya an Masvarakat

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir Kinerja					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
																				dan Kampung					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah				Indek Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	7.539.323.496	A (90,12)	12.365.160.465	A (92,16)	23.331.140.608	A (94,06)	22.677.103.138	A (96,26)	26.980.411.947	A (98)	27.065.060.766	A (98)	113.985.247.323						
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN		10	4.114.963.912	12	1.978.596.500	15	9.276.777.206	18	9.004.819.900	20	10.053.888.240	25	10.058.888.240	25	44.487.933.998	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan					
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM				993 Orang	5.614.506.000	993 Orang	6.175.956.600	1000 orang	6.793.552.260	1000 orang	7.472.907.486	1000 orang	8.220.198.235	5979 Orang	34.277.120.581	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan					
7	1	2	Program Penyelenggara an Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan			207.000.000		105.400.000		421.395.040		430.445.040		488.800.040		505.074.540		1.683.104.160	Kecamatan					
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	557.373.000	100%	676.657.965	100%	1.167.011.762	100%	988.285.938	100%	1.114.816.181	100%	1.130.899.751	100%	137.102.000	Kecamatan					
2	1	3	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri	800%	9	2.659.986.584	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
					Persentase desa maju	3100%	41		50												54	58	62	71	71
					Persentase desa berkembang	600%	49		40												35	30	25	15	15
					Persentase desa tertinggal	100%	1		0												0	0	0	0	0
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI								1.318.402.825.478		1.646.459.584.275		1.797.748.756.633		2.498.918.991.424		2.095.449.325.621		2.254.218.097.289		11.424.471.691.024					

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan membahas seluruh program yang dirumuskan selama periode 2021-2026 beserta indikator kinerja, kerangka pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang diperinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Selengkapnya mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut:

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026**

Kapabilitas Riil/Belanja	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH						
BELANJA DAERAH	1.851.971.934.755	1.894.346.374.809	2.189.803.698.000	2.432.597.000.000	2.578.097.000.000	2.625.097.000.000
Belanja Operasi	1.160.793.058.634	1.152.071.635.199	1.331.757.887.928	1.479.415.824.285	1.567.903.560.821	1.596.487.228.293
- Belanja pegawai	587.400.924.947	567.211.658.839	655.678.499.239	728.376.498.620	771.942.605.357	786.015.505.814
- Belanja barang dan jasa	516.746.505.116	527.081.435.218	609.289.246.854	676.843.862.937	717.327.667.718	730.404.910.499
- Belanja hibah	55.049.628.571	56.150.621.142	64.908.318.488	72.104.993.234	76.417.781.795	77.810.916.244
- Belanja bantuan sosial	1.596.000.000	1.627.920.000	1.881.823.347	2.090.469.494	2.215.505.952	2.255.895.735
Belanja Modal	418.387.539.625	426.755.290.418	493.315.438.784	548.011.521.552	580.789.526.452	591.377.610.509
Belanja Tidak Terduga	23.991.641.496	61.743.760.292	71.373.808.092	79.287.340.506	84.029.724.075	85.561.628.046
Belanja Transfer	248.799.695.000	253.775.688.900	293.356.563.195	325.882.313.657	345.374.188.652	351.670.533.152
- Belanja bagi hasil	7.562.000.000	7.713.240.000	8.916.258.241	9.904.843.556	10.497.278.200	10.688.648.841
- Belanja bantuan keuangan	241.237.695.000	246.062.448.900	284.440.304.955	315.977.470.101	334.876.910.452	340.981.884.311

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	713.590.59 2.875	100%	886.482.14 0.214	100%	946.930.42 3.132	100%	1.002.888.6 21.080	100%	1.216.295.5 45.125	100%	1.291.382.1 81.714	100%	6.057.569.5 04.141	Semua SKPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							899.685.06 6.439		1.108.541.5 65.144		1.242.580.4 53.233		1.816.293.6 94.902		1.383.725.8 07.509		1.504.650.3 59.346		7.774.724.0 09.973	
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				136.318.86 7.889		195.025.90 4.218		268.343.51 3.138		270.762.89 2.650		270.036.41 3.238		284.514.20 5.416		1.425.001.7 96.550	
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	76,17	134.078.73 6.589,00	77,22	190.810.32 3.018,00	78,28	263.501.01 3.138,00	79,35	265.605.76 7.650,00	80,44	264.234.33 1.988,20	81,54	278.570.83 5.103,97	81,54	1.396.801.0 07.487,17	Dinas Pendidikan
				Angka partisipasi kasar SD/MI	104,29	105,33		106,39		107,45		108,52		109,61		110,71				
				Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95,82	96,78		97,75		98,72		99,71		100,00		100,00		100		
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,79	96,18		96,58		96,97		97,37		97,77		98,17		98,17		
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76,53	78,37		80,25		82,18		84,15		86,17		88,24		88,24		
				Angka partisipasi sekolah SD/MI	100,34	101,34		102,36		103,38		104,41		105,46		106,51		106,51		
				Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91,85	92,77		93,70		94,63		95,58		96,54		97,50		97,50		
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01		0		0		0		0		0,00		0,00		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02		0,01		0		0		0		0,00		0,00		
				Angka Kelulusan	-	-		-		-		-		-		-		-		
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100		100		100		100		100		100,00		100		
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100		100		100		100		100		100,00		100		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105,59	100,00		100,00		100		100		100		100		100		
				Angka melek huruf	99,42	99,46		99,49		99,53		99,56		99,6		99,64		99,64		
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		87,11		87,11		
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata Standar Nilai Pendidikan (SNP)	5,59	5,64	-	5,7	-	5,76	400.000.000,00	5,81	440.000.000,00	5,87	484.000.000,00	5,93	532.400.000,00	5,93	1.856.400.000,00	Dinas Pendidikan
				Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	4,01	5		5,05		5,10		5,15		5,20		5,26		5,26		
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-		-		-		-		-		-		-		
				PAUD	33,13	33,46		33,80		34,13		34,48		34,82		35,17		35,17		
				SD	76,36	77,12		77,89		78,67		79,46		80,26		81,06		81,06		
				SMP	94,38	95,32		96,28		97,24		98,21		99,19		100,00		100		
				Rasio murid/guru SD Negeri	15	15	2.240.131.300,00	15	4.215.581.200,00	15	4.347.500.000,00	15	4.560.125.000,00	15	4.783.381.250,00	15,00	5.017.800.312,50	15,00	25.164.519.062,50	Dinas Pendidikan
				Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		
				Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		
				Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	-		-		-		-		-		-		-		
1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	77.000.000,00	-	84.700.000,00	-	93.170.000,00	-	324.870.000,00	Dinas Pendidikan
				SD	0,54	0,54		0,54		0,54		0,54		0,54		0,54		0,54		
				SMP	0,45	0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Presentase usulan yang disetujui terhadap jumlah usulan perizinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1	1	6	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah bahan, modul, dan	-	-		-	-	25.000.000,00	1	80.000.000,00	1	450.000.000,00	1	300.000.000,00	1	855.000.000,00	Dinas Pendidikan	
				model pembelajaran bahasa dan sastra	-	-		-	-		-		-		-		-			
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			172.211.717.396		246.709.031.400		263.459.277.940		738.758.685.928		281.992.068.314		295.721.271.377		1.818.099.115.755		
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80		7,80		7,80		7,80		7,80		7,80		7,80	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,00	22,00		20,00		19,00		18,00		18,00		18,00		18,00		
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	10,00		10,00		9,00		8,00		8,00		7,00		7,00		
				Angka kematian anak balita	15,00	17,00		16,00		15,00		15,00		15,00		15,00				
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30,00	60,00	166.362.353.500,00	80,00	233.911.501.400,00	90,00	248.861.162.940,00	95,00	723.210.957.928,00	98,00	265.698.795.314,00	100,00	278.719.908.877,00	100,00		1.736.011.743.359,00
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60,00	67,00		70,00		75,00		80,00		83,00		85,00		85,00		
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
				Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59,00	110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		110,00		85,00		
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
				presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,90	93,60		94,10		94,60		95,00		95,00		95,00		95,00		
				Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79,00	85,00		87,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49		0,48		0,47		0,46		0,45		0,85		0,85		
				Angka kejadian Malaria	0,00	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	1	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79,00	100,00	4.122.686.896,00	100,00	10.355.968.000,00	100,00	11.737.162.000,00	100,00	12.100.594.000,00	100,00	12.316.713.000,00	100,00	12.536.056.000,00	100,00	63.169.179.896,00	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00				
				Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103,00	110,00		120,00		125,00		135,00		140,00		145,00				
				Jumlah Tenaga Bidan	303,00	310,00		320,00		325,00		330,00		335,00		340,00				
				Jumlah Tenaga Perawat	584,00	600,00		615,00		630,00		645,00		660,00		675,00				
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100,00	100,00	936.677.000,00	100,00	1.166.562.000,00	100,00	1.476.453.000,00	100,00	1.831.184.000,00	100,00	2.297.015.000,00	100,00	2.914.807.000,00	100,00	10.622.698.000	Dinas Kesehatan
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00		73,00		76,00		80,00		82,00		85,00		85,00		
				Persentase I RTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	59,00	83,80	790.000.000,00	87,90	1.275.000.000,00	91,60	1.384.500.000,00	95,00	1.615.950.000,00	95,00	1.679.545.000,00	95,00	1.550.499.500,00		8.295.494.500,00	Dinas Kesehatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35,00		45,00		50,00		55,00		55,00		55,00		55,00		
				Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD dr. ABDUL RIVAI)				92.654.091.904		101.919.501.094		112.111.451.204		123.322.596.324		135.654.855.957		149.220.341.552		714.882.838.035	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100%	100%	92.157.271.804	100%	101.372.998.984	100%	111.510.298.883	100%	122.661.328.771	100%	134.927.461.648	100%	148.420.207.813	100%	711.049.567.904	RSUD dr. Abdul Rivai
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100%	100%	496.820.100	100%	546.502.110	100%	601.152.321	100%	661.267.553	100%	727.394.308	100%	800.133.739	100%	3.833.270.132	RSUD dr. Abdul Rivai
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				462.481.649.178		530.050.628.432		564.878.710.951		645.527.520.000		655.657.520.000		728.002.846.000		3.586.598.874.561	
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	44.177.000.000	13,09 %	55.700.000.000	21,25 %	61.600.000.000	22,97 %	67.300.000.000	24,95 %	72.500.000.000	29,76 %	79.570.000.000	32,61 %	380.847.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%	144.808.14 8.260	83%	150.140.45 4.840	86%	164.262.52 0.000	90%	172.462.52 0.000	93%	131.862.52 0.000	97%	167.862.84 6.000	97%	931.399.00 9.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71%	77%		80%		83%		87%		89%		94%		94%		
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,00%	0,00%	1.000.000.0 00	0,00%	24.500.000. 000	1,20%	1.000.000.0 00	2,41%	1.000.000.0 00	3,61%	1.000.000.0 00	4,82%	1.000.000.0 00	4,82%	29.500.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	0,00%	0,00%		0,00%		1,21%		2,41%		3,62%		4,83%				
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	capaian akses air limbah domestik layak	44,1%	44,6%	2.342.000.0 00	49,2%	11.900.000. 000	50,7%	3.900.000.0 00	52,1%	3.900.000.0 00	53,5%	3.900.000.0 00	54,9%	3.900.000.0 00	54,9%	29.842.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,0%	15,0%	20.467.000. 000	19,0%	13.100.000. 000	37,0%	16.100.000. 000	38,0%	16.100.000. 000	39,0%	13.100.000. 000	40,0%	22.100.000. 000	40,0%	100.967.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 unit	71	43.400.000. 000	78	54.350.000. 000	85	64.350.000. 000	92	74.350.000. 000	99	84.350.000. 000	106	94.350.000. 000	106	415.150.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	66	205.064.02 0.864	66,5	213.260.17 3.592	67	244.616.19 0.951	67,5	303.300.00 0.000	68	342.300.00 0.000	68,5	350.800.00 0.000	68,5	1.659.340.3 85.407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
1	3	1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	0	0,11	300.000.000	0,16	1.800.000.000	0,21	2.200.000.000	0,26	2.200.000.000	0,31	2.200.000.000	0,36	2.200.000.000	0,36	10.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	1 2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Belum Tersedia		923.480.054	30,0%		31,0%	6.850.000.000	33,0%	4.915.000.000	38,0%	4.445.000.000	45,0%	6.220.000.000	45%	28.653.480.054	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
				Ruang publik yang berubah peruntukannya	Belum Tersedia			20,0%		20,0%				19,0%				18,0%				17,0%		17%
				Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Belum Tersedia	0,7848		78,5%	5.300.000.000	78,5%		78,5%		4.915.000.000		78,5%		4.445.000.000			78,5%	6.220.000.000	78%	
				Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedia			30,0%	31,0%	35,0%		40,0%		45,0%		45%								
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.976.801.000		11.700.000.000		12.025.000.000		12.295.000.000		15.342.000.000		18.573.700.000		81.912.501.000					
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	75.000.000	0,196	1.650.000.000	0,197	2.050.000.000	0,198	1.900.000.000	0,199	4.500.000.000	0,200	6.900.000.000	0,20	17.075.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	4	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	85%	2.366.801.000	88%	1.950.000.000	91%	1.175.000.000	93,86%	675.000.000	97%	675.000.000	100%	575.000.000	100%	7.416.801.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,14%	0,14%		0,11%		0,08%		0,05%		0,03%		0%		0%						

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	4	4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,11%	90,35 %	410.000.000	90,9%	450.000.000	91,17 %	900.000.000	91,45 %	900.000.000	91,72 %	500.000.000	91,72 %	500.000.000	91,72 %	3.660.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	52,0	9.125.000.000	61,3	7.650.000.000	71,0	7.900.000.000	80,7	8.670.000.000	90,3	9.517.000.000	100,0	10.448.700.000	100,0	53.310.700.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan			-		-		-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	450.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22.381.939.072		15.205.000.000		15.495.000.000		17.634.500.000		18.900.450.000		19.815.495.000		109.432.384.072	
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	95%	95%	4.206.939.072	96%	7.450.000.000	97%	8.345.000.000	98%	9.909.500.000	99%	10.900.450.000	100%	12.140.495.000	100%	52.952.384.072	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan PERDA																		
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	100%	100%	16.075.000.000	100%	6.225.000.000	100%	4.825.000.000	100%	5.275.000.000	100%	5.425.000.000	100%	4.975.000.000	100%	42.800.000.000	Badan Penanggulangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
						(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)
				Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	gan Bencana Daerah
				Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1	5	4	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	2.100.000.000		100%	1.530.000.000		100%	2.325.000.000		100%	2.450.000.000		100%	2.575.000.000		
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.660.000.000		7.931.500.000		6.267.500.000		8.392.500.000		6.142.500.000		8.802.500.000		39.196.500.000		
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	80%	100%	1.160.000.000	100%	1.910.000.000	100%	1.625.000.000	100%	3.750.000.000	100%	1.500.000.000	100%	4.100.000.000	100%	14.045.000.000	Dinas Sosial	
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Presentase Kasus Migran Korban tindak kekerasan yang di pulangkan		100%	-	100%	100.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial	
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Sosial
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial		100%		100%	3.754.000.000		100%	2.730.000.000		100%	2.730.000.000		100%	2.730.000.000		100%	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
						(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		100%	-	100%	365.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	1.945.000.000	Dinas Sosial	
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	-	100%	1.302.500.000	100%	967.500.000	100%	967.500.000	100%	967.500.000	100%	1.027.500.000	100%	5.232.500.000	Dinas Sosial	
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan TMP dalam Kondisi baik		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	3.000.000.000	Dinas Sosial	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							46.584.125.621		102.365.125.210		112.439.864.155		120.205.693.172		144.166.976.795		141.195.700.177		1.077.847.485.128		
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				974.999.818		4.659.072.000		5.102.000.000		5.901.200.000		6.531.320.000		7.204.452.000		30.373.043.818		
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	100%			100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	1.831.530.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	629.999.818	70%	1.284.072.000	75%	1.342.000.000	75%	1.476.200.000	75%	1.623.820.000	80%	1.786.202.000	80%	8.142.293.818	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20%	20%	70.000.000	25%	2.475.000.000	25%	2.750.000.000	30%	3.314.000.000	30%	3.685.400.000	35%	4.073.940.000	35%	16.368.340.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	275.000.000	100%	600.000.000	100%	680.000.000	100%	748.000.000	100%	822.800.000	100%	905.080.000	100%	4.030.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.891.719.416		4.824.190.000		5.879.500.000		6.652.000.000		7.628.100.000		11.406.790.000	39.282.299.416		
2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1,70%	2,00%	903.499.700	2,30%	1.250.000.000	2,60%	1.350.000.000	2,90%	1.587.000.000	3,20%	1.868.100.000	3,50%	2.201.790.000	3,50%	9.160.389.700	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	13%	12%	1.242.672.522	11,00 %	650.000.000	10,00 %	775.000.000	9,00%	900.000.000	8,00%	1.025.000.000	7,00%	2.650.000.000		7.242.672.522	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Ratio KDRT	0,008%	0,007 %	205.348.044	0,005 %	864.190.000	0,003 %	1.149.500.000	0,002 %	1.275.000.000	0,002 %	1.510.000.000	0,002 %	2.995.000.000	0,002 %	7.999.038.044	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang mempunyai data gender dan anak	%	0%		6%	-	9%	200.000.000	11%	200.000.000	13%	200.000.000	15%	200.000.000	15%	800.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kampung/Kel Layak Anak	-	0	290.199.600	2%	560.000.000	3%	670.000.000	4%	775.000.000	5%	830.000.000	6%	885.000.000	6%	4.010.199.600	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kasus anak yang ditangani	67	65	249.999.550	63	1.500.000.000	61	1.735.000.000	59	1.915.000.000	57	2.195.000.000	55	2.475.000.000	55	10.069.999.550	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.375.000.000		4.830.000.000		4.670.000.000		5.220.000.000		5.500.000.000		5.680.000.000		27.275.000.000	
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26.694 ton	20.000 ton	50.000.000	20.500 ton	830.000.000	21.000 ton	950.000.000	21.500 ton	1.030.000.000	22.000 ton	1.100.000.000	22.500 ton	1.000.000.000	22.500 ton	4.960.000.000	Dinas Pangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	78,05	950.000.000	80,00	2.350.000.000	82,00	2.320.000.000	83,00	2.680.000.000	84,10	2.850.000.000	86,00	3.080.000.000	86,00	14.230.000.000	Dinas Pangan
				Persentase Penguatan cadangan pangan	50%	60%		80%		90%		100%		100%		100%		100%		
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40, 15 %	45%	150.000.000	50%	500.000.000	60%	525.000.000	60%	625.000.000	60%	650.000.000	60%	650.000.000	60%	3.100.000.000	Dinas Pangan
2	9	6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	260 sampel	52 sampel	225.000.000	52 sampel	1.150.000.000	52 sampel	875.000.000	52 sampel	885.000.000	52 sampel	900.000.000	52 sampel	950.000.000	260 sampel	4.985.000.000	Dinas Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.178.422.563		14.099.049.312		13.517.589.312		14.280.000.000		17.485.000.000		19.490.000.000		81.050.061.187	
			Program Pengelolaan Pendidikan				500.000.000											500.000.000	Dinas Pertanahan	
			Program Penataan Bangunan Gedung				953.422.763											953.422.763	Dinas Pertanahan	
			Program Penyelenggaraan Jalan				550.000.000											550.000.000	Dinas Pertanahan	
			Program Pengelolaan Izin Lokasi				74.999.800											74.999.800	Dinas Pertanahan	
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah		2 Sengketa	50.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	1.450.000.000	Dinas Pertanahan
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah			-	100%	12.816.889.312	100%	12.316.889.312	100%	13.000.000.000	100%	16.000.000.000	100%	18.000.000.000	100	72.133.778.624	Dinas Pertanahan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	10	6	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	cakupan pelaksanaan retribusi dan ganti rugi tanah		-	50 Bidang g	300.000.000	50 Bidang g	300.000.000	50 Bidang g	300.000.000	50 Bidang	300.000.000	50 Bidang g	300.000.000	250 bidang	1.500.000.000	Dinas Pertanahan	
2	10	9	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik	10 bidang	50.000.000	100%	357.160.000	100%	275.700.000	100%	280.000.000	100%	285.000.000	100%	290.000.000	100%	1.537.860.000	Dinas Pertanahan	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah			100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.350.000.000	Dinas Pertanahan	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			13.672.000.121		14.092.492.536		15.431.247.095		16.366.640.799		17.578.227.835		17.964.269.226		95.104.877.612		
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	2,38	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	315.000.000	90%	330.000.000	90%	345.000.000	90%	360.000.000	90%	1.950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	514.506.735	90%	994.999.150	90%	1.071.700.000	90%	1.149.025.000	90%	1.236.886.250	90%	1.285.395.562	90%	6.252.512.697	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	97,90	90%	4.889.125.740	90%	4.889.125.740	90%	5.133.500.000	90%	5.389.000.000	90%	5.658.000.000	90%	5.939.500.000	90%	31.898.251.480	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38	90%	74.993.000	90%	74.993.000	90%	78.700.000	90%	82.600.000	90%	86.700.000	90%	91.000.000	90%	488.986.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.	2,38	90%	179.999.900	90%	179.999.900	90%	189.000.000	90%	198.200.000	90%	208.110.000	90%	218.240.500	90%	1.173.550.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Tersedianya data dan informasi keberadaan MHA dan terlaksananya pemberdayaan serta penguatan kelembagaan MHA	-	90%	150.000.000	90%	200.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	350.000.000	90%	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	2,38	90%	194.875.600	90%	194.875.600	90%	204.619.670	90%	214.652.003	90%	225.234.600	90%	235.996.330	90%	1.270.253.803	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	90%	150.000.000	90%	200.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	350.000.000	90%	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat	2,38	90%	74.978.500	90%	74.978.500	90%	78.727.425	90%	82.663.796	90%	86.796.985	90%	91.136.834	90%	489.282.040	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah	97,58	90%	7.143.520.646	90%	6.983.520.646	90%	7.860.000.000	90%	8.320.500.000	90%	9.031.500.000	90%	9.043.000.000	90%	48.382.041.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				956.711.500		1.890.766.500		2.079.843.150		2.287.827.465		2.516.610.212		2.768.271.233		12.500.030.059	
2	1	2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,22%	100%	341.764.450	100%	584.352.000	100%	642.787.200	100%	707.065.920	100%	777.772.512	100%	855.549.763	100%	3.909.291.845	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	92,41%	100%	173.433.650	100%	600.000.000	100%	660.000.000	100%	726.000.000	100%	798.600.000	100%	878.460.000	100%	3.836.493.650	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan	ADA	ADA	399.315.500	ADA	561.284.500	ADA	617.412.950	ADA	679.154.245	ADA	747.069.670	ADA	821.776.636	ADA	3.826.013.501	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan (ADA/TIDAK)	ADA	ADA	42.197.900	ADA	145.130.000	ADA	159.643.000	ADA	175.607.300	ADA	193.168.030	ADA	212.484.833	ADA	928.231.063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.554.983.193		9.700.000.000		13.000.000.000		13.430.000.000		17.040.000.000		17.300.000.000		75.024.983.193	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	1 3	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	50	79.998.100	65	2.150.000.000	70	2.400.000.000	75	2.700.000.000	80	3.000.000.000	90	3.300.000.000	90	13.629.998.100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung
2	1 3	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar Desa/Kampung	4	6	49.999.600	15	410.000.000	17	540.000.000	20	670.000.000	23	760.000.000	26	800.000.000	26	3.229.999.600	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung
2	1 3	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri	800%	9	2.659.986.584	10	3.990.000.000	11	6.290.000.000	12	5.460.000.000	13	7.850.000.000	14	7.150.000.000	14	33.399.986.584	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung
				Persentase desa maju	3100%	41		50		54		58		62		71		71		
				Persentase desa berkembang	600%	49		40		35		30		25		15		15		
				Persentase desa tertinggal	100%	1		0		0		0		0		0		0		
2	1 3	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD	50	1.764.998.909	80	3.150.000.000	100	3.770.000.000	120	4.600.000.000	150	5.430.000.000	160	6.050.000.000	160	24.764.998.909	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung
				Persentase LPM Berprestasi	TAD	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase PKK aktif	100	100		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Posyandu aktif	26,4	26,4		100		100		100		100		100		100		
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	10		15		20		25		30		35		35		
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.331.450.766		6.257.659.862		6.523.884.598		7.245.019.908		7.836.068.748		7.581.222.473		39.775.306.354	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,55	2,83	3.533.357.500	2,83	2.852.241.500	2,83	2.699.531.500	2,83	2.979.531.500	2,83	3.184.531.500	2,83	3.184.531.500	2,83	18.433.725.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaain Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	3	Program Keluarga Berencana (KB)	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	%	0	478.142.056	0,00%	2.503.957.362	0,00%	2.724.353.098	0,00%	2.946.488.408	0,00%	3.170.537.248	0,00%	2.703.690.973	74,87	14.527.169.144	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaain Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 1	19 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	319.951.210	17 per 1000 kelahiran	901.461.000	16 per 1000 kelahiran	1.100.000.000	15 per 1000 kelahiran	1.319.000.000	14 per 1000 kelahiran	1.481.000.000	13 per 1000 kelahiran	1.693.000.000	13 per 1000 kelahiran	6.814.412.210	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaain Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																410.890.000.000	
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	11.429.000.000	55	17.299.000.000	60	14.474.000.000	65	16.501.000.000	70	24.301.000.000	75	32.101.000.000	75	116.105.000.000	Dinas Perhubungan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	28.030.000.000	2	41.675.000.000	2	40.325.000.000	2	106.950.000.000	2	37.050.000.000	2	40.755.000.000	12	294.785.000.000	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		9.080.000.000		13.009.000.000		13.359.525.000		12.527.497.500		12.884.925.497		60.860.947.997	
2	16	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	75	75		75	3.280.000.000	80	3.444.000.000	85	3.616.275.000	90	3.797.085.000	95	3.986.932.998	100	18.124.292.998	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	1,30	1,3		1,3	5.800.000.000	1,4	9.565.000.000	1,4	9.743.250.000	1,5	8.730.412.500	1,6	8.897.992.499	1,6	42.736.654.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.240.000.000		1.140.000.000		1.360.000.000		1.570.000.000		1.780.000.000		2.010.000.000		9.100.000.000	
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	75 Kop	50 Kop	100.000.000	50 Kop	180.000.000	50 Kop	250.000.000	50 Kop	290.000.000	50 Kop	340.000.000	50 Kop	400.000.000	375 Kop	1.560.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	20%	0%	60.000.000	5%	100.000.000	5%	150.000.000	5%	200.000.000	5%	250.000.000	5%	300.000.000	45%	1.060.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	32 Koperasi	32 Koperasi	-	5 Koperasi	140.000.000	5 Koperasi	170.000.000	5 Koperasi	200.000.000	5 Koperasi	220.000.000	5 Koperasi	250.000.000	57 Koperasi	980.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45%	0%	960.000.000	5%	550.000.000	5%	590.000.000	5%	630.000.000	5%	670.000.000	5%	710.000.000	70%	4.110.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	5 UKM	120.000.000	5 UKM	170.000.000	10 UKM	200.000.000	15 UKM	250.000.000	20 UKM	300.000.000	25 UKM	350.000.000	25 UKM	1.390.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.962.100.000		2.728.310.000		5.582.050.000		3.309.755.000		5.979.755.000		3.709.000.000		23.270.970.000	
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	355 Investor	355 Invest or	150.000.000	360 Invest or	155.000.000	365 Invest or	160.000.000	370 Invest or	165.000.000	375 Investo r	170.000.000	380 Invest or	175.000.000	380 Invest or	975.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi di Dalam dan Luar Daerah Kabupaten	1 kali	1 kali	280.000.000	2 kali	655.000.000	3 kali	3.200.000.000	2 kali	750.000.000	3 kali	3.255.000.000	2 kali	765.000.000	2 kali	8.905.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,02 triliun rupiah	4,02 triliun rupiah	812.100.000	4,10 triliun rupiah	933.310.000	4,18 triliun rupiah	1.047.050.000	4,27 triliun rupiah	1.139.755.000	4,35 triliun rupiah	1.219.755.000	4,44 triliun rupiah	1.279.000.000	4,44 triliun rupiah	6.430.970.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase investor yang ber investasi	65%	65%	450.000.000	75%	615.000.000	80%	725.000.000	85%	780.000.000	90%	835.000.000	95%	940.000.000	95%	4.345.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	18	6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	50 data izin	50 data izin	270.000.000	55 data izin	370.000.000	58 data izin	450.000.000	60 data izin	475.000.000	62 data izin	500.000.000	65 data izin	550.000.000	65 data izin	2.615.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.554.999.862		14.592.500.000		14.489.750.000		16.551.725.000		25.938.047.500		15.568.352.250		96.695.374.612	
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	13 Organisasi	6 Organisasi	1.614.999.862	6 Organisasi	2.547.500.000	6 Organisasi	3.124.750.000	6 Organisasi	3.346.725.000	6 Organisasi	3.368.047.500	6 Organisasi	3.623.352.250	6 Organisasi	17.625.374.612	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	50 Orang	15 Orang	7.315.000.000	18 Orang	10.970.000.000	21 Orang	10.215.000.000	24 Orang	11.930.000.000	27 Orang	21.370.000.000	30 Orang	10.470.000.000	30 Orang	72.270.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Jumlah prestasi olahraga	9 Prestasi	9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi		9 Prestasi				
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	625.000.000	1 Organisasi	1.075.000.000	1 Organisasi	1.150.000.000	1 Organisasi	1.275.000.000	1 Organisasi	1.200.000.000	1 organisasi	1.475.000.000	6 organisasi	6.800.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-		1.550.000.000		1.627.500.000		1.708.875.000		1.794.318.750		1.884.034.686		8.564.728.436	
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik Sektoral	50	50		50	1.550.000.000	65	1.627.500.000	80	1.708.875.000	90	1.794.318.750	95	1.884.034.686	95	8.564.728.436	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-		1.550.000.000		1.612.500.000		1.628.125.000		1.697.031.250		1.769.382.812		8.257.039.062	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	20	20	25	1.550.000.000	30	1.612.500.000	35	1.628.125.000	40	1.697.031.250	45	1.769.382.812	45	8.257.039.062	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.631.798.900		3.335.000.000		3.865.000.000		5.350.000.000		6.300.000.000		7.200.000.000		27.681.798.900		
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	5 Event	719.999.400	6 Event	2.665.000.000	7 Event	2.200.000.000	7 Event	3.500.000.000	7 Event	4.250.000.000	7 Event	4.950.000.000	7 Event	18.284.999.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina	3 Kelompok Seni Budaya	3 Kelom pok Seni Budaya	69.799.900	-	-	3 Kelom pok Seni Budaya	250.000.000	4 Kelom pok Seni Budaya	300.000.000	4 Kelom pok Seni Budaya	350.000.000	5 Kelom pok Seni Budaya	400.000.000	5 Kelom pok Seni Budaya	1.369.799.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Situs BCB	3 Situs BCB	100.000.000	4 Situs BCB	200.000.000	4 Situs BCB	120.000.000	4 Situs BCB	150.000.000	4 Situs BCB	175.000.000	4 Situs BCB	200.000.000	4 Situs BCB	945.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Bangunan Bersejarah/Museum dan Keraton Yang Dikelola	2 Museum/ Keraton	3 Museum/ Keraton	741.999.600	4 Museum/ Keraton	470.000.000	4 Museum/ Keraton	1.295.000.000	4 Museum/ Keraton	1.400.000.000	4 Museum/ Keraton	1.525.000.000	4 Museum/ Keraton	1.650.000.000	4 Museum/ Keraton	7.081.999.600	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			909.980.632		7.031.085.000		3.455.000.000		3.930.000.000		4.435.000.000		4.965.000.000		24.726.065.632		
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Perpustakaan	35.000 pemustaka	35.000 pemustaka	909.980.632	35.000 pemustaka	7.031.085.000	40.000 pemustaka	3.255.000.000	45.000 Pemustaka	3.690.000.000	50.000 Pemustaka	4.155.000.000	55.000 Pemustaka	4.645.000.000	55.000 Pemustaka	23.686.065.632	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	2 3	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Presentase Pelestarian Naskah Kuno	na					70%	200.000.000	72%	240.000.000	74%	280.000.000	76%	320.000.000	78%	1.040.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				349.958.850		1.005.000.000		1.235.000.000		1.415.000.000		1.600.000.000		1.810.000.000		7.414.958.850	
2	2 4	2	Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	80%	80%	194.961.800	80%	670.000.000	80%	850.000.000	82%	950.000.000	82%	1.055.000.000	83%	1.160.000.000	83%	4.879.961.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4	3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase Cakupan perlindungan dan Penyelamatan Arsip	80%	80%	124.998.600	80%	235.000.000	81%	275.000.000	82%	335.000.000	83%	385.000.000	84%	450.000.000	84%	1.804.998.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 4	4	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Presentase Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	70%	70%	29.998.450	70%	100.000.000	72%	110.000.000	74%	130.000.000	76%	160.000.000	78%	200.000.000	78%	729.998.450	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							79.897.282.792		92.655.818.000		58.855.200.000		65.330.700.000		63.068.220.000		69.835.042.000		429.642.262.792	
3	2 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				6.521.006.616		23.482.258.000		10.825.000.000		10.825.000.000		5.925.000.000		6.375.000.000		63.953.264.616	
3	2 5	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,98 ton	23.399,74 ton	5.267.221.788	24.101,3 ton	17.942.258.000	24.824,78 ton	7.425.000.000	25569,53	7.275.000.000	26336,61	2.275.000.000	27126,71	2.675.000.000	27126,71	42.859.479.788	Dinas Perikanan
3	2 5	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	2259,99 ton	2.379,90 ton	1.253.784.828	2.403,7 ton	3.410.000.000	2.427,74 ton	1.600.000.000	2.452,01 ton	1.650.000.000	2.476,53 ton	1.750.000.000	2.501,30 ton	1.800.000.000	2.501,30 ton	11.463.784.828	Dinas Perikanan
3	2 5	5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Tingkat kepatuhan pelaku utama perikanan terhadap peraturan perikanan dalam melakukan keojatan perikanan		-	-	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Perikanan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	2	5	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			4.486.31 ton	1.530.000.000	4.620.90 ton	1.200.000.000	4.759.53 ton	1.500.000.000	4.902.32 ton	1.500.000.000	5.049.39 ton	1.500.000.000	5.049.39 ton	7.230.000.000	Dinas Perikanan	
3	2	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.423.575.586		19.795.160.000		15.835.000.000		18.195.000.000		19.250.000.000		22.270.000.000		97.768.735.586		
3	2	6	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	2.018.576.012	195.159 Orang	15.295.160.000	214.674 Orang	11.035.000.000	236.141 Orang	12.845.000.000	259.755 Orang	13.300.000.000	270.355 Orang	16.020.000.000	270.355 Orang	70.513.736.012	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari		4 Hari		4 Hari		4 Hari					
3	2	6	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	339.999.774	7 Destinasi Wisata	2.200.000.000	7 Destinasi Wisata	2.550.000.000	7 Destinasi Wisata	3.050.000.000	8 Destinasi Wisata	3.600.000.000	8 Destinasi Wisata	3.900.000.000	8 Destinasi Wisata	15.639.999.774	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	6	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30 Orang	64.999.800	30 Orang	2.300.000.000	60 Orang	2.250.000.000	90 Orang	2.300.000.000	120 Orang	2.350.000.000	150 Orang	2.350.000.000	150 Orang	11.614.999.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			7.787.700.590		44.718.400.000		27.478.200.000		30.540.000.000		32.126.950.000		34.861.145.000		177.512.395.590		
3	2	7	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000		2.250.000		2.317.500		2.385.000		2.475.000		2.520.000		2.520.000	9.556.381.174	Dinas Perkebunan
					Kelapa Dalam	3.483	4.071	703.986.174	5.571	1.450.000.000	6.871	1.595.000.000	8.371	1.754.500.000	9.471	1.929.950.000	9.980	2.122.945.000			
					Kakao	788	900		1.200		1.400		1.700		1.950		2.100				
					Karet	82	185		205		255		300		400		515				
					Lada	827	919		1.019		1.219		1.340		1.455		1.500				
3	2	7	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Kebun yang dikembangkan		50	119.996.760	60	1.675.000.000	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	2.075.000.000	100	2.175.000.000	100	9.494.996.760	Dinas Perkebunan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	2	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	306.283.916	6000	2.030.000.000	7500	2.460.000.000	10000	2.525.000.000	12500	2.580.000.000	15000	2.655.000.000	15000	12.556.283.916	Dinas Perkebunan
3	2	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	174.991.800	15	450.000.000	20	550.000.000	20	550.000.000	25	650.000.000	25	650.000.000	130	3.024.991.800	Dinas Perkebunan
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	378.714.800	10 Kelompok Tani	1.150.000.000	10 Kelompok Tani	1.255.000.000	10 Kelompok Tani	1.275.000.000	10 Kelompok Tani	1.280.000.000	10 Kelompok Tani	1.285.000.000	60 Kelompok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan
3	2	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	2.789.898.494	3,15	22.124.500.000	3,26	9.945.000.000	3,37	10.920.000.000	3,49	12.120.000.000	3,62	13.332.000.000	3,62	71.231.398.494	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65		5,75		5,85		5,95		6		6		
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62		3,77		3,9		4,02		4,17		4,25		4,25		
				Produksi Daging Sapi	470	472,35		474,71		477,09		479,47		481,87		484,28		484,28		
				Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1805,59		1859,76		1915,55		1973,02		2032,21		2093,17		2093,17		
3	2	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973.232	300	7.645.000.000	400	2.145.000.000	450	2.393.000.000	550	2.675.000.000	550	2.942.500.000	550	18.600.473.232	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9	8,5	1.443.104.326	9	2.050.000.000	9,5	2.410.000.000	10	2.620.000.000	10,5	2.780.000.000	11	3.058.000.000	11	14.361.104.326	Dinas Pertanian dan Peternakan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
			Masyarakat Veteriner	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	-	0,5		1		1,2		1,3		1,4		1,5		1,5		
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	199.999.800	2535	2.788.900.000	3305	1.998.200.000	4000	2.477.500.000	4700	2.942.000.000	5000	3.236.200.000	5000	13.642.799.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	273.876.200	33	1.125.000.000	40	1.400.000.000	42	1.525.000.000	44	1.675.000.000	45	1.842.500.000	45	7.841.376.200	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875.088	85	2.230.000.000	86	2.020.000.000	87	2.750.000.000	88	1.420.000.000	89	1.562.000.000	89	10.578.875.088	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.320.000.000		1.890.000.000		2.290.000.000		2.710.000.000		3.120.000.000		3.520.000.000		14.850.000.000	
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	80.000.000	120 SKA	100.000.000	150 SKA	150.000.000	180 SKA	200.000.000	200 SKA	250.000.000	220 SKA	260.000.000	1220 SKA	1.040.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	250.000.000	3 Pasar	400.000.000	3 Pasar	450.000.000	4 Pasar	500.000.000	4 Pasar	550.000.000	4 Pasar	600.000.000	4 pasar	2.750.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	0,2%	0	300.000.000	0,2%	480.000.000	0,2%	640.000.000	0,2%	800.000.000	0,2%	960.000.000	0,2%	1.120.000.000	1%	4.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan			110.000.000		220.000.000		310.000.000		410.000.000	0	490.000.000	0	600.000.000		2.140.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	30	6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang mendapatkan layanan Perlindungan Konsumen	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	530.000.000	60 Pelaku Usaha	630.000.000	80 pelaku usaha	670.000.000	100 Pelaku usaha	720.000.000	120 Pelaku usaha	780.000.000	140 pelaku Usaha	840.000.000	600 pelaku Usaha	4.170.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	450.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				910.000.000		1.100.000.000		1.440.000.000		1.980.000.000		1.520.000.000		1.660.000.000		8.610.000.000	
3	31	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata	100%	100%	690.000.000	100%	850.000.000	100%	1.170.000.000	100%	1.690.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.330.000.000	100%	6.940.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%	0%	220.000.000	5%	250.000.000	5%	270.000.000	5%	290.000.000	5%	310.000.000	5%	330.000.000	49%	1.670.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				60.935.000.000		1.670.000.000		987.000.000		1.080.700.000		1.126.270.000		1.148.897.000		66.947.867.000	
3	32	2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi			700.000.000	100%	1.500.000.000	100%	800.000.000	100%	875.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	5.675.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan			60.120.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	60.425.255.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan			115.000.000	100%	120.000.000	100%	132.000.000	100%	145.200.000	100%	159.720.000	100%	175.692.000	100%	847.612.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						88.405.422.348		107.702.420.500		115.745.224.341		127.511.938.147		141.246.119.204		153.464.376.816		733.972.201.356		
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				68.603.973.032		82.037.460.200		88.198.264.041		97.275.888.147		106.680.069.204		114.768.326.816		557.460.681.440	
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	100%	100%	1.145.000.000	100%	2.453.800.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	13.598.800.000	Bagian Tata Pemerintahan
				Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100%	100%	29.530.000.000	100%	30.650.000.000	100%	30.150.000.000	100%	32.450.000.000	100%	34.522.000.000	100%	34.796.000.000	100%	192.098.000.000	Bagian Kesra
				Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.	-	87%	900.000.000	90%	1.690.000.000	92%	1.913.000.000	95%	2.099.300.000	97%	2.329.230.000	98%	2.523.153.000	98%	11.454.683.000	Bagian Hukum dan Perundangn dagan
4	1	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Perekonomian		95%	545.000.000	95%	800.000.000	95%	850.000.000	95%	950.000.000	95%	1.100.000.000	95%	1.100.000.000	95%	5.345.000.000	Bagian Perekonomia n
				Persentase OPD yang melaporkan Program Pembancun.		95%	990.664.000	95%	1.090.672.000	95%	2.100.000.000	98%	2.300.000.000	98%	2.500.000.000	98%	2.500.000.000	98%	11.481.336.000	Bagian Pembanguna n

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase peningkatan proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan		80%	519.898.024	80%	620.000.000	85%	682.000.000	90%	750.200.000	90%	825.220.000	95%	907.742.000	95%	5.055.260.024	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	85%	95%	5.657.759.816	95%	7.587.988.200	95%	8.346.787.020	95%	9.181.465.722	95%	10.199.612.294	95%	11.109.573.524	95%	52.083.186.576	Bagian Umum dan Kepegawaian
				Persentase Tertatanya Administrasi Umum	100%	80%	735.000.000	85%	1.600.000.000	90%	1.820.000.000	95%	1.900.000.000	100%	1.970.000.000	100%	2.025.000.000	100%	9.196.500.000	Kantor Penghubung
				Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	27.845.651.192	100%	33.945.000.000	100%	38.016.477.021	100%	43.244.922.425	100%	48.764.006.910	100%	55.281.858.292	100%	247.097.915.840	Bagian Keuangan dan Aset
				Persentase OPD yang ditata sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan yang berlaku	100%	80%	735.000.000	85%	1.600.000.000	90%	1.820.000.000	95%	1.900.000.000	100%	1.970.000.000	100%	2.025.000.000	100%	10.050.000.000	Bagian Organisasi
4	2		SEKRETARIAT DPRD				19.801.449.316		25.664.960.300		27.546.960.300		30.236.050.000		34.566.050.000		38.696.050.000		176.511.519.916	
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100	19.801.449.316	100	25.664.960.300	100	27.546.960.300	100	30.236.050.000	100	34.566.050.000	100	38.696.050.000	100	176.511.519.916	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							297.612.465.072		318.866.894.224		330.617.440.158		369.073.954.671		442.600.746.806		453.323.380.473		2.212.094.881.404	
5	1		PERENCANAAN				5.159.998.758		5.049.500.000		5.049.500.000		5.049.500.000		5.049.500.000		5.049.500.000		30.407.498.758	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100%	100%	2.649.999.770	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	1.920.000.000	100%	12.249.999.770	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	2.509.998.988	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	18.157.498.988	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	2		KEUANGAN				287.267.502.764		303.673.991.724		307.413.606.352		345.358.052.511		416.973.348.080		422.560.411.060		2.083.246.912.491	
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	278.340.781.180	WTP	289.932.000.000	WTP	291.022.000.000	WTP	325.624.950.943	WTP	393.053.541.132	WTP	393.294.849.358	WTP	1.971.268.122.613	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu				
				Persentase SILPA terhadap APBD	25,93	21,04		20		20		19		19		18		18		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%	1.244.340.488	100%	4.145.342.300	100%	4.345.342.300	100%	4.545.342.300	100%	4.695.342.300	100%	4.845.342.300	100%	23.821.051.988	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		100%		
				Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%		
				Presentase Aset yang memanfaatkan	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%		
				Presentase penghapusan aset	65%	70%		75%		80%		85%		95%		100%		100%		
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD dalam APBD	10.01%	10,50 %	2.865.190.548	10,50 %	3.724.724.712	11%	4.842.172.026	11%	6.294.823.634	11,5%	8.183.270.724	12%	10.638.251.941	12%	36.548.433.585	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	2.865.190.548	100%	3.724.724.712	100%	4.842.172.026	100%	6.294.823.634	100%	8.183.270.724	100%	10.638.251.941	100%	36.548.433.585	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah	-	1.902.840.108.000	1.952.000.000	1.882.328.900.000	2.147.200.000	1.931.129.900.000	2.361.920.000	2.155.129.900.000	2.598.112.000	2.284.629.900.000	2.857.923.200	2.322.129.900.000	3.143.715.520	2.322.129.900.000	15.060.870.720	Badan Pendapatan Daerah
5	3		KEPEGAWAIAN				4.114.963.912		3.491.596.500		10.941.077.206		10.835.549.900		12.067.691.240		12.274.071.540		53.724.950.298	
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	10	10	4.114.963.912	12	1.978.596.500	15	9.276.777.206	18	9.004.819.900	20	10.053.888.240	25	10.058.888.240	25	44.487.933.998	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	10	10		12	1.513.000.000	15	1.664.300.000	18	1.830.730.000	20	2.013.803.000	25	2.215.183.300	25	9.237.016.300	Sekretariat KORPRI
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				-		5.614.506.000		6.175.956.600		6.793.552.260		7.472.907.486		8.220.198.235		34.277.120.581	
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM				993 Orang	5.614.506.000	993 Orang	6.175.956.600	1000 orang	6.793.552.260	1000 orang	7.472.907.486	1000 orang	8.220.198.235	5979 Orang	34.277.120.581	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.069.999.638		1.037.300.000		1.037.300.000		1.037.300.000		1.037.300.000		5.219.199.638		10.438.399.276	
5	5	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan	100	100	1.069.999.638	100	1.037.300.000	100	1.037.300.000	100	1.037.300.000	100	1.037.300.000	100	5.219.199.638		10.438.399.276	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							4.007.334.350		9.906.137.340		12.877.978.542		16.741.372.105		21.763.783.736		28.292.918.857		93.589.524.929	
6	1		INSPEKTORAT DAERAH				4.007.334.350		9.906.137.340		12.877.978.542		16.741.372.105		21.763.783.736		28.292.918.857		93.589.524.929	
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	2.063.156.500	80%	5.821.290.140	80%	7.567.677.182	85%	9.837.980.337	85%	12.789.374.438	85%	16.626.186.769	85%	54.705.665.365	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	1.944.177.850	80%	4.084.847.200	80%	5.310.301.360	80%	6.903.391.768	85%	8.974.409.298	85%	11.666.732.088	85%	38.883.859.564	Inspektorat

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
UNSUR KEWILAYAHAN						24.127.775.797		21.674.916.389		24.168.245.041		25.511.344.194		27.497.654.913		28.802.066.761		149.880.118.436		
7	1		KECAMATAN TELUK BAYUR				3.655.000.000		4.350.472.000		4.723.463.200		5.095.053.520		5.468.602.872		5.917.807.159		29.210.398.751	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Opublik	100%			100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	250.000.000	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pembedayaan Masyarkaak Desa dan Kelurahan	100%	100%	2.731.400.000	100%	3.359.912.000	100%	3.695.903.200	100%	4.065.493.520	100%	4.472.042.872	100%	4.919.247.159	100%	23.243.998.751	Kecamatan Teluk Bayur
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	810.000.000	100%	810.000.000	100%	810.000.000	100%	810.000.000	100%	810.000.000	100%	810.000.000	100%	4.860.000.000	Kecamatan Teluk Bayur
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	20.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	420.000.000	Kecamatan Teluk Bayur
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	93.600.000	100%	100.560.000	100%	137.560.000	100%	139.560.000	100%	106.560.000	100%	108.560.000	100%	686.400.000	Kecamatan Teluk Bayur
7	1		KECAMATAN TANJUNG REDEB				8.124.993.425		7.436.500.000		8.291.650.000		9.060.815.000		9.995.896.500		11.014.486.150		53.924.341.075	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pembedayaan Masyarkaak Desa dan Kelurahan	100%	100%	8.104.997.625	100%	6.875.000.000	100%	7.562.500.000	100%	8.318.750.000	100%	9.150.625.000	100%	10.065.687.500	100%	50.077.560.125	Kecamatan Tanjung Redeb
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	-	100%	525.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	3.575.000.000	Kecamatan Tanjung Redeb

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	9.996.600	100%	10.000.000	100%	50.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	99.996.600	Kecamatan Tanjung Redeb
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	9.999.200	100%	26.500.000	100%	29.150.000	100%	32.065.000	100%	35.271.500	100%	38.798.650	100%	171.784.350	Kecamatan Tanjung Redeb
7	1		KECAMATAN TALISAYAN				2.256.398.000		673.000.000		740.300.000		957.398.000		1.097.488.630		605.033.379		6.227.494.009	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Kampun/Kelurahan yang terbina di Kecamatan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	48.400.000	100%	53.724.000	100%	102.124.000	Kecamatan Talisayan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	1.702.798.000	100%	538.000.000	100%	591.800.000	100%	656.898.000	100%	729.156.780	100%	196.185.026	100%	4.414.837.806	Kecamatan Talisayan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	460.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	85.470.000	100%	94.871.700	100%	105.307.587	100%	892.649.287	Kecamatan Talisayan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	10.000.000	100%	-	100%	-	100%	95.665.000	100%	95.665.000	100%	106.188.150	100%	307.518.150	Kecamatan Talisayan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	83.600.000	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	119.365.000	100%	129.395.150	100%	143.628.617	100%	612.488.767	Kecamatan Talisayan
7	1		KECAMATAN TALABAR				759.420.000		786.000.000		819.915.040		794.415.040		813.415.040		794.415.040		3.697.600.000	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	90	90	175.000.000	90	175.000.000	91	179.995.040	91	179.995.040	91,5	179.995.040	91,5	179.995.040	91,5	1.069.980.160	Kecamatan Talabar

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri						1 Kampung ung		1 Kampung ung		2 Kampu ng		3 Kamp ung		3 Kamp ung		Kecamatan Talabar
				Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	2 Kampung	3 Kamp ung	399.420.000	3 Kamp ung	511.000.000	3 Kamp ung	419.420.000	3 Kamp ung	419.420.000	3 Kampu ng	419.420.000	3 Kamp ung	419.420.000	3 Kamp ung	2.588.100.000	
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	3 Kamp ung		3 Kamp ung		2 Kamp ung		2 Kamp ung		1 Kampu ng						
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	25%	20%	150.000.000	20%	70.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	820.000.000	Kecamatan Talabar
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	155.000.000	Kecamatan Talabar
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 Kampung	6 Kamp ung	15.000.000	6 Kamp ung	15.000.000	6 Kamp ung	40.500.000	6 Kamp ung	15.000.000	6 Kampu ng	34.000.000	6 Kamp ung	15.000.000	6 Kamp ung	134.500.000	Kecamatan Talabar
7	1		KECAMATAN SEGAH				1.105.560.000		871.399.852		1.445.539.837		1.366.250.000		1.459.500.000		1.447.500.000		7.465.749.689	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			30.000.000	90,5	-	90,75	50.000.000	91	50.000.000	91,25	50.000.000	91,5	50.000.000	91,5	230.000.000	Kecamatan Segah
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri						1 Kamp ung		1 Kamp ung		1 Kampu ng		1 Kamp ung		1 Kamp ung		Kecamatan Segah
				Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	3 Kampung		800.560.000	4 Kamp ung	756.399.852	4 Kamp ung	964.039.837	4 Kamp ung	950.000.000	4 Kampu ng	950.000.000	4 Kamp ung	975.000.000	4 Kamp ung	5.395.999.689	
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	10 Kampung			8 Kamp ung		8 Kamp ung		8 Kamp ung		8 Kampu ng		8 Kamp ung		8 Kamp ung		

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas		20%	150.000.000	20%	70.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	100%	820.000.000	Kecamatan Segah
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	75.000.000	100%	15.000.000	100%	75.000.000	100%	58.750.000	100%	100.000.000	100%	107.500.000	100%	431.250.000	Kecamatan Segah
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Kampung	13 Kampung	50.000.000	13 Kampung	30.000.000	13 Kampung	206.500.000	13 Kampung	157.500.000	13 Kampung	209.500.000	13 Kampung	165.000.000	13 Kampung	818.500.000	Kecamatan Segah
7	1		KECAMATAN SAMBALIUNG				2.244.475.000		887.000.000		872.500.000		877.500.000		972.500.000		1.069.500.000		6.909.475.000	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	14.000.000	Kecamatan Sambaliung
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	2.059.975.000	100%	710.000.000	100%	775.000.000	100%	835.000.000	100%	900.000.000	100%	990.000.000	100%	6.269.975.000	Kecamatan Sambaliung
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	75%	75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	300.000.000	Kecamatan Sambaliung
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	225.000.000	Kecamatan Sambaliung
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	12.500.000	100%	-	100%	60.000.000	100%	-	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	114.500.000	Kecamatan Sambaliung
7	1		KECAMATAN MARATUA				573.300.000		648.300.000		703.300.000		728.300.000		758.300.000		798.300.000		4.059.800.000	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	85	8700 %	-	9050 %	15.000.000	9075 %	30.000.000	91	35.000.000	91	35.000.000	92	35.000.000	91,5	150.000.000	Kecamatan Maratua
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri			333.300.000		378.300.000	1 Kampung	398.300.000	2 Kampung	408.300.000	3 Kampung	418.300.000	4 Kampung	428.300.000	4 Kampung	2.364.800.000	Kecamatan Maratua
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	4 Kampung		4 Kampung		3 Kampung	2 Kampung		1 Kampung							
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	900.000.000	Kecamatan Maratua
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	560.000.000	Kecamatan Maratua
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Kampung	4 Kampung	40.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	55.000.000	4 Kampung	235.000.000	Kecamatan Maratua
7	1		KECAMATAN KELAY				946.286.920		1.197.000.000		1.365.000.000		1.297.000.000		1.410.000.000		1.395.000.000		7.610.286.920	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri		100%	756.293.920	100%	920.000.000	100%	985.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.070.000.000	100%	1.070.000.000	100%	5.801.293.920	Kecamatan Kelay
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas		75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	150.000.000	75%	900.000.000	Kecamatan Kelay
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	19.993.000	100%	57.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	403.993.000	Kecamatan Kelay

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	20.000.000	100%	70.000.000	100%	160.000.000	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	85.000.000	100%	505.000.000	Kecamatan Kelay
7	1		KECAMATAN GUNUNG TABUR				2.256.398.000		2.781.620.264		2.837.920.264		2.837.920.264		2.837.920.264		2.837.920.264		16.389.699.320	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Kampun/Kelurahan yang terbina di Kecamatan	100%	100%	-	100%	48.400.000	100%	48.400.000	100%	48.400.000	100%	48.400.000	100%	48.400.000	100%	242.000.000	Kecamatan Gunta
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	1.702.798.000	100%	2.091.995.264	100%	2.091.995.264	100%	2.091.995.264	100%	2.091.995.264	100%	2.091.995.264	100%	12.162.774.320	Kecamatan Gunta
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang																
				Jumlah Desa dan Kelurahan Maju																
				Jumlah Desa dan Kelurahan Tertinggal																
				Jumlah Desa dan Kelurahan Sangat Tertinggal																
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	2.760.000.000	Kecamatan Gunta
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	10.000.000	100%	80.665.000	100%	95.665.000	100%	95.665.000	100%	95.665.000	100%	95.665.000	100%	473.325.000	Kecamatan Gunta
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	83.600.000	100%	100.560.000	100%	141.860.000	100%	141.860.000	100%	141.860.000	100%	141.860.000	100%	751.600.000	Kecamatan Gunta
7	1		KECAMATAN PULAU DERAWAN				453.328.308		314.286.208		334.714.829		357.186.312		381.904.943		409.095.437		2.250.516.036	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	269.253.308	100%	204.286.208	100%	224.714.829	100%	247.186.312	100%	271.904.943	100%	299.095.437	100%	1.516.441.036	Kecamatan Pulau Derawan
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	150.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	500.000.000	Kecamatan Pulau Derawan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	19.995.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	94.995.000	Kecamatan Pulau Derawan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	14.080.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	139.080.000	Kecamatan Pulau Derawan
7	1		KECAMATAN BIDUK-BIDUK				573.300.000		633.300.000		673.300.000		693.300.000		723.300.000		763.300.000	2	4.059.800.000	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri			333.300.000		378.300.000	1 Kampung	398.300.000	2 Kampung	408.300.000	3 Kampung	418.300.000	4 Kampung	428.300.000	4 Kampung	2.364.800.000	Kecamatan Biduk-Biduk
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	4 Kampung	0	4 Kampung	0	3 Kampung	0	2 Kampung	0	1 Kampung	0	0	0	0	0	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	900.000.000	Kecamatan Biduk-Biduk
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	560.000.000	Kecamatan Biduk-Biduk
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Kampung	4 Kampung	40.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	35.000.000	4 Kampung	55.000.000	4 Kampung	235.000.000	Kecamatan Biduk-Biduk
7	1		KECAMATAN BATU PUTIH				632.808.864		610.000.000		751.000.000		788.100.000		861.910.000		968.101.000		4.611.919.864	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	87	88,5	-	90	-	90	50.000.000	91	50.000.000	91	50.000.000	92	50.000.000	92	200.000.000	Kecamatan Batu Putih
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	2 Kampung	3 Kampung	457.820.064	4 Kampung	480.000.000	3 Kampung	528.000.000	4 Kampung	580.800.000	4 Kampung	638.880.000	3 Kampung	702.768.000	3 Kampung	3.388.268.064	Kecamatan Batu Putih
				Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	3 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		1 Kampung		1 Kampung		1 Kampung				
				Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	1 Kampung	1 Kampung		1 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		2 Kampung		3 Kampung		3 Kampung		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	1	0,2	150.000.000	0,2	70.000.000	0,2	77.000.000	0	84.700.000	0	93.170.000	0	102.487.000	1	577.357.000	Kecamatan Batu Putih
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1	19.995.000	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	1	111.571.500	Kecamatan Batu Putih
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7 Kampung	7 Kampung	4.993.800	7 Kampung	45.000.000	7 Kampung	79.500.000	7 Kampung	54.450.000	7 Kampung	59.895.000	7 Kampung	90.884.500	7 Kampung	334.723.300	Kecamatan Batu Putih
7	1		KECAMATAN BIATAN			546.507.280	2	486.038.065	2	609.641.872	2	658.106.059	2	716.916.665	2	781.608.331	2	3.463.037.771		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Opublik	100%	100%		100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	100%		Kecamatan Biatan
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	8 Orang	8 Orang	396.507.280	8 Orang	282.000.000	8 Orang	310.200.000	8 Orang	341.220.000	8 Orang	375.342.000	8 Orang	412.876.200	8 Orang	2.118.145.480	Kecamatan Biatan

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kali	10 Kali	10.000.000	10 Kali		10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	10.000.000	10 Kali	50.000.000	Kecamatan Biatan
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	70.000.000	100%		100%	65.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	315.000.000	Kecamatan Biatan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	70.000.000	100%	149.038.065	100%	163.941.872	100%	180.336.059	100%	198.369.665	100%	218.206.631	100%	979.892.291	Kecamatan Biatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							3.920.000.000		3.920.000.000		5.020.000.000		5.020.000.000		4.020.000.000		4.020.000.000		25.920.000.000	
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.920.000.000		3.920.000.000		5.020.000.000		5.020.000.000		4.020.000.000		4.020.000.000		25.920.000.000	
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan		500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	500.000.000	500 Orang	3.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi Masyarakat Dalam Beretika Budaya & Politik		3.500 orang	2.200.000.000	3.500 orang	2.200.000.000	4.500 orang	3.200.000.000	4.500 orang	3.200.000.000	3.500 orang	2.200.000.000	3.500 orang	2.200.000.000	3.500 orang	15.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Cakupan Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masvarakat		95%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	2.100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Kemasya rakan dan Ekonomi		560 Orang	300.000.000	560 Orang	300.000.000	560 Orang	400.000.000	560 Orang	400.000.000	560 Orang	400.000.000	560 Orang	400.000.000	560 Orang	2.200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUDH ANKAM		9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	570.000.000	9 potensi konflik	3.420.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah							2.133.702.289.497		2.630.440.100.632		2.825.066.583.561		3.523.465.974.077		3.416.887.199.175		3.646.163.959.381		18.405.759.869.724	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur

melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

**Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Berau**

No	Indikator	Target Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	1,29	2,29	3,79	4,29	4,79	5,29
2	Indek Pembangunan Manusia	74,99	75,10	75,50	75,89	76,29	76,69
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	151,45	154,04	156,67	159,35	162,08	164,85
4	Indeks Gini	0,300	0,300	0,290	0,290	0,290	0,280
5	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	403.903	391.466	379.179	366.998	354.906	342.901
6	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (55)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (70)	BB (76)
7	Tingkat Pengangguran terbuka	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41
8	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Berau

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	PDRB Per Kapita	148,90	151,45	154,04	156,67	159,35	162,08	164,85	164,85
2	Pertumbuhan Ekonomi	-3,35	1,29	2,29	3,79	4,29	4,79	5,29	5,29
3	Presentase Usaha mikro dan kecil	24,00%	0,00%	6,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	40,00%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	na	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,03
5	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,71	11,79	11,86	11,94	12,01	12,09	12,09
6	Indeks Gini	0,300	0,300	0,300	0,290	0,290	0,290	0,280	
Kesejahteraan Sosial									
1	Angka melek huruf	99,42	99,46	99,49	99,53	99,56	99,6	99,64	99,64
2	Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53	14,10	14,29	14,47	14,65	14,83	14,83
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	9,70	9,84	9,98	10,12	10,26	10,26
4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17	72,28	72,38	72,49	72,60	72,71	72,71
5	Persentase balita gizi kurang	7,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
6	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9,30%	19,70%	29,60%	44,90%	66,60%	99,90%	100,00%	100,00%
7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	5,13	5,07	5,01	4,95	4,90	4,84	4,84
8	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	4,84	4,73	4,62	4,51	4,41	
9	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%
10	Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94
ASPEK PELAYANAN UMUM									

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	76,17	77,22	78,28	79,35	80,44	81,54	81,54
2	Angka partisipasi kasar SD/MI	104,29	105,33	106,39	107,45	108,52	109,61	110,71	110,71
3	Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95,82	96,78	97,75	98,72	99,71	100,00	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,79	96,18	96,58	96,97	97,37	97,77	98,17	98,17
5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76,53	78,37	80,25	82,18	84,15	86,17	88,24	88,24
6	Angka partisipasi sekolah SD/MI	100,34	101,34	102,36	103,38	104,41	105,46	106,51	106,51
7	Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91,85	92,77	93,70	94,63	95,58	96,54	97,50	97,50
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0,00	0,00
10	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
12	Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105,59	100,00	100,00	100	100	100	100	100
13	Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25	71,66	75,25	79,01	82,96	87,11	87,11
14	Rata-rata Standar Nilai Pendidikan (SNP)	5,59	5,64	5,7	5,76	5,81	5,87	5,93	5,93
15	Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	4,01	5	5,05	5,10	5,15	5,20	5,26	5,26
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PAUD	33,13	33,46	33,80	34,13	34,48	34,82	35,17	35,17
18	SD	76,36	77,12	77,89	78,67	79,46	80,26	81,06	81,06
19	SMP	94,38	95,32	96,28	97,24	98,21	99,19	100,00	100,00
20	Rasio murid/guru SD Negeri	15	15	15	15	15	15	15,00	15,00
21	Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19
22	Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76
24	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SD	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
26	SMP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
27	Presentase usulan yang disetujui terhadap jumlah usulan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah bahan, modul, dan	-	-	-	-	1	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,00	22,00	20,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3	Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	10,00	10,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00
4	Angka kematian anak balita	15,00	17,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
5	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30,00	60,00	80,00	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00
6	Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60,00	67,00	70,00	75,00	80,00	83,00	85,00	85,00
7	Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	85,00
9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
10	presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,90	93,60	94,10	94,60	95,00	95,00	95,00	95,00
12	Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79,00	85,00	87,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,85	0,85
15	Angka kejadian Malaria	0,00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103,00	110,00	120,00	125,00	135,00	140,00	145,00	
31	Jumlah Tenaga Bidan	303,00	310,00	320,00	325,00	330,00	335,00	340,00	
32	Jumlah Tenaga Perawat	584,00	600,00	615,00	630,00	645,00	660,00	675,00	
33	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00	73,00	76,00	80,00	82,00	85,00	85,00
35	Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
36	Cakupan Desa/kelurahan	59,00	83,80	87,90	91,60	95,00	95,00	95,00	

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37	Universal Child Immunization (UCI)								
38	Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35,00	45,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
39	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD dr. ABDUL RIVAI)								
1	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	13,09%	21,25%	22,97%	24,95%	29,76%	29,76%
2	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%	83%	86%	90%	93%	97%	97%
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71%	77%	80%	83%	87%	89%	94%	94%
4	persentase pengurangan sampah								
5	Persentase penanganan sampah								
6	capaian akses air limbah domestik layak	44,1%	44,6%	49,2%	50,7%	52,1%	53,5%	54,9%	54,9%
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	40,0%	15,0%	19,0%	37,0%	38,0%	39,0%	40,0%	40,0%
8	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 Unit	71	78	85	92	99	106	106
9	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	0	0,11	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36	0,36
10	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Belum Tersedia		20,0%	20,0%	19,0%	18,0%	17,0%	17,0%
11	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Belum Tersedia	0,7848	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%
12	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedia		30,0%	31,0%	35,0%	40,0%	45,0%	45,0%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio rumah layak huni	0,195	0,195	0,196	0,197	0,198	0,199	0,200	0,20
2	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	85%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,14%	0,14%	0,11%	0,08%	0,05%	0,03%	0,0%	0,0%
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,11%	90,35%	90,90%	91,17%	91,45%	91,72%	91,72%	91,72%
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	52,0	61,3	71,0	80,7	90,3	100,0	100,00
6	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan					100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
2	Persentase Penegakan PERDA								
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pelayanan dan pengaduan	80	80	80	80	80	90	95	95
2	Persentase (%) Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	60	60	60	60	60	65	65	65
3	Persentase (%) Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayagunakan/dibantu	60	60	60	65	70	80	90	90
4	Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan fasilitas Reunifikasi	80	80	80	80	80	80	80	80
5	Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Bimbingan Sosial, Mental, Spiritual	80	80	80	80	80	80	80	80
6	Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang	80	80	80	80	80	80	80	80

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mendapatkan pelayanan medis/kesehatan dan perbekalannya								
7	Persentase % Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng yang dilayani	60	60	60	60	65	65	75	75
8	Persentase (%) PMKS Yang dilayani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan dan difasilitasi	80	80	80	80	80	80	80	80
10	Persentase % Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	80	80	80	80	80	80	80	80
11	Persentase % Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Rujukan / Dirujuk	80	80	80	80	80	80	80	80
12	Persentase (%) Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menerima bantuan PKH	80	80	80	80	80	80	80	80
13	Persentase (%) PMKS, Kelompok Rentan, dan orang yang tidak mampu yang dilayani	90	90	90	95	95	100	100	100
14	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan/ pengemis yang mendapatkan pelayanan	80	80	80	90	95	100	100	100
15	PMKS luar panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60	60	60	60	70	75	80	80
16	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan dan jaminan sosial	80	80	80	85	85	90	100	100
17	Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	80	80	90	90	90	95	100	100
18	Jumlah pelaksana sistem dan rujukan terpadu (SLRT) yang difasilitasi	90	90	90	90	90	90	90	90
19	Jumlah orang terlantar tuna sosial, PMKS yang dilayani dan terpenuhinya perlengkapan rumah singgah yang disediakan	90	90	90	95	95	100	100	100
20	Persentase (%) Petugas/Tenaga Ahli/Relawan/Tenaga Kesehatan dalam penanganan PMKS Kabupaten/Kota	60	60	60	65	70	75	80	80

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Persentase (%) Pembinaan Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	60	60	65	70	70	70	70	70
22	Presentase (%) SDM yang melayani penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	60	60	60	60	60	60	60	60
23	Presentase (%) Warga Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Presentase (%) Tenaga Relawan dalam pemberian pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase (%) Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	80	80	80	80	80	90	90	90
26	Persentase (%) Paket Permakanan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase (%) Korban bencana yang mendapatkan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Persentase (%) Bencana dan KLB yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70%	70%	70%	75%	75%	75%	80%	80%
3	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20%	20%	25%	25%	30%	30%	35%	35%
4	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Presentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1,70%	2,00%	2,30%	2,60%	2,90%	3,20%	3,50%	3,50%
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	13%	12%	11,00%	10,00%	9,00%	8,00%	7,00%	7,00%
3	Rasio KDRT	0,008%	0,007%	0,005%	0,003%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%
4	Persentase OPD yang mempunyai data gender dan anak	%	0%	6%	9%	11%	13%	15%	15%

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Kampung/Kel Layak Anak	-	0	2%	3%	4%	5%	6%	6%
6	Jumlah kasus anak yang ditangani	67	65	63	61	59	57	55	55
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26.694 Ton	20.000 Ton	20.500 Ton	21.000 Ton	21.500 Ton	22.000 Ton	22.500 Ton	22.500 Ton
2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	78,05	80,00	82,00	83,00	84,10	86,00	86,00
3	Persentase Penguatan cadangan pangan	50%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40, 15 %	45%	50%	60%	60%	60%	60%	60%
5	Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	260 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	260 Sampel
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah		2 Sengketa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah			100%	100%	100%	100%	100%	100
3	cakupan pelaksanaan retribusi dan ganti rugi tanah			50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	250 Bidang
4	presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik		10 Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan penatagunaan tanah			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan	78,53	78,63	78,73	78,83	78,93	79,03	79,13	79,13
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79	56,79
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,87	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
4	Jumlah Emisi yang Diturunkan dari Pemanfaatan Lahan	578.176,56 Ton CO2 eq	406.000 Ton CO2 eq	391.466 Ton CO2 eq	379.179 Ton CO2 eq	366.998 Ton CO2 eq	354.906 Ton CO2 eq	342.901 Ton CO2 eq	342.901 Ton CO2 eq
5	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	80	74%	73%	72%	71%	70%	69%	69%
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,784	89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan penerbitan akta kelahiran	92,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Ketersediaan database kependudukan (ADA/TIDAK)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	50	65	70	75	80	90	90
2	Jumlah kerjasama antar Desa/Kampung	4	6	15	17	20	23	26	26
3	Persentase desa mandiri	800%	9	10	11	12	13	14	14
4	Persentase desa maju	3100%	41	50	54	58	62	71	71
5	Persentase desa berkembang	600%	49	40	35	30	25	15	15
6	Persentase desa tertinggal	100%	1	0	0	0	0	0	0
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD	50	80	100	120	150	160	160
8	Persentase LPM Berprestasi	TAD	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Posyandu aktif	26,4	26,4	100	100	100	100	100	100
11	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	10	15	20	25	30	35	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,55	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
2	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,87
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 1	19 per 1000 Kelahiran	18 per 1000 Kelahiran	17 per 1000 Kelahiran	16 per 1000 Kelahiran	15 per 1000 Kelahiran	14 per 1000 Kelahiran	13 per 1000 Kelahiran	13 per 1000 Kelahiran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	2	2	2	2	2	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	75	75	75	80	85	90	95	100
2	Indeks SPBE	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Jumlah koperasi aktif	75 Kop	50 Kop	50 Kop	50 Kop	50 Kop	50 Kop	50 Kop	375 Kop
2	Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	20%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	45%
3	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	32 Koperasi	32 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	57 Koperasi
4	Persentase UMKM Aktif	45%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	70%
5	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	5 UKM	5 UKM	10 UKM	15 UKM	20 UKM	25 UKM	25 UKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	355 Investor	355 Investor	360 Investor	365 Investor	370 Investor	375 Investor	380 Investor	380 Investor
2	Jumlah Promosi di Dalam dan Luar Daerah Kabupaten	1 Kali	1 Kali	2 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,02 Triliun Rupiah	4,02 Triliun Rupiah	4,10 Triliun Rupiah	4,18 Triliun Rupiah	4,27 Triliun Rupiah	4,35 Triliun Rupiah	4,44 Triliun Rupiah	4,44 Triliun Rupiah
4	Presentase investor yang ber investasi	65%	65%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
5	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	50 Data Izin	50 Data Izin	55 Data Izin	58 Data Izin	60 Data Izin	62 Data Izin	65 Data Izin	65 Data Izin
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	13 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi
2	Cakupan pembinaan olahraga	50 Orang	15 Orang	18 Orang	21 Orang	24 Orang	27 Orang	30 Orang	30 Orang
3	Jumlah prestasi olahraga	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi
4	Cakupan pembinaan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	6 Organisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik Sektoral	50	50	50	65	80	90	95	95
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	20	20	25	30	35	40	45
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	5 Event	6 Event	7 Event	7 Event	7 Event	7 Event	7 Event
2	Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina	3 Kelompok Seni Budaya	3 Kelompok Seni Budaya	-	3 Kelompok Seni Budaya	4 Kelompok Seni Budaya	4 Kelompok Seni Budaya	5 Kelompok Seni Budaya	5 Kelompok Seni Budaya
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Situs BCB	3 Situs BCB	4 Situs BCB	4 Situs BCB	4 Situs BCB	4 Situs BCB	4 Situs BCB	4 Situs BCB
4	Jumlah Bangunan Bersejarah/Museum dan Keraton Yang Dikelola	2 Museum/Keraton	3 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton	4 Museum/Keraton
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah kunjungan Perpustakaan	35.000 pemustaka	35.000 pemustaka	35.000 pemustaka	40.000 pemustaka	45.000 Pemustaka	50.000 Pemustaka	55.000 Pemustaka	55.000 Pemustaka
2	Presentase Pelestarian Naskah Kuno	na			70%	72%	74%	76%	78%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	82,0%	82,0%	83,0%	83,0%
2	Presentase Cakupan perlindungan dan Penyelamatan Arsip	80,0%	80,0%	80,0%	81,0%	82,0%	83,0%	84,0%	84,0%
3	Presentase Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	70,0%	70,0%	70,0%	72,0%	74,0%	76,0%	78,0%	78,0%
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,98 Ton	23.399,74 Ton	24.101,3 Ton	24.824,78 Ton	25.569,53 Ton	26.336,61 Ton	27.126,71 Ton	27.126,71 Ton

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	2.259,99 Ton	2.379,90 Ton	2.403,7 Ton	2.427,74 Ton	2.452,01 Ton	2.476,53 Ton	2.501,30 Ton	2.501,30 Ton
3	Tingkat kepatuhan pelaku utama perikanan terhadap peraturan perikanan dalam melakukan kegiatan perikanan		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			4.486,31 Ton	4.620,90 Ton	4.759,53 Ton	4.902,32 Ton	5.049,39 Ton	5.049,39 Ton
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Jumlah Wisatawan	127.396 Orang	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang
2	Lama kunjungan Wisata	2 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari
3	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	7 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata	8 Destinasi Wisata
4	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	60 Orang	90 Orang	120 Orang	150 Orang	150 Orang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	Ton	2.235.000	2.250.000	2.317.500	2.385.000	2.475.000	2.520.000	2.520.000
2	Kelapa Dalam	3.483	4.071	5.571	6.871	8.371	9.471	9.980	9.980
3	Kakao	788	900	1.200	1.400	1.700	1.950	2.100	2.100
4	Karet	82	185	205	255	300	400	515	515
5	Lada	827	919	1.019	1.219	1.340	1.455	1.500	1.500
6	Luas Kebun yang dikembangkan		50	60	100	100	100	100	100
7	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3.000	5000	6000	7500	10000	12500	15000	15000
8	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	15	15	20	20	25	25	130
9	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani
10	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	3,15	3,26	3,37	3,49	3,62	3,62
11	Produktivitas Jagung	5	5,55	5,65	5,75	5,85	5,95	6	6
12	Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62	3,77	3,9	4,02	4,17	4,25	4,25
13	Produksi Daging Sapi	470	472,35	474,71	477,09	479,47	481,87	484,28	484,28

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Produksi Telur Ayam Ras	1.753	1.805,59	1.859,76	1.915,55	1.973,02	2.032,21	2.093,17	2.093,17
15	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	300	400	450	550	550	550
16	Vaksinasi Ternak Ruminansia terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	9	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11
17	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada Ternak Unggas	-	0,5	1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
18	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	500	2.535	3.305	4.000	4.700	5.000	5.000
19	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		33	33	40	42	44	45	45
20	Cakupan bina kelompok petani	83	84	85	86	87	88	89	89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	100 SKA	120 SKA	150 SKA	180 SKA	200 SKA	220 SKA	1220 SKA
2	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	2 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar	4 Pasar
3	Presentase Stabilisasi harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting								
4	Ekspor Bersih Perdagangan			0	0	0	0	0	
5	Jumlah Konsumen yang mendapatkan layanan Perlindungan Konsumen	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	140 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha
6	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Presentase Pengendalian Izin Usaha Industri terhadap jumlah Industri yang terdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Pengawasan terhadap industri Kecil menengah	24%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	49%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase transmigran yang ditempatkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (53,25)	CC (55)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (70)	BB (76)	BB (76)
2	Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)	B (65)	B (67)	B (68)	B (70)	BB (72)	BB (72)
3	Survei Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	A (90,12)	A (92,16)	A (94,06)	A (96,26)	A (98)	A (98)
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Presentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	61 (CUKUP)	61 (CUKUP)	65 (CUKUP)	81 (BAIK)	81 (BAIK)	85 (BAIK)	85 (BAIK)
7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN								
1	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase SILPA terhadap APBD	25,93	21,04	20	20	19	19	18	18
4	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
7	Presentase Aset yang termanfaatkan	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%
8	Presentase penghapusan aset	65%	70%	75%	80%	85%	95%	100%	100%

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Kontribusi PAD dalam APBD	10,01%	10,50%	10,50%	11%	11%	11,5%	12%	12%
10	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terkelolanya Keuangan Daerah	-	1.902.840.108.000	1.882.328.900.000	1.931.129.900.000	2.155.129.900.000	2.284.629.900.000	2.322.129.900.000	2.322.129.900.000
KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	10	10	12	15	18	20	25	25
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM			993 Orang	993 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	5979 Orang
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
INSPEKTORAT DAERAH									
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%
2	Persentase Cakupan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN TELUK BAYUR									
1	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Opublik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pembedayaan Masyarkaat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KECAMATAN TANJUNG REDEB									
1	Cakupan Pembedayaan Masyarkaat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KECAMATAN TALISAYAN									
1	Cakupan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KECAMATAN TALABAR									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	90	90	90	91	91	91,5	91,5	91,5
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri				1 Kampung	1 Kampung	2 Kampung	3 Kampung	3 Kampung
3	Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	2 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung
4	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	1 Kampung		
5	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	6 Kampung
KECAMATAN SEGAH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			90,5	90,75	91	91,25	91,5	91,5
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri			1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung
3	Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	3 Kampung		4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung
4	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	10 Kampung		8 Kampung	8 Kampung	8 Kampung	8 Kampung	8 Kampung	8 Kampung
5	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas		20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
6	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KECAMATAN SAMBALUNG								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KECAMATAN MARATUA								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	85	8700%	9050%	9075%	91	91	92	91,5
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri				1 Kampung	2 Kampung	3 Kampung	4 Kampung	4 Kampung
3	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	3 Kampung	2 Kampung	1 Kampung		
4	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung
	KECAMATAN KELAY								
1	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas		75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
3	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	KECAMATAN GUNUNG TABUR								
1	Jumlah Kampung/Kelurahan yang terbina di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang								
4	Jumlah Desa dan Kelurahan Maju								

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Jumlah Desa dan Kelurahan Tertinggal								
6	Jumlah Desa dan Kelurahan Sangat Tertinggal								
7	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KECAMATAN DERAWAN									
1	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KECAMATAN BIDUK-BIDUK									
1	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri				1 Kampung	2 Kampung	3 Kampung	4 Kampung	4 Kampung
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	3 Kampung	2 Kampung	1 Kampung		
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	4 Kampung
KECAMATAN BATU PUTIH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	87	88,5	90	90	91	91	92	92
2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	2 Kampung	3 Kampung	4 Kampung	3 Kampung	4 Kampung	4 Kampung	3 Kampung	3 Kampung
3	Jumlah Desa dan Kelurahan Berkembang	4 Kampung	3 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung
4	Jumlah Desa dan Kelurahan Maju	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	3 Kampung	3 Kampung
5	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	1
6	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1	1	1	1	1	1	1

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung	7 Kampung
	KECAMATAN BIATAN								
1	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Opublik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang
3	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali
4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan		500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
2	Tingkat partisipasi Masyarakat Dalam Beretika Budaya & Politik		3.500 Orang	3.500 Orang	4.500 Orang	4.500 Orang	3.500 Orang	3.500 Orang	3.500 Orang
3	Tingkat Cakupan Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4	Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang
5	Jumlah potensi konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM		9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik	9 Potensi Konflik
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
KEMAMPUAN EKONOMI									
1	Ketaatan terhadap RTRW	Belum Tersedia		30,0%	31,0%	33,0%	38,0%	45,0%	45,0%
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	66	66,5	67	67,5	68	68,5	68,5
3	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	50	55	60	65	70	75	75

BAB IX PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Berau agar terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh dukungan kuat dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, kerjasama yang erat antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Berau, kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya, serta partisipasi penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bappeda.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Kepala Daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi

kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Berau, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengingat masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Berau sekarang akan berakhir pada tahun 2024, maka pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Berau periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Berau 2021-2026 hanya sampai tahun pelaksanaan 2024;
- 2) Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Berau di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada RPJMD Berau 2021-2026 ini hingga tersusunnya RPJMD periode berikutnya setelah Bupati dan Wakil Bupati Berau yang baru terpilih.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agar RPJMD dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bupati Berau berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dan mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, sosialisasi Perda RPJMD 2021-2026 dilakukan oleh Baplitbang Kabupaten Berau;

- 2) Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran terkait wajib menjabarkan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Berau 2021-2026 ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan untuk tahun rencana berkenaan;
- 3) RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbang) Kabupaten Berau, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
- 5) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Berau;

- 6) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain Organisasi Perangkat Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM), maka jika diperlukan untuk melaksanakan RPJMD ini dapat dilakukan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap mempertimbangkan azas efisiensi dan efektivitas;
- 7) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD dimaksud ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- 8) RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 dapat dilakukan perubahan apabila syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan/atau Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) terpenuhi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

